



KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK



4.0

**PERAN ISEI MEMPERKUAT SINERGI
UNTUK KETAHANAN
DAN KEBANGKITAN EKONOMI
MENUJU INDONESIA MAJU**



PENERBIT
PENGURUS PUSAT IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK 4.0

PERAN ISEI MEMPERKUAT SINERGI UNTUK KETAHANAN DAN KEBANGKITAN EKONOMI MENUJU INDONESIA MAJU

Kajian Kebijakan Publik adalah kajian yang dipublikasikan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dalam bentuk buku. Buku tersebut merangkum berbagai perspektif pemikiran, analisis, dan rekomendasi kebijakan ekonomi publik. Untuk Edisi Tahun 2023 ini, kajian mencakup analisis memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas dalam mendorong ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju melalui serangkaian upaya. Upaya tersebut antara lain dorongan hilirisasi, percepatan digitalisasi, dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.





KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK 4.0

PERAN ISEI MEMPERKUAT SINERGI UNTUK KETAHANAN DAN KEBANGKITAN EKONOMI MENUJU INDONESIA MAJU

Editor:

Yoga Affandi
Wahyu A. Nugroho
Donni F. Anugrah

Penulis:

Yoga Affandi, Wahyu A. Nugroho, Donni F. Anugrah,
Arief B. Laksono, Oki Hermansyah, Wishnu Badrawani, Arnita Rishanty

PENERBIT

Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

Jl. Daksa IV No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

Telp: +62-21-22772577

Fax: +62-21-7201812

Email: isei.pusat@gmail.com

Website: <https://isei.or.id/>

Kajian Kebijakan Publik 4.0

Peran ISEI Memperkuat Sinergi untuk Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Menuju Indonesia Maju

15,5 x 23 cm | xxvii + 194 Halaman

ISBN : 978 – 623 – 98213 – 2 – 6

Cetakan Pertama, Oktober 2023

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.



KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK 4.0

PERAN ISEI MEMPERKUAT SINERGI UNTUK KETAHANAN DAN KEBANGKITAN EKONOMI MENUJU INDONESIA MAJU

- PELINDUNG** : Ketua Umum PP ISEI, Perry Warjiyo
- PEMIMPIN REDAKSI** : Ketua Bidang II, Dody Budi Waluyo
- DEWAN REDAKSI** : Anggito Abimanyu, M. Edhie Purnawan, Telisa A. Falianty, Bustanul Arifin, Nimmi Zulbainarni, Ninasapti Triaswati, Karaniya Dharmasaputra, Bayu Krisnamurthi, Yugi Prayanto
- EDITOR** : Yoga Affandi, Wahyu A. Nugroho, Donni F. Anugrah
- PENULIS** : Yoga Affandi, Wahyu A. Nugroho, Donni F. Anugrah, Arief B. Laksono, Oki Hermansyah, Wishnu Badrawani, Arnita Rishanty
- ADMINISTRASI** : Misbahol Yaqin, Dian Rahmawati

PENERBIT

Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

Jl. Daksa IV No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

KATA PENGANTAR

Kinerja perekonomian global tahun 2023 sejauh ini menunjukkan perkembangan positif didukung oleh pembukaan ekonomi Tiongkok serta pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS). Perkembangan positif ekonomi global tersebut serta ekspektasi kenaikan upah karena keketatan pasar tenaga kerja di AS dan Eropa mengakibatkan proses penurunan inflasi global berjalan lebih lambat (*high inflation*), sehingga mendorong kebijakan moneter negara maju lebih ketat dan akan berlangsung lebih lama (*higher interest rate for longer*). Pengetatan kebijakan moneter dimaksud, ditambah dengan terganggunya stabilitas sistem keuangan di AS, meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global yang kemudian menahan kembalinya aliran modal ke negara berkembang dan meningkatkan tekanan nilai tukar di berbagai negara.

Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan ekspor. Dari kinerja eksternal, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal sehingga nilai tukar Rupiah menguat sejalan dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia. Tekanan inflasi terus menurun dipengaruhi oleh dampak positif kebijakan moneter serta sinergi yang erat dalam pengendalian inflasi antara Bank Indonesia serta Pemerintah Pusat dan Daerah di berbagai daerah. Stabilitas sistem keuangan terjaga dan likuiditas perbankan memadai, sehingga berkontribusi positif mendorong peningkatan kredit/pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital meningkat didukung oleh sistem pembayaran yang lancar dan andal.

Momentum perekonomian tersebut didorong oleh 3 (tiga) pelajaran penting dari kebijakan pemulihan ekonomi, yakni transformasi ekonomi melalui digitalisasi, hilirisasi, dan inklusi yang didukung oleh konsistensi dan inovasi bauran kebijakan ekonomi nasional, serta sinergi yang kuat antarlembaga. Kerja sama internasional khususnya Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN juga menjadi fokus penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan global.

Perekonomian Indonesia dihadapkan pada tantangan lingkungan strategis yang kompleks. Tantangan tersebut termasuk ketahanan pangan dan energi yang rentan menyebabkan inflasi, tren digitalisasi global dengan risiko gangguan pada stabilitas keuangan, dan perlunya pengembangan ekonomi hijau sebagai respons terhadap perubahan iklim. Untuk mengatasinya, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) berfokus pada 4 (empat) strategi utama,

yaitu memperkuat sinergi untuk pemulihan ekonomi nasional, mendorong inovasi dan kontribusi dalam kebijakan reformasi struktural untuk Indonesia Maju, percepatan digitalisasi di berbagai bidang, dan optimalisasi program pemberdayaan anggota dan pengurus ISEI.

Akhir kata, kami berharap buku Kajian Kebijakan Publik (KKP) 4.0 ini akan menjadi sumber acuan penting bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan. Dengan sinergi yang kuat, kami berharap stabilitas perekonomian nasional terjaga dan pemulihan ekonomi inklusif di era digital terus didorong. Semoga langkah-langkah ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dr. Perry Warjiyo

Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI

PENGANTAR EDITORIAL

Buku Kajian Kebijakan Publik (KKP) ISEI 4.0 yang mengambil tema “Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju” pada tahun 2023 sekaligus menandai edisi keempat dari penerbitan buku terkait, dalam turut mewarnai dinamika analisis dan perumusan kebijakan nasional. Bagi ISEI secara khusus, kembali memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikirannya melalui terbitan kajian kebijakan publik yang mendukung arah pembangunan ekonomi nasional, untuk bertahan dan bangkit menuju prospek pertumbuhan yang lebih baik.

Sebagai bentuk penguatan rekomendasi kebijakan dari beberapa edisi sebelumnya, pada edisi keempat ini, buku KKP mencoba menggabungkan pandangan yang berasal dari berbagai bidang di kepengurusan Pusat ISEI, dengan tujuan rekomendasi yang dihasilkan dapat lebih integratif serta telah memperhatikan berbagai aspek. Berbagai bidang tersebut antara lain, Bidang I terkait organisasi dan hubungan kelembagaan yang mewakili pandangan ISEI di daerah, Bidang II terkait perumusan kebijakan di tataran pusat dan nasional, Bidang III terkait akademi dan riset, serta Bidang IV terkait kerja sama internasional.

Dalam proses penyusunannya, buku KKP 4.0 melakukan pendalaman terhadap 10 area kebijakan dari 15 Focus Group ISEI, yang sekaligus mencerminkan upaya penguatan kebijakan di berbagai sektor ekonomi tersebut. Hal ini dilakukan, dengan tujuan menjabarkan lebih lanjut faktor-faktor utama yang dibutuhkan dalam memperkuat ketahanan dari risiko global, memperbaiki struktur, dan meningkatkan daya saing perekonomian sebagai elemen penting dalam mewujudkan visi menuju Indonesia Maju. Tema yang diangkat pada tahun ini sekaligus mencerminkan perjalanan transformasi rekomendasi yang diusung oleh ISEI dari tahun ke tahun dengan senantiasa memperhatikan dinamika terkini, serta pentingnya konsistensi, inovasi, dan sinergi kebijakan dalam menjaga stabilitas serta memperkuat agenda pembangunan. Berbagai rekomendasi yang diusung dapat ditemukan sebagai suatu pandangan baru, sementara beberapa di antaranya merupakan penguatan dari usulan kebijakan pada buku KKP edisi sebelumnya.

Berbagai analisa kebijakan tersebut kemudian disusun ke dalam 6 (enam) bab, yang secara berurutan menjelaskan mengenai tantangan ekonomi terkini dan risiko yang perlu diantisipasi, kemudian respons kebijakan yang diperlukan untuk menjaga momentum pemulihan, hingga berbagai komponen

strategi yang diperlukan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi nasional pada jangka pendek, menengah, dan panjang.

Mewakili segenap penulis dan *Focus Group* ISEI Bidang II, kami berharap semoga buku ini dapat memberikan pandangan baru dan sumbangsih yang bernilai bagi berbagai pihak, terutama para akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha untuk bersama menyukseskan agenda pembangunan nasional.

Dody Budi Waluyo, S.E., MBA.

Ketua Bidang II PP ISEI – Perumusan dan Rekomendasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Pemulihan ekonomi global dihadapkan pada sejumlah tantangan seiring dengan efek samping dari respons kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Ketidakpastian ekonomi global masih tinggi disertai risiko perbaikan yang tidak merata dan pergeseran sumber pertumbuhan global dari beberapa negara utama. Beberapa negara masih menunjukkan ketahanan yang baik di tengah risiko harga komoditas global yang relatif mereda, serta membaiknya konsumsi domestik dan kinerja perdagangan yang positif. Sementara itu, sebagian negara lainnya masih mengalami perbaikan yang melambat di tengah dampak *re-opening* yang tidak sesuai perkiraan, realisasi inflasi yang masih di atas target khususnya inflasi pangan, berlanjutnya fragmentasi ekonomi dan geopolitik global, disrupsi teknologi, serta *downside* faktor lainnya yang merupakan akumulasi kebijakan secara agresif di negara maju dalam tiga tahun terakhir. Potensi *debt trap* menjadi risiko yang perlu diantisipasi ke depan. Sulitnya akses *overseas financing* dan mahalnya bunga bank dapat menyebabkan terjadinya *spillover* ke *Emerging Markets* yang dipandang memiliki *leverage* tinggi dan dapat melemahkan prospek ekonomi.

Dari sisi domestik, ekonomi Indonesia tetap kuat didukung kombinasi indikator ekonomi yang membaik, memperkuat indikasi keberhasilan respons kebijakan pemulihan ekonomi. Di tengah risiko ekonomi global yang fluktuatif, perekonomian Indonesia terpantau tetap baik didukung permintaan domestik yang tetap kuat dan kinerja ekspor yang terjaga. Perbaikan ekonomi domestik juga didukung oleh terjaganya optimisme pada sektor riil seperti pulihnya keyakinan konsumen, ekspansi *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur, serta berlanjutnya surplus pada transaksi berjalan. Inflasi Indonesia menurun secara gradual dan lebih cepat dari prakiraan, kondisi ini juga didukung langkah-langkah stabilitas serta dukungan insentif pemerintah dan di sektor keuangan dalam menjaga prospek pemulihan.

Meski demikian, tantangan menjaga ketahanan dan kebangkitan ekonomi masih diliputi ketidakpastian yang tinggi. Para pemangku kebijakan kini dihadapkan pada beberapa 'tantangan baru' seperti divergensi arah normalisasi kebijakan, peningkatan tekanan stabilitas sistem keuangan (SSK), dan risiko kerentanan utang. Sementara itu, berbagai 'tantangan lama' kembali mengemuka dan bahkan memiliki intensitas yang lebih besar, antara lain seperti risiko iklim, kemiskinan dan kesenjangan, serta ketahanan pangan dan energi.

Mencermati dinamika yang tidak mudah dari sisi global maupun domestik tersebut, terdapat 3 (tiga) pelajaran penting yang dapat dipetik oleh para pemangku kepentingan dari perspektif kebijakan untuk pemulihan:

- Pelajaran pertama adalah mewaspadaikan peningkatan fragmentasi geoekonomi global, baik yang terjadi di pasar keuangan, geopolitik, dan perdagangan. Berbagai isu tersebut tidak hanya berpotensi memberi tekanan lebih lanjut dari sisi *inward looking policy* yang meningkat dan menghambat potensi kerja sama untuk pemulihan, serta menambah ketidakpastian di tengah kapasitas kebijakan fiskal yang semakin terbatas dalam merespons berbagai risiko. Dalam mendukung pertumbuhan ke depan, produktivitas menjadi salah satu kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil yang dapat dicapai melalui tumbuhnya kegiatan inovasi, dorongan pada hilirisasi, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital.
- Pelajaran kedua adalah menavigasi akselerasi teknologi dan informasi. Dalam industri keuangan, kehadiran *fintech (financial technology)* telah memberi ruang lebih besar kepada pelaku ekonomi untuk mengakses sumber keuangan yang lebih optimal. Namun, di sisi lain *fintech* juga memiliki risiko yang bersifat asimetris antara pesatnya teknologi dan inovasi digital terhadap kemampuan mengelola risiko. Hal ini bila tidak direspons dengan baik dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan (SSK) dan kesinambungan pertumbuhan.
- Pelajaran ketiga terkait mengantisipasi dampak negatif dari perubahan iklim. Perubahan iklim dapat berdampak sangat signifikan, baik terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, maupun terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi stabilitas makroekonomi, perubahan iklim menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem yang dapat mengganggu sisi suplai (*physical risk*) terutama produk-produk pangan, sehingga menimbulkan tantangan terhadap pencapaian target inflasi oleh bank sentral. Di samping itu, dampak *transition risk* dari respons kebijakan yang mendukung ekonomi hijau, seperti *carbon tax*, juga berpotensi menambah tekanan terhadap harga barang *output*.

Pendalaman terhadap berbagai isu global maupun domestik, serta dampaknya pada pencapaian visi Indonesia Maju dalam buku ini akan dilakukan melalui 5 (lima) pilar framework pendalaman rekomendasi kebijakan. *Framework* dimaksud meliputi aspek kebijakan utama, kelembagaan, arah transformasi ke depan, serta sinergi yang dibutuhkan untuk pencapaian *end state* menuju visi Indonesia yang maju dan inklusif. Setiap pilar merupakan elaborasi dari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tujuan di jangka pendek maupun jangka menengah-panjang, serta modalitas yang perlu terus diperkuat.

Framework Pendalaman Rekomendasi KKP Edisi 4.0



Kaitannya dengan *framework* di atas, rekomendasi kebijakan ISEI akan dibagi dalam 3 (tiga) kelompok kebijakan yang saling melengkapi dan terintegrasi. Kelompok pertama adalah penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas dan memitigasi *negative spillovers*. Kelompok kedua mengenai penguatan integrasi kebijakan pada sektor ekonomi prioritas yang berdaya saing. Kemudian, **kelompok** ketiga tentang mengakselerasi implementasi hilirisasi, digitalisasi dan ekonomi hijau sebagai upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kelompok kebijakan pertama, terkait sinergi dalam menjaga stabilitas dan memitigasi negatif *spillover*. Hal ini ditandai dengan peran bauran kebijakan nasional yang tetap fokus menjaga ketahanan dan kebangkitan perekonomian. Koordinasi erat antara kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan moneter Bank Indonesia serta bauran kebijakan lainnya di sektor keuangan dalam payung Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu terus dilakukan, baik sebagai *shock absorber* maupun menjaga momentum pemulihan berkelanjutan dengan cara senantiasa bertahan dan beradaptasi untuk menghadapi tekanan ekonomi yang timbul dari sisi eksternal serta dampak rembetannya ke domestik.

Berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah dan otoritas terkait telah menunjukkan hasil positif bagi pemulihan. Ke depan, tantangan yang dihadapi akan semakin multidimensional. Oleh karena itu, penguatan sinergi antarotoritas tersebut kemudian perlu dikelompokkan berdasar prioritasnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah-panjang:

- a. Dalam jangka pendek. Bauran kebijakan nasional perlu diarahkan pada upaya memperkuat stabilitas dan mendorong berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik. Penjabaran lebih lanjut strategi kebijakan di jangka pendek akan terdiri dari 3 (tiga) aspek yakni:

- Pertama, di sisi fiskal, kebijakan perlu terus diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan momentum pemulihan ekonomi nasional dengan tetap konsisten melanjutkan konsolidasi dan reformasi yang telah digariskan. Peran kebijakan fiskal sebagai instrumen stabilisasi, alokasi, dan distribusi tetap dikedepankan. Terutama di jangka pendek, kebijakan dapat diarahkan untuk mendukung stabilitas dan daya beli masyarakat utamanya kelas bawah serta mendorong berlanjutnya pemulihan ekonomi.
 - Kedua, kebijakan pemerintah untuk melanjutkan subsidi fiskal dalam menjaga stabilitas harga perlu terus disinergikan dengan kebijakan moneter Bank Indonesia dengan tetap fokus pada upaya memperkuat stabilitas makroekonomi. Sementara itu, kebijakan pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi jangka pendek juga perlu disinergikan dengan kebijakan Bank Indonesia lainnya yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, melalui makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta keuangan inklusif dan hijau.
 - Ketiga, meningkatkan peran kebijakan mikroprudensial untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan dan mendorong pembiayaan. Menjaga kondisi industri keuangan yang stabil dalam hal ini perlu dilaksanakan secara paralel dengan strategi memperkuat ketahanan serta dukungan industri keuangan bagi transformasi ekonomi nasional sepanjang *outlook* inflasi berada dalam target yang telah ditetapkan.
- b. Pada jangka menengah – panjang. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter difokuskan pada penguatan ketahanan dan momentum pemulihan ekonomi dari dampak gejolak global dalam jangka pendek, kebijakan transformasi perekonomian perlu ditingkatkan untuk memastikan berjalannya kebangkitan ekonomi nasional pada lintasan menuju Indonesia Maju. Kebijakan transformasi untuk meningkatkan kapasitas ekonomi domestik perlu didesain secara holistik dan terintegrasi agar lebih efektif. Setidaknya terdapat 5 (lima) cakupan kebijakan struktural yang perlu dikedepankan, yaitu pembangunan infrastruktur, hilirisasi, reformasi struktural, digitalisasi ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia.

Prioritas kebijakan di atas pada satu sisi juga perlu ditunjang aspek payung kelembagaan yang kuat. Dalam hal ini, Penguatan fungsi dan mandat melalui UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) turut memiliki peranan penting dalam menjaga konsistensi kebijakan yang sinergis dan inovatif. Dengan dukungan kelembagaan yang kredibel. Berbagai sinergi, inovasi, dan konsistensi bauran kebijakan ekonomi nasional di atas akan

mampu terus memperkuat ketahanan dan mendorong perekonomian Indonesia semakin maju ke depannya. Melalui berbagai strategi tersebut, prospek ekonomi Indonesia akan semakin kuat, sehingga terus melanjutkan pemulihan ekonomi dalam jangka pendek dan akan dapat melaju tinggi dengan ketahanan yang tetap kuat dalam jangka menengah ditopang oleh keberlanjutan kebijakan reformasi sektor riil.

Selanjutnya, kelompok kebijakan kedua terkait memperkuat integrasi kebijakan pada sektor ekonomi prioritas yang berdaya saing dan bernilai tambah. Kelompok kebijakan ini mencakup penajaman integrasi kebijakan pada 10 (sepuluh) area, sebagaimana tabel berikut.

No.	Sektor	Rekomendasi Penguatan Kebijakan
1.	Penguatan Akses Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi peran TPKAD dalam mendukung sinergi antara institusi di pusat dan daerah dalam peningkatan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). 2. Perluasan <i>piloting program</i> EKI di pedesaan untuk mendukung peningkatan literasi keuangan di beberapa wilayah <i>rural</i>. 3. Melanjutkan transformasi digital perbankan, didukung infrastruktur digital yang kuat, kesediaan SDM yang mumpuni, serta kebijakan regulasi pro-inovasi dan keamanan data dan privasi yang mendukung pertumbuhan inovasi.
2.	Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi peran UU Kesehatan dalam memastikan standarisasi pelayanan, tenaga, dan infrastruktur kesehatan primer yang merata di berbagai daerah. Khusus untuk tenaga medis diharapkan dapat memiliki standar internasional, sehingga kualitas pelayanannya dapat lebih kompetitif. 2. Memperkuat peran program kartu prakerja untuk menopang kelompok <i>subsistence</i>, dan daya saing kaum perempuan. 3. Peningkatan <i>capacity building</i> tenaga kerja untuk sektor-sektor <i>frontier</i> (energi baru terbarukan dan <i>blue industry</i>) melalui program <i>upskilling</i> serta penyediaan sertifikasi yang relevan.

No.	Sektor	Rekomendasi Penguatan Kebijakan
3.	Konektivitas Domestik dan Pemberdayaan Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan skema pendanaan yang kreatif untuk menarik minat swasta berinvestasi, baik dalam bentuk investasi langsung maupun <i>crowdfunding</i> yang difasilitasi pemerintah. 2. Penyederhanaan regulasi serta <i>refocusing</i> inovasi pelayanan publik, terutama upaya bersama untuk menyatukan aplikasi perizinan berbasis digital ke dalam satu pintu sebagai <i>quick-win</i>. 3. Pengembangan <i>Infrastructure Investor Outlook</i> dan <i>National Project Database</i> yang berisi daftar peluang investasi di sektor infrastruktur dan perluasan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4.	Pemberdayaan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas fasilitas dan insentif yang diberikan oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah) yaitu terkait kemudahan izin usaha, pembiayaan, bantuan hukum, inkubasi usaha, promosi, perlindungan konsumen, dan dana alokasi khusus (PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM). 2. Optimalisasi program kurasi dalam peningkatan kualitas produk dengan memenuhi standar mutu nasional maupun internasional serta melakukan sertifikasi halal bagi produk yang sesuai. 3. Peningkatan kapasitas digitalisasi usaha dengan memanfaatkan <i>platform</i> digital, bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN/BUMD, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan asosiasi usaha terkait lainnya.
5.	Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki <i>database</i> industri kreatif, kerja sama antara BPS, Bank Indonesia, Kemenparekraf, dan Kemenkop UKM serta melibatkan asosiasi terkait seperti Kadin dan ISEI. 2. Pendampingan dan pelatihan bagi pelaku industri kreatif yang berorientasi ekspor dengan skema program kolaborasi antar- K/L dan juga Pemda.

No.	Sektor	Rekomendasi Penguatan Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi perlindungan hak dan kekayaan intelektual untuk produk-produk industri kreatif.
6.	Ekonomi dan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi produk keuangan dan insentif bagi perbankan syariah seperti produk <i>investment account</i> dan insentif produk halal berorientasi ekspor dan berfokus pada sektor prioritas. 2. Peningkatan instrumen intermediasi keuangan syariah (bank maupun nonbank) pada sektor-sektor prioritas nasional. 3. Peningkatan akses dan promosi ekspor Indonesia, khususnya di negara-negara OKI.
7.	Sumber Daya Kemaritiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur utama dan konektivitas maritim dengan pendekatan yang efisien dan <i>industrial-oriented</i> (termasuk simplifikasi proses bisnis, integrasi sistem logistik, dan kesiapan kawasan industri maritim). 2. Meningkatkan peranan <i>supply chain</i> produk Indonesia ke global melalui fasilitasi dalam hal standarisasi maupun promosi perdagangan. 3. Mendorong produksi sumber daya perikanan domestik yang lebih bernilai tambah, misalnya melalui skema hilirisasi.
8.	Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pangan dicapai melalui peningkatan produksi dan produktivitas. Hal ini dilakukan dengan penerapan teknologi serta pelatihan dan penyuluhan kepada petani. 2. Penguatan keterjangkauan melalui optimalisasi manajemen logistik dan distribusi pangan. 3. Penguatan aspek nutrisi dan keamanan dengan berfokus pada perlu berfokus pada diversifikasi pangan dan peningkatan penyediaan Pangan Beragam, Bergizi, Sehat, Aman (B2SA) dan terjangkau.
9.	Energi Baru Terbarukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong diversifikasi sumber energi dan mendorong pengembangan energi baru terbarukan.

No.	Sektor	Rekomendasi Penguatan Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penguatan pendanaan dan investasi transisi energi dengan cara menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong partisipasi sektor swasta, dan mencari sumber pendanaan alternatif dan kerja sama internasional. 3. Mendorong pembangunan infrastruktur energi di antaranya seperti pembangunan Penerangan Jalan Umum, Tenaga Surya (PJU-TS), Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan Alat Penyalur Daya Listrik.
10.	Perdagangan dan Keuangan Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat strategi dasar peningkatan investasi dan perdagangan internasional melalui perbaikan <i>ease of doing business</i> serta diplomasi keuangan internasional di beberapa negara mitra, salah satunya melalui skema <i>Local Currency Transaction (LCT)</i>. 2. Pemanfaatan teknologi modernisasi perdagangan. 3. Percepatan penyelesaian ratifikasi <i>Free Trade Agreement</i>.

Kelompok kebijakan ketiga, yaitu mengakselerasi implementasi hilirisasi, digitalisasi dan ekonomi hijau sebagai upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hilirisasi, digitalisasi, dan ekonomi hijau dalam hal ini memiliki peranan penting tidak hanya karena potensinya yang besar dalam meningkatkan produktivitas, tetapi pada saat yang sama setiap aspek tersebut mampu memperkuat perbaikan struktur ekonomi yang menjadi fondasi penting untuk memacu ekonomi Indonesia naik kelas menuju negara maju.

Dari sisi hilirisasi, strategi kebijakan perlu diarahkan untuk memperkuat kebijakan industrialisasi dalam negeri yang memberi manfaat dari sisi daya saing produk di pasar global, penerimaan negara, serta kesejahteraan masyarakat. Kebijakan hilirisasi dalam hal ini mencakup dua sektor sekaligus, yakni mineral dan pangan (perkebunan, pertanian dan perikanan) yang saling melengkapi dengan tetap memperhatikan prioritas produk turunan yang dihasilkan serta ketersediaan sumber bahan baku. Hilirisasi mineral berperan penting dalam peningkatan investasi domestik, penciptaan nilai tambah produksi industri dalam negeri, serta peningkatan daya saing.

Sementara itu, hilirisasi pangan tetap sejalan dengan arah pencapaian strategi hilirisasi secara umum, serta dukungan lebih luas untuk pertumbuhan yang inklusif dengan implementasinya yang senantiasa mengacu kepada empat indikator utama, yakni menjadi daya ungkit perekonomian, menjaga inflasi, meningkatkan daya saing, dan mendorong penyerapan tenaga kerja.

Kaitannya dengan hal ini, serangkaian rekomendasi kebijakan yang komprehensif diperlukan. Pertama, mengoptimalkan insentif fiskal dan nonfiskal dalam memperbaiki faktor produksi, mencakup kemampuan modal, infrastruktur, dan sumber daya manusia untuk memastikan kesinambungan serta konektivitas pembangunan rantai industri hilirisasi yang mampu meningkatkan peluang ekspor jenis komoditas baru. Kedua, memperkuat *alignment* pada pengaturan kelembagaan di pusat maupun daerah, terutama terkait aspek penerimaan dan bagi hasil, untuk menghasilkan manfaat yang lebih merata pada beberapa kawasan industri strategis di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, meningkatkan promosi dan perluasan akses pasar produk-produk hilirisasi di dalam negeri. Upaya meningkatkan promosi dan perluasan akses pasar perlu diarahkan untuk mendukung *linkage value chain* produk turunan di pasar global, sebagai target antara memenuhi permintaan produk setengah jadi yang diproduksi, seraya penguatan teknologi terus dilakukan untuk menghasilkan *output* produk akhir yang lebih bernilai tambah. Promosi juga diperlukan dalam rangka menarik investasi yang masuk ke dalam negeri melalui dukungan *ease of doing business* di tingkat pusat

Agar dampaknya semakin inklusif, arah kebijakan hilirisasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan UMKM perlu **terus dipertahankan**. Program *piloting* hilirisasi komoditas yang melibatkan UMKM perlu diperluas dengan memerhatikan keunggulan yang dimiliki pada masing-masing daerah. Kolaborasi antara UMKM dan hilirisasi industri dapat ditempuh dari sisi *core business* yang mencakup pemrosesan langsung barang mentah menjadi barang setengah mentah, maupun *non-core business* yang meliputi dukungan kebutuhan logistik, suplai bahan baku, hingga penyediaan prasarana pendukung lainnya.

Dari sisi strategi digitalisasi, saat ini ekonomi dan keuangan digital memiliki peranan penting dalam menciptakan inklusi ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. Melalui pengembangan teknologi digital, individu dan bisnis dapat mengakses pasar global, mengurangi kesenjangan digital, dan meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan. Dari perspektif makro, inklusi keuangan juga memiliki kontribusi terhadap stabilitas keuangan suatu negara. Secara garis besar inklusi keuangan berperan besar dalam

akselerasi pembangunan ekonomi dan keuangan digital, pengembangan UMKM digital, penguatan perlindungan konsumen di era digital, serta kebijakan pembiayaan digital.

Dalam pelaksanaannya, perkembangan digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia saat ini dihadapkan pada 5 (lima) tantangan utama. Pertama, belum meratanya akses terhadap infrastruktur dan layanan digital. Kedua, peningkatan kapabilitas SDM berwawasan digital yang terampil dan berdaya saing. Ketiga, upaya mewujudkan regulasi dan peta jalan pembangunan digital yang selaras baik di tingkat pusat maupun daerah. Keempat, sumber pembiayaan dan upaya menarik investor potensial untuk pengembangan industri ekonomi digital dalam negeri. Kelima, perubahan budaya masyarakat dan jaminan perlindungan konsumen yang kuat.

Merespons tantangan di atas, untuk menavigasi peran optimal ekonomi dan keuangan digital bagi perekonomian nasional, terdapat 5 (lima) usulan kebijakan pendukung yang ditawarkan dalam melengkapi *mainstream* kebijakan utama di tingkat nasional. Pertama, Penguatan regulasi digital dengan prinsip *shared-responsibilities* antara otoritas maupun asosiasi terkait untuk mewujudkan efektivitas pengaturan yang mendukung kelancaran *market entry* serta pada saat yang sama meningkatkan disiplin pada ekosistem industri *existing*. Kedua, menghadirkan program pendidikan dan pelatihan digital yang inklusif serta terdesentralisasi di daerah-daerah. Ketiga, mengoptimalkan digitalisasi dalam pengembangan sistem logistik yang efisien dan terintegrasi. Keempat, integrasi program peningkatan kapasitas UMKM secara digital untuk meningkatkan keunikan dan daya saing. Kelima, melanjutkan pengembangan infrastruktur digital strategis yang turut mendukung perluasan literasi dan inklusi keuangan digital nasional.

Ekonomi hijau menjadi salah faktor penting dalam mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menimbang, selama dua dekade terakhir dampak kerusakan lingkungan, *global warming* dan *climate change* kian serius memengaruhi perekonomian negara. Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target *net-zero* emisi karbon selambat-lambatnya pada 2050. Pada COP26 di Glasgow, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mencapai puncak emisi GHG nasional pada tahun 2030, dengan *net sink* (*carbon sequestration*) di sektor kehutanan dan tata guna lahan, dan untuk mencapai target emisi *net-zero* pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Melihat tantangan yang multidimensi, upaya untuk mengakselerasi ekonomi hijau di Indonesia perlu ditempuh secara integratif, di antaranya melalui strategi *two-pronged approach* atau pendekatan yang dilakukan dari berbagai arah berbeda namun saling terkait. Pendekatan tersebut terdiri dari meningkatkan partisipasi sektor keuangan dalam mendukung pengembangan dan pendalaman pasar pada berbagai *green-related instrument* serta memperkuat produktivitas sektor riil untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dalam mendorong alternatif kegiatan usaha berbasis hijau.

Strategi optimalisasi ekonomi hijau di atas masih sejalan dengan inisiatif yang tengah ditempuh pemerintah dalam memastikan proses transisi ekonomi hijau yang seimbang, adil dan transparan. 'Seimbang' dalam artian kebijakan transisi dilaksanakan secara gradual dengan memperhatikan kondisi iklim berusaha dan kesiapan masyarakat setempat. Kemudian 'adil' yang berarti meskipun dalam implementasinya kebijakan terkait bersifat *mandatory* tetapi juga diiringi dengan mekanisme kompensasi yang bisa diterima sehingga tidak terlalu memberatkan pelaku usaha dan juga terjangkau. Terakhir, adalah 'transparan' yang mengedepankan komitmen bersama antara regulator di tingkat global dan domestik terhadap penggunaan metodologi yang *accountable* dan dijalankan secara kolektif dalam memenuhi target *Net Zero Emission* di masing-masing negara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
PENGANTAR EDITORIAL	vi
PENDAHULUAN	viii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GRAFIK	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv

BAB I	BERTAHAN DAN BERADAPTASI UNTUK MEMAJUKAN EKONOMI DOMESTIK DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL	1
1.1	Ketidakpastian Ekonomi Global Tetap Tinggi	2
1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi Global Melambat dan Rentan terhadap Gejolak	2
1.1.2	Disinflasi Global Berlangsung secara Gradual	5
1.1.3	Suku Bunga tetap Tinggi untuk Waktu yang Lebih Lama	6
1.2	Ketahanan Ekonomi Indonesia Tetap Baik dengan Stabilitas Terjaga	8
1.2.1	Pemulihan Ekonomi Domestik Berlanjut di tengah Perlambatan Ekonomi Dunia	9
1.2.2	Stabilitas Nilai Tukar Terjaga Ditopang Ketahanan Eksternal yang Kuat	11
1.2.3	Inflasi Lebih Rendah dari Prakiraan Awal	15
1.2.4	Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga dengan Ketahanan yang Baik	17
1.2.5	Ekonomi dan Keuangan Digital di Indonesia Meningkat Pesat	19
1.3	Tiga Pelajaran Penting dari Perspektif Kebijakan untuk Pemulihan	21
1.4	Penajaman Paradigma Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	24

BAB II	SINERGI DAN INOVASI BAURAN KEBIJAKAN NASIONAL MEMPERKUAT KETAHANAN DAN MENDORONG PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN	27
2.1.	Strategi Bauran Kebijakan di Jangka Pendek	28
2.1.1	Kebijakan Fiskal: Konsolidasi dengan Tetap Berdaya Dukung untuk Stabilitas dan Pertumbuhan	29

2.1.2	Bauran Kebijakan Bank Indonesia untuk Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan	33
2.1.3	Kebijakan Mikroprudensial untuk Memperkuat Ketahanan Sistem Keuangan dan Mendorong Pembiayaan	38
2.2	Strategi Bauran Kebijakan di Jangka Panjang	39
BAB III	MEMPERKUAT MOMENTUM, MENDORONG KEBANGKITAN SEKTOR RIIL	47
3.1.	Kebangkitan Sektor Riil dan Penguatan Output Potensial	48
3.2.	Sinergi dalam Memperkuat Kebijakan Sektoral ...	50
3.2.1	Penguatan Kebijakan Sektoral pada Akses Pembiayaan	52
3.2.2	Penguatan Kebijakan Sektoral pada Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Kesehatan	54
3.2.3	Penguatan Kebijakan Sektoral pada Konektivitas Domestik dan Infrastruktur	57
3.2.4	Penguatan Kebijakan Sektoral pada Pengembangan UMKM Nasional	60
3.2.5	Penguatan Kebijakan Sektoral Pemberdayaan Ekonomi Kreatif	63
3.2.6	Penguatan Kebijakan Sektoral pada Ekonomi Syariah	65
3.2.7	Penguatan Kebijakan Sektoral Sumber Daya Kemaritiman	68
3.2.8	Penguatan Kebijakan Sektoral Ketahanan Pangan	73
3.2.9	Penguatan Kebijakan Sektoral Energi Baru Terbarukan (EBT)	75
3.2.10	Penguatan Kebijakan Sektoral dalam Perdagangan dan Keuangan Internasional	78
3.3.	Memantapkan Integrasi Kebijakan Sektoral untuk Pemulihan	80
BAB IV	HILIRISASI UNTUK MEMPERKUAT DAYA SAING EKONOMI NASIONAL	83
4.1.	Hilirisasi Pertambangan	86
4.1.1	Perkembangan Hilirisasi Pertambangan	86
4.1.1.2	Perkembangan Hilirisasi Bauksit	93
4.1.1.3	Perkembangan Hilirisasi Timah	94
4.1.1.4	Perkembangan Hilirisasi Tembaga	94
4.1.2	Tantangan Hilirisasi Pertambangan	95

4.1.2.1	Tantangan Hilirisasi Nikel	96
4.1.2.2	Tantangan Hilirisasi Bauksit	97
4.1.2.3	Tantangan Hilirisasi Timah	98
4.1.2.4	Tantangan Hilirisasi Tembaga	99
4.1.3	Rekomendasi Strategi Pengembangan Hilirisasi Pertambangan	100
4.2	Hilirisasi Pertanian	103
4.2.1.	Potensi Hilirisasi Pertanian	104
4.2.2.	Tantangan Hilirisasi Pertanian	107
4.2.3.	Rekomendasi Strategi Pengembangan Hilirisasi Pangan	110
BAB V	AKSELERASI DIGITALISASI UNTUK INKLUSIF EKONOMI DAN KEUANGAN	115
5.1.	Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Digital Nasional	116
5.2.	Digitalisasi UMKM	117
5.2.1	UMKM dan Pasar Digital	117
5.2.2	UMKM dan Digitalisasi Sektor Transportasi (<i>Ride Hailing</i>) dan Sektor Ekonomi Lainnya	118
5.2.3	Digitalisasi dalam Peningkatan Produktivitas UMKM	119
5.3.	Pembiayaan Digital	120
5.3.1	Pembiayaan Digital melalui Perusahaan <i>Fintech</i>	121
5.3.2	Sinergi Lembaga Keuangan dan <i>Fintech</i> dalam Rangka Mendorong Pembiayaan Digital ...	122
5.4.	Digitalisasi Sistem Pembayaran	122
5.5.	Perlindungan Konsumen dan Keamanan Digital	125
5.5.1	Kejahatan Keuangan Digital dan Keamanan Data	125
5.5.2	Regulasi Perlindungan Konsumen	127
5.5.3	Literasi Keuangan Digital	129
5.6.	Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan	129
5.6.1	Tantangan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital	129
5.6.2	Rekomendasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Digital	133
BAB VI	PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN	137
6.1.	Lima Tantangan Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC)	138

6.1.1	Mengatasi Regulasi yang Tumpang Tindih dan Kontradiktif	139
6.1.2	Penguatan Infrastruktur sebagai Modalitas untuk Adaptasi <i>Climate Change</i>	141
6.1.3	Membangun Sistem Data yang Andal dan Terintegrasi	141
6.1.4	Mempelajari Kapasitas Manusia Indonesia untuk Lapangan Kerja Hijau	142
6.1.5	Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat	144
6.2	Peran dan Kontribusi Sektor untuk Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan	146
6.2.1	Sektor Energi dan Pertambangan	146
6.2.2	Sektor Pangan	147
6.2.3	Sektor Kemaritiman	148
6.2.4	Sektor UMKM	149
6.3	Strategi <i>Two-Pronged Approach</i> dalam Mengakselerasi Ekonomi Hijau di Indonesia	150
6.3.1	Memperkuat Ekosistem Investasi dan Pembiayaan Hijau Domestik	151
6.3.2	Meningkatkan Produktivitas Sektor-sektor Pendukung Ekonomi Hijau	155
DAFTAR PUSTAKA		159

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1	Sumber Pemulihan Ekonomi Dunia	4
Grafik 1. 2	Perkembangan Inflasi Global	5
Grafik 1. 3	Ekspektasi Inflasi Global	5
Grafik 1. 4	Inflasi Negara Maju	6
Grafik 1. 5	Inflasi Negara Berkembang	6
Grafik 1. 6	Probabilitas Resesi pada 2023	7
Grafik 1. 7	Ketidakpastian Global masih Tinggi	8
Grafik 1. 8	Kinerja Dolar AS dan Persepsi Risiko EM	8
Grafik 1. 9	Pertumbuhan Spasial Triwulan II 2023	10
Grafik 1. 10	Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: 2023-2024	10
Grafik 1. 11	Ekonomi Domestik Pra dan Pascapandemi Covid-19 ...	11
Grafik 1. 12	Pertumbuhan Sektor dan <i>Contact-Intensive Sector</i> ...	11
Grafik 1. 13	Dampak <i>Contact-Intensive Sector</i> pada Sektor Lain	11
Grafik 1. 14	<i>Term of Trade</i> Indonesia	11
Grafik 1. 15	Pergerakan Rupiah vs Negara Lain	14
Grafik 1. 16	<i>Risk Adjusted Return (RAR)</i>	14
Grafik 1. 17	Ekspektasi Inflasi IHK dan Inti	15
Grafik 1. 18	<i>Flattening Philips Curve</i>	15

Grafik 1. 19	Perkiraan El Nino 2023	16
Grafik 1. 20	Ekspor Ukraina diangkut melalui Laut Hitam	16
Grafik 1. 21	Perkembangan Rasio AL/DPK	17
Grafik 1. 22	Suku Bunga Perbankan	17
Grafik 1. 23	Indeks <i>Lending Standard</i>	18
Grafik 1. 24	Kredit Per Jenis Penggunaan	18
Grafik 1. 25	Volume <i>Mobile</i> dan <i>Internet Banking</i>	20
Grafik 1. 26	Rasio <i>E-commerce</i> terhadap Konsumsi Rumah Tangga	20
Grafik 2. 1	Konsumsi Pemerintah	32
Grafik 2. 2	Defisit APBN	32
Grafik 2. 3	Perkembangan <i>Tax Ratio</i>	33
Grafik 2. 4	Perbandingan <i>Tax Ratio</i> Beberapa Negara	33
Grafik 2. 5	Perkembangan Suku Bunga Kebijakan	35
Grafik 2. 6	Suku Bunga Perbankan	35
Grafik 2. 7	Proyek Strategis Nasional (PSN)	43
Grafik 2. 8	Ekspor Nikel	43
Grafik 2. 9	PDRB Sulampua	43
Grafik 4. 1	Perbandingan Transaksi Berjalan Negara Berdapatan Tinggi & Menengah.....	84
Grafik 4. 2	Dampak Perubahan Output Industri Manufaktur pada Sektor Ekonomi	84
Grafik 4. 3	Perkembangan Distribusi Nilai Ekspor Indonesia Berdasarkan Tingkat Teknologi	85
Grafik 4. 4	Distribusi Nilai Ekspor per Wilayah Berdasarkan Tingkat Teknologi	85
Grafik 4. 5	Perkembangan Investasi PMA di Sektor Industri Manufaktur	89
Grafik 4. 6	Perkembangan Kontribusi PDB dari Subsektor Utama Industri Manufaktur	89
Grafik 4. 7	Neraca Perdagangan Produk Turunan Logam Dasar	92
Grafik 4. 8	Target Pembangunan <i>Smelter</i> 2021-2024	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Arah Kebijakan Fiskal 2023: <i>Shock Absorber</i> dan Konsolidasi	30
Gambar 2. 2	APBN Tahun 2023: Optimis dan Waspada	31
Gambar 2. 3	Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi: Pendekatan <i>Endogenous Growth Model</i>	41
Gambar 2. 4	Peningkatan Kapasitas dan Kebangkitan Ekonomi Jangka Menengah	42
Gambar 2. 5	Kebijakan Hilirisasi Manufaktur Berbasis Sumber Daya Alam (SDA)	44
Gambar 2. 6	Kebijakan Pengembangan Pariwisata	45
Gambar 3. 1	Matriks Hubungan <i>Output Gap</i> terhadap Deviasi Inflasi dari Sasaran	41

Gambar 3. 2	Piramida Penduduk Indonesia Pada 2020, 2045, dan 2070	55
Gambar 4. 1	Linimasa Perkembangan Kebijakan Larangan Ekspor Mineral Mentah	88
Gambar 4. 2	Kerangka Berpikir Hilirisasi Pertambangan	90
Gambar 4. 3	Keterkaitan Produk Prioritas Hilirisasi dalam Ekosistem Industri EV	91
Gambar 4. 4	Pemetaan Prioritas Pengembangan Komoditas Pangan Kementerian/Lembaga	108
Gambar 5. 1	Laporan Kasus Kejahatan Siber 2021	126
Gambar 6. 1	<i>Global Land-Ocean Temperature Index</i>	137
Gambar 6. 2	Temperatur Bumi pada Tahun 1884	138
Gambar 6. 3	Temperatur pada Tahun 2022	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Pertumbuhan Ekonomi Dunia	4
Tabel 1. 2	Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)	13

BAB I

BERTAHAN DAN BERADAPTASI

UNTUK MEMAJUKAN EKONOMI DOMESTIK DI TENGAH

KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Ketidakpastian ekonomi global masih tinggi pada 2023. Pertumbuhan ekonomi global 2023 diperkirakan mencapai 2,7%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 3,5%, serta disertai pergeseran sumber pertumbuhan. Pertumbuhan Amerika Serikat (AS) diperkirakan lebih baik, dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga seiring dengan perbaikan upah dan keyakinan konsumen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok lebih rendah sejalan dengan tertahannya konsumsi dan investasi terutama sektor properti. Tekanan inflasi di negara maju masih relatif tinggi dipengaruhi oleh perekonomian yang lebih kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Hal ini diperkirakan akan mendorong kenaikan lebih lanjut suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk kenaikan *Federal Funds Rate* (FFR) yang lebih tinggi dari perkiraan awal tahun.

Perkembangan ini mendorong aliran modal ke negara berkembang lebih selektif dan meningkatkan tekanan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga dipicu oleh kembali meningkatnya ketegangan geopolitik pada semester II 2023 yang dapat berdampak pada kenaikan harga energi dan pangan global serta tekanan inflasi global. Perkembangan ekonomi global yang kurang kondusif tersebut juga tidak terlepas dari semakin mengemukanya *geo-economic fragmentation* yang semakin menekan prospek pemulihan dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi global.¹ Oleh karena itu, memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampaknya terhadap ekonomi Indonesia.

Ketahanan ekonomi domestik tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tinggi. Pemulihan pertumbuhan ekonomi domestik terus berlanjut hingga mencapai 4,5% - 5,3%, terutama ditopang oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga tetap kuat sejalan dengan naiknya mobilitas, terkendalinya inflasi, dan membaiknya ekspektasi

¹ *Geo-economic fragmentation* menggambarkan pembalikan integrasi ekonomi global yang didorong oleh kebijakan dan sering kali dipandu oleh pertimbangan strategis (IMF, 2023)

pendapatan. Investasi juga tetap tumbuh positif didukung antara lain oleh berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Sementara itu, ekspor diperkirakan melambat akibat menurunnya ekspor barang sejalan dengan pelemahan ekonomi global, sedangkan ekspor jasa masih kuat ditopang oleh meningkatnya wisatawan mancanegara.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga akan tetap baik dengan transaksi berjalan yang diperkirakan terjaga dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB. Neraca transaksi modal dan finansial tetap terjaga, ditopang aliran masuk modal asing baik dalam bentuk PMA maupun portofolio sejalan dengan persepsi positif investor terhadap perekonomian Indonesia. Nilai tukar Rupiah juga terkendali sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi yang rendah, imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik, dampak positif dari implementasi PP 36/2023 tentang DHE SDA, serta kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia. Inflasi telah kembali ke dalam sasaran lebih cepat dari prakiraan dan akan tetap terkendali dalam kisaran $3,0\pm 1\%$ pada sisa tahun 2023 dan $2,5\pm 1\%$ pada tahun 2024.

Prospek perbaikan ekonomi domestik dihadapkan pada sejumlah risiko yang perlu diwaspadai. Di sisi global, risiko utama bersumber dari kerentanan geopolitik, ketidakpastian pasar keuangan global, dan mulai meningkatnya implementasi kebijakan proteksionisme pangan di berbagai negara. Berbagai risiko tersebut dapat menimbulkan dampak rambatan, baik melalui *financial channel* maupun *trade channel* yang dapat mengganggu prospek pemulihan ekonomi Indonesia. Sementara itu di sisi domestik, risiko terutama terkait dengan berlanjutnya struktur pertumbuhan ekonomi yang kurang berimbang, tekanan inflasi pangan akibat El-Nino, serta keberlanjutan upaya perbaikan struktur ekonomi Indonesia. Dalam kaitan ini, berbagai risiko tersebut perlu diwaspadai dan diantisipasi dengan baik karena dapat mengganggu keseimbangan internal dan eksternal perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sinergi kebijakan nasional, baik siklikal maupun struktural, perlu dilanjutkan dan diperkuatnya guna memastikan terus berlanjutnya pemulihan dan stabilitas ekonomi Indonesia untuk mencapai Indonesia Maju pada tahun 2045.

1.1 Ketidakpastian Ekonomi Global Tetap Tinggi

1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Global Melambat dan Rentan terhadap Gejala

Ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian yang tinggi. Fragmentasi hubungan antarnegara di dunia berlanjut baik dari sisi ekonomi maupun

sisi politik yang saling terkait, sehingga menahan pemulihan ekonomi global pascapandemi Covid-19. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari semakin mengemukanya permasalahan struktural geoekonomi dan geopolitik yang ada. Di sisi geoekonomi, terdapat indikasi bahwa dunia mengalami langkah mundur dari upaya globalisasi. Dalam hal ini, liberalisasi perdagangan internasional, sebagai bagian penting dari globalisasi, mengalami kendala seperti yang tercermin pada meningkatnya jumlah kebijakan proteksionisme, baik terkait *trade*, investasi, maupun lalu lintas modal internasional oleh banyak negara. Jumlah kebijakan pembatasan perdagangan internasional meningkat pesat terutama sejak masa pandemi dari sekitar 1.700 kebijakan pada 2020 menjadi sekitar 2.500 kebijakan pada akhir 2022.² Perkembangan tersebut tidak terlepas dari persaingan geopolitik, termasuk perang di Ukraina, yang mendorong meningkatnya implementasi kebijakan proteksionisme pangan dan energi serta pembatasan lalu lintas perdagangan dengan pertimbangan keamanan yang pada akhirnya memicu *geo-economic fragmentation*. Pada gilirannya, *geo-economic fragmentation* ini menurunkan volume perdagangan internasional, *cross border immigration*, aliran modal internasional termasuk *foreign direct investment* seiring dengan *fenomena onshoring, frienshoring, dan nearshoring*. Berbagai perkembangan yang bersifat struktural tersebut akan menghambat laju pemulihan ekonomi global.

Pemulihan ekonomi global berlangsung lambat dan tidak merata. Setidaknya terdapat 3 (tiga) perkembangan yang patut menjadi perhatian yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, kualitas pertumbuhan yang menurun, dan berbagai risiko yang merupakan efek samping kebijakan yang agresif, sehingga dapat mengganggu prospek pemulihan ekonomi global. Meskipun pemulihan ekonomi global pascapandemi Covid-19 terus berlanjut, namun pertumbuhannya pada tahun 2023 diperkirakan hanya mencapai 2,7%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 3,5% (Tabel 1.1).

Perkembangan terkini juga menunjukkan terjadinya pergeseran sumber pertumbuhan ekonomi global. Ekonomi Amerika Serikat (AS) yang semula diperkirakan menurun, bahkan berisiko resesi, sebagai dampak kenaikan suku bunga kebijakan *Federal Funds Rate (FFR)* yang agresif, ternyata masih resilien. Masih solidnya ekonomi AS tersebut didukung kuatnya konsumsi rumah tangga yang ditopang berlanjutnya perbaikan upah dan keyakinan konsumen. Sementara itu, ekonomi Tiongkok yang semula diperkirakan akan menjadi motor pemulihan ekonomi global, seiring dengan

² Global Trade Alert (2023)

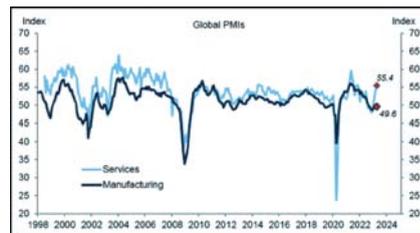
pencabutan kebijakan *Zero Covid Policy*, mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, sejalan dengan tertahannya konsumsi dan investasi terutama sektor properti.

Struktur pemulihan ekonomi global masih belum kuat. Hingga semester I 2023, sumber pertumbuhan ekonomi global masih didominasi oleh sektor jasa, sedangkan peran sektor manufaktur masih terbatas (Grafik 1.1). Kondisi ini berbeda dengan episode-episode pemulihan ekonomi pascakrisis sebelumnya di mana sektor manufaktur menjadi motor pemulihan ekonomi. Dalam jangka pendek, sektor jasa memang dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di berbagai negara utama, termasuk Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Tiongkok namun dampaknya terhadap pertumbuhan jangka panjang relatif terbatas. Hal ini sejalan dengan rendahnya dampak *multiplier* sektor jasa baik terhadap sektor lainnya maupun permintaan ekspor global. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia berisiko menuju “*new normal*” yang diwarnai oleh pertumbuhan yang lebih rendah dari sebelumnya, sehingga tidak mampu mengompensasi *output loss* yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 lalu.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Negara	2019	2020	2021	2022	2023*
Dunia	2,8	-2,8	6,3	3,5	2,7
Negara Maju	1,7	-4,2	5,4	2,7	1,3
Amerika Serikat	2,3	-2,8	5,9	2,1	1,4
Kawasan Eropa	1,6	-6,1	5,3	3,5	0,6
Jepang	-0,4	-4,3	2,2	1,1	1,3
Negara Berkembang	3,6	-1,8	6,8	4,0	3,8
Tiongkok	6,0	2,2	8,4	3,0	5,1
India	4,8	-6,6	8,3	6,8	6,2
ASEAN-5	4,3	-4,4	4,0	5,5	4,9
Amerika Latin	0,2	-6,8	7,0	3,9	1,5
Negara Berkembang Eropa	2,5	-1,6	7,3	0,8	1,2
Timur Tengah & Asia Tengah	1,6	-2,7	4,4	5,4	2,9

Grafik 1. 1 Sumber Pemulihan Ekonomi Dunia



Sumber: IMF dan Bank Indonesia, diolah

Sumber: S&P Global, Goldman Sachs

Prospek pertumbuhan ekonomi global masih dihadapkan pada berbagai risiko. Setidaknya terdapat 3 (tiga) risiko utama yang perlu diwaspadai. *Pertama*, pemulihan ekonomi Tiongkok yang tidak sekuat perkiraan, sejalan dengan penjualan sektor properti dan konsumsi yang masih terbatas terutama untuk konsumsi jasa. Sebagai salah satu negara mitra utama, terbatasnya pemulihan dan sumber pertumbuhan ekonomi Tiongkok dimaksud dapat menahan perbaikan di negara-negara lainnya termasuk di ASEAN. *Kedua*, adanya risiko suku bunga kebijakan di negara maju, termasuk AS yang tetap tinggi sejalan dengan persistensi inflasi inti. Suku bunga tinggi juga dapat memicu kembali meningkatnya tekanan pada SSK. Kombinasi negatif dari kedua hal tersebut pada gilirannya dapat menekan prospek pertumbuhan ekonomi AS, dan juga negara maju yang lain. *Ketiga*, risiko peningkatan rasio utang publik di negara berkembang yang dapat

menjurus kepada fenomena ‘*debt trap*’ seiring dengan semakin sulitnya akses untuk *overseas financing* dan mahalanya bunga yang harus dibayar. Saat ini ada sekitar 60% jumlah negara berkembang di dunia yang dihadapkan pada risiko *debt vulnerabilities* apabila tidak terdapat inisiatif global dalam mengatur lebih lanjut mekanisme restrukturisasi utang yang teratur dan tepat waktu.

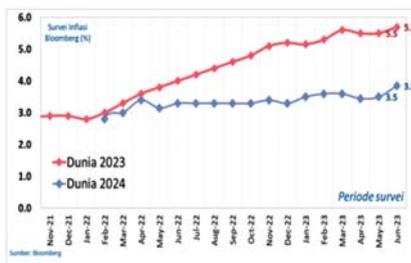
1.1.2 Disinflasi Global Berlangsung secara Gradual

Tekanan inflasi global menurun secara gradual. Lambatnya penurunan inflasi global tersebut disebabkan oleh setidaknya 5 (lima) faktor utama. *Pertama*, belum pulih sepenuhnya rantai pasokan global sehingga menghambat kemampuan sisi suplai untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat (*pent-up demand*) sejalan dengan perbaikan aktivitas ekonomi dunia. *Kedua*, kembali memanasnya tensi geopolitik global yang diikuti oleh penerapan sanksi dan retaliiasi, sehingga menimbulkan risiko kenaikan harga komoditas energi dan pangan dunia. *Ketiga*, ketatnya pasar tenaga kerja, terutama di negara maju, yang berdampak pada persistennya inflasi jasa (Grafik 1.2). *Keempat*, ekspektasi inflasi yang masih tinggi, terutama di negara maju, yang berdampak pada kenaikan upah nominal dan juga inflasi (*wage-price spiral effect*) (Grafik 1.3). *Kelima*, kondisi *output gap* yang telah menyempit di berbagai negara, sehingga lebih sensitif terhadap kenaikan permintaan.

Grafik 1. 2 Perkembangan Inflasi Global



Grafik 1. 3 Ekspektasi Inflasi Global



Sumber: IMF dan Bank Indonesia, diolah

Sumber: Bloomberg

Divergensi proses disinflasi terus berlanjut. Sejalan dengan penurunan harga komoditas global, energi dan pangan, secara umum inflasi global mulai turun meski kecepatan yang berbeda antara negara maju dengan berkembang. Tekanan inflasi di negara maju masih relatif tinggi, dipengaruhi oleh perekonomian yang lebih kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Di samping itu, kuatnya kinerja sektor jasa di negara maju telah menimbulkan komplikasi dalam upaya menurunkan inflasi melalui kebijakan suku bunga

mengingat dampak kebijakan moneter relatif kurang efektif dalam menurunkan inflasi jasa ketimbang inflasi barang. Hal tersebut menjelaskan mengapa tingkat inflasi di AS masih tinggi meskipun The Fed telah menempuh kenaikan suku bunga yang sangat agresif.

Sementara itu, proses disinflasi di negara berkembang relatif cepat mengingat tidak adanya keketatan di pasar tenaga kerja, sehingga tekanan inflasi dari sisi permintaan relatif terbatas. Dengan demikian, seiring penurunan harga internasional, inflasi IHK di negara berkembang juga menurun dengan cepat. Perbedaan kecepatan penurunan inflasi menyebabkan inflasi di banyak negara maju masih di atas sasaran, berbeda dengan inflasi di negara berkembang yang sebagian besar telah kembali ke sasarannya (Grafik 1.4 dan 1.5)

Grafik 1.4 Inflasi Negara Maju



Sumber: Bloomberg dan IMF, *diolah*

Grafik 1.5 Inflasi Negara Berkembang



Sumber: Bloomberg dan IMF, *diolah*

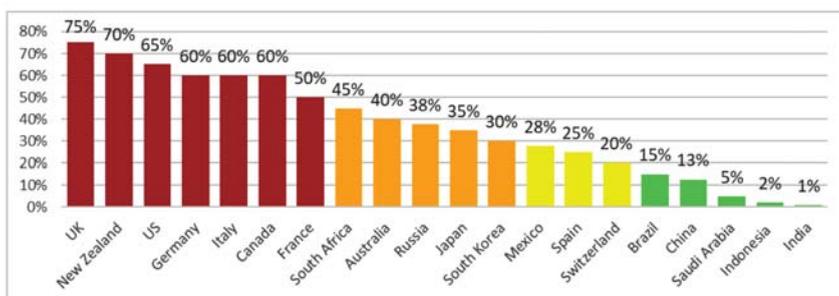
1.1.3 Suku Bunga tetap Tinggi untuk Waktu yang Lebih Lama

Tekanan inflasi yang masih tinggi khususnya di negara maju mendorong tingkat bunga tetap tinggi. Perbedaan kecepatan proses disinflasi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berdampak juga pada divergensi kebijakan moneter antara negara maju dan berkembang. Pada 2023, bank sentral negara maju, termasuk The Fed dan ECB, diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga kebijakannya untuk memastikan berlanjutnya proses disinflasi, sementara bank sentral negara berkembang cenderung mempertahankan suku bunga kebijakannya atau mulai menurunkan seperti yang ditempuh oleh People Bank's of China (PBOC). Perbedaan tingkat tekanan inflasi tersebut juga berdampak pada *timing* penurunan suku bunga kebijakan pada tahun 2024. Dalam kaitan ini, penurunan suku bunga kebijakan di negara maju diperkirakan baru akan terjadi paling cepat pada semester II 2024, sementara penurunan suku bunga di negara berkembang akan lebih awal.

Efek samping dari kebijakan suku bunga tinggi yang agresif memicu peningkatan risiko resesi khususnya di negara maju. Setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang menyebabkan perbedaan risiko resesi. *Pertama*, ketersediaan ruang fiskal dan kebijakan suku bunga bank sentral. Upaya konsolidasi fiskal yang ditempuh berbagai negara, pascaekspansi fiskal yang signifikan selama pandemi Covid-19, menurunkan daya dukung fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Inovasi kebijakan fiskal yang pada akhirnya bisa menyelamatkan terjadinya resesi, seperti yang dilakukan di Tiongkok, di mana pemerintah dan bank sentral telah mengeluarkan tambahan stimulus serta mulai menurunkan suku bunga kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus melemah. *Kedua*, kondisi pasar tenaga kerja yang masih sangat kuat di beberapa negara seperti AS akan dapat menopang konsumsi sehingga mengurangi risiko terjadinya resesi, *Ketiga*, ketahanan sektor keuangan domestik dalam menghadapi kenaikan suku bunga kebijakan. Kasus terjadinya gangguan stabilitas perbankan di AS dan Eropa dapat menjadi perhatian khusus karena berisiko menambah tekanan resesi sejalan dengan penurunan kredit.

Di antara negara maju, negara-negara Eropa memiliki potensi terbesar mengalami resesi di tengah ekonomi AS yang akan terhindar dari resesi. Sementara, probabilitas terjadinya resesi di negara berkembang relatif kecil sebagaimana terlihat pada Grafik 1.6.

Grafik 1. 6 Probabilitas Resesi pada 2023

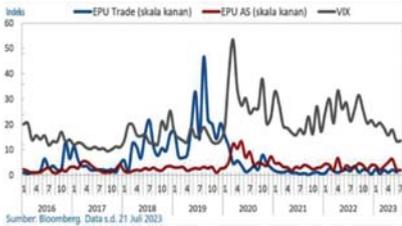


Sumber: Bloomberg, April 2023

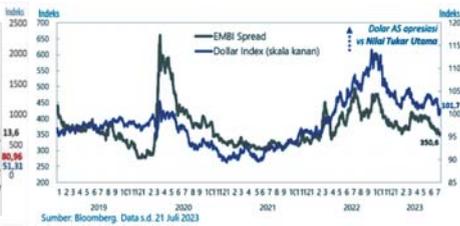
Ketidakpastian pasar keuangan global juga tetap tinggi. Di samping prospek ekonomi global yang berpotensi lebih rendah dari ekspektasi, sehingga meningkatkan premi risiko, ketidakpastian pasar keuangan juga didorong oleh arah *stance* kebijakan moneter, khususnya di negara maju. Dalam kaitan ini, potensi masih adanya kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed pada 2023 dan *timing* penurunannya yang masih belum jelas menyebabkan penguatan DXY, kenaikan *yield* UST, serta perilaku *risk-off*

investor global yang berdampak pada peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global (Grafik 1.7 dan 1.8). Di samping itu, tingginya ketidakpastian pasar keuangan global juga dipengaruhi oleh perkembangan tensi geopolitik yang sampai saat ini belum mereda, bahkan cenderung meningkat sejalan dengan keputusan Rusia untuk menarik diri dari *Black Sea Initiative*. Sejalan dengan hal tersebut, aliran modal asing, khususnya dalam bentuk portofolio, menjadi terbatas dan menimbulkan tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

Grafik 1.7 Ketidakpastian Global masih Tinggi



Grafik 1.8 Kinerja Dolar AS dan Persepsi Risiko EM



1.2 Ketahanan Ekonomi Indonesia Tetap Baik dengan Stabilitas Terjaga

Di tengah perkembangan ekonomi dan keuangan global yang kurang menguntungkan, kinerja ekonomi Indonesia tetap kuat. Di sisi pertumbuhan, pemulihan ekonomi domestik terus berlanjut hingga semester I 2023. Pertumbuhan ekonomi pada 2022 yang mencapai 5,03%, terus meningkat menjadi 5,17% pada triwulan II 2023. Permintaan domestik tetap kuat didukung antara lain oleh sinergi kebijakan fiskal-makroprudensial, berlanjutnya reformasi struktural, dan sinergi KSSK. Sementara itu, kinerja ekspor barang melambat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang melemah, di tengah membaiknya ekspor jasa. Di sisi stabilitas, baik makroekonomi maupun sistem keuangan juga tetap terjaga. Inflasi terus menurun dan telah kembali pada kisaran sasarannya 3+1% pada bulan Juni 2023, lebih cepat dari prakiraan semula. Nilai tukar Rupiah cenderung mengalami apresiasi pada 2023, dan lebih baik dibandingkan dengan negara *peers*, ditopang oleh kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang tetap baik dan langkah-langkah penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah oleh Bank Indonesia. Selain itu, stabilitas sistem keuangan juga terjaga kuat didukung oleh permodalan yang tinggi dan risiko kredit yang tetap rendah. Namun, kredit mulai melambat akibat menurunnya permintaan kredit dari dunia usaha.

Ke depan, perbaikan prospek ekonomi Indonesia akan terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan mencapai sekitar 4,5-5,3%

terutama didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat. Inflasi akan tetap terkendali pada kisaran sasaran 3+1% pada 2023 dan 2,5+1% pada 2024. Kinerja NPI pada 2023 diperkirakan akan tetap baik dengan transaksi berjalan terjaga dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB. Sementara itu, kredit tetap akan tumbuh pada kisaran 9-11% pada 2023 didukung penguatan kebijakan makprudensial akomodatif dan sinergi kebijakan KSSK.

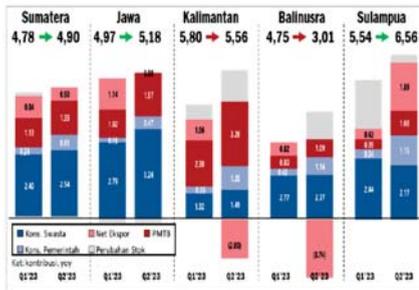
Prospek perbaikan ekonomi domestik dihadapkan pada sejumlah risiko yang perlu diwaspadai. Di sisi global risiko utama terkait geopolitik, suku bunga tinggi, ketidakpastian pasar keuangan global, dan berbagai permasalahan struktural, termasuk ketahanan energi dan pangan dunia di tengah muai meningkatnya implementasi kebijakan proteksionisme pangan. Sementara itu, di sisi domestik, risiko terutama terkait dengan berlanjutnya struktur pertumbuhan ekonomi yang kurang berimbang, tekanan inflasi pangan akibat El-Nino, serta keberlanjutan upaya perbaikan struktur ekonomi Indonesia. Berbagai risiko tersebut perlu diwaspadai dan diantisipasi dengan baik karena dapat mengganggu keseimbangan internal dan eksternal perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sinergi kebijakan nasional, baik siklikal maupun struktural, guna memastikan terus berlanjutnya pemulihan dan stabilitas ekonomi Indonesia untuk mencapai Indonesia Maju pada tahun 2045.

1.2.1 Pemulihan Ekonomi Domestik Berlanjut di tengah Perlambatan Ekonomi Dunia

Perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut di tengah perlambatan ekonomi global. Perekonomian nasional terus membaik, pascapandemi Covid-19, tumbuh 5,31% pada 2022, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,70%. Perbaikan pertumbuhan ekonomi tersebut berlanjut pada semester I 2023 di mana PDB triwulan II 2023 tumbuh 5,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2023 lebih didorong oleh permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga dan pemerintah maupun investasi. Ekspor mulai melemah, seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang menurun, khususnya ekspor barang sedangkan ekspor jasa meningkat sejalan dengan kenaikan wisatawan mancanegara. Secara spasial, perbaikan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2023 terjadi di Jawa dan Sumatera sejalan dengan kuatnya permintaan domestik, sedangkan Sulampua sumber pertumbuhannya lebih didorong oleh ekspor sejalan dengan hilirisasi nikel yang terus berlanjut. Sementara

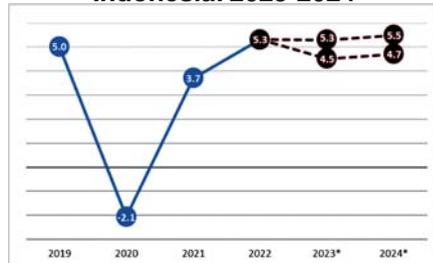
itu, Kalimantan dan Balinusra mencatat penurunan pertumbuhan ekonomi akibat kontraksi ekspor (Grafik 1.9). Di sisi lapangan usaha, perbaikan permintaan domestik dimaksud juga telah mendorong pertumbuhan sektor-sektor utama seperti Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi dan Pergudangan. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan dapat mencapai kisaran 4,5-5,3% (Grafik 1.10).

Grafik 1. 9 Pertumbuhan Spasial Triwulan II 2023



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1. 10 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: 2023-2024



Sumber: BPS, diolah

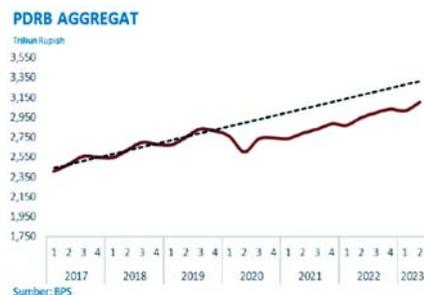
Kualitas pertumbuhan ekonomi nasional pascapandemi perlu terus diperkuat. Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap kuat, terdapat indikasi adanya perubahan pola pertumbuhan ekonomi domestik yang menyebabkan level perekonomian Indonesia masih belum kembali pada *path* ekonomi sebelum pandemi Covid-19 (Grafik 1.11).³ Hal ini juga terkait dengan sumber pertumbuhan ekonomi domestik saat ini masih lebih bertumpu pada *high contact-intensive sectors*, didukung oleh pulihnya mobilitas masyarakat sejalan dengan pencabutan status pandemi Covid-19, sebagaimana terlihat pada Grafik 1.12. Masalahnya, sektor-sektor tersebut mempunyai keterkaitan antar sektor yang relatif rendah, sehingga dampaknya dalam mendorong pertumbuhan sektor lain dan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi terbatas (Grafik 1.13).

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mengingat ke depan, pertumbuhan ekonomi domestik, paling tidak dalam jangka pendek, akan lebih bertumpu permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan harga komoditas global yang melemah akan menurunkan *term of trade* ekspor Indonesia sehingga dapat menghambat upaya mendorong terus

³ Hal tersebut juga sejalan dengan studi oleh Cerra and Sweta C. Saxena (2017) yang menyimpulkan bahwa level perekonomian dunia tidak pernah kembali ke level tren sebelum terjadinya *shock*. Besaran dampak *shock* terhadap level perekonomian tergantung dari jenis *shock*-nya, di mana *currency crisis* dapat menurunkan ekonomi sebesar 5%, *BOP crisis* mendorong ekonomi turun 10%, dan *financial crisis* menyebabkan ekonomi turun 15%.

berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional (Grafik 1.14). Kinerja eksternal yang melemah dan tren pertumbuhan simpanan perbankan yang menurun akan menghambat peningkatan konsumsi sebagai sumber permintaan domestik. Oleh karena itu, perlu memperluas sumber pertumbuhan ekonomi domestik ke sektor-sektor yang mempunyai *forward-backward linkage* yang tinggi dan juga mampu menyerap tenaga kerja yang besar, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional yang lebih kuat. Untuk itu, dukungan sinergi kebijakan nasional harus terus dilanjutkan dan diperkuat, termasuk sinergi kebijakan fiskal-moneter dan fiskal-makroprudensial, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan, sembari terus melanjutkan reformasi ekonomi untuk terus meningkatkan daya saing ekonomi dari sisi penawaran.

Grafik 1. 11 Ekonomi Domestik Pra dan Pascapandemi Covid-19



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1. 12 Pertumbuhan Sektor dan Contact-Intensive Sector

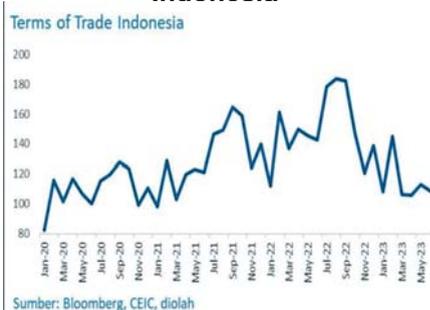


*) *contact-intensive sector* : Perdagangan, transportasi dan pergudangan, akomodasi makan minum, Pariwisata (akomodasi/restoran), transportasi, dan perdagangan.
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1. 13 Dampak Contact-Intensive Sector pada Sektor



Grafik 1. 14 Term of Trade Indonesia



1.2.2 Stabilitas Nilai Tukar Terjaga Ditopang Ketahanan Eksternal yang Kuat

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan II 2023 tetap terjaga di tengah kondisi ketidakpastian global. Defisit transaksi berjalan

tercatat rendah di tengah kondisi penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global serta kenaikan permintaan domestik. Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat defisit yang masih terkendali seiring dampak tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Dengan perkembangan tersebut, NPI pada triwulan II 2023 mencatat defisit 7,4 miliar dolar AS dan posisi cadangan devisa pada akhir Juni tercatat tetap tinggi sebesar 137,5 miliar dolar AS, atau setara dengan pembiayaan 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Transaksi berjalan mencatat defisit rendah di tengah kondisi penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global serta berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik. Pada triwulan II 2023, transaksi berjalan mencatat defisit 1,9 miliar dolar AS (0,5% dari PDB), setelah membukukan surplus 3,0 miliar dolar AS (0,9% dari PDB) pada triwulan sebelumnya. Surplus neraca perdagangan nonmigas masih tinggi meski lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi ekspor nonmigas yang menurun sejalan dengan penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global, sedangkan impor menurun terbatas di tengah kondisi membaiknya aktivitas ekonomi domestik. Defisit neraca perdagangan migas meningkat dipengaruhi tingginya konsumsi BBM sebagai dampak naiknya mobilitas dan kebutuhan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Lebih lanjut, defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer juga lebih tinggi sejalan dengan peningkatan ekonomi domestik dan pola pembayaran dividen pada triwulan II 2023.

Ke depan, NPI pada 2023 diperkirakan tetap baik dengan transaksi berjalan terjaga dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB. Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan juga terjaga, ditopang oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan investasi portofolio, sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional.

Tabel 1. 2 Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulan II 2023

ITEMS	2021	2022*					2023	
	Total	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Total	Tw.I*	Tw.II**
Transaksi Berjalan	3.511	552	3.848,78	4.547	3.723	12.670	2.982	-1.933
A. Barang¹⁾	43.806	11.301	16.796,97	17.623	16.951	62.672	14.701	10.352
- Ekspor	232.835	66.770	75.173,53	77.836	72.759	292.538	67.320	61.977
- Impor	-189.029	-55.468	-58.376,57	-60.213	-55.808	-229.866	-52.619	-51.625
a. Nonmigas	57.804	17.210	24.444,51	25.160	22.958	89.773	19.013	15.164
b. Migas	-12.965	-5.694	-7.186,98	-6.481	-5.415	-24.777	-3.976	-4.327
B. Jasa - jasa	-14.599	-4.376	-5.021,11	-5.408	-5.532	-20.337	-4.581	-4.655
C. Pendapatan Primer	-31.961	-7.868	-9.450,20	-9.077	-9.628	-36.023	-8.608	-9.146
D. Pendapatan Sekunder	6.264	1.494	1.523,12	1.410	1.931	6.358	1.469	1.515
Transaksi Modal dan Finansial	12.572	-1.854	-1.329	-5.377	686	-7.874	3.685	-4.964
1. Investasi Langsung	17.286	4.633	3.386	3.346	3.451	14.816	3.861	3.309
2. Investasi Portofolio	5.086	-3.182	-449	-1.121	-1.717	-8.469	3.030	-2.587
3. Investasi Lainnya	-9.880	-3.306	-4.268	-5.605	-1.494	-14.672	-3.207	-5.692
Neraca Keseluruhan (IV + V)	16.083	-1.302	2.520	-830	4.408	4.796	6.667	-6.897
Memorandum:								
- Posisi Cadangan Devisa	144.905	139.129	136.379	130.782	137.233	137.233	145.189	137.541
- Dalam Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri	7,8	7,0	6,4	5,7	5,9	5,9	6,2	6,0
- Transaksi Berjalan (% PDB)	0,30	0,18	1,14	1,34	1,13	0,96	0,90	-0,55
* Angka - angka sementara								
** Angka - angka sangat sementara								

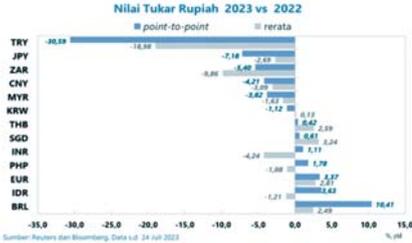
Sumber: Bank Indonesia

Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah sangat kuatnya dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Seperti telah dikemukakan di atas, kenaikan FFR yang agresif, dolar AS yang sangat kuat, dan tingginya persepsi risiko investor global (“*cash is the king*”) menyebabkan aliran keluar investasi portofolio dan tekanan pelemahan nilai tukar negara-negara EMEs, termasuk Indonesia. Untuk memitigasi dampak rambatan gejolak global ini, Bank Indonesia memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan intervensi di pasar valuta asing dalam jumlah besar, baik secara *spot* maupun *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), di samping transaksi SBN di pasar sekunder untuk menjaga imbal hasil SBN tetap menarik bagi investor portofolio asing. Stabilisasi Rupiah sangat penting untuk menghindarkan Indonesia dari krisis dari dampak gejolak global, yaitu agar tidak berdampak pada kenaikan harga-harga impor (*imported inflation*), sehingga mendukung upaya pengendalian inflasi, maupun agar stabilitas moneter, sistem keuangan, dan stabilitas makroekonomi terjaga.

Kinerja nilai tukar Rupiah lebih baik dibandingkan dengan negara *peers*. Pada 2022, sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global, indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) mencapai tertinggi 114,11 pada tanggal 27 September 2022 dan tercatat 103,49 pada akhir Desember 2022 atau mengalami penguatan sebesar 8,18% (ytd) selama tahun 2022. Di tengah penguatan DXY tersebut, dengan dukungan kebijakan stabilisasi nilai tukar oleh Bank Indonesia, Rupiah sampai dengan akhir 2022 hanya terdepresiasi 8,45%, tidak banyak berbeda dengan penguatan

DXY dan relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya. Kinerja positif tersebut berlanjut pada 2023, tercermin pada nilai tukar Rupiah yang secara *year to date* sampai dengan bulan Juni menguat 3,63% ptp dari level akhir Desember 2022, lebih kuat dibandingkan dengan apresiasi Peso Filipina, Rupee India, dan Baht Thailand masing-masing sebesar 1,78%, 1,11%, dan 0,42% (Grafik 1.15). Ke depan, dengan akan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global, nilai tukar Rupiah akan menguat ditopang oleh prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi yang rendah, imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik, dan dampak positif dari implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor SumberDaya Alam (DHE SDA) (Grafik 1.16).

Grafik 1. 15 Pergerakan Rupiah vs Negara Lain



Grafik 1. 16 Risk Adjusted Return (RAR)

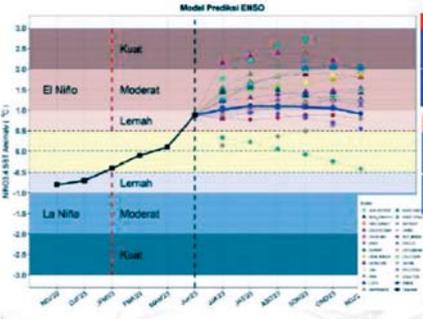


Dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan eksternal Indonesia perlu diwaspadai. Setidaknya terdapat 2 (dua) *channel* transmisi perkembangan ekonomi global dalam memengaruhi ekonomi Indonesia. *Pertama* terkait *financial channel*, di mana ketidakpastian ekonomi global, termasuk risiko peningkatan inflasi global, akan memicu perilaku *risk-off* investor asing dalam keputusan alokasi investasi dan menyebabkan kebijakan suku bunga tinggi di negara maju bertahan lebih lama. Dalam kaitan ini, aliran modal ke negara berkembang akan menjadi terbatas sehingga menurunkan kinerja neraca transaksi modal dan finansial. *Kedua*, *trade channel*, di mana pelemahan ekonomi global tidak hanya akan menurunkan permintaan ekspor namun juga harga komoditas ekspor, sehingga dapat melemahkan kinerja neraca transaksi berjalan Indonesia. *Ketiga*, *channel* tersebut pada akhirnya akan menyebabkan dukungan neraca pembayaran terhadap stabilitas eksternal melemah dan berpotensi memberikan tekanan depresiasi nilai tukar Rupiah, kenaikan *yield* surat berharga domestik, dan *imported inflation*.

Risiko inflasi ke depan tetap perlu diwaspadai. Risiko inflasi ke depan yang perlu diwaspadai terutama bersumber dari harga pangan. Terkait harga pangan, setidaknya terdapat 2 (dua) faktor yang dapat mendorong peningkatan harga pangan, yakni risiko El-Nino dan ketegangan geopolitik terkait perang di Ukraina. Pengalaman historis menunjukkan bahwa periode El-Nino selalu diikuti oleh kenaikan inflasi *volatile food* sebagai dampak dari musim kering yang lebih panjang terhadap kualitas panen komoditas beras dan berbagai tanaman hortikultura. Oleh karena itu, meski El-Nino 2023 di Indonesia intensitasnya diperkirakan lemah, namun fenomena El-Nino yang juga terjadi di berbagai negara lain, khususnya penghasil komoditas pangan termasuk India sebagai negara penghasil beras utama dunia, dapat memicu munculnya kembali respons proteksionisme pangan, sehingga menambah tekanan pada harga pangan dunia (Grafik 1.19).

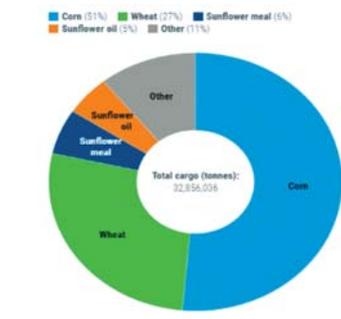
Risiko kenaikan harga pangan global juga terkait dengan ketegangan geopolitik. Setelah pada 2022, tekanan terhadap harga beberapa komoditas pangan mereda sejalan dengan dicapainya kesepakatan *Black Sea Grain Initiative* yang memungkinkan Ukraina tetap melakukan ekspor produk-produk pangan utamanya, termasuk gandum, biji matahari, dan jagung. Namun demikian, keputusan Rusia untuk menghentikan kesepakatan *Black Sea Grain Initiative* pada Juli 2023 menimbulkan risiko turunnya pasokan dunia atas berbagai komoditas dimaksud yang dapat mendorong kenaikan harga. Hal ini mengingat Ukraina merupakan salah satu pemasok utama beberapa komoditas pangan dunia tersebut di mana ekspornya dilakukan melalui laut hitam (Grafik 1.20). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya penguatan ketahanan pangan di Indonesia, baik dalam jangka pendek, termasuk melalui penguatan cadangan pangan strategis tertentu dan diversifikasi sumber impor bahan pangan, maupun dalam jangka panjang termasuk melalui peningkatan produktivitas pertanian.

Grafik 1. 19 Perkiraan El Nino tahun 2023



Sumber: BMKG, diolah

Grafik 1. 20 Ekspor Ukraina diangkut melalui Laut Hitam

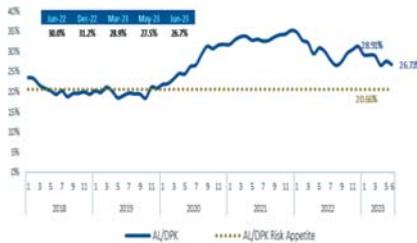


Sumber: United Nations

1.2.4 Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga dengan Ketahanan yang Baik

Kondisi likuiditas perbankan tetap longgar. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap tinggi, yaitu mencapai 31,20% pada akhir 2022 dan 26,7% pada Juni 2023, jauh di atas rata-rata AL/DPK sebelum pandemi Covid-19 yang sekitar 20% (Grafik 1.21). Terjaganya kondisi likuiditas perbankan dimaksud tidak terlepas dari kebijakan likuiditas longgar yang ditempuh Bank Indonesia untuk mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit dan pembelian SBN di pasar primer untuk pembiayaan APBN. Sementara itu, likuiditas perekonomian, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2,) tetap tumbuh masing-masing sebesar 9,5% (yoy) dan 8,3% (yoy). Longgarnya likuiditas perbankan berdampak positif terhadap perkembangan suku bunga perbankan di tengah kenaikan BI7DRR sebesar 225 bps pada periode Agustus 2022- Januari 2023. Di pasar uang, suku bunga IndONIA masih cukup rendah yakni 5,61% pada pertengahan Juli 2023, sedangkan imbal hasil SBN tenor jangka panjang tercatat 6,22%. Di perbankan, suku bunga deposito dan kredit juga terjaga rendah, masing-masing sebesar 4,14% dan 9,34% pada Juni 2023 atau hanya meningkat 124 bps dan 40 bps sebagaimana terlihat pada Grafik 1.22.

Grafik 1. 21 Perkembangan Rasio AL/DPK



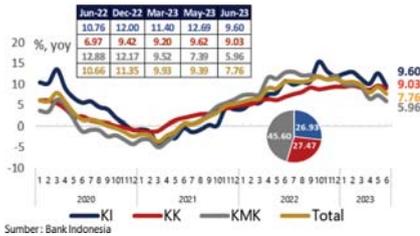
Grafik 1. 22 Suku Bunga Perbankan



Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan mulai melambat karena penurunan permintaan kredit dari dunia usaha. Setelah menunjukkan kinerja yang positif pada tahun 2022 di mana kredit tumbuh 11,35% (yoy), ditopang oleh peningkatan di seluruh jenis kredit dan seluruh sektor ekonomi, pertumbuhan kredit mulai melambat pada 2023 (Grafik 1.23). Di tengah tetap longgarnya sisi penawaran pada tahun 2023, seperti yang tercermin pada kondisi likuiditas dan standar penyaluran kredit yang longgar, permintaan kredit melambat akibat perilaku korporasi yang cenderung mempercepat pelunasan kredit dan berperilaku *wait and see* dalam meningkatkan rencana investasinya ke depan. Sejalan dengan perkembangan tersebut,

pertumbuhan kredit melambat menjadi 7,76% (yoy) pada Juni 2023 (Grafik 1.24) dan diperkirakan mencapai 9-11% untuk keseluruhan tahun 2023.

Grafik 1. 23 Indeks Lending Standard



Grafik 1. 24 Kredit Per Jenis Penggunaan



Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, tetap terjaga baik dari sisi permodalan, risiko kredit, maupun likuiditas. Permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio, CAR*) tetap tinggi yaitu sebesar 25,63% pada Desember 2022 dan 26,07% pada Mei 2023. Tetap kuatnya CAR perbankan dimaksud sejalan dengan semakin naiknya komponen modal dari akumulasi keuntungan maupun aktiva tertimbang menurut risiko (*ATMR*) dengan terkendalinya risiko kredit. Seiring dengan permodalan yang kuat, risiko kredit tetap terkendali yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan, NPL*) yang tetap rendah yakni sebesar 2,52% (bruto) dan 0,77% (neto) pada Mei 2023.

Terjaganya ketahanan sistem keuangan Indonesia dimaksud juga dikonfirmasi oleh hasil *Global Bank Stress Test* oleh IMF yang menunjukkan dalam skenario ekonomi yang memburuk, stabilitas sistem keuangan Indonesia dapat tetap terjaga baik sejalan dengan *buffer* permodalan dan likuiditas perbankan yang dimiliki yang diperkirakan akan mampu menyerap risiko yang muncul.⁴

Tantangan yang dihadapi perbankan di Indonesia adalah suku bunga kredit yang tinggi. Dalam hal ini, *Net Interest Margin (NIM)* Indonesia mencapai 4,80% per Juni 2023, tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara di bawah Kamboja. Tingginya NIM di Indonesia juga menjadi salah satu faktor dari tingginya ongkos usaha atau ekonomi di Indonesia. Bunga yang terlalu besar ini juga dikhawatirkan dapat menekan dunia usaha, khususnya di level Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Maka dari itu, diperlukan penyesuaian kembali terutama untuk pembiayaan sektor-sektor yang memberikan daya ungkit bagi pemulihan dan kebangkitan ekonomi Indonesia ke depannya.

⁴ Sumber dari *Article IV Consultation* oleh International Monetary Fund (IMF) tahun 2023.

Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) juga terus menunjukkan perkembangan yang baik. Pendapatan premi asuransi komersial selama periode Januari-Maret 2023 mencapai Rp78,50 triliun. Sementara itu, nilai *outstanding* piutang pembiayaan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp435,53 triliun (tumbuh 16,35% yoy) didorong oleh pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing tumbuh 34,25% dan 19,14%. Selanjutnya, profil risiko Lembaga Pembiayaan tetap terjaga dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang stabil pada level 2,37%. Sektor dana pensiun tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 4,74% yoy dengan nilai aset mencapai Rp350,08 triliun. Permodalan di sektor IKNB juga terjaga dengan *Risk Based Capital* (RBC) asuransi jiwa dan asuransi umum dan reasuransi mencapai 460,06% dan 315,79%, berada di atas *threshold* 120%. Selain itu, *gearing ratio* perusahaan pembiayaan juga berada pada level 2,11 kali, jauh lebih rendah dari batas maksimum 10 kali.

Ke depan, upaya mendorong intermediasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan tetap perlu diperkuat. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan ketidakpastian pasar keuangan global perlu diantisipasi dengan baik karena dapat memberikan tekanan terhadap fungsi intermediasi dan stabilitas sistem keuangan (SSK) sejalan dengan naiknya risiko likuiditas dan risiko pasar perbankan Indonesia.

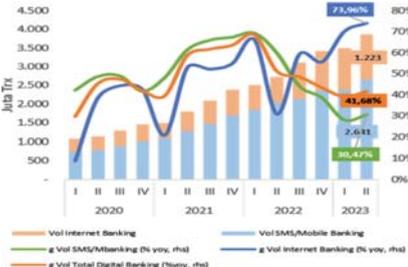
Berbagai langkah penguatan kebijakan dalam mendorong intermediasi perbankan guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dirasa sangat tepat. Termasuk, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) Bank Indonesia, yang difokuskan pada sektor-sektor yang mempunyai daya ungkit tinggi pada pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja serta dukungan fiskal untuk meningkatkan permintaan domestik, antara lain berupa kebijakan mendorong sektor perumahan. Mempertimbangkan adanya keterkaitan antarotoritas sektor keuangan dalam upaya dimaksud, sinergi kebijakan melalui KSSK perlu terus dilakukan dan bahkan diperkuat, sehingga intermediasi akan meningkat dengan stabilitas yang tetap terjaga.

1.2.5 Ekonomi dan Keuangan Digital di Indonesia Meningkat Pesat

Transaksi ekonomi dan keuangan digital terus meningkat dalam mendukung pemulihan. Pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan digital (EKD) tersebut juga ditopang oleh meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital yang terus didorong oleh Bank Indonesia, serta akselerasi *digital banking*. Nilai transaksi uang elektronik (UE) pada tahun 2022 tumbuh 36,0% (yoy) mencapai Rp399,6 triliun, sedangkan nilai transaksi *digital*

banking meningkat 28,7% (yoy) menjadi Rp52.546 triliun. Penggunaan UE dan *digital banking* terus meningkat pada 2023 seperti terlihat pada Grafik 1.25. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran tersebut juga telah mendorong transaksi *e-commerce* berkembang pesat hingga tumbuh 18,5% mencapai Rp475 triliun selama tahun 2022 dan terus meningkat sampai dengan Juni 2023. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh *e-commerce*, sehingga preferensi masyarakat dalam menggunakan *e-commerce* untuk kebutuhan konsumsinya juga tetap tinggi (Grafik 1.26). Ke depan, transaksi ekonomi dan keuangan digital akan terus berlanjut antara lain akibat semakin besarnya akseptasi dan preferensi masyarakat atas transaksi nontunai dan semakin lengkapnya kemudahan sistem pembayaran digital. Namun demikian, berbagai tantangan dan risiko digital (*digital fraud*) yang ada perlu terus diwaspadai karena dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital, sehingga menghambat pengembangan ekonomi dan keuangan digital itu sendiri.

Grafik 1. 25 Volume Mobile dan Internet Banking



Grafik 1. 26 Rasio E-commerce terhadap Konsumsi Rumah Tangga



Perkembangan dan prospek ekonomi Indonesia yang baik mendapat pengakuan dari dunia internasional. Hal ini tercermin dari asesmen 3 (tiga) lembaga *rating* utama yakni Standard and Poor's (S&P), Moody's, dan Fitch yang mempertahankan *sovereign credit rating* Republik Indonesia tetap pada level *investment grade* di saat berbagai negara mengalami penurunan *rating*. Bahkan, R&I pada Juli 2023 meningkatkan *outlook* Republik Indonesia dari stabil menjadi positif dan mempertahankan Peringkat Republik Indonesia pada BBB+. Persepsi positif dunia internasional tersebut mencerminkan keyakinan kuat pemangku kebijakan internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global yang meningkat.

Selain itu, hal ini juga menunjukkan kepercayaan dunia internasional atas efektivitas pengelolaan ekonomi makro. Oleh karena itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi cukup baik, inflasi rendah dan defisit fiskal yang kembali ke dalam target lebih cepat dari perkiraan awal, stabilitas sistem keuangan yang terjaga, serta menurunnya rasio utang pemerintah. Meski demikian, masih besarnya tantangan ekonomi ke depan tetap mengharuskan pemangku kebijakan untuk terus bersinergi dalam mendorong pemulihan dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1.3 Tiga Pelajaran Penting dari Perspektif Kebijakan untuk Pemulihan

Setiap krisis ataupun periode-periode yang berat dalam perekonomian sesungguhnya adalah kesempatan yang baik untuk belajar. Dalam perjalanan sejarah, banyak krisis ekonomi yang melahirkan teori atau pemikiran ekonomi baru dengan tujuan mempersiapkan para pemangku kepentingan serta pemikir ekonomi memiliki antisipasi yang lebih baik guna menghindari potensi risiko yang lebih besar di masa mendatang. Krisis dari pandemi, bagaimanapun juga merupakan krisis yang membawa dampak terparah bagi perekonomian setelah fenomena *Great Depression* dengan implikasi negatif yang merata baik di negara maju maupun negara berkembang di dunia.

Risiko hari ini merupakan akumulasi dari 3 tahun upaya negara-negara di dunia bertahan dari pandemi, serta respons kebijakan yang ditempuh secara agresif untuk dapat pulih di tengah peningkatan *inward looking policy* serta tensi geopolitik yang kemudian menyebabkan pemulihan di sebagian negara berjalan lebih lambat daripada ekspektasi. Meski demikian, stimulus fiskal dan moneter yang dilakukan sebelumnya dalam besaran yang luar biasa oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, kini telah menampakkan hasil. Beberapa *leading indicator* dari sisi kepercayaan pelaku ekonomi terhadap perekonomian serta konsumsi jasa mulai membaik dibandingkan kondisi pandemi, hal ini tidak terlepas dari dinamika perdagangan global yang mulai pulih didukung *re-opening* ekonomi di beberapa negara utama secara bertahap. Upaya untuk mengoptimalkan momentum perbaikan perlu terus ditempuh dengan senantiasa memperhatikan arah perubahan lingkungan strategis yang terjadi secara global maupun domestik setelah melewati krisis pandemi lalu. Perubahan lingkungan strategis tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek, antara lain:

1) Fragmentasi geoekonomi global

Fragmentasi pasar keuangan, geopolitik, dan perdagangan kembali menimbulkan risiko divergensi arah pemulihan ekonomi di beberapa negara utama. Prospek pemulihan ekonomi global tertahan di tengah fenomena suku bunga kebijakan di beberapa negara utama yang tetap tinggi serta diiringi perbedaan laju penurunan inflasi antara negara maju dan berkembang. Sementara itu, pemberlakuan kebijakan restriksi atau pembatasan ekspor komponen semikonduktor dan *chip* oleh AS dan Jepang ke China dikhawatirkan akan memicu ketimpangan baru dari sisi kemajuan teknologi antara negara maju dan berkembang (*technology decoupling*). Berbagai isu tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan tekanan bagi negara terkait dari sisi eksternal, tetapi juga dari sisi internal di tengah kapasitas kebijakan fiskal yang semakin terbatas dalam merespons berbagai risiko.

Di sisi lain, fragmentasi geoekonomi global turut menimbulkan tantangan serius bagi kerja sama internasional serta upaya untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Kaitannya dengan hal ini, regulator perlu kembali memperkuat fondasi hubungan kerja sama internasional yang selama ini dibangun dalam 3 aspek, yakni diplomasi ekonomi, kerja sama dan transparansi kebijakan, serta reformasi peran organisasi internasional. Hal ini sekaligus mempertimbangkan kompleksitas tantangan yang dihadapi pada isu-isu global, sehingga upaya kolaboratif antara negara dan lembaga internasional perlu ditempuh dengan menjaga dialog terbuka, meningkatkan transparansi, dan kerja sama dalam kerangka yang lebih luas serta saling menguntungkan (resiprokal).

2) Akselerasi Teknologi dan Informasi

Teknologi telah menjadi '*game changer*' pada proses pemulihan. Adaptasi masyarakat meningkat signifikan selama pandemi. Transformasi ekonomi digital berbasis inovasi dan adopsi teknologi digital menjadi semakin urgen untuk menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas tantangan global-domestik saat ini dan sekaligus mengawal optimisme bertransisi menuju negara maju yang kompetitif dan inklusif di jangka menengah-panjang. Pengaruh teknologi digital dalam dunia ekonomi juga meluas ke dunia finansial, melalui berbagai inovasi yang sering disebut *financial technology* atau disingkat *fintech*. *Fintech* satu sisi telah membawa bentuk baru intermediasi keuangan dengan berbagai kemudahan dan manfaat pada perekonomian. *Fintech* memberikan ruang lebih besar kepada pelaku ekonomi untuk mengakses sumber keuangan yang lebih optimal. Namun, sisi lain *fintech* juga memiliki risiko yang bila tidak direspons dengan baik

dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Peran teknologi keuangan dalam perekonomian perlu terus diperkuat, dengan tetap mewaspadai dan memitigasi risiko yang ditimbulkannya. Tidak dapat dipungkiri, selain manfaat yang besar digitalisasi juga membawa konsekuensi risiko, antara lain *shadow banking*, *cybersecurity*, proteksi data, dan risiko operasional yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan. Tantangan semakin meningkat di tengah kebutuhan membangun integrasi sistem pembayaran antar negara di kawasan, khususnya ASEAN. Bank for International Settlement (BIS) menyebutkan kesiapan untuk membangun integrasi keuangan tersebut tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga perhitungan yang cermat terhadap dampak moneter yang dihasilkan pada masing-masing otoritas, serta aspek legal.

Dalam upaya penguatan peran ekonomi dan keuangan digital, kebijakan yang ditempuh oleh otoritas perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (i) Diperlukan *interlink* yang kuat antara keuangan digital dan ekonomi digital agar tercipta ekosistem yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan perekonomian secara keseluruhan; (ii) Perbankan perlu didorong untuk bertransformasi digital secara *end-to-end*; (iii) Kolaborasi antara bank dan *fintech* perlu diperkuat dan diperluas; (iv) Penguatan regulasi, *entry-policy*, pelaporan dan pengawasan yang selaras dengan tuntutan era digital; (v) Keterbukaan ekonomi perlu memperhatikan prinsip *national interest*; dan (vi) Perluasan akseptasi digital perlu terus didorong.

3) Perubahan Iklim

Dampak luar biasa yang ditimbulkan dari krisis pandemi mendorong mayoritas negara untuk kembali memperkuat komitmen dalam pengurangan emisi karbon. Perubahan iklim dapat berdampak sangat signifikan, baik terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, maupun terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi stabilitas makroekonomi, perubahan iklim menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem yang dapat mengganggu sisi suplai (*physical risk*) terutama produk-produk pangan, sehingga menimbulkan tantangan terhadap pencapaian target inflasi oleh bank sentral. Di samping itu, dampak *transition risk* dari respons kebijakan yang mendukung ekonomi hijau, seperti *carbon tax*, juga berpotensi menambah tekanan terhadap harga barang *output*.

Dari sisi stabilitas sistem keuangan, transisi dalam memitigasi perubahan iklim global perlu dilihat dari dua arah, regulator maupun industri, agar kebijakan

yang dihasilkan senantiasa berimbang. Hal ini memperhatikan tantangan yang timbul bagi sistem keuangan di tengah tuntutan perubahan portofolio perbankan yang selama ini bergantung dari sektor penyumbang karbon. Hal yang serupa juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi yang berisiko tertekan baik dari sisi suplai maupun permintaan. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana memitigasi risiko perubahan iklim melalui kebijakan yang juga mampu mendorong produktivitas terutama di jangka pendek.

1.4 Penajaman Paradigma Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Menatap ke depan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan telah menjadi bagian dari agenda pembangunan global dan nasional dengan ke peserta serta dukungan lembaga internasional yang semakin luas. Dalam kondisi dunia yang mulai pulih, perlunya model pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi lebih mendesak daripada sebelumnya. Hal ini dilandasi fakta penting, bahwa untuk mengatasi ketimpangan yang semakin tinggi pascapandemi, maka pemulihan tidak dapat lagi hanya berfokus pada pencapaian angka pertumbuhan semata, namun juga memerlukan perbaikan kualitas agar manfaatnya bisa semakin merata dan dirasakan oleh banyak pihak.

Perubahan paradigma dalam pembangunan ekonomi adalah suatu keniscayaan. Apabila kita amati, dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi perubahan paradigma dalam ekonomi global yang cukup signifikan, di antaranya seperti perubahan paradigma neoklasik ke institusional, yang menekankan pada pentingnya keberadaan institusi dalam mempengaruhi perilaku ekonomi melalui aturan, norma, dan nilai-nilai sosial. Berikutnya, perubahan juga terjadi pada paradigma tentang globalisasi, di mana dalam pemahaman yang lama, pasar dianggap sebagai satu-satunya kekuatan utama yang mempengaruhi ekonomi global, di mana kinerja perdagangan murni dilandasi interaksi dari penawaran - permintaan. Namun, dalam paradigma baru, faktor-faktor seperti perdagangan bilateral, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan justru menjadi aspek utama yang dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan dalam mengelola kerja sama internasional serta agenda kemitraan lainnya.

Berlanjut ke era sekarang, paradigma pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat berjalan beriringan dan tidak menimbulkan kontradiksi. Diskursus mengenai topik ini sampai dengan hari ini pun masih terus berkembang guna mencari model implementasi terbaiknya pada perekonomian di tingkat daerah maupun pusat. Kaitannya dengan ini, fokus

kebijakan pemerintah dalam memacu digitalisasi, hilirisasi, dan ekonomi hijau perlu senantiasa diarahkan untuk mampu menjembatani konteks pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dimaksud.

1) Mendorong Transformasi Digital untuk Ekonomi yang Berkelanjutan

Ekonomi dan keuangan digital terus berkembang tidak hanya pada tingkat nasional namun juga pada tataran global. Peningkatan ketersediaan alat pembayaran digital dan naiknya akseptasi masyarakat dalam menggunakan teknologi digital telah menjadikan adopsi teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari menjadi suatu keniscayaan. Oleh karena itu, transformasi digital perlu didorong dengan memanfaatkan kebangkitan teknologi (*the rise of technology*) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, namun juga berkelanjutan dan inklusif. Transformasi digital dapat mendorong peningkatan produktivitas dan perluasan akses oleh pelaku ekonomi, terutama UMKM baik pada kegiatan produksi, distribusi, penjualan, dan pembiayaan serta layanan perbankan dan sistem pembayaran. Dengan demikian, transformasi digital tidak lagi hanya berhenti pada sektor keuangan, namun juga pada sektor riil melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas. Termasuk di dalamnya digitalisasi sisi produksi pada UMKM sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi di sisi hulu (budidaya) untuk meningkatkan produktivitas antara lain melalui *Internet of Things (IoT)*, maupun di sisi hilir (pemasaran) untuk efisiensi rantai distribusi komoditas pertanian.

2) Mengoptimalkan Manfaat Hilirisasi untuk Pemerataan dan Peningkatan Daya Saing

Kebijakan hilirisasi industri yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional. Indonesia juga bertekad menjadi pemain kunci global dalam industri hilirisasi berbasis komoditas dengan mengurangi ekspor bahan mentah dan meningkatkan hilirisasi industri berbasis SDA di dalam negeri, termasuk di antaranya adalah komoditas nonmineral melalui hilirisasi pangan yang secara umum akan melibatkan *interlinkage* UMKM di dalam proses bisnis. Meski demikian, transformasi ekonomi tidak selalu datang tanpa risiko, oleh karenanya langkah transformasi hilirisasi perlu dibangun dengan semangat kemandirian serta didukung upaya peningkatan kapasitas dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia agar hasilnya bisa dirasakan oleh banyak lapisan masyarakat, terutama melalui diversifikasi sektor ekonomi yang diperoleh dari skema *downstreaming* komoditas terkait sehingga dapat membantu penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan asli daerah.

3) Menempuh Transisi Ekonomi Hijau yang Seimbang, Adil dan Transparan

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, transisi menuju ekonomi hijau sangat penting dan mendesak untuk ditempuh dalam menjaga prospek pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meski demikian, upaya transisi tersebut tidak selalu mudah apalagi bila memperhatikan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah, industri, maupun sektor keuangan untuk menyesuaikan jenis *output* dan fasilitas pendukung dari suatu rantai produksi yang menjadi penyumbang emisi karbon. Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian terkait perlu mengoptimalkan perannya, melalui instrumen langsung yang dimiliki, untuk mengatasi perubahan iklim dan memfasilitasi transisi hijau yang adil dan terjangkau melalui insentif dan skema pembiayaan yang inovatif serta pengaturan pajak karbon. Keseluruhan skema tersebut akan diimplementasikan dengan memperhatikan iklim berusaha dan kondisi masyarakat agar dampaknya tidak hanya positif bagi lingkungan tetapi juga bagi kehidupan ekonomi dan sosial penduduk setempat. Catatan penting lainnya, adalah perlunya dikembangkan metodologi yang *accountable* dan dijalankan secara kolektif di tingkat global dalam memastikan komitmen terhadap upaya pengurangan jejak karbon tersebut dilaksanakan secara tepat sasaran baik dalam skala industri hingga rumah tangga.

BAB II

SINERGI DAN INOVASI BAURAN KEBIJAKAN NASIONAL MEMPERKUAT KETAHANAN DAN MENDORONG PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN

Sinergi dan inovasi bauran kebijakan ekonomi nasional perlu semakin ditingkatkan untuk memperkuat stabilitas dan mendorong momentum pemulihan menuju Indonesia Maju 2045. Bauran kebijakan nasional yang tersinergi menjadi semakin penting dalam menghadapi semakin tingginya ketidakpastian ekonomi global di tengah upaya pemulihan ekonomi yang tengah berjalan. Perkembangan geoekonomi yang semakin terfragmentasi, dengan segala konsekuensinya termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi global, tekanan inflasi global, dan ketidakpastian pasar keuangan global, menimbulkan berbagai risiko tekanan pada ekonomi domestik yang perlu diwaspadai. Di sisi keseimbangan internal, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan kenaikan inflasi dunia dapat mengganggu prospek pemulihan ekonomi dan stabilitas harga di dalam negeri. Di sisi keseimbangan eksternal, tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dapat menekan aliran masuk modal asing ke Indonesia dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Di samping itu, beberapa permasalahan struktural ekonomi Indonesia yang masih ada dapat meningkatkan kerentanan ekonomi domestik terhadap *shock*. Dengan kondisi tersebut, sinergi kebijakan ekonomi nasional, termasuk fiskal, moneter, makroprudensial, dan lainnya, perlu semakin ditingkatkan agar dapat saling memperkuat dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Inovasi kebijakan yang menggabungkan pendekatan *book-smart* dan *street-smart* juga perlu dikedepankan untuk menjawab berbagai tantangan, sehingga ekonomi Indonesia tetap melaju. Kebijakan yang berbasis *book-smart* dapat dilengkapi dengan *street-smart*, sehingga dapat lebih efektif dan efisien memenuhi kebutuhan perekonomian. Dalam kaitan ini, Pemerintah melanjutkan reformasi fiskal yang holistik melalui berbagai inovasi kebijakan fiskal baik di sisi kebijakan anggaran, seperti optimalisasi pendapatan, *better spending*, dan penguatan *fiscal buffer*, maupun non-anggaran. Sementara itu, Bank Indonesia juga melakukan setidaknya 5 (lima) inovasi kebijakan, yaitu penerbitan *Term Deposit* Valas DHE-SDA, Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, QRIS Tuntas, dan *Local Currency Transaction* (LCT).

Berbagai inovasi kebijakan dimaksud mampu memperkuat ketahanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya lebih tinggi namun juga berkualitas dan inklusif.

Ke depan, tantangan penguatan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional masih perlu menjadi prioritas kebijakan. Ketidakpastian ekonomi global yang masih tetap tinggi, baik karena permasalahan struktural akibat fragmentasi ekonomi maupun siklikal terkait arah kebijakan moneter bank sentral dunia. Hal tersebut menyiratkan tekanan terhadap ekonomi domestik di sisi ketahanan dan pertumbuhan masih perlu diwaspadai. Kebijakan fiskal perlu tetap menyeimbangkan fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi sehingga kondisi keuangan tetap sehat tanpa menghilangkan peran dukungan fiskal terhadap pertumbuhan dan stabilitas. Kebijakan moneter juga tetap diarahkan pada menjaga stabilitas, dengan derajat yang ditentukan oleh perkembangan perekonomian yang ada (*data-dependent*), sementara kebijakan Bank Indonesia lainnya dapat diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bauran kebijakan tersebut tentunya perlu memerhatikan perkembangan siklus ekonomi, siklus keuangan, dan siklus aliran modal asing. Kebijakan mikroprudensial dapat diarahkan untuk menjaga kesehatan industri keuangan, sehingga tetap berdaya dukung pada upaya memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Berbagai kebijakan jangka pendek tersebut perlu diperkuat dengan dilanjutkannya kebijakan reformasi sektor riil, termasuk hilirisasi, untuk memperkuat sisi penawaran ekonomi, sehingga Indonesia akan mampu tumbuh tinggi dan berkelanjutan dengan stabilitas perekonomian yang tetap terjaga. Dalam kaitan tersebut, berbagai kebijakan dimaksud harus dilakukan secara tersinergi, inovatif, dan konsisten, sehingga ekonomi Indonesia akan semakin melaju menuju Indonesia maju.

2.1. Strategi Bauran Kebijakan di Jangka Pendek

Bauran kebijakan nasional jangka pendek diarahkan pada upaya memperkuat stabilitas dan mendorong berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik. Indonesia sebagai negara terbuka tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat akan memengaruhi permintaan ekspor Indonesia yang pada gilirannya berdampak pada investasi dan konsumsi serta pertumbuhan ekonomi domestik secara keseluruhan. Di sisi lain, tingginya ketidakpastian ekonomi dunia berdampak pada semakin terbatasnya aliran masuk modal asing dan bertambahnya tekanan nilai tukar Rupiah, serta meningkatkan risiko *imported inflation* sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini. Tantangan tersebut perlu direspons dengan cepat dan tepat melalui sinergi bauran

kebijakan nasional, sehingga ekonomi Indonesia tetap dapat terus melaju menuju Indonesia Maju.

Koordinasi erat kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, serta kebijakan lainnya di sektor keuangan dan sektor riil diperkuat. Di sisi Pemerintah, kebijakan fiskal selama 2022 dan 2023 terus diarahkan sebagai *shock absorber* sembari menjaga momentum pemulihan ekonomi. Bank Indonesia terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas, sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, dan ekonomi keuangan yang inklusif dan hijau terus ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan mikroprudensial OJK juga diarahkan untuk menjaga ketahanan perbankan sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi melalui upaya peningkatan kredit pembiayaan yang berhati-hati. Koordinasi kebijakan baik secara bilateral antar institusi maupun secara multilateral melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus semakin diperkuat untuk memastikan interaksi antarkebijakan memberikan hasil yang optimal bagi terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

Sinergi bauran kebijakan nasional mampu menjaga kinerja ekonomi Indonesia di tengah kondisi global yang kurang kondusif. Stabilitas makroekonomi terjaga yang tercermin dari kembalinya inflasi ke dalam kisaran sasarannya sebesar $3\pm 1\%$ pada Juli 2023, lebih cepat dari perkiraan semula, neraca transaksi berjalan yang tetap terkendali, nilai tukar yang stabil, dan defisit fiskal juga telah kembali lebih rendah dari 3% PDB. Stabilitas sistem keuangan juga tetap baik dengan tingkat permodalan perbankan yang kuat dan rasio kredit yang rendah. Alat likuid perbankan tetap tinggi, sehingga mendukung perbaikan intermediasi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga cukup baik dan mampu tumbuh di atas 5%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang. Terjaganya kondisi ekonomi Indonesia tersebut sejalan dengan semakin eratnya sinergi bauran kebijakan nasional yang ditempuh oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan otoritas pemangku kebijakan lainnya.

2.1.1 Kebijakan Fiskal: Konsolidasi dengan Tetap Berdaya Dukung untuk Stabilitas dan Pertumbuhan

Di sisi fiskal, kebijakan terus diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan momentum pemulihan ekonomi nasional dengan tetap konsisten melanjutkan konsolidasi dan reformasi yang telah digariskan. Di tengah tingginya harga

komoditas dan risiko ketidakpastian global yang eskalatif, kebijakan fiskal pada tahun 2023 tetap diarahkan untuk waspada, antisipatif, dan responsif (Gambar 2.1). Untuk itu, konsisten dengan kebijakan fiskal tahun 2022, APBN tahun 2023 dirumuskan sebagai penyangga kejutan atau *shock absorber* agar dampak gejala global tidak menimbulkan ketidakstabilan makroekonomi dan mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional yang tengah berlangsung. Hal tersebut ditempuh dengan melakukan alokasi anggaran belanja yang diarahkan untuk: (i) Mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat; (ii) Menjaga momentum pemulihan seperti mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan; dan (iii) Menjaga belanja prioritas seperti penguatan produktivitas dan pondasi ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, Pemerintah menempuh optimalisasi belanja subsidi, dana kompensasi, perlindungan sosial, dan belanja prioritas, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan dukungan reformasi struktural. Pada saat yang sama, konsolidasi dan reformasi fiskal terus diperkuat untuk menjaga kesehatan APBN jangka menengah-panjang melalui penyiapan *buffer* untuk antisipasi ketidakpastian dan penguatan pondasi untuk konsolidasi dan keberlanjutan fiskal jangka menengah.

Gambar 2.1 Arah Kebijakan Fiskal 2023: *Shock Absorber* dan Konsolidasi

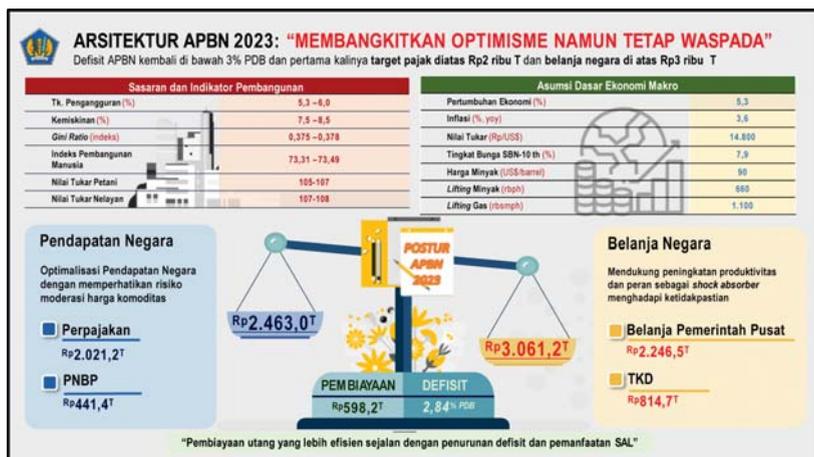


Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan arah kebijakan fiskal tersebut, arsitektur APBN tahun 2023 dirumuskan untuk memperkuat ketahanan dan membangkitkan optimisme pemulihan ekonomi nasional, namun tetap waspada dan antisipatif terhadap dampak gejala global. Konsolidasi fiskal dilakukan dengan menargetkan defisit APBN sebesar 2,84% dari PDB sebagai bentuk komitmen normalisasi kebijakan setelah selama 3 (tiga) tahun masa pandemi Covid-19 diperbolehkan lebih dari 3% PDB. Kebutuhan pembiayaan utang juga

menurun menjadi Rp696,4 triliun sejalan dengan penurunan defisit fiskal dan pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) dari tahun 2022 yang sebagian berasal dari pembelian SBN di pasar perdana oleh Bank Indonesia sesuai Kesepakatan Bersama III antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan UU No.2 Tahun 2020. Sebagai *shock absorber* terhadap tingginya harga energi dan pangan dunia, subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2023 dialokasikan sebesar Rp339,6 triliun, sehingga Pemerintah tidak lagi perlu menyesuaikan harga energi di dalam negeri dan karenanya mendukung terkendalinya inflasi dan daya beli masyarakat. Upaya menjaga daya beli masyarakat khususnya kelompok bawah juga diperkuat dengan mengalokasikan anggaran perlindungan sosial yang cukup besar mencapai sekitar Rp476 triliun. Untuk pengendalian inflasi khususnya dari harga pangan, Pemerintah mengalokasikan anggaran bidang ketahanan pangan dalam APBN 2023 sebesar Rp104,2 triliun untuk mendorong peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung transformasi ekonomi pendidikan (Rp612,2 triliun), infrastruktur (Rp392,1 triliun), dan kesehatan (Rp178,7 triliun).

Gambar 2. 2 APBN Tahun 2023: Optimis dan Waspada

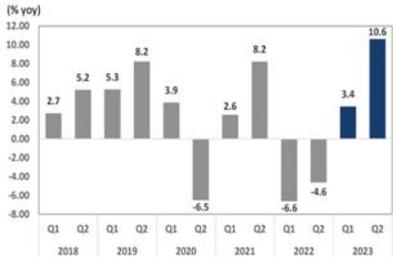


Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi fiskal semester I 2023 cukup baik di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. Di sisi pendapatan, meskipun mendapat tekanan dari penurunan harga komoditas global, realisasi penerimaan pada semester I 2023 masih kuat, mencapai sekitar 55% dari target APBN. Tetap kuatnya penerimaan tersebut didukung oleh penerimaan pajak, khususnya PPh Non migas, sejalan dengan konsistensi Pemerintah dalam menempuh reformasi perpajakan, baik melalui peningkatan tingkah kepatuhan maupun perluasan

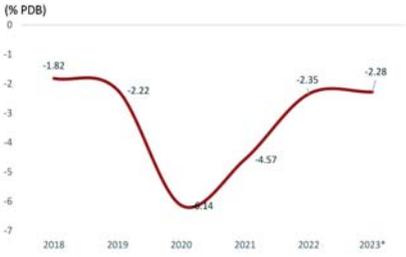
basis pajak. Selain itu, terus membaiknya aktivitas ekonomi domestik turut memperkuat penerimaan. Sementara itu, penerimaan PPh dan PNBP Migas serta penerimaan kepabeanaan mengalami kontraksi antara lain akibat penurunan harga minyak dunia dan CPO. Di sisi pengeluaran, realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang masing-masing mencapai sekitar 40% dan 45% dari target, masih dapat ditingkatkan pada semester II untuk memperkuat daya dukung APBN terhadap perekonomian yang pada semester I 2023 tumbuh 7,5% (yoy) (Grafik 2.1). Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN 2023 diperkirakan lebih rendah mencapai 2,28% pada 2023, sehingga juga berdampak pada menurunnya kebutuhan pembiayaan APBN terutama dari utang, selanjutnya mendukung sustainabilitas fiskal ke depannya (Grafik 2.2). Satu hal yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan upaya konsolidasi fiskal untuk menjaga sustainabilitas keuangan Pemerintah dengan menjaga peran APBN sebagai *buffer* sekaligus mendorong berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional di tengah perkembangan ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian.

Grafik 2.1 Konsumsi Pemerintah



Sumber: BPS

Grafik 2.2 Defisit APBN

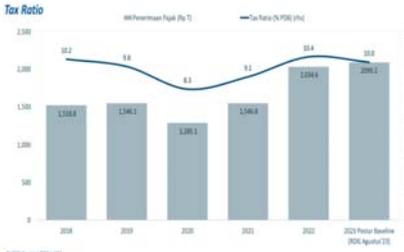


Sumber: Kementerian Keuangan

Ke depan, kebijakan fiskal perlu terus diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, peran kebijakan fiskal sebagai instrumen stabilisasi, alokasi, dan distribusi tetap dikedepankan. Dalam jangka pendek, kebijakan dapat diarahkan untuk mendukung stabilitas dan daya beli masyarakat utamanya kelas bawah serta mendorong berlanjutnya pemulihan ekonomi. Hal ini penting mengingat kondisi ekonomi global ke depan yang masih akan diliputi oleh ketidakpastian yang tinggi. Dalam jangka menengah-panjang, kebijakan fiskal perlu tetap diarahkan mendukung transformasi ekonomi baik melalui penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, maupun kelembagaan. Berbagai kebijakan jangka menengah-panjang tersebut, diharapkan akan meningkatkan produktivitas ekonomi, memperkuat nilai tambah produk-produk Indonesia, serta memperluas basis pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan hijau.

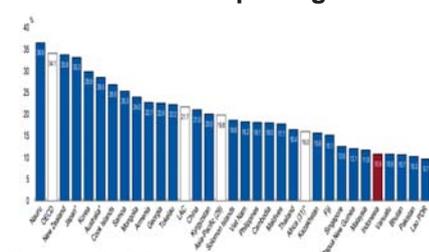
Upaya mempercepat transformasi ekonomi Indonesia perlu didukung oleh penguatan kebijakan fiskal baik disisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Dalam kaitan ini, setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, di sisi pendapatan negara, diperlukan upaya-upaya ekstra untuk memperkuat penerimaan pajak guna menaikkan *tax ratio* Indonesia (Grafik 2.3 dan Grafik 2.4), sehingga mampu mendukung belanja pemerintah dan sustainabilitas keuangan negara. Di sisi belanja, prioritas peningkatan kualitas belanja Pemerintah Pusat dan Daerah yang tepat waktu, mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, serta prioritas SDM dan infrastruktur perlu terus dilakukan. Di sisi pembiayaan, upaya pemenuhan kebutuhan fiskal melalui pembiayaan yang inovatif dan seimbang antara pembiayaan yang bersumber dari domestik dan luar negeri juga tetap perlu dikedepankan.

Grafik 2. 3 Perkembangan Tax Ratio



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2. 4 Perbandingan Tax Ratio Beberapa Negara



Sumber: OECD

2.1.2 Bauran Kebijakan Bank Indonesia untuk Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan

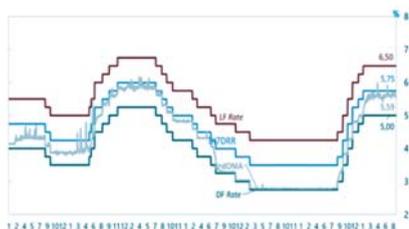
Kebijakan Pemerintah untuk melanjutkan subsidi fiskal dan anggaran ketahanan pangan disinergikan dengan kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi kembali ke kisaran sasaran. Dengan masih berlanjutnya tekanan terhadap stabilitas makroekonomi akibat ketidakpastian ekonomi global yang tinggi, arah bauran kebijakan Bank Indonesia sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional, tetap untuk menjaga stabilitas dan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, berlanjutnya subsidi fiskal dan anggaran ketahanan pangan dalam APBN 2023 akan mampu menyerap dampak tingginya harga energi dan pangan global terhadap inflasi domestik sehingga normalisasi kebijakan moneter Bank Indonesia tidak harus dilakukan secara sangat ketat.

Fokus normalisasi kebijakan moneter adalah untuk menurunkan tingkat inflasi dari dampak penyesuaian harga BBM pada tahun 2022 dan untuk

menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak kuatnya dolar AS akibat kenaikan suku bunga global. Untuk itu, Bank Indonesia secara terukur telah menempuh kebijakan kenaikan suku bunga secara *front-loaded, pre-emptive*, dan *forward looking* untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran $3\pm 1\%$ lebih awal, yaitu pada paruh pertama tahun 2023 dan menjaga inflasi 2024 tetap dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$. Dengan terkendalinya inflasi, daya beli masyarakat dapat tetap terjaga dan mendukung peningkatan konsumsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga terus menempuh kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari pengendalian inflasi (*imported inflation*) serta mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sebagai prasyarat pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, instrumen bauran kebijakan Bank Indonesia yaitu kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta inklusi ekonomi dan keuangan tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

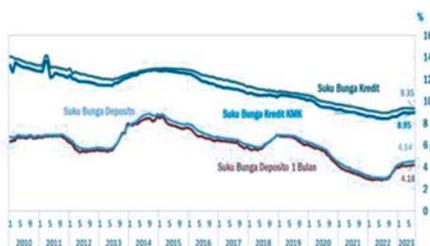
Pada aspek kebijakan moneter, suku bunga kebijakan BI *7-Days Reverse Repo* (BI7DRR) diarahkan untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan *imported inflation*. Hal ini tercermin pada kenaikan BI7DRR sejak 2022 sampai dengan 2023 sebesar 225 bps, di mana kenaikan terakhir dilakukan pada bulan Januari 2023. Dengan kenaikan tersebut, BI7DRR mencapai 5,75% dan dipertahankan pada level yang sama hingga saat ini (Grafik 2.5). Arah kebijakan suku bunga tersebut konsisten dengan *stance* kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran $3,0\pm 1\%$ pada sisa tahun 2023. Bank Indonesia juga terus memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Bank Indonesia juga melakukan normalisasi kebijakan likuiditas untuk menurunkan akses likuiditas perbankan yang sangat besar. Normalisasi kebijakan ditempuh dengan kenaikan giro wajib minimum (GWM) Rupiah pada 2022 secara bertahap, terukur dan sangat hati-hati, serta dikomunikasikan secara baik. Dengan kebijakan tersebut, akses likuiditas perbankan menurun, namun masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan level sebelum masa pandemi. Kondisi likuiditas perbankan yang longgar ini yang menyebabkan tingkat suku bunga perbankan relatif rendah di tengah kenaikan suku bunga BI7DRR sehingga mendukung upaya peningkatan intermediasi perbankan (Grafik 2.6). Jika di tinjau dari *Net Interest Margin* (NIM), ini masih menunjukkan tingkat yang tinggi di mana mencapai 4,80% pada Juni 2023, atau tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara setelah Kamboja. Tingginya NIM ini juga menjadi salah satu faktor dari tingginya ongkos usaha atau ekonomi di Indonesia.

Grafik 2. 5 Perkembangan Suku Bunga Kebijakan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2. 6 Suku Bunga Perbankan



Sumber: Bank Indonesia

Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah juga terus diperkuat untuk mengendalikan *imported inflation* dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Dalam kaitan ini, upaya dimaksud ditempuh antara lain melalui intervensi di pasar valas spot, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Bank Indonesia juga menempuh kebijakan *twist operation* melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN, sehingga mendorong aliran masuk modal asing. Untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia melakukan inovasi kebijakan dengan menerbitkan instrumen operasi moneter valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) berupa *term deposit* (TD) valas DHE sebagai instrumen penempatan DHE oleh eksportir melalui bank kepada Bank Indonesia. Kebijakan dimaksud juga merupakan bentuk sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah untuk memperkuat ketahanan eksternal. Di samping itu, inovasi kebijakan juga ditempuh dengan menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen operasi moneter yang *pro-market* untuk memperkuat pendalaman pasar uang, mendukung upaya menarik aliran masuk modal asing dalam bentuk portofolio, serta untuk optimalisasi aset SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebagai *underlying*.

Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar yang tersinergi dengan paket kebijakan terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Arah kebijakan makroprudensial longgar tersebut ditempuh mengingat siklus keuangan Indonesia yang masih berada di bawah optimalnya, sehingga upaya mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dapat dilakukan tanpa menimbulkan tekanan pada stabilitas sistem keuangan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia meningkatkan stimulus kebijakan makroprudensial melalui inovasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan: (i) Penajaman insentif likuiditas kepada bank-bank penyalur kredit pembiayaan pada sektor-sektor hilirisasi

(pertambangan, pertanian, perkebunan, dan perikanan), perumahan, pariwisata, serta meningkatkan inklusi keuangan (UMKM dan KUR) dan ekonomi-keuangan hijau; serta (ii) Peningkatan besaran insentif menjadi maksimal 4% dari sebelumnya 2,8%.

Penguatan kebijakan KLM tersebut sejalan dengan kebijakan makroprudensial longgar lain termasuk: (i) Mempertahankan rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) sebesar 0%, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%, serta rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) 6% (BUK) dan 4,5% (Syariah); (ii) Pelonggaran rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) Kredit Properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti, bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu dan pelonggaran ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru; dan (iii) Kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK).

Penguatan kebijakan sistem pembayaran terus dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, upaya meningkatkan layanan dan efisiensi transaksi sistem pembayaran digital serta perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) ditempuh dengan memperpanjang dukung sistem pembayaran terhadap permintaan domestik, khususnya konsumsi. Termasuk di dalamnya, kebijakan Kartu Kredit (KK) yang meliputi kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan maksimum sebesar 1% dari total tagihan dan dengan nilai denda tidak melebihi Rp100.000. Sementara itu, kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sampai dengan 31 Desember 2023 yang mencakup tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah, serta penyesuaian kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS bagi *merchant* usaha mikro yang bersifat progresif untuk mendukung usaha mikro.

Selain itu, Bank Indonesia juga terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital dan penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Upaya ini dilakukan antara lain melalui, pertama, perluasan 45 juta pengguna QRIS. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia melakukan inovasi QRIS dengan memperkuat fitur QRIS TUNTAS (Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai) yang memungkinkan penggunaan tidak hanya dapat menggunakan QRIS untuk pembayaran, namun juga melakukan transfer dana antarpengguna QRIS, serta tarik tunai, dan setor

tunai di ATM dan agen QRIS TUNTAS. Penguatan fitur tersebut diharapkan akan mampu mendorong inklusi melalui perluasan akses pembayaran digital kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, Bank Indonesia memperluas ke pesertaaan, kanal layanan, dan akseptasi BI-FAST kepada masyarakat. Ketiga, implementasi dan mendorong akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Keempat, implementasi inisiatif *Regional Payment Connectivity* (RPC) melalui pengembangan QRIS antarnegara antara lain Singapura, Jepang, India, dan Tiongkok serta implementasi *Fast Payment Interconnectivity*, sehingga semakin menumbuh kembangkan penggunaan QRIS. Berbagai penguatan kebijakan di sistem pembayaran tersebut akan dapat semakin mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital, dan penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berbagai kebijakan juga didukung oleh pendalaman pasar valas terhadap Rupiah dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah serta perluasan instrumen lindung nilai dan fasilitasi perdagangan-investasi antarnegara termasuk melalui inovasi kebijakan perluasan kerja sama penggunaan LCT. Kebijakan ini tidak hanya dilakukan dengan negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand, namun juga dengan Jepang dan Tiongkok. Perluasan kerja sama LCT juga tengah dilakukan dengan Singapura dan Korea Selatan untuk semakin mendorong akselerasi penggunaan LCT dengan negara mitra. Hasil kerja keras mengembangkan LCT telah terlihat pada total nilai transaksi LCT Indonesia dengan 4 negara mitra yang ada pada 2022 mencapai ekuivalen 4,1 miliar dolar AS, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2,5 miliar dolar AS) atau meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dari awal implementasi pada 2018 (348,5 juta dolar AS).

Bauran kebijakan Bank Indonesia dapat tetap diarahkan pada upaya memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Arah bauran tersebut tetap diperlukan mengingat ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi ke depan akan menghadirkan tantangan baik di sisi stabilitas maupun pertumbuhan ekonomi domestik. Dengan kondisi ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, kebijakan moneter dapat tetap fokus pada upaya memperkuat stabilitas agar inflasi tetap terkendali pada kisaran sasaran $3\pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5\pm 1\%$ pada 2024. Lebih rendahnya target inflasi tahun 2024 memerlukan implementasi kebijakan yang konsisten dengan dukungan sinergi kebijakan sehingga dampak

terhadap perekonomian secara keseluruhan menjadi lebih baik. Sementara itu, kebijakan Bank Indonesia lainnya, yaitu makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta keuangan inklusif dan hijau tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

2.1.3 Kebijakan Mikroprudensial untuk Memperkuat Ketahanan Sistem Keuangan dan Mendorong Pembiayaan

Upaya menjaga kondisi industri keuangan yang stabil dilaksanakan secara paralel dengan strategi memperkuat ketahanan serta dukungan industri keuangan bagi transformasi ekonomi nasional. Upaya tersebut sejalan dengan dinamika perekonomian global yang masih menyiratkan risiko stabilitas ketahanan sistem keuangan dan juga perlunya dukungan sistem keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kondisi tersebut, kebijakan bagi industri keuangan nasional saat ini diprioritaskan pada penguatan sektor jasa keuangan dan optimalisasi peran sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penguatan sektor jasa keuangan ditempuh baik pada sektor perbankan maupun pasar modal dan IKNB. Di sektor perbankan, kebijakan ke depan akan difokuskan pada penguatan permodalan dan konsolidasi, penguatan tata kelola industri, inovasi produk dan layanan serta peningkatan efisiensi perbankan. Pada pasar modal dan IKNB, serangkaian upaya peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas terkait pengelolaan investasi. Sementara itu, perusahaan pembiayaan akan didorong untuk dapat lebih mendiversifikasi sumber pendanaannya. Kebijakan penguatan industri jasa keuangan ini juga akan dilengkapi dengan kebijakan peningkatan perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat.

Optimalisasi peran sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diarahkan dengan mendorong pembiayaan yang lebih tinggi, sehat, dan inklusif. Optimalisasi peran tersebut tidak hanya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, namun juga menjalankan berbagai program peningkatan daya tarik investasi pasar keuangan domestik, termasuk dengan mendorong terciptanya institusi penyedia likuiditas, pengembangan infrastruktur dan produk derivatif di Bursa Efek Indonesia, serta mengoptimalkan penerapan prinsip *interoperability* antara pasar keuangan. Optimalisasi peran sektor keuangan juga akan ditempuh melalui percepatan perluasan akses keuangan kepada pelaku UMKM guna mendukung program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pembangunan nasional.

Berbagai kebijakan tersebut mampu mendorong fungsi intermediasi dan menjaga sistem keuangan Indonesia tetap resilien. Di sisi perbankan, kredit tumbuh 9,39% (yoy) menjadi Rp6.577 triliun didorong pertumbuhan kredit investasi sebesar 12,69% diikuti kualitas kredit yang terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,77% pada bulan Mei 2023. Kredit restrukturisasi Covid-19 juga mencatatkan penurunan, baik dari segi nominal maupun nasabah, yakni menjadi sebesar Rp372,07 triliun dan dengan jumlah nasabah sebanyak 1,64 juta nasabah. Kondisi likuiditas industri perbankan tetap memadai di tengah pertumbuhan DPK yang melambat. Hal ini tercermin pada rasio AL/NCD dan AL/DPK sebesar 123,27% dan 27,52%, jauh di atas ambang batas ketentuan yang masing-masing sebesar 50% dan 10%. Di sektor IKNB, kinerja yang solid tetap baik sebagaimana tercermin pada profil risiko perusahaan pembiayaan yang masih terjaga meski NPF meningkat sebesar 2,63%, diikuti nilai *outstanding* pertumbuhan piutang pembiayaan yang naik menjadi 16,38%, khususnya pembiayaan modal kerja dan investasi.

Berbagai kebijakan yang ditempuh Pemerintah, Bank Indonesia dan otoritas kebijakan terkait di atas diperkuat dengan sinergi kebijakan, sehingga meningkatkan efektivitasnya. Di sisi pengendalian inflasi, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah dengan Bank Indonesia terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Di samping itu, sinergi kebijakan pengendalian inflasi juga dilakukan melalui dukungan fiskal untuk subsidi dan ketahanan pangan dengan kebijakan moneter yang *pro-stability*. Di sisi pertumbuhan, sinergi kebijakan ditempuh baik secara bilateral antara kebijakan fiskal dengan makroprudensial longgar maupun multilateral melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diperkuat untuk mendorong kredit kepada dunia usaha khususnya pada khususnya pada sektor-sektor hilirisasi, serta meningkatkan inklusi keuangan (UMKM dan KUR) dan ekonomi-keuangan hijau. Di bidang internasional, sinergi antara Bank Indonesia dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023, khususnya melalui jalur keuangan, juga semakin dikedepankan.

2.2 Strategi Bauran Kebijakan di Jangka Panjang

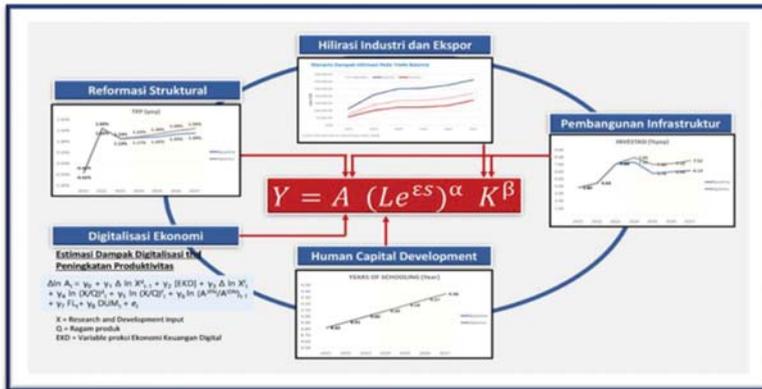
Sinergi kebijakan fiskal dan moneter difokuskan pada penguatan ketahanan dan momentum pemulihan ekonomi dari dampak gejolak global dalam jangka pendek, kebijakan transformasi perekonomian perlu ditingkatkan untuk memastikan berjalannya kebangkitan ekonomi nasional pada lintasan

menuju Indonesia Maju. Dalam kaitan ini, pendekatan *endogenous growth model* dapat diterapkan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, transformasi perekonomian diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi domestik dengan meningkatkan kapasitas perekonomian, sehingga berdaya tahan terhadap gejolak dan mampu tumbuh lebih tinggi tanpa memberikan tekanan pada stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Kebijakan transformasi untuk meningkatkan kapasitas ekonomi domestik perlu didesain secara holistik dan terintegrasi agar lebih efektif. Setidaknya terdapat 5 (lima) cakupan kebijakan struktural yang perlu dikedepankan, yaitu pembangunan infrastruktur, hilirisasi, reformasi struktural, digitalisasi ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia (Gambar 2.3). Pembangunan infrastruktur konektivitas fisik dan digital akan meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi baik dari sisi kenaikan modal, melalui pertumbuhan investasi, maupun produktivitas sejalan dengan perbaikan efisiensi dan daya saing. Hilirisasi pengolahan komoditas sumber daya alam (SDA) ke industri berbagai turunannya tidak hanya akan meningkatkan kapasitas penawaran ekonomi (*aggregate supply*) melalui kenaikan modal, namun juga mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan (*aggregate demand*) dengan kenaikan nilai tambah ekspor. Sementara itu, reformasi struktural untuk meningkatkan kemudahan investasi dan usaha, seperti penerapan UU Cipta Kerja, akan mendorong kapasitas ekonomi melalui kenaikan efisiensi dan produktivitas.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) memegang peranan yang sangat penting untuk terus ditingkatkan tidak hanya melalui pendidikan formal tetapi juga pelatihan vokasi serta pengembangan riset dan teknologi yang akan menghadirkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang berkualitas. Demikian pula, digitalisasi ekonomi dan keuangan yang juga akan meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian nasional, khususnya segmen transaksi ritel, sektor UMKM dan ekonomi kerakyatan. Keberhasilan kebijakan transformasi sektor riil sangat ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan kelima aspek penting tersebut untuk saling memperkuat sumber-sumber peningkatan kapasitas perekonomian nasional.

Gambar 2. 3 Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi: Pendekatan *Endogenous Growth Model*

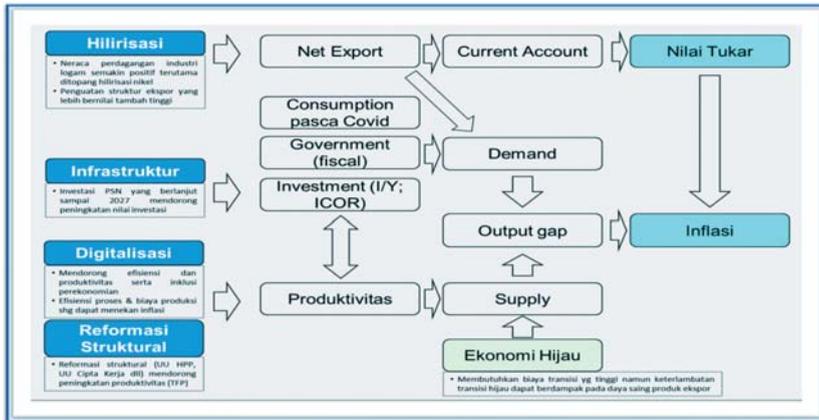


Sumber: Bank Indonesia

Kebijakan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, pengembangan SDM, dan digitalisasi yang didukung reformasi struktural untuk peningkatan kapasitas ekonomi akan mendukung stabilitas dan pencapaian pertumbuhan yang tinggi dalam jangka menengah. Seperti dijelaskan di atas, transformasi sektor riil berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Dari sisi penawaran agregat, kenaikan jumlah maupun produktivitas modal dan tenaga kerja akan meningkatkan kapasitas *output* nasional (Gambar 2.4). Dari sisi permintaan, kebijakan hilirisasi akan mendorong peningkatan ekspor lebih besar karena nilai tambah yang dihasilkan, di samping peningkatan investasi penanaman modal asing, selain yang berasal dari investasi untuk pembangunan infrastruktur.

Peningkatan kapasitas *output* potensial akan lebih besar dalam jangka menengah, sehingga mendorong pertumbuhan lebih tinggi dengan stabilitas yang semakin terjaga. Di sisi keseimbangan eksternal, ketahanan akan semakin kuat dengan kenaikan ekspor yang mendukung surplus transaksi berjalan dan kenaikan PMA yang mendukung surplus neraca modal dan finansial. Kondisi NPI akan lebih kuat sehingga berdampak positif terhadap perkembangan dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Di sisi keseimbangan internal, peningkatan kapasitas *output* potensial akan mendorong perbaikan kesenjangan *output* dalam memenuhi kenaikan permintaan sehingga mendukung terjaganya stabilitas harga dan terkendalinya inflasi pada tingkat yang menurun dan rendah. Prospek ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas makroekonomi yang terjaga inilah yang mencerminkan gambaran dari hasil positif dari kebijakan transformasi ekonomi dimaksud.

Gambar 2. 4 Peningkatan Kapasitas dan Kebangkitan Ekonomi Jangka Menengah



Sumber: Bank Indonesia

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi baik dari sisi kenaikan modal maupun produktivitas. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur sebaiknya diarahkan untuk memperkuat mata rantai pasokan nasional (*national supply chains*) dan mengintegrasikannya dengan mata rantai global yang terpolarisasi (*multipolar global supply chains*) sesuai dengan mitra strategis perdagangan dan investasi Indonesia. Lebih dari itu, pengembangan konektivitas infrastruktur perlu pula dilakukan untuk mendukung kebijakan hilirisasi industri dan ekspor atas SDA, yang pada umumnya merupakan industri pertambangan di Kawasan Timur Indonesia, serta industri pengolahan dan berbagai turunannya di wilayah Jawa. Strategi tersebut akan mampu semakin memperkuat mata rantai pasokan nasional. Demikian pula pengembangan konektivitas infrastruktur untuk mendukung kebijakan pengembangan pariwisata di 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas secara terintegrasi perlu terus diperkuat. Arah strategi kebijakan pembangunan konektivitas infrastruktur yang mendukung hilirisasi dan pariwisata seperti ini perlu tetap menjadi pertimbangan dalam implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) ke depan.

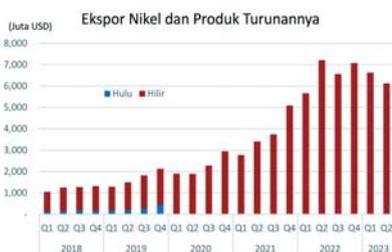
Grafik 2. 7 Proyek Strategis Nasional (PSN)



Sumber: KPIP, diolah

PSN akan memegang peran penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi domestik. Pembangunan infrastruktur PSN akan dapat menaikkan modal dan produktivitas sehingga mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa menimbulkan tekanan terhadap stabilitas perekonomian yang berarti, sebagaimana postulasi *endogenous growth model* yang telah diuraikan sebelum ini. Berdasarkan data KPIP, meskipun realisasi investasi infrastruktur pada tahun 2022 lebih rendah dari rencana pada tahun 2021, namun akan meningkat pada tahun 2023-2024 (Grafik 2.7). Berdasarkan perkiraan tersebut, pembangunan PSN akan dapat mendukung pertumbuhan investasi meningkat menjadi hampir 8% pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan skenario tanpa PSN yang hanya tumbuh sekitar 7,3%. Meskipun nilai investasi PSN kemudian akan mulai menurun, hasil positif dari investasi infrastruktur terhadap peningkatan produktivitas pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi, yang tercermin pada pertumbuhan investasi pada 2027, dengan pembangunan infrastruktur dapat mencapai 7,5% dibandingkan 6,1% tanpa investasi infrastruktur.

Grafik 2. 8 Ekspor Nikel



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2. 9 PDRB Sulampua



Sumber: Bank Indonesia

Kebijakan hilirisasi untuk pengembangan industri dan ekspor manufaktur berbasis SDA juga perlu terus diperluas dan ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Keberhasilan hilirisasi nikel menjadi baterai lithium dan industri otomotif listrik serta berbagai turunannya terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Pengolahan nikel tersebut mampu mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan agregat dan meningkatkan nilai tambah (*valued added*) ekspor, sehingga memperkuat transaksi berjalan yang lebih sehat. Dampak positif dari hilirisasi dapat dilihat pada tetap kuatnya kinerja ekspor produk turunan SDA meski harga komoditas mulai turun. Ekspor turunan nikel meningkat pesat dari 7 miliar dolar AS pada tahun 2018 menjadi 21,2 miliar pada tahun 2022 (Grafik 2.8). Wilayah-wilayah yang melakukan hilirisasi, seperti Sulawesi, juga mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya (Grafik 2.9). Lebih dari itu, kenaikan modal ke sektor pertambangan dan industri dari hilirisasi nikel tersebut mampu meningkatkan kapasitas *output* potensial ekonomi Indonesia (*supply side*) sehingga mendukung pertumbuhan secara berkelanjutan. Karena itu, akselerasi hilirisasi SDA dan industri turunannya perlu untuk ditempuh agar semakin mendorong kapasitas *output* potensial dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tentu saja, upaya tersebut juga harus mempertimbangkan ketahanan cadangan SDA, perkembangan teknologi baru yang mampu melakukan daur ulang, serta transisi ke arah ekonomi hijau (*green economy*) dan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*).

Gambar 2. 5 Kebijakan Hilirisasi Manufaktur Berbasis Sumber Daya Alam (SDA)



Sumber: Bank Indonesia

Langkah-langkah konkret ke depan untuk memperluas program hilirisasi ke komoditas lain perlu disusun dalam memperkuat rencana jangka menengah-panjang. Hilirisasi perlu diperluas tidak hanya untuk komoditas minerba, namun juga pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata (Gambar 2.5). Strategi dan kebijakan hilirisasi industri berbasis SDA ke depan dimaksud memerlukan penyesuaian Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Dalam implementasinya, sinergi kebijakan melalui forum koordinasi yang selama ini telah berjalan antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia perlu diperkuat ke depan. Fokus koordinasi kebijakan dimaksud ditujukan untuk memperkuat langkah-langkah bersama antara lain terkait penentuan industri prioritas jangka menengah-panjang yang diselaraskan dengan penyesuaian RIPIN, peningkatan pembiayaan untuk mendukung hilirisasi, serta perumusan dan implementasi transisi ke arah ekonomi hijau dan keuangan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, beberapa strategi penguatan hilirisasi dimaksud yang akan dibahas secara detail pada Bab IV.

Gambar 2. 6 Kebijakan Pengembangan Pariwisata



Sumber: Bank Indonesia

Selain hilirisasi, penguatan sumber pertumbuhan baru ekonomi juga perlu dilakukan dengan memanfaatkan *comparative advantage* Indonesia, termasuk sektor pariwisata. Setelah terpuruk pada saat pandemi Covid-19, sektor pariwisata saat ini mulai bangkit dan perlu terus dikembangkan untuk mendukung pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional. Dalam kaitan

ini, semangat sinergi, inovasi, dan konsistensi sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya menjadi sangat penting. Sinergi perlu semakin diperkuat antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bank Indonesia, serta kementerian/lembaga dan mitra strategis terkait melalui Koordinasi Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Pariwisata (Sekber Pariwisata) untuk menyepakati langkah-langkah bersama memajukan sektor pariwisata (Gambar 2.6). Inovasi kebijakan melalui pendekatan 3A (Atraksi, Akses, Amenitas) dan 2P (Pelaku, Promosi) perlu ditempuh guna meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia. Berbagai hal tersebut perlu tetap difokuskan untuk pengembangan lebih lanjut 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas, khususnya 5 (lima) destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), tanpa menutup kemungkinan destinasi lain yang berkembang sehingga akan dapat mencapai target kunjungan wisatawan yang telah ditetapkan.

Berbagai sinergi, inovasi, dan konsistensi bauran kebijakan ekonomi nasional di atas akan mampu untuk terus memperkuat ketahanan dan mendorong perekonomian Indonesia semakin maju ke depannya. Dengan ketidakpastian ekonomi global yang masih akan tetap tinggi, koordinasi kebijakan fiskal-moneter, kebijakan mikroprudensial, serta kebijakan reformasi sektor riil perlu terus semakin diperkuat. Hanya dengan berbagai strategi tersebut, prospek ekonomi Indonesia akan semakin kuat sehingga terus melanjutkan pemulihan ekonomi dalam jangka pendek dan akan dapat melaju tinggi dengan ketahanan yang tetap kuat dalam jangka menengah ditopang oleh keberlanjutan kebijakan reformasi sektor riil.

BAB III

MEMPERKUAT MOMENTUM, MENDORONG KEBANGKITAN SEKTOR RIIL

Krisis yang diakibatkan oleh pandemi telah berlalu, namun dampaknya terhadap ekonomi masih dirasakan sampai saat ini. Setelah dunia mulai pulih, ditandai dengan mobilitas manusia yang meningkat dan mitigasi kesehatan yang lebih baik, kinerja sektor riil masih menunjukkan perbaikan yang belum merata. Sektor ekonomi yang ditopang oleh kegiatan jasa menjadi yang paling cepat mengalami perbaikan setelah mengalami dampak pandemi paling parah. Perbaikan ini didorong oleh berlanjutnya proses *re-opening* ekonomi di beberapa negara utama, tercermin dari perkembangan indikator Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa yang telah memasuki fase ekspansi, termasuk di Indonesia.

Kondisi yang berbeda dialami sektor manufaktur di mana perbaikannya agak lamban. Hal ini tercermin dari PMI manufaktur justru masih berada dalam fase kontraksi yang lebih lama dari perkiraan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh inflasi energi dan bahan baku yang tinggi, ketatnya iklim tenaga kerja, serta berlanjutnya tensi geopolitik global yang menyebabkan perdagangan dunia kembali menghadapi tekanan. Oleh karena itu sektor industri menghadapi keterbatasan dalam segera memenuhi kebutuhan *pent-up demand* untuk produk-produk manufaktur dunia.

Pada saat yang sama, kecepatan pemulihan ekonomi nasional amat dipengaruhi oleh seberapa cepat kemampuan sektor riil untuk kembali bangkit dan pulih. Hal ini dilandasi teori *trickle-down effect* yang dapat dihasilkan dari pemulihan industri domestik kepada sektor ekonomi penopang lainnya. Karena ketika aktivitas industri mulai pulih, kebutuhan untuk faktor produksi yakni sumber daya manusia (SDM) dan modal yang menopang industri terkait akan kembali meningkat dalam mendukung operasional perusahaan, begitu juga dengan sektor ekonomi lainnya yang menjadi bagian dari *back-ward linkage* maupun *forward-linkage* dari industri terkait. Secara keseluruhan, dampak yang dirasakan bisa lebih luas dalam mendukung pemerataan.

Di sisi lain, sektor riil juga memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan sektor ini dianggap dapat segera memberikan akses lebih baik terhadap penyediaan

barang dan jasa yang dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi. Hal ini kemudian juga memiliki dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Bab ini akan membahas lebih lanjut bagaimana strategi untuk memperkuat pemulihan sektor-sektor utama pada perekonomian setelah menghadapi krisis pandemi, dengan mengoptimalkan berbagai *endowment factor* (faktor pengungkit) yang dimiliki, baik yang berasal dari sisi kelembagaan, pembiayaan yang inklusif, hingga optimalisasi keberadaan UMKM.

3.1. Kebangkitan Sektor Riil dan Penguatan Output Potensial

Upaya memperkuat fundamental ekonomi melalui sektor riil tentunya perlu diawali dengan pemahaman yang baik mengenai perkembangan *output gap* dan *output* potensial yang terjadi di kawasan. Dalam perekonomian, konsep *output gap* yang merupakan selisih antara *output* aktual dan *output* potensial, memiliki peranan penting dalam membantu analisa kondisi ekonomi suatu negara. Keduanya memberikan pengetahuan tentang tingkat pertumbuhan aktual dan sejauh mana ekonomi dapat beroperasi di atas atau di bawah kapasitas penuhnya. Kaitannya dengan hal tersebut, pemantauan terhadap kondisi *output gap* dan *output* potensial memiliki peranan penting bagi pemulihan ekonomi pascapandemi setidaknya jika ditinjau dari 3 (tiga) aspek.

Aspek pertama, pemantauan terhadap pemulihan ekonomi itu sendiri. *Output gap* membantu mengidentifikasi sejauh mana ekonomi terkena dampak resesi atau krisis terkait lainnya, serta seberapa baik kinerja ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam kondisi ini, mengukur *output gap* dapat membantu pelaku ekonomi yang terdiri dari pengusaha maupun investor untuk menyusun perencanaan bisnis dan investasi di masa depan, baik dalam bentuk ekspansi atau menunda investasi berdasarkan friksi-friksi dalam aktivitas ekonomi yang ditimbulkan akibat pelebaran *output gap* sehingga dapat mempengaruhi tercapainya target bisnis secara lebih efektif di kemudian hari.

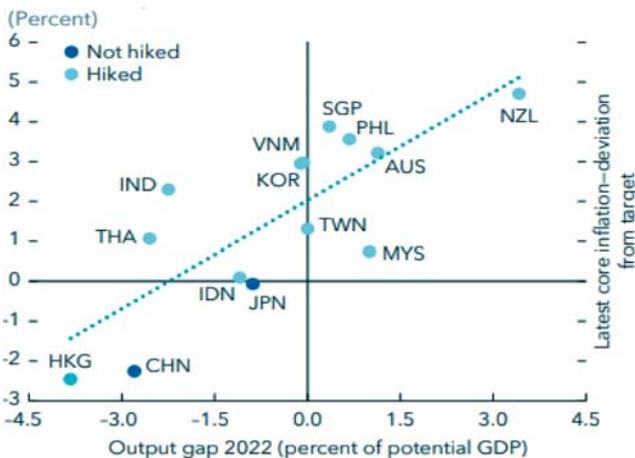
Aspek kedua, mendukung formulasi kebijakan ekonomi yang tepat. Dalam hal ini pemerintah dan bank sentral dapat menggunakan konsep dari *output gap* tersebut dalam merancang kebijakan moneter dan fiskal yang sejalan dengan kebutuhan ekonomi, sehingga tidak menimbulkan *overheat* terhadap perekonomian. Sebaliknya, bila besaran kebijakan yang dihasilkan tidak cukup maka ia akan menimbulkan efek *lagging* dalam rangka mempengaruhi sasaran atau indikator perekonomian yang akan dituju. Dalam situasi *output gap* positif yang berarti terjadinya *demand* yang tinggi, bank sentral dapat

mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga guna mengendalikan inflasi. Sebaliknya, ketika terjadi *output gap* negatif yang berarti *demand* rendah, stimulus fiskal dapat diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

ketiga, pemantauan terhadap inflasi. *Output gap* positif memiliki implikasi langsung terhadap inflasi karena fenomena terjadinya permintaan yang lebih tinggi dari produksi yang tersedia. Sebaliknya, *output gap* negatif dapat menyebabkan tekanan deflasi karena kondisi penawaran yang melebihi permintaan.

Dalam perkembangan terakhir, *output gap* turut mempengaruhi persistensi inflasi yang masih berada di level tinggi pada beberapa negara kawasan. Perkembangan inflasi di global masih dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi baik di negara maju maupun berkembang. Pada negara maju, inflasi yang tinggi dipengaruhi oleh ekspektasi terhadap kenaikan upah serta pasar tenaga kerja yang ketat. Sedangkan di negara berkembang, inflasi lebih dipengaruhi kondisi pelebaran *output gap* yang terindikasi dari menguatnya permintaan domestik di tengah perlambatan *output* produksi. Hal ini sekaligus mencerminkan dampak *scarring* yang masih terjadi pada beberapa industri prioritas (*scarring*) yang kemudian berkontribusi kepada tingkat inflasi yang lebih persisten. Gambaran hubungan antara deviasi inflasi terhadap target serta tingkat *output gap* beberapa negara di kawasan sebagaimana tercermin dalam Gambar 3.1.

Gambar 3. 1 Matriks Hubungan *Output Gap* terhadap Deviasi Inflasi dari Sasaran



Sumber: International Monetary Fund (IMF)

Berbagai upaya untuk meningkatkan *output* potensial dari suatu negara pascapandemi terus ditempuh. Indonesia terus melakukan penguatan melalui sektor-sektor kunci. Berdasarkan data terkini, sektor lapangan usaha yang memiliki kontribusi dominan pada perekonomian tahun 2022 yakni: (i) Industri pengolahan (18,34%); (ii) Perdagangan besar dan eceran; (iii) Reparasi mobil dan sepeda motor (12,85%); (iv) Pertanian, kehutanan, dan perikanan (12,40%); (v) Pertambangan dan penggalian (12,22%); dan (vi) Konstruksi (9,77%). Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan juga memperlihatkan kontribusi yang signifikan (BPS, 2022).

Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi sektoral Indonesia adalah kebijakan hilirisasi baik sumber daya alam (SDA) dan pangan. Potensi besar yang dimiliki keduanya dinilai dapat menjadi *game changer* dalam pemulihan ekonomi Indonesia dan menjadi penopang ekonomi ke depannya. Arah hilirisasi tersebut telah tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Program hilirisasi menjadi salah satu prioritas agar dapat memberikan nilai tambah bagi rantai pasokan, baik pada rantai pasok pangan maupun energi. Hal ini agar dapat memberikan manfaat lebih bagi perekonomian, terbukti dari PDB Indonesia pada tahun 2022 yang masih ditopang oleh dominasi industri pengolahan sebagai kontributor utama yaitu sebesar 18,34% (BPS, 2022). Upaya hilirisasi juga telah berdampak positif pada perbaikan profil ekspor Indonesia menuju kategori *medium-high tech manufactures*.

3.2 Sinergi dalam Memperkuat Kebijakan Sektoral

Menghadapi kondisi tekanan yang multidimensi, adaptasi dan inovasi saja tentunya tidak akan cukup tanpa sinergi kebijakan yang erat secara nasional dalam mendukung sektor riil. Pemerintah dan otoritas terkait dalam hal ini terus berupaya untuk memperbaiki peran dari sektor-sektor utama potensial dalam mengakselerasi pemulihan domestik. Dari sisi kebijakan fiskal, APBN 2023 tetap diarahkan untuk mendukung berbagai upaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan agenda prioritas nasional, termasuk melalui belanja infrastruktur dan belanja bansos yang ditujukan untuk memperkuat fundamental ekonomi dan mendukung serta mendorong transformasi perekonomian secara lebih efektif.

Dari sisi kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong penyaluran kredit di dalam negeri dengan tetap mempertahankan terjaganya SSK. Bentuk kebijakan

stimulus tersebut ditempuh melalui implementasi kebijakan makroprudensial longgar baik dari sisi besaran *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), rasio PLM, rasio LTB/FTV, dan uang muka kredit/pembiayaan untuk kendaraan bermotor. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) untuk meningkatkan kredit/pembiayaan dengan fokus pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit lebih tinggi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya pada sektor hilirisasi minerba dan nonminerba (pertanian, peternakan, dan perikanan), perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata, serta pembiayaan inklusif (UMKM, KUR dan Ultra Mikro/UMi) dan hijau. Besaran insentif likuiditas makroprudensial juga ditingkatkan dari sebelumnya paling tinggi 280 bps menjadi paling tinggi 400 bps.

Dari sisi industri keuangan, OJK berkomitmen terus menjaga stabilitas dan mendorong perkembangan sektor jasa keuangan (SJK) agar tumbuh sehat dan berkesinambungan. Beberapa langkah kebijakan yang ditempuh antara lain melalui: (i) Penguatan integritas laporan keuangan LJK; (ii) Penguatan integritas sektor jasa keuangan dengan menerbitkan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJKAPU PPT dan PPPSPM di SJK); (iii) Penguatan ketahanan, pengaturan dan pengawasan LJK dalam melakukan pemisahan UUS bagi perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, serta perbankan; dan (iv) OJK juga berkomitmen untuk terus melakukan langkah progresif dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat khususnya di pedesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI).

Dari sisi penjaminan dan resolusi, kebijakan LPS akan tetap diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan termasuk dalam menjaga SSK. Upaya menjaga SSK antara lain dilakukan dengan memonitor kecukupan cakupan penjaminan simpanan sesuai Undang-Undang LPS, memastikan efektivitas mekanisme *early involvement*, dan koordinasi dengan anggota KSSK dalam resolusi. Termasuk dalam hal ini dilakukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi LPS di bidang penjaminan dan resolusi bank.

Di tengah dukungan kebijakan di sektor keuangan, pemulihan ekonomi sektoral di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang idiosinkratis. Tantangan tersebut antara lain: (i) Infrastruktur yang Tertinggal; (ii) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (iii) Investasi dalam pendidikan

dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan sektor-sektor ekonomi yang berkembang; (iv) Pengembangan inovasi sektoral; dan (v) keberlanjutan lingkungan. Kelima tantangan tersebut mempengaruhi pertumbuhan pada beberapa sektor potensial, sehingga perlu suatu pendekatan yang dapat mengintegrasikan arah kebijakan sektoral terutama untuk beberapa isu yang saling beririsan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, pada pembahasan sub berikut akan dijabarkan lebih lanjut bagaimana bentuk penguatan kebijakan sektoral yang diperlukan dalam mendorong kebangkitan sektor riil di dalam negeri. Pembahasan kebijakan sektoral akan dibagi berdasar tantangan dan respons kebijakan yang merupakan hasil pembahasan dari masing-masing *Focus Group* ISEI Bidang II baik melalui studi literatur, survei, maupun *focus group discussion* (FGD). Susunan pembahasan dari kebijakan sektoral berikut akan diurut berdasarkan peran utamanya dalam mendukung perbaikan faktor produksi dalam perekonomian, hingga kebijakan pendukung lainnya yang menjadi pelengkap.

3.2.1 Penguatan Kebijakan Sektoral pada Akses Pembiayaan

Dalam rangka memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi menuju Indonesia Maju pada tahun 2023, diperlukan adanya sinergi penguatan akses pembiayaan bagi sektor UMKM. Peningkatan akses pembiayaan bagi sektor UMKM selaras dengan momentum bonus demografi yang sedang dialami Indonesia hingga tahun 2030 mendatang. Guna memanfaatkan momentum ini secara optimal, Indonesia perlu bertransformasi dari negara kelas menengah menjadi negara maju dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, salah satunya melalui dukungan terhadap sektor UMKM dengan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tantangan:

Akses pembiayaan merupakan kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan kesejahteraan UMKM di Indonesia. Meski demikian, Indonesia dihadapkan beberapa tantangan utama yang menjadi penghalang dalam penguatan akses pembiayaan. Tantangan utama penguatan akses pembiayaan mencakup 5 (lima) hal pokok yakni:

Pertama, penyaluran kredit yang masih lesu. Pada tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa penyaluran kredit UMKM di Indonesia masih sangat rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini tercermin dari total kredit perbankan yang mengalir ke UMKM hanya sebesar 18%, jauh di bawah penyaluran kredit di negara tetangga yang mencapai 30-80%.

Kedua, persyaratan kredit UMKM yang ketat, sehingga banyak usaha mikro yang belum mendapatkan akses pembiayaan melalui lembaga formal. Mereka terpaksa menggunakan modal sendiri atau mengandalkan rentenir dan pinjaman daring ilegal yang sering disebut sebagai “*pinjol*”. Penyebab utamanya adalah kurangnya minat perbankan untuk membiayai dan menyetujui permohonan kredit dari UMKM, karena persyaratan yang ketat yang sulit dipenuhi oleh UMKM.

Ketiga, keterbatasan infrastruktur informasi. Pada era digital yang semakin berkembang pesat saat ini, akses yang cepat dan mudah terhadap informasi menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan suatu negara, terutama dalam akses pembiayaan. Hal ini akan terwujud dengan membangun infrastruktur informasi yang memadai. Pembuatan *database* profil UMKM yang lebih komprehensif akan mempermudah lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank dalam mengakses informasi mengenai UMKM potensial yang layak untuk dibiayai.

Keempat, alternatif sumber pembiayaan yang sedikit. Keterbatasan anggaran APBN menyebabkan akses pembiayaan untuk UMKM khususnya kelompok mikro tidak dapat sepenuhnya bergantung pada dana pemerintah. Untuk menarik minat bank swasta dan lembaga keuangan nonbank dalam memberikan kredit untuk kelompok mikro, perlu adanya margin keuntungan. Jika suku bunga kredit usaha kelompok mikro terlalu tinggi, peminjam akan mengalami kesulitan. Namun, jika suku bunga terlalu rendah, pemberi pinjaman tidak akan tertarik.

Terakhir, tantangan integrasi akses pembayaran. Terkait hal ini, Bank Indonesia telah menyediakan akses pembayaran melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sejak 1 Januari 2020. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengintegrasikan lebih banyak usaha mikro-kecil ke dalam sistem pembayaran nasional QRIS. Langkah ini akan memberikan data penjualan yang berharga untuk sektor usaha ini. Hal ini juga akan membantu kreditor apabila data pembayaran QRIS yang dikelola Bank Indonesia dapat terintegrasi dengan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Respons Kebijakan:

Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah program “AKSES 2023” untuk kemudahan UMKM memperoleh pembiayaan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) telah mengenalkan program AKSES (Akselerasi Keuangan Syariah Ekonomi Kreatif dan Pariwisata) pada tahun 2023 sebagai solusi

bagi UMKM yang ingin mengembangkan bisnis mereka dengan mendapatkan pembiayaan yang lebih mudah. Program AKSES merupakan hasil sinergi antara Kemenparekraf, LBS Urun Dana, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, dan KNEKS.

Program AKSES menghadirkan program akselerasi bisnis UMKM melalui mekanisme *securities crowdfunding*. Program ini merupakan kerja sama antara Kemenparekraf dan LBS Urun Dana. Keuntungan utama dengan layanan urun dana ini terdapat opsi pembiayaan yang sangat *value adding*. Hal ini karena bersifat partisipatif, berbasis komunitas, dan akhirnya dapat menjadi saham yang bisa menghasilkan keuntungan yang dibagi rata.

Proses program AKSES dimulai dengan pendaftaran *online* yang kemudian akan dilakukan proses kurasi. UMKM yang terpilih akan mendapatkan berbagai program pendampingan, seperti webinar, *bootcamp*, *mentoring*, hingga *Sharia Pitching Forum*. Selain itu, mereka juga akan terdaftar di platform Lembaga Bisnis Syariah (LBS). Harapannya, melalui program ini, pembiayaan bagi UMKM akan meningkat, dan dengan demikian, omzet bisnis mereka juga akan meningkat. Dengan peningkatan ini, UMKM diharapkan dapat naik kelas dan mencapai kesuksesan yang lebih besar.

3.2.2 Penguatan Kebijakan Sektorial pada Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Kesehatan

Secara umum, ketenagakerjaan di Indonesia masih didominasi oleh sektor informal hingga Februari 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja di sektor informal mencapai 80,24 juta orang, atau sekitar 59,31% dari total penduduk yang bekerja di dalam negeri, yang berjumlah 135,3 juta orang. Sementara itu, sektor formal diisi oleh 55,06 juta jiwa atau sekitar 40,69% dari total pekerja. Dalam kurun waktu Agustus 2022 hingga Februari 2023, terjadi penurunan proporsi pekerja di sektor informal sebesar 0,66% poin. Persentase pekerja di sektor informal juga mengalami penurunan sebesar 0,14% poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, proporsi pekerja di sektor formal mengalami kenaikan sebesar 0,66% poin jika dibandingkan dengan Agustus 2022, dan secara tahunan, terdapat peningkatan sebesar 0,14% poin. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pekerja di sektor formal.

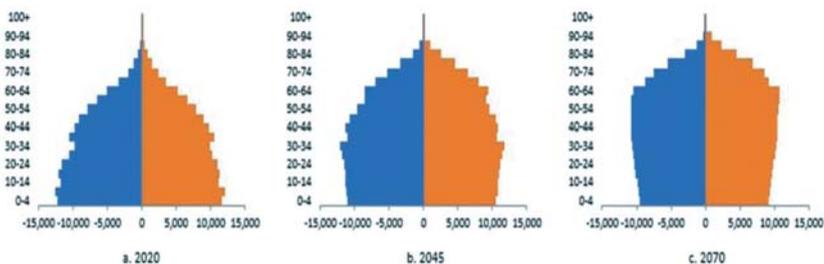
Tantangan:

Tantangan ketenagakerjaan di Indonesia masih dipengaruhi adanya friksi (bias) antara kebutuhan lapangan kerja dengan ketersediaan angkatan kerja terutama di sektor formal. Kondisi ini menyebabkan *mismatch* pada

penyerapan tenaga kerja domestik. Menurut laporan BPS pada Februari 2023 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang, berkurang sekitar 410 ribu orang dibanding Februari 2022. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2023 mencapai 5,45%, turun jika dibanding Februari 2022 yang masih 5,86%. Tingkat TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah total angkatan kerja dengan penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Adapun jumlah total angkatan kerja Indonesia pada Februari 2023 mencapai 146,62 juta orang, bertambah 2,61 juta orang dibanding Februari 2022. Kendati angka pengangguran Februari 2023 berkurang dari Februari 2022, jumlah ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19, yakni jumlah pengangguran bertambah sekitar 1,2 juta orang.

Dukungan kebijakan yang progresif dalam hal ini diperlukan agar pemangku kepentingan dapat segera mengantisipasi dampak lanjutan dari meningkatnya pengangguran ke jebakan *middle income trap*. Tren demografi juga menunjukkan pergeseran dalam struktur penduduk. Pada tahun 1970, komposisi penduduk Indonesia didominasi oleh kelompok usia muda (0-14 tahun) hingga mencapai 43,2% karena implementasi Program Keluarga Berencana pada era Orde Baru. Namun, dengan terus menurunnya tingkat kelahiran, komposisi penduduk usia muda secara bertahap turun. Sebaliknya, penduduk lanjut usia (>65 tahun) terus meningkat dari 3% pada tahun 1970 menjadi proyeksi 18% pada tahun 2050. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang telah memperpanjang harapan hidup. Dalam periode 2055-2060, proporsi penduduk lanjut usia diperkirakan akan melebihi proporsi penduduk usia muda. Perubahan demografi seperti ini akan berdampak pada kebijakan ekonomi dan sosial, termasuk perubahan dalam layanan sosial yang lebih ramah terhadap lansia dan perlindungan mereka seperti panti lansia, layanan kesehatan, dan transportasi (Gambar 3.2).

Gambar 3. 2 Piramida Penduduk Indonesia Pada 2020, 2045, dan 2070



Sumber: United Nations

Khusus terkait tantangan dalam sektor kesehatan meliputi akses terhadap layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Di beberapa negara, terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang berkualitas. Selain itu, perubahan gaya hidup yang tidak sehat, peningkatan penyakit tidak menular, dan ancaman wabah penyakit menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang perlu ditangani secara serius.

Pengesahan UU Kesehatan 2023 pada tanggal 11 Juli 2023 lalu menekankan pentingnya pergeseran fokus kebijakan kesehatan nasional dari ‘mengobati’ menjadi ‘mencegah’. Berdasarkan objektif tersebut, pemerintah memiliki peranan penting dalam memfasilitasi kepastian hukum pada aspek bisnis proses dan administrasi lapangan, pengambilan keputusan yang beralih dari organisasi profesi ke *council*, kepastian mutu tenaga kerja asing, serta tenaga kerja kesehatan tradisional. Keseluruhan ini ditujukan untuk mewujudkan standarisasi jejaring layanan primer dan laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia yang didukung dengan pengembangan layanan unggulan berstandar internasional.

Respons Kebijakan:

Sektor ketenagakerjaan, kependudukan, dan kesehatan merupakan sektor krusial yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan suatu negara. Namun, sektor-sektor ini juga dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan kompleks. Pada sektor ketenagakerjaan, salah satu masalah utama adalah pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menyebabkan ketimpangan sosial, dan menimbulkan ketidakstabilan sosial. Adanya kesenjangan keterampilan antara tenaga kerja yang tersedia dan kebutuhan pasar juga menjadi tantangan dalam memenuhi permintaan lapangan kerja yang berkualitas. Fenomena ini dapat berdampak pada ketimpangan pendapatan, kualitas hidup rendah, dan kurangnya mobilitas sosial.

Untuk menghadapi masalah dan tantangan ini, diperlukan strategi dan solusi yang holistik dan terintegrasi. *Pertama*, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Ini dapat mencakup pengembangan keterampilan, pelatihan, dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. *Kedua*, pengelolaan kependudukan yang baik diperlukan untuk mengatasi pertumbuhan populasi yang cepat. Ini melibatkan pendekatan yang mencakup perencanaan keluarga, pendidikan seksual, dan akses yang merata terhadap layanan kesehatan reproduksi. *Ketiga*, dalam sektor kesehatan, perlu dilakukan investasi dalam

infrastruktur kesehatan, peningkatan ketersediaan tenaga medis, dan penguatan sistem pelayanan kesehatan. Pendidikan dan promosi kesehatan juga penting dalam mendorong gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah harus mengadopsi pendekatan yang terintegrasi dan holistik untuk mengelola ketiga sektor ini secara seimbang dan saling mendukung. Upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional diperlukan untuk mengembangkan kebijakan, program, dan investasi yang mempromosikan ketenagakerjaan yang inklusif, pengendalian pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan, serta akses yang luas dan merata terhadap pelayanan kesehatan. Pendekatan ini juga harus memperhatikan aspek sosial, seperti kesetaraan gender, perlindungan pekerja, dan kesempatan kerja bagi kelompok rentan. Dengan demikian, keterkaitan yang kuat antara sektor ketenagakerjaan, kependudukan, dan kesehatan dapat menjadi landasan yang kokoh untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

3.2.3 Penguatan Kebijakan Sektoral pada Konektivitas Domestik dan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur selalu menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia. Sebagai sebuah negara dengan jumlah pulau dan penduduk yang cukup banyak, Indonesia perlu membangun banyak pelabuhan, baik laut maupun udara. Dalam hal ini Indonesia juga perlu memperluas jaringan jalan raya, jalan tol, dan jembatan yang menghubungkan berbagai kota, desa, dan daerah perbatasan dengan pusat-pusat perekonomian. Indonesia juga perlu membangun bendungan dan waduk untuk mendukung pertanian dan memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Pemerintah juga berusaha untuk menerapkan teknologi modern dalam pembangunan infrastruktur agar lebih efisien, produktif, dan menjadi sumber kebanggaan bagi masyarakat. Infrastruktur modern juga dapat menarik wisatawan dan investasi asing, yang akan memperkuat perekonomian Indonesia dan menciptakan lapangan kerja.

Tantangan:

Upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata tidaklah mudah. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan ketidakpastian global, yang berdampak pada penundaan beberapa proyek infrastruktur pada tahun 2020 dan menurunkan aktivitas sektor konstruksi. Hal ini juga berdampak pada perlambatan impor, terutama untuk barang modal yang mendukung sektor konstruksi, serta menurunkan penyerapan tenaga kerja dan bahan baku domestik, serta tertundanya manfaat ekonomi

yang dihasilkan dari penyelesaian proyek infrastruktur tersebut. Kaitannya dengan hal ini, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur melalui peningkatan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2022, anggaran untuk pembangunan infrastruktur meningkat menjadi Rp450 triliun, naik 7,81% dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun sebelumnya.

Permasalahan utama terkait infrastruktur dan konektivitas domestik meliputi kurangnya investasi, koordinasi yang lemah, regulasi yang kompleks, dan ketimpangan regional. Kurangnya investasi menjadi salah satu akar permasalahan utama dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan anggaran pemerintah, ketidakpastian regulasi, dan kurangnya daya tarik bagi sektor swasta untuk berinvestasi. Kurangnya investasi mengakibatkan pembangunan infrastruktur yang terhambat dan konektivitas yang tidak optimal.

Koordinasi yang lemah antara berbagai sektor terkait dan level pemerintahan juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan infrastruktur. Kurangnya sinergi antara kebijakan fiskal, perencanaan pembangunan, dan regulasi menyebabkan proyek infrastruktur yang tidak terintegrasi dengan baik, menyebabkan ketidakefisienan dan penundaan dalam implementasi. Hal ini dapat berdampak pada ketidakefisienan dan penundaan dalam implementasi proyek-proyek tersebut.

Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang rumit juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Proses perizinan yang lambat, sering terjadinya perubahan kebijakan, dan ketidakpastian hukum menyebabkan penundaan dan meningkatkan risiko bagi investor. Setiap kementerian atau lembaga pemerintah umumnya memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam pelaksanaan kebijakan nasional, terutama pada Proyek Strategis Nasional (PSN). Pelaksanaan tersebut juga meliputi pemantauan pelaksanaan di mana kementerian atau lembaga tersebut mempunyai aplikasi pemantauan dan mekanisme pengukuran tersendiri, sehingga sering kali pencapaian dan target penyelesaian pun menjadi berbeda-beda.

Di samping itu, ketimpangan regional dalam pembangunan infrastruktur juga menjadi masalah serius. Ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah menjadi masalah serius di beberapa negara. Wilayah yang terpencil atau kurang berkembang sering kali tidak mendapatkan investasi yang memadai untuk memperbaiki konektivitas dan infrastruktur dasar. Hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial antara wilayah yang kaya infrastruktur dengan yang tidak.

Respons Kebijakan:

Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan strategis dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan dalam jangka pendek. Pertama, perluasan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilakukan untuk mempercepat proses koordinasi dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Langkah ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, perlu juga dibangun *National Project Database* dalam bentuk *Infrastructure Investor Outlook* yang akan menyediakan informasi detail tentang proyek-proyek infrastruktur yang sedang berlangsung atau direncanakan.

Dalam hal koordinasi lintas sektoral, diperlukan penguatan lembaga koordinasi. Beberapa lembaga yang perlu diperkuat adalah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP), dan Kantor Bersama Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Lembaga-lembaga ini memiliki mandat koordinasi dan pengambilan keputusan lintas Kementerian/Pemerintahan/Lembaga, sehingga dapat meningkatkan kolaborasi antarlembaga dan mengurangi kendala birokrasi. Salah satu tujuan utamanya adalah memastikan efektivitas PSN yang saling berkaitan, seperti Bandara Kertajati dengan Jalan Tol Cisumdawu dan Jalan Tol Manado Bitung dengan KEK Bitung.

Pemerintah perlu membentuk skema-skema kreatif dalam upaya menarik minat swasta untuk berinvestasi. Skema ini meliputi *Life Cycle Support* (LCS), *Life Value Capture* (LVC), atau konsep *crowdfunding* untuk infrastruktur. Peraturan yang membatasi ruang swasta untuk berinvestasi dalam infrastruktur perlu diperbarui, seperti Peraturan Pemanfaatan Aset Negara, penyiapan proyek KPBU *unsolicited*, dan KPBU skala kecil. Pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG) dan penginderaan jarak jauh (*remote monitoring/sensing*) dapat digunakan dalam memantau dan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih kebijakan teknis di lapangan.

Dalam jangka menengah-panjang, penguatan perlu dilakukan dalam penyusunan Rencana Strategis Infrastruktur Jangka Menengah-Panjang yang komprehensif, dengan tujuan memetakan langkah-langkah pembangunan infrastruktur dalam jangka waktu yang lebih panjang, misalnya 10 atau 20 tahun ke depan. Selanjutnya, diperlukan upaya untuk mendorong diversifikasi sumber pendanaan infrastruktur, seperti penerbitan obligasi infrastruktur, penggunaan *Regional Government Debt*, dan pelibatan Bank Pembangunan Daerah/BPD. Untuk menunjang hal tersebut, peningkatan

kapasitas pelaksanaan menjadi kunci dalam pengembangan infrastruktur. Perlu adanya penguatan kapasitas institusi terkait dalam perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan proyek infrastruktur. Hal ini melibatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, pembenahan sistem administrasi, dan peningkatan kemampuan pengawasan.

Terakhir, pemerintah perlu menginisiasi kemitraan jangka panjang dengan Badan Usaha yang berbasis Infrastruktur. Badan usaha ini misalnya Perusahaan *Over-the-Top (OTT) Application*. Dengan melakukan kemitraan jangka panjang, pemerintah dapat tetap relevan dan responsif dalam menyusun kebijakan infrastruktur yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai hasil yang optimal, pemerintah perlu mengidentifikasi prioritas yang realistis dan mengalokasikan sumber daya yang memadai. Melibatkan pemangku kepentingan terkait serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi rekomendasi ini juga merupakan langkah penting.

3.2.4 Penguatan Kebijakan Sektorial pada Pengembangan UMKM Nasional

UMKM merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, pada 2021 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,97% (Rp8,6 triliun) dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97%. Dampak yang diberikan oleh UMKM berkorelasi dengan jumlah UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya. Jika ditinjau dari letak provinsi, UMKM terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 1,49 juta unit usaha. Sementara daerah paling sedikit diduduki oleh Papua dengan jumlah 3,9 ribu unit. Walaupun jumlahnya semakin meningkat, aspek kualitas dari perkembangan UMKM juga perlu diperhatikan. Hal ini tentunya untuk menciptakan ekosistem UMKM yang tumbuh inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan:

Setelah terganggu akibat pandemi Covid-19, kinerja UMKM Indonesia mulai pulih. Sepanjang tahun 2022, kinerja UMKM mencatatkan kinerja cemerlang terutama dari sisi pertumbuhan usahanya. Namun, laju UMKM di Indonesia ke depan juga mendapatkan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah tantangan SDM yang dapat membawa UMKM tumbuh berkelanjutan. kurangnya tenaga kerja yang terampil dan terlatih. UMKM sering kali kesulitan untuk menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Kurangnya akses ke pelatihan dan pendidikan vokasional

juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas tenaga kerja. Hal ini dapat membatasi Potensi UMKM di Indonesia.

Tantangan yang dihadapi oleh UMKM nasional lainnya adalah perluasan akses pasar, di mana hanya sebagian kecil UMKM yang dapat menjangkau pasar di tingkat provinsi. Hal ini disebabkan keterbatasan akses informasi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini sebenarnya dapat diantisipasi dengan memanfaatkan sarana digital dalam memperluas akses pasarnya. Namun, kendala seperti literasi digital yang masih rendah menjadi hambatan tambahan. Kemudian persaingan dengan perusahaan besar dan *e-commerce* yang memiliki skala ekonomi dan teknologi lebih baik menjadi kendala dalam perluasan akses pasar UMKM ke depan.

Keterbatasan kapasitas menjadi faktor penghambat pengembangan UMKM ke depan. UMKM biasanya menghadapi keterbatasan faktor produksi, khususnya modal dan kemampuan manajerial. Hal ini tidak terlepas dari UMKM yang berawal dari usaha mikro, sehingga sangat bertumpu pada perorangan.

Tantangan pembiayaan juga menjadi tantangan lain bagi pengembangan UMKM. Keterbatasan modal UMKM seharusnya dapat dipenuhi dari pendanaan eksternal. Namun demikian, masih terdapat *gap* antara UMKM dan lembaga pembiayaan formal, khususnya perbankan. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank karena kurangnya jaminan yang memadai atau riwayat kredit yang terbatas. Hal ini membuat mereka sulit untuk mengembangkan usahanya.

Respons Kebijakan:

Seperti yang disebutkan pada bagian tantangan UMKM sebelumnya, faktor yang harus dibenahi dalam menuju UMKM yang kompetitif dan tangguh adalah sumber daya yang *capable* dan kompeten. Terutama dengan kapasitas seperti *entrepreneurship skill*, manajemen produksi-pemasaran-keuangan, dan cakap (pengetahuan dasar) dalam pemanfaatan teknologi digital khususnya. Oleh karenanya peningkatan kualitas pelaku UMKM merupakan elemen yang krusial dalam menjaga sustainability usaha. Dalam hal ini pemerintah telah menyusun sejumlah program kebijakan khususnya berupa pemberian pelatihan bagi pelaku UMKM yang diharapkan dapat memberikan manfaat positif dalam rangka peningkatan produktivitas dan penjualan. Beberapa pelatihan tersebut diarahkan pada subjek seperti pengetahuan manajerial dan khususnya pemanfaatan teknologi terkini di era digitalisasi saat ini.

Lebih dari itu, perlu adanya integrasi ekosistem UMKM dengan mengajak pelaku industri, UMKM, dan pendidikan tinggi terutama vokasi dalam memanfaatkan momentum pengembangan kawasan industri. Strategi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pihak industri/UMK maupun pihak pendidikan vokasi. Dengan adanya sinergi antara UMKM dan pendidikan vokasi, akses mahasiswa untuk melakukan magang sebagai sarana belajar sambil bekerja akan meningkat sehingga lulusan vokasi nantinya telah dibekali dengan gambaran dalam melakukan pekerjaan secara nyata. Di lain sisi, pendidikan vokasi dapat memberikan bantuan dan pembinaan bagi UMKM untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam menjalankan usahanya.

Pengembangan kapabilitas pelaku UMKM di era kebangkitan ekonomi pascapandemi ini adalah melalui pendampingan dan termasuk pelatihan UMKM dalam penggunaan platform *online*, meningkatkan kreativitas dan inovasi serta strategi pemasaran *online*. Pendampingan dan pelatihan dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, *marketplace*, dan perbankan. Khusus untuk mendukung penjualan ekspor produk UMKM, diperlukan pendampingan sesama aggregator dan memanfaatkan informasi pasar luar negeri dari Kementerian Luar Negeri terkait dengan standarisasi dan kurasi produk agar dapat memenuhi kriteria dan *demand* di pasar luar negeri.

Dari perluasan akses pasar, selain dengan memanfaatkan platform digital dalam meningkatkan pemasarannya, isu persaingan dengan perusahaan besar dan *e-commerce* yang memiliki skala ekonomi dan teknologi lebih baik merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh banyak pelaku UMKM di Indonesia. Untuk memitigasi isu persaingan usaha tersebut, pemerintah perlu mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk atau layanannya, mencari *niche* pasar yang belum terjamah, berkolaborasi dengan mitra strategis, dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan masyarakat terhadap produk dan layanan UMKM. Selain itu, untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan berimbang, Pemerintah bersama dengan regulator juga perlu menetapkan regulasi yang dapat mencakup berbagai jenis model bisnis platform digital yang ada.

Strategi lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kapasitas UMKM di Indonesia adalah akses pendanaan. Terdapat *gap* antara UMKM dan pemberi modal eksternal seperti perbankan sehingga UMKM sering kali kesulitan mencari pendanaan. Beberapa permasalahan pada akses pendanaan antara lain: (i) Kurangnya pengalaman, jaringan, dan pendanaan;

(ii) *Scarring effect* akibat dampak negatif pandemi Covid-19 yang menurunkan permintaan, produksi, dan distribusi produk UMKM serta menyulitkan pelunasan pinjaman dan pembayaran tagihan; dan (iii) Keterbatasan agunan yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Sinergi antara pemerintah, perbankan, lembaga keuangan mikro, dan asosiasi UMKM diperlukan dalam mendukung peningkatan alokasi anggaran dan insentif fiskal bagi UMKM, peningkatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema KUR Ultra Mikro, mengintegrasikan program Kartu Prakerja dengan KUR, dan melakukan perubahan kebijakan KUR Khusus bagi korporatisasi petani dan nelayan.

3.2.5 Penguatan Kebijakan Sektor Pemberdayaan Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang paling dinamis dan berkembang di kancah ekonomi global, dan berkontribusi dalam penambahan nilai serta promosi identitas nasional. Tercatat bahwa ekonomi kreatif Indonesia berkontribusi menciptakan nilai tambah sebesar Rp1.297 triliun pada tahun 2022, serta berhasil menduduki peringkat ketiga setelah industri perfilman Hollywood Amerika dan industri musik K-Pop Korea Selatan. Kontribusi ekspor industri ekonomi kreatif juga berperan besar dalam perekonomian nasional dengan nilai ekspor ekonomi kreatif pada tahun 2022 sebesar 26,46 miliar dolar AS atau setara dengan Rp397,98 triliun.

Industri ekonomi kreatif tidak hanya dapat mendorong pendapatan tetapi juga penciptaan lapangan kerja. Industri ekonomi kreatif berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan mencapai 22,29 juta tenaga kerja pada tahun 2022. Dari angka tersebut, tiga subsektor dengan penyerapan terbesar yakni 41,5% berasal dari sektor kuliner, 17,5% dari sektor fashion, dan 15% dari sektor kriya. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja pada subsektor yang banyak menggunakan teknologi digital mengalami pertumbuhan paling cepat. Jumlah pekerja di aplikasi dan pengembang *game* meningkat secara signifikan dari 46.990 pekerja pada 2019 menjadi 129.404 pada 2020 artinya terjadi peningkatan lebih dari 174%.

Tantangan:

Dinamika perkembangan jumlah pelaku industri kreatif di Indonesia memerlukan integrasi *database* Industri kreatif, terutama yang UMKM. Banyaknya jumlah UMKM di Indonesia memiliki kelemahan pada *collecting* dan *validity* data UMKM, termasuk UMKM yang bergerak di Industri kreatif. Selama ini, setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki versi *database* jumlah UMKM sendiri-sendiri, sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi kebutuhan dari masing-masing UMKM. Kondisi ini pada

akhirnya menyebabkan kurangnya kucuran investasi pada sektor industri ekonomi kreatif. Hal ini terjadi karena para investor beranggapan bahwa industri memiliki fase naik turun yang sangat cepat sehingga investor sangat berhati-hati dalam melakukan investasi. Hingga saat ini, ada sekitar 92,4% pelaku usaha industri kreatif masih menggunakan modal pribadi sebagai sumber pendanaan usahanya. Selain itu, 96,6% pelaku usaha masih belum memiliki bentuk badan usaha formal.

Tantangan lainnya berasal dari akses industri kreatif pada teknologi digital yang terbatas, terutama di daerah yang jaringan internetnya masih belum sempurna. Setidaknya terdapat tiga langkah yang sedang diupayakan Pemerintah dalam adaptasi ekonomi kreatif ke ekosistem digital. *Pertama*, memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. *Kedua*, mendorong pengembangan teknologi finansial dengan memaksimalkan dukungan konektivitas internet dan penetrasi telepon genggam. *Ketiga*, mendorong kolaborasi mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi, model bisnis, dan berkelanjutan bisnis *start-up*.

Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan hak dan kekayaan intelektual masih tergolong lemah. Sejumlah besar pekerja ekonomi kreatif masih belum menyadari pentingnya melindungi IP (*intellectual property*) mereka untuk mencegah potensi pelanggaran dan mengubah ide mereka menjadi aset eksklusif yang berharga. Untuk mengatasi hal ini tantangan, Pemerintah mengimplementasikan beberapa program untuk mendukung secara ketat pelaku ekonomi kreatif untuk proaktif melindungi, mengelola, dan mengomersialkan aset kekayaan intelektual melalui kesadaran IP serta program fasilitasi manajemen IP.

Respons Kebijakan:

Dalam rangka memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi, diperlukan adanya sinergi penguatan akses pembiayaan bagi sektor UMKM. Peningkatan akses pembiayaan bagi sektor UMKM selaras dengan momentum bonus demografi yang sedang dialami Indonesia hingga tahun 2030 mendatang. Guna memanfaatkan momentum ini secara optimal, Indonesia perlu bertransformasi dari negara kelas menengah menjadi negara maju dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, salah satunya melalui dukungan terhadap sektor UMKM dengan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pemerintah telah meningkatkan penyaluran KUR pada tahun 2023. Penyaluran tersebut menjadi Rp450 triliun atau sesuai dengan kecukupan

anggaran subsidi KUR pada APBN dengan tujuan agar tercapainya target penyaluran KUR. Oleh sebab itu, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan sinergi yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, pelaku UMKM, Penyalur KUR, Penjamin KUR, asosiasi, akademisi, dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam upaya ini, salah satu bentuk sinergi yang dapat dilakukan adalah melalui penyelenggaraan kegiatan KUR Festival.

Kegiatan KUR Festival ini dapat menjadi momen penting dalam rangka meningkatkan sinergi antara semua pihak terkait. Dalam festival ini, pemerintah, Penyalur KUR, Penjamin KUR, dan BPJS Ketenagakerjaan saling berkolaborasi untuk menyalurkan informasi mengenai kebijakan dan proses penyaluran KUR yang mudah dan terjangkau. Kegiatan ini melibatkan generasi muda secara umum dan pelaku UMKM secara khusus, dengan tujuan untuk mendorong upaya agar generasi muda dapat terus mengembangkan kompetensi, meningkatkan produktivitas, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Di samping itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan debitur baru KUR dan mendukung UMKM naik kelas, pemerintah memiliki target paling sedikit 1,76 juta debitur baru dan paling sedikit 2,36 juta debitur graduasi pada tahun 2023.

Tak hanya inklusif, usaha sosial kreatif juga berdampak positif bagi sekitar, termasuk perempuan, kaum disabilitas dan lansia. Sektor ini berpengaruh positif bagi komunitas dan budaya dan berdampak bagi pembangunan lokal dan kelompok sosial rentan. Sebanyak 22% usaha sosial bergerak di bidang ekonomi kreatif. Sektor usaha sosial kreatif menyediakan 1,5% – 2% lapangan kerja inklusif. Berdasarkan studi “*Creative and Social Enterprise in Indonesia*” yang diselenggarakan oleh British Council dengan The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) dan Asia Venture Philanthropy Network (AVPN) pada 2020 lalu, rata-rata pekerja perempuan yang dipekerjakan adalah 3,8%. Sedangkan, rata-rata penyandang disabilitas yang dipekerjakan adalah 1,2%. Bahkan, sebanyak 0,9% pekerja dalam industri ekonomi kreatif merupakan lansia dengan usia di atas 65 tahun.

3.2.6 Penguatan Kebijakan Sektoral pada Ekonomi Syariah

Ekonomi dan keuangan syariah telah mengalami perkembangan pesat dalam dua dekade terakhir, baik secara global maupun nasional. Laporan the State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2022 memperkirakan bahwa 1,9 miliar muslim di dunia membelanjakan setara dengan 2 triliun dolar AS pada tahun 2021 untuk sektor makanan, farmasi, kosmetik, *fashion*,

perjalanan, dan media rekreasi. Hal itu meningkat sebesar 8,9% dari tahun 2020. Pada laporan yang sama dijelaskan bahwa aset keuangan Islam tumbuh menjadi 3,6 triliun dolar AS pada tahun 2021, naik 7,8% dari 3,4 triliun dolar AS pada tahun 2020. Faktor utama yang memengaruhi perkembangan ini adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman terkait dengan ekonomi syariah.

Tantangan:

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi guna mencapai potensi penuh sektor ini. Pertama adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah. Meskipun kesadaran meningkat, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan literasi keuangan syariah agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kedua, kurangnya tenaga ahli yang terlatih dalam bidang keuangan syariah menjadi kendala yang signifikan. Diperlukan upaya dalam meningkatkan program pendidikan dan pelatihan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam industri keuangan syariah. Investasi dalam pengembangan tenaga ahli akan memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap perkembangan sektor ini. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dalam *masterplan* pengembangan ekonomi syariah menjelaskan kesiapan SDM merupakan salah satu modal dasar menghadapi perkembangan ekonomi global dan visi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia

Ketiga, regulasi yang konsisten dan jelas menjadi tantangan penting. Pentingnya regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah, transparan, dan konsisten adalah kunci bagi kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan industri keuangan syariah. Pemerintah perlu terus memperkuat regulasi dan memastikan penegakan hukum yang efektif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan sektor ini.

Keempat, tantangan berupa diversifikasi produk dan layanan syariah. Industri keuangan syariah perlu terus berinovasi untuk menawarkan produk dan layanan yang beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diversifikasi produk dan layanan akan membuka peluang baru dan meningkatkan daya tarik sektor ini.

Kelima, pengawasan yang ketat dan pengendalian risiko menjadi kunci keberhasilan ekonomi dan keuangan syariah. Perlu adanya sistem pengawasan yang kuat dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pengendalian

risiko yang baik akan membantu menjaga stabilitas sektor keuangan syariah dan membangun kepercayaan investor.

Respons Kebijakan:

Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, industri keuangan syariah, dan lembaga pendidikan menjadi kunci. Sinergi yang kuat antara semua pihak akan mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan ini, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah yang signifikan di tingkat regional dan global. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan yang optimal, dibutuhkan strategi yang bersifat jangka pendek maupun strategi jangka menengah-panjang.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan di jangka pendek adalah peningkatan akses dan promosi ekspor Indonesia, khususnya di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Hal ini dapat dilakukan dengan promosi ekonomi dan keuangan syariah melalui kerja sama pada negara OKI. Harapannya, kerja sama yang dilakukan juga mengarah pada promosi ekspor produk-produk syariah yang dimiliki oleh Indonesia. Lebih dari itu, langkah ini menjadi penting untuk menciptakan Indonesia sebagai poros ekonomi dan keuangan syariah ke depan.

Kebijakan lain dalam jangka pendek yang dapat dilakukan adalah Inovasi produk dan insentif bagi perbankan syariah. Pada inovasi produk keuangan syariah dimaksudkan menciptakan produk-produk yang lebih terdiversifikasi sehingga akan membuka peluang baru dan meningkatkan daya tarik di sektor ini. Salah satu produk yang dapat dipertimbangkan adalah produk *investment account* syariah. Kemudian, insentif bagi perbankan syariah ini dimaksudkan pada insentif produk berorientasi ekspor dan berfokus pada sektor prioritas.

Kampanye Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) perlu terus dilakukan terutama pada segmen masyarakat berpendapatan tinggi. Selain menjadi strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, gerakan ZISWAF yang bersifat masif dan inklusif bisa menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. ZISWAF mendorong agar harta mengalir dan tidak menumpuk, serta ekonomi masyarakat tumbuh secara sehat dan adil. Adanya tren digital dapat dimanfaatkan dengan baik dalam memudahkan pelayanan ZISWAF dan ekonomi dan keuangan syariah secara keseluruhan. Pelayanan yang mudah akan mendorong masyarakat berkontribusi dalam sektor ini lebih masif ke depan.

Strategi dalam jangka menengah panjang juga perlu diperhatikan dengan baik dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dalam hal ini, strategi yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam jangka panjang adalah peningkatan instrumen intermediasi keuangan syariah (bank maupun non-bank) pada sektor-sektor prioritas nasional. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Sukuk BI (SukBI) Inklusif untuk mendukung pengembangan instrumen moneter dan pasar uang syariah. SukBI Inklusif juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah dalam memenuhi ketentuan kebijakan makprudensial, termasuk RPIM dan PLM.

Peningkatan kompetensi pelaku usaha merupakan strategi jangka panjang lain pada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ini disebabkan karena kurangnya tenaga ahli yang terlatih dalam bidang keuangan syariah menjadi kendala yang signifikan. Dengan demikian, upaya dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha di sektor ekonomi dan keuangan syariah perlu untuk dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan program pendidikan dan pelatihan pada pelaku usaha di sektor ini. Kemudian, peningkatan investasi dalam pengembangan tenaga ahli akan memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap perkembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah ke depan.

Strategi jangka panjang lain adalah edukasi dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan literasi ekonomi syariah nasional. Berbagai program edukasi dan sosialisasi dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman baik jalur formal dan nonformal. Salah satunya adalah penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2022. Dari berbagai kebijakan tersebut juga terbukti cukup efektif di mana survei literasi ekonomi syariah di Indonesia meningkat dari sebelumnya 16,28% (2019) menjadi 20,01% (2021).

3.2.7 Penguatan Kebijakan Sektor Sumber Daya Kemaritiman

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam, salah satunya adalah kemaritiman. Dua pertiga wilayah Indonesia merupakan wilayah lautan. Sebagai negara kepulauan yang utuh sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB, dengan luas laut yang begitu besar terdiri dari luas perairan nusantara 3,1 juta kilometer persegi, Indonesia menyimpan potensi hasil laut yang luar biasa.

Pada tahun 2021, produksi perikanan mengalami peningkatan. Data BPS menunjukkan bahwa produksi perikanan mencapai 24,48 juta ton untuk penyediaan konsumsi ikan 55,37 kg/kapita/tahun. Kemudian, sektor

perikanan mampu menyerap kerja ±7,5 juta orang nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaut. Lebih dari itu, ekspor hasil perikanan 5,72 miliar dolar AS dan berkontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 2,77%. Garis pantai yang panjang dan laut yang luas juga memberikan hasil dan potensi besar bagi ekonomi Indonesia ke depan (Briandana *et al.*, 2018). Untuk itu, diperlukan penyusunan strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi sumber daya kemaritiman Indonesia ke depan dan berkelanjutan.

Tantangan:

Pengembangan sumber daya kemaritiman di Indonesia menawarkan potensi yang sangat besar, namun juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan. Salah satu permasalahan pada sektor kemaritiman adalah pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. *Overfishing* atau penangkapan ikan berlebihan, penangkapan ikan ilegal, dan degradasi terumbu karang dapat menyebabkan penurunan populasi ikan dan kerusakan ekosistem laut. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya yang serius dalam pengawasan yang ketat dan tegas dalam melindungi ekosistem laut ke depannya.

Infrastruktur dan aksesibilitas juga menjadi permasalahan dalam pengembangan sumber daya kemaritiman di Indonesia. Kurangnya infrastruktur maritim yang memadai, seperti pelabuhan, dermaga, dan jalur pelayaran yang baik, dapat menghambat transportasi, perdagangan, dan pariwisata di wilayah pesisir (Suseto *et al.*, 2018). Oleh karena itu, diperlukan investasi yang lebih besar dalam pengembangan infrastruktur maritim guna meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kemaritiman.

Keterbatasan kapasitas dan sumber daya manusia juga menjadi dalam pengembangan sumber daya kemaritiman. Pengembangan sumber daya kemaritiman membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih, berkualitas, dan memiliki pengetahuan yang memadai. Keterbatasan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan teknologi menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya kemaritiman.

Ancaman perubahan iklim juga menjadi hal serius dalam pengembangan sumber daya kemaritiman. Perubahan iklim dan kenaikan suhu global berdampak signifikan pada sumber daya kemaritiman. Pemanasan laut, peningkatan tingkat asam laut, dan perubahan pola cuaca dapat mengganggu ekosistem laut dan menimbulkan kerugian ekonomi. Permasalahan lain dari sektor kemaritiman yaitu koordinasi dan keterpaduan kebijakan yang masih belum memadai. Ini dibuktikan oleh

Suseto *et al.* (2018) yang menemukan bahwa tumpang tindih kebijakan yang terjadi di Indonesia membuat pengembangan sektor kemaritiman di Indonesia kurang efektif. Pengembangan sumber daya kemaritiman melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan yang berbeda. Koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya menjadi tantangan dalam mencapai keterpaduan kebijakan dan pengelolaan sumber daya kemaritiman yang holistik.

Selain itu, permasalahan utama yang terjadi pada masa pandemi dan setelahnya yaitu berasal dari sistem logistik kelautan. Industri logistik menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia bahkan seluruh dunia, angkutan logistik mengalami kendala, sehingga pergerakan barang dan distribusi barang antar daerah, antar negara juga mengalami kendala serupa. Sebagai contoh keberhasilan Indonesia dalam menghadapi Covid-19 yaitu eksistensi industri logistik untuk beberapa komoditi khususnya sektor perikanan dan kelautan yang tidak mengalami penurunan yang signifikan. Sektor ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dapat pulih. Produk perikanan bersifat *perishable* atau mudah rusak, sehingga penanganan pascapanen dan logistik kelautan menjadi kunci dalam mempertahankan kualitas dan harga optimal produk perikanan.

Selain tantangan, isu ke depan dari pengembangan sektor kemaritiman di Indonesia adalah hilirisasi perikanan. Ada beberapa kendala serta tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh Indonesia yaitu masalah kritis terkait logistik kelautan, usaha penangkapan, pelabuhan pendaratan ikan, industri pembekuan dan pengolahan, kapal penampung dan pengangkut, sarana transportasi laut dan udara serta distribusi dan *seafood outlet*.

Dalam operasionalnya, sub sektor kelautan dan perikanan melibatkan beberapa pelaku selain dari nelayan itu sendiri seperti pemerintah dan swasta. Pemerintah sebagai pemberi kebijakan kelautan perikanan memberikan sarana dan prasarana pelabuhan pendaratan perikanan. Isu pada pelabuhan pendaratan adalah terlalu banyak instansi pemerintah yang terlibat dan *overlapping* pengaturan pelabuhan sehingga harus ada otoritas tertinggi pelabuhan.

Sarana dan transportasi laut walaupun merupakan industri tersier, namun dapat mendorong dan menjaga kualitas dan harga ikan agar tetap optimal. Adapun isu yang berkembang pada transportasi laut yakni: (i) *Single trip* tetapi *double cost*; (ii) Jumlah *reefer container* terbatas dan pasokan listrik di kapal terbatas; (iii) Monopoli pengusaha tertentu dalam perizinan

pengangkutan laut di daerah; (iv) Jadwal kapal pengangkutan yang tidak reguler; dan (v) Frekuensi transportasi yang kurang sesuai dengan kebutuhan. Isu yang berkembang pada transportasi udara yakni: (i) Keterbatasan *space* di pesawat terbang untuk pengangkutan produk ikan segar; (ii) Pengangkutan ikan segar dengan *styrofoam* menghadapi persoalan rentan bocor; (iii) Tarif biaya terlalu mahal termasuk es batu; dan (iv) Keterbatasan pasokan es kering untuk kebutuhan transportasi udara.

Respons Kebijakan:

Indonesia memiliki potensi besar sumber daya kemaritiman. Dengan potensi yang ada perlu dilakukan kebijakan yang strategis dan terukur untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kemaritiman di Indonesia. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah menerapkan 5 (lima) kebijakan strategis yaitu (i) Memperluas kawasan konservasi laut; (ii) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; (iii) Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; (iv) Pengawasan serta pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (v) Pembersihan sampah plastik laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut. Kebijakan ini dikenal dengan Kebijakan Ekonomi Biru. Lima kebijakan ini juga merupakan *roadmap* pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Implementasi program-program ekonomi biru akan memacu tumbuhnya industri hilirisasi sektor perikanan di Indonesia .

Kebijakan lain yang vital untuk dilakukan adalah pengembangan infrastruktur dan konektivitas kemaritiman. Pembangunan kemaritiman menjadi penting karena merupakan penghubung lalu lintas antar pulau maupun antar negara. Lebih dari itu, infrastruktur yang mendukung akan menjadi fondasi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ketercapaian ini selanjutnya akan memberikan dampak terhadap perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung. Terlebih, Indonesia yang merupakan negara kepulauan, menjadikan kebijakan dalam rangka penguatan infrastruktur maritim menjadi signifikan untuk dilakukan.

Pengembangan infrastruktur dan konektivitas kemaritiman ini dapat dilakukan dengan menyediakan jalur transportasi seperti tol laut. Dengan dibangunnya tol-tol laut, maka akan mempermudah akses bidang logistik. Hal ini selanjutnya akan berdampak pada penekanan harga biaya logistik ke arah yang lebih baik (Zen *et al.*, 2021). Kapal laut merupakan salah satu aspek penting dalam infrastruktur maritim. Maka dari itu, memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas dari kapal laut merupakan salah satu agenda kebijakan yang perlu dilakukan. Jika dibandingkan dengan negara di kawasan lain, seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura, kualitas kapal Indonesia

masih kalah bersaing. Selain itu, kapal perikanan Indonesia umumnya adalah kapal ukuran kecil (lebih kurang 97%). Indonesia sedikit sekali memiliki armada kapal perikanan besar untuk beroperasi di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) maupun di laut lepas. Melihat kondisi yang ada, perbaikan dari sisi kualitas dan kuantitas perlu dilakukan.

Dari sisi strategi pengembangan sumber daya perikanan, program penangkapan ikan terukur berbasis kuota sudah baik dan perlu dilanjutkan. Eksploitasi penangkapan ikan dilaut perlu dicegah untuk menjadi keberlangsungan ekosistem maritim di Indonesia. Kuota terhadap produksi (tangkap) mampu menghilangkan fenomena berlomba-lomba mencari ikan (*race for fish*) karena setiap nelayan pasti memperoleh bagian untuk menangkap. Perikanan terukur diharapkan mampu mendapatkan keuntungan maksimum dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan. Kemudian, pemilihan kebijakan penerapan kuota diiringi dengan peningkatan pendataan, pengawasan, dan *law enforcement* yang kuat.

Terkait dengan dukungan produksi perikanan, perikanan budidaya juga merupakan salah satu solusi alternatif, namun saat ini pengembangannya belum optimal. Dari sisi permintaan, konsumsi ikan masyarakat Indonesia sekitar 30 kg per kapita per tahun tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Masyarakat Singapura, Korea, dan Jepang mengonsumsi ikan mencapai 80 – 100 kg (per kapita per tahun). Oleh karena itu, perikanan budidaya baik air tawar maupun air laut perlu dikembangkan secara masif dan nasional.

Lebih dari itu, dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya maritim di Indonesia adalah dengan menerapkan *cold chain* yang efisien. Penerapan sistem rantai dingin di setiap pusat pendaratan ikan (PPI)/tempat pelelangan ikan) TPI memberi dampak terhadap perbaikan kualitas komoditas perikanan. Diperlukan peran pemerintah dalam penyediaan pabrik es untuk masing-masing PPI/TPI. Produk perikanan adalah produk yang mudah rusak sehingga pendinginan merupakan kunci untuk menjaga kesegaran ikan. Beberapa masalah dalam industri pendinginan seperti keterbatasan pasokan listrik di pasar tradisional, keterbatasan *freezer*, keterbatasan *coldstorage*, keterbatasan *reefer truck* dan *image* masyarakat terhadap ikan beku yang salah.

Strategi lain yang dapat diterapkan adalah penerapan *supply chain* atau *value chain management*. *Supply chain* atau *value chain management* merupakan suatu konsep menyangkut pola pendistribusian produk yang mampu menggantikan pola-pola pendistribusian produk secara optimal. Pola

baru ini menyangkut aktivitas pendistribusian, jadwal produksi, dan logistik. Dengan kata lain ini digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari *supplier*, manufaktur, distributor, *retailer*, dan *customer* di sektor kemaritiman. Secara keseluruhan, strategi ini diharapkan dapat menciptakan pemberdayaan sumber daya kemaritiman secara optimal dan berkelanjutan.

3.2.8 Penguatan Kebijakan Sektor Ketahanan Pangan

Penguatan kebijakan ketahanan pangan pada tahun 2023 perlu menjadi prioritas dalam mendukung kebangkitan menuju Indonesia maju. Berdasarkan Global Food Security Index (GFSI) 2022, ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat 63 dari 113 negara. Apabila dilihat berdasarkan indeksinya, ketahanan pangan Indonesia tahun 2022 berada pada level 60,2, lebih tinggi jika dibandingkan periode 2020-2021. Dalam kelompok ASEAN, ketahanan pangan Indonesia tergolong cukup kuat yakni menduduki peringkat keempat. Di samping itu, Indonesia terus berupaya memperkuat ketahanan pangan dalam menjaga kestabilan harga dan ekspektasi inflasi yang dapat berpengaruh terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat.

Tantangan:

Memperkuat kebijakan ketahanan pangan menjadi hal penting dalam upaya membangkitkan perekonomian nasional di tengah risiko disrupsi ekonomi pangan. Meskipun ketahanan pangan Indonesia menguat pada tahun 2022 setelah sempat melemah sepanjang dua tahun ke belakang, sejumlah tantangan tetap mewarnai kondisi ketahanan pangan nasional. Terjadinya perubahan iklim membuat Indonesia rentan akan bencana ekologis dan berdampak serius pada produktivitas. Selain itu, terdapat urgensi penguatan ekosistem inovasi pangan dan pertanian untuk keberlanjutan dan ketahanan pangan. Sejumlah tantangan yang harus dihadapi ke depan baik dalam aspek ketersediaan pasokan (*availability*), keterjangkauan pangan (*affordability*), kualitas nutrisi dan keamanan makanan (*quality and safety*), serta keberlanjutan dan adaptasi (*sustainability and adaptation*). Oleh karena itu, penguatan kebijakan ketahanan pangan pada tahun 2023 perlu terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Respons Kebijakan:

Sejumlah tantangan ketahanan pangan yang ada menjadi dasar dalam perumusan penguatan kebijakan pangan Indonesia. Pada aspek ketersediaan pasokan (*availability*), kebijakan peningkatan produksi pertanian perlu ditekankan dan memerlukan insentif untuk melakukan perubahan teknologi. Selain itu, perlu memberikan pelatihan kepada petani

melalui penyuluhan pertanian agar petani dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas produk pertanian. Penyuluhan pertanian dapat dikolaborasikan dengan penggunaan teknologi digital melalui penggunaan aplikasi yang dapat memonitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Terkait dengan aspek keterjangkauan pangan (*affordability*), perlu dilakukan penekanan kebijakan dalam pengembangan sistem logistik dan distribusi pangan yang efektif dan efisien. Mengoptimalkan manajemen logistik dan distribusi pangan karena peranannya sangat krusial bagi ketahanan pangan agar bahan pangan terdistribusikan dengan maksimal hingga sampai ke tangan konsumen. Selain itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pangan yang cukup di pasar dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun untuk ketersediaan pasokan perlu dilakukan penguatan produksi domestik, penguatan stok nasional, dan penguatan kelembagaan.

Penguatan ketahanan pangan pada aspek kualitas nutrisi dan keamanan makanan (*quality and safety*), perlu berfokus pada diversifikasi pangan dan peningkatan penyediaan pangan sehat, beragam, bergizi, sehat, aman (B2SA) dan terjangkau. Dalam program diversifikasi pangan diperlukan regulasi dan insentif pemerintah agar menarik partisipasi investor dan pihak swasta sehingga dapat mendorong produksi pangan lokal maupun pengembangan produk turunannya. Dalam sisi peningkatan keamanan pangan, pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat harus memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan.

Memperkuat kebijakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan adaptif sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Terdapat peran pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan praktik pertanian yang berkelanjutan dan adaptif. Hal ini termasuk mempromosikan penggunaan varietas tanaman yang tahan iklim, penggunaan teknologi pertanian yang lebih ramah lingkungan, pengembangan varietas tanaman yang tahan kekeringan, serta pengembangan sistem irigasi yang lebih efektif. Mengingat perubahan iklim yang semakin tidak terkendali, membuat Indonesia rentan akan bencana ekologis. Oleh karena itu, penguatan kebijakan ketahanan pangan harus mencakup program yang berkelanjutan dan adaptif (*sustainability and adaptation*) untuk mewujudkan invensi yang ada.

Dengan adanya sejumlah tantangan yang dihadapi ke depan, dibutuhkan reformasi sistem inovasi pertanian yang dapat diadopsi oleh petani. Penguatan digitalisasi, daya saing, dan posisi petani dalam rantai nilai perlu dipertimbangkan lebih jauh. Pemerintah juga perlu memprioritaskan

R&D dan penyuluhan pertanian untuk menemukan solusi inovatif agar dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem pangan di Indonesia. Salah satu program unggulan ketahanan pangan yakni pengembangan *food estate*, menjadi alternatif sumber pangan yang membutuhkan jangka waktu lama, namun demikian hal tersebut perlu untuk terus dilakukan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan dan peran setiap individu dalam mencapainya sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ketahanan pangan.

Ke depan, untuk mendukung ketahanan pangan perlu mendukung industri pangan baik secara jangka pendek dan jangka menengah-panjang. Hal ini pada gilirannya akan mengarah pada kebijakan hilirisasi pangan. Kaitannya dengan hal ini, kebijakan yang dilakukan pertama adalah penguatan hilirisasi pangan. Kedua, strategi hilirisasi pangan wajib mempertimbangkan potensi sumber daya dan kearifan lokal, meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja baru, dan berkontribusi pada pengembangan wilayah dan ekonomi lokal. Ketiga, hilirisasi industri pangan mensyaratkan kepastian hukum dan iklim usaha dalam suatu tata guna lahan, kejelasan zonasi, keseimbangan ekologis dalam pemanfaatan sumber daya berkelanjutan. Keempat, dukungan digitalisasi pada rantai nilai pangan, serta konsistensi kebijakan dalam negeri dalam pemberdayaan petani dan nelayan kecil, akses pembiayaan.

3.2.9 Penguatan Kebijakan Sektor Energi Baru Terbarukan (EBT)

Dari berbagai upaya percepatan transisi energi dan pengembangan sumber daya EBT, diperlukan penguatan sinergi kebijakan, kerja sama, dan komitmen para pemangku kepentingan sektor energi. Hal ini agar dapat mempercepat transisi energi inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, implementasi pendanaan JETP (*Just Energy Transition Partnership*) sebesar 20 miliar dolar AS atau setara dengan Rp300 triliun dapat direalisasikan dengan optimal. Dana yang berasal dari investasi publik dan swasta dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah, diharapkan dapat mempercepat target dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan. Target tersebut antara lain: (i) Pemanfaatan energi baru terbarukan setidaknya 34% bersumber dari energi baru terbarukan tahun 2030; (ii) *Net Zero Emissions* sektor ketenagalistrikan tahun 2050, lebih cepat 10 tahun dari proyeksi awal; (iii) Emisi sektor ketenagalistrikan tidak melebihi 290 juta ton CO₂ pada tahun 2030; dan (iv) *Peaking* emisi sektor ketenagalistrikan diproyeksikan terjadi pada tahun 2030.

Tantangan:

Kebijakan pengembangan sektor energi menjadi tantangan bagi pemerintah.

Hal ini tidak terlepas dari peningkatan kebutuhan energi seiring dengan peningkatan populasi. Sementara itu, sumber daya yang tersedia semakin terbatas. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada upaya peningkatan kapasitas energi untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan. Salah satunya menyeimbangkan permintaan energi ke depannya dengan melakukan transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Sebagai wujud nyata komitmen implementasi transisi energi, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan harga karbon pada tahun 2023. Kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk *carbon cap and trade* yang bertujuan untuk menentukan batas atas dalam emisi karbon di beberapa sektor tertentu dan memperkenalkan perdagangan dan skema pajak karbon. Selain itu, pemerintah juga telah menargetkan pencapaian proporsi energi baru terbarukan sebesar 23% dari total sumber energi pada tahun 2025. Untuk mendukung implementasi transisi energi, mekanisme transisi energi juga menjadi salah satu pembahasan utama Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023.

Dalam mendukung transisi energi penggunaan EBT, Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Terutama untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan target emisi nol bersih pada tahun 2060. Pemerintah terus berupaya melakukan diversifikasi sumber energi dan mendorong pengembangan energi baru terbarukan. Saat ini pemanfaatannya baru mencapai 12,6 GW, padahal potensinya mencapai lebih dari 3.600 GW. Selain itu, infrastruktur EBT perlu terus didorong pembangunannya agar akses energi merata ke seluruh wilayah Indonesia. Upaya mengakselerasi pengembangan infrastruktur energi dan transisi energi ke sumber energi baru terbarukan tentunya perlu didukung kebijakan dan pembiayaan yang memadai. Oleh sebab itu, penguatan kebijakan energi perlu dilakukan sebagai langkah penting untuk menghadapi berbagai tantangan dalam sektor energi dan mencapai target yang telah ditentukan.

Respons Kebijakan:

Penguatan kebijakan energi nasional tahun 2023 harus terus difokuskan pada pengembangan sumber daya EBT dan transisi energi seperti pengembangan energi biomasa, wood pellet dan lainnya. Hal ini agar dapat menjaga ketahanan energi serta mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah terkait yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu optimalisasi sumber daya EBT melalui jaringan smart grid dan program REBID (*Renewable Energy Based Industrial Development*). Program *super grid* berfokus pada peningkatan pengembangan EBT, menyediakan dan memperluas akses energi, serta menjaga stabilitas dan keamanan transmisi. Di sisi lain, program REBID berfokus pada upaya percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam

skala besar di daerah yang beban energinya rendah dan potensi EBT melimpah. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga bermitra dengan Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP). Pemerintah juga terus mendorong berbagai kebijakan energi, salah satunya tingkat campuran mandatori biodiesel akan kembali ditingkatkan menjadi 35% (B35) yang diimplementasikan pada Februari 2023. Program B35 tersebut dilakukan untuk menekan impor solar dan sebagai langkah antisipasi lonjakan harga minyak dunia. Selain itu, program B35 juga diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya Energi Baru Terbarukan (EBT). Sejalan dengan penerapan B35, Kementerian ESDM meningkatkan jumlah biodiesel yang dialokasikan tahun 2023 menjadi 13,15 juta (kL), sementara itu penjualan biosolar diproyeksikan mencapai 37.567.411 juta (kL). Di samping itu, pemerintah juga tengah mengupayakan kemandirian Indonesia dalam sektor energi yang bergantung terhadap sektor otomotif yakni Bahan Bakar Minyak (BBM). Kemandirian energi dapat dicapai selama BBM bisa dikonversikan sebagian melalui biodiesel dan yang lainnya dikombinasikan dengan *electric vehicle*.

Peningkatan infrastruktur energi menjadi bagian penting dari penguatan kebijakan energi Indonesia. Pembangunan pembangkit listrik baru, jaringan transmisi, dan distribusi listrik terus dilakukan untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pada tahun 2023 terus mendorong pembangunan infrastruktur energi di antaranya yakni pembangunan Penerangan Jalan Umum - Tenaga Surya (PJU-TS) sebanyak 31.075 unit, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebanyak 3 unit, serta Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) sebesar 7.500 unit. Pembangunan infrastruktur energi tersebut diperuntukkan kepada masyarakat Indonesia yang sulit terjangkau jaringan listrik.

Pengembangan infrastruktur energi dan transisi ke sumber daya EBT memerlukan pendanaan dan investasi yang besar. Dalam hal ini, pemerintah perlu terus melakukan pemenuhan pembiayaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong partisipasi sektor swasta, dan mencari sumber pendanaan alternatif seperti pendanaan berkelanjutan dan kerja sama internasional, sebagaimana yang ditempuh melalui skema pendanaan transisi energi *Just Energy Transition Partnership* (JETP) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022.

3.2.10 Penguatan Kebijakan Sektor dalam Perdagangan dan Keuangan Internasional

Ketahanan ekonomi nasional tidak lepas dari upaya dalam mendorong penguatan perdagangan dan keuangan internasional. Kondisi perdagangan internasional Indonesia pascapandemi Covid-19 mengalami optimisme yang kuat. Hal ini ditandai dengan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2023 tetap tinggi sebesar 144,2 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan April 2022 sebesar 135,7 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa ini dinilai mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Meski demikian, World Trade Organization (WTO) menunjukkan bahwa perdagangan melambat pada tahun 2023. Pertumbuhan *trade* akan melambat sebesar 1,7% pada 2023 dampak dari peningkatan harga komoditas global. Selain itu, ketegangan perdagangan antara negara-negara terus menjadi isu penting. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dimulai pada tahun 2018 telah menghasilkan kenaikan tarif dan pembatasan perdagangan antara kedua negara tersebut. Munculnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan beberapa mitra dagangnya lainnya juga memberikan dampak negatif pada perdagangan global.

Tantangan:

Secara umum tantangan utama ekonomi Indonesia adalah menjaga momentum pemulihan ekonomi pada banyak sektor ekonomi. Tantangan lainnya yaitu mengatasi permasalahan yang timbul akibat adanya bidang-bidang usaha yang memang diperkirakan tidak akan dapat bangkit lagi, memperkuat faktor penunjang perubahan fundamental perilaku ekonomi seperti digitalisasi dan mobilitas yang meningkat. Selain itu, perlu menjawab berbagai tantangan lama yang mengemuka kembali bahkan dengan intensitas yang lebih besar seperti masalah ketidakpastian iklim, masalah kemiskinan dan kesenjangan, dan masalah pangan dan gizi. Hal ini diperberat dengan tantangan operasional seperti kenaikan suku bunga, inflasi dan penurunan ekspor.

Kondisi keuangan internasional menunjukkan peningkatan tekanan utang pada beberapa negara berkembang di satu sisi, dan pengetatan keuangan global di sisi lain. Kombinasi kedua hal ini akan dan telah menimbulkan situasi yang kurang kondusif untuk pertumbuhan. Harga-harga komoditas internasional memasuki fase ketidakpastian kembali setelah terjadi penurunan cukup drastis akibat normalisasi harga pada triwulan terakhir 2022 dan awal 2023. Hal ini terjadi pada kelompok energi maupun komoditas pangan dan pertanian.

Upaya untuk membangkitkan sekaligus membangun ketahanan ekonomi nasional akan berhadapan dengan prediksi terjadinya ancaman resesi ekonomi global. Hal ini dapat berdampak pada langsung maupun tidak langsung pada penurunan permintaan ekspor produk Indonesia dari negara-negara mitra dagang utama, penurunan harga beberapa komoditas andalan ekspor, kenaikan suku bunga di negara-negara lain yang menyebabkan aliran modal mengalir ke luar negeri, meningkatnya beban biaya usaha akibat depresiasi rupiah ditambah dengan masih mahalannya produk-produk esensial yang terkena akibat langsung dari tekanan masalah geopolitik.

Tantangan lain yang dihadapi ke depan adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual dan risiko stabilitas keuangan global. Pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti pencurian hak cipta atau merek dagang, dapat merugikan perusahaan dan negara yang memiliki inovasi dan produk yang terlindungi. Tantangan ini dapat mempengaruhi perdagangan internasional dan daya saing suatu negara. Risiko stabilitas keuangan global menunjukkan tren peningkatan sejak Oktober 2022, utamanya pada sektor perbankan. Pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed dapat memicu terjadinya *capital outflows* pada negara-negara berkembang. Oleh karena hal tersebut tentu akan meningkatkan risiko sistemik yang dapat berdampak buruk pada kepercayaan pasar terhadap resiliensi sistem keuangan global.

Ketidakpastian tentang pertumbuhan ekonomi global atau regional dapat mempengaruhi pasar keuangan. Ketika ada kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi, resesi, atau perubahan struktural dalam perekonomian global, investor cenderung menjadi lebih *risk-averse* dan pasar menjadi lebih tidak stabil.

Respons Kebijakan:

Di tengah ekonomi Indonesia yang telah berhasil melewati badai pandemi dengan relatif baik. Indonesia dapat meningkatkan kerja sama dalam organisasi regional dan multilateral dalam upaya memperkuat perdagangan dan keuangan internasional. Kerja sama tersebut dapat dilakukan seperti dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau Uni Eropa. Kerja sama ini dapat membantu mengatasi hambatan perdagangan dan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih terbuka dan adil. Mendorong kesepakatan perdagangan bebas bilateral atau multilateral seperti Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) dapat membantu menciptakan akses pasar yang lebih besar dan mengurangi proteksionisme. Diversifikasi pasar dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu pasar tertentu dan mengurangi risiko dari fluktuasi ekonomi atau kebijakan proteksionisme di pasar utama.

Adopsi dan penegakan hukum yang kuat dalam melindungi hak kekayaan intelektual juga perlu diperhatikan. Ini akan memberikan insentif bagi inovasi dan investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta meningkatkan kepercayaan investor dalam perdagangan internasional. Komunikasi yang baik antara negara-negara dapat membantu mengatasi perbedaan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa. Negosiasi yang efektif dan dialog yang terbuka dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam hubungan perdagangan internasional.

Pengembangan kebijakan dan instrumen yang efektif untuk mengelola risiko keuangan, seperti fluktuasi mata uang atau krisis keuangan diperlukan untuk memperkuat posisi neraca perdagangan. Ini termasuk pengawasan perbankan yang kuat, kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana, serta instrumen keuangan yang dapat melindungi dari risiko fluktuasi mata uang. Strategi tersebut dapat membantu negara-negara mengatasi tantangan di perdagangan internasional dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kerja sama lintas negara.

Langkah penting yang perlu diperhatikan adalah dengan terus mendorong investasi dan menegaskan komitmen menuju transisi ekonomi hijau. Inisiatif dunia usaha untuk melakukan langkah-langkah strategis yang sejalan mendukung kesiapan Indonesia itu. Program-program seperti *'close-loop economy'* yang didorong oleh sejumlah perusahaan terkemuka dalam PISAgro misalnya sangat mendukung strategi dasar peningkatan investasi dan transisi menuju ekonomi hijau. Atau dorongan hilirisasi yang bukan hanya dilakukan untuk tambah tetapi juga untuk usaha pertanian bersama dengan *stakeholders* terkait juga menjadi bagian dari strategi penting pembangunan ekonomi nasional.

3.3 Memantapkan Integrasi Kebijakan Sektoral untuk Pemulihan

Integrasi kebijakan erat kaitannya dengan upaya bersama untuk mengoptimalkan tercapainya pembangunan nasional yang holistik dan berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan perkembangan indikator makroekonomi dan sektor riil yang membaik, serta prospek pertumbuhan yang kuat dengan juga dibarengi peningkatan daya saing. Pencapaian tujuan pertumbuhan yang holistik dan berkelanjutan tersebut tentunya tidak dapat dicapai jika hanya bertumpu pada satu instrumen kebijakan saja, sehingga perlu pendekatan yang integratif melalui penggabungan/bauran dari berbagai lini kebijakan sektoral baik dari sisi kelembagaan, sektor keuangan, lingkungan, pendidikan dan pembangunan yang saling melengkapi untuk dapat menghasilkan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian yang membaik tentu tidak terlepas dari dampak positif pengelolaan makroekonomi yang disiplin dan sehat serta berorientasi ke depan. Kebijakan fiskal terlihat solid, ditandai dengan defisit APBN yang mengarah ke level fundamentalnya serta belanja yang lebih berkualitas. Kebijakan moneter juga konsisten ditempuh dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga inflasi terus menurun dan nilai tukar yang terjaga. Sementara itu, kebijakan struktural terus diperkuat guna memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan efisiensi perekonomian.

Dinamika pemulihan sektor riil sebagaimana dirangkum pada bab ini juga perlu disikapi dengan antisipasi dan kesiapan kebijakan yang tepat. Hal ini penting terutama dalam rangka menghindari munculnya eksternalitas negatif yang justru berdampak kepada inefisiensi dalam pembangunan, yang pada gilirannya turut berdampak kepada pencapaian pertumbuhan dengan biaya dan ongkos sosial yang lebih tinggi daripada seharusnya. Kesiapan ini pada satu sisi terkait dengan kemampuan perekonomian untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki, dan pada sisi lain kesiapan juga berkaitan dengan kemampuan menyusun strategi serta mengeksekusi kebijakan itu sendiri.

Mencermati berbagai kondisi di atas, dengan mengoptimalkan integrasi kebijakan sektoral regulator dapat meraih manfaat dari 3 (tiga) aspek:

- Pertama, peningkatan efisiensi yang mengintegrasikan kebijakan dapat menghindari tumpang tindih dalam program dan proyek, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.
- Kedua, integrasi kebijakan mampu memberikan dampak positif yang lebih besar ketika berbagai sektor kebijakan dilaksanakan secara terkoordinasi dibandingkan ketika beroperasi secara terpisah, manfaat positif yang lain adalah integrasi kebijakan membantu regulator dalam menasar lebih dari satu sasaran kebijakan melalui pendekatan solusi terpadu.
- Ketiga, mencegah kemungkinan terjadinya konflik kebijakan, karena kita dapat mengidentifikasi langsung interaksi antarkebijakan serta potensi mispersepsi yang timbul, kondisi ini dapat membantu menghadirkan bentuk kebijakan yang lebih konsisten dan seimbang.

Integrasi kebijakan juga menjadi suatu catatan positif yang sudah pernah dilakukan bahkan ketika pemerintah bersama otoritas dan pemangku kebijakan terkait berusaha keras menghadapi krisis akibat pandemi. Dalam implementasinya, strategi kebijakan dibagi dalam beberapa *time frame* rekomendasi kebijakan yaitu: (i) Strategi kebijakan jangka pendek,

antara lain melalui penguatan pada kebijakan kesehatan dalam masa transisi, mendorong daya beli masyarakat, akselerasi stimulus fiskal; (ii) Strategi jangka menengah-panjang, antara lain dengan mendorong keberhasilan implementasi PEN pada sektor-sektor potensial, relaksasi ketentuan untuk mendukung perbaikan ekspor serta mendorong digitalisasi dalam memudahkan transaksi keuangan; dan (iii) Melanjutkan reformasi struktural ekonomi, antara lain melalui pemulihan kegiatan investasi dan iklim usaha yang kondusif, penguatan stabilitas sistem keuangan, penguatan struktur fiskal, serta (iv) Mendorong upaya penggalan sumber-sumber pertumbuhan baru.

Ke depan, tentunya jalan pembangunan ekonomi ke depan belum sepenuhnya lepas dari kondisi ketidakpastian yang cukup tinggi sebagaimana hasil pengamatan pemangku kebijakan terkait dalam forum KSSK. Prospek ekonomi global dan domestik tentunya akan bergantung pada keberhasilan dalam memitigasi efek samping negatif dari kebijakan pemulihan yang agresif serta memastikan optimisme pelaku ekonomi tetap terjaga dalam menstimulasi konsumsi dan investasi ke perekonomian. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam *press release* KSSK bulan Agustus 2023 lalu yang menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia di triwulan II 2023 diperkirakan masih tumbuh kuat, terutama ditopang peningkatan konsumsi rumah tangga dan tren ekspansif aktivitas manufaktur yang mulai membaik dan berada pada level ekspansi sejak bulan Juli 2023 (53,3). Sementara itu berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi.

BAB IV

HILIRISASI UNTUK MEMPERKUAT DAYA SAING EKONOMI NASIONAL

Kebijakan transformasi sektor riil perlu terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia Maju. Dari pendekatan *endogenous growth model*, salah satu kebijakan transformasi yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi adalah hilirisasi sumber daya alam (SDA). Hilirisasi pengolahan *primary product* ke industri berbagai turunannya akan meningkatkan kapasitas penawaran ekonomi (*aggregate supply*) melalui kenaikan modal serta mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan (*aggregate demand*) dengan kenaikan nilai tambah ekspor. Hal ini pun sejalan dengan Bappenas (2019) yang menekankan posisi industrialisasi sebagai salah satu dari pilar pembangunan untuk mencapai Visi Indonesia 2045 menjadi negara maju.

Hilirisasi SDA akan memperkuat struktur industri manufaktur seiring dengan meningkatnya produktivitas dan nilai tambah dari output. Studi literatur menunjukkan peran penting dari industri manufaktur sebagai salah satu prasyarat menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita tinggi (Szirmai, 2012; Rodrik, 2013; dan UNIDO, 2013). Faktor yang diidentifikasi sebagai kontribusi industri manufaktur dalam mendorong lompatan pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas, yang merupakan kunci dari reformasi struktural. Hal ini selanjutnya meningkatkan pendapatan per kapita seiring nilai tambah dan daya saing ekspor yang lebih tinggi. Hausmann *et al.* (2007) dan Lall *et al.* (2005) menyimpulkan bahwa kompleksitas dari produk ekspor turut memengaruhi lompatan tingkat pendapatan. Negara berpendapatan tinggi memiliki kemampuan memproduksi barang kompleks dengan dukungan teknologi dan kapabilitas SDM, yang mendukung penguatan neraca transaksi berjalan dari sisi pendapatan ekspor. Pemetaan *cross-country* dalam periode lima tahun terakhir (Grafik 4.1) mengonfirmasi negara berpendapatan tinggi mencatatkan surplus transaksi berjalan. Sementara itu, negara berpendapatan menengah-rendah cenderung mencatatkan defisit transaksi berjalan.

Penguatan struktur industri manufaktur Indonesia melalui hilirisasi tak lepas dari SDA yang menjadi *endowment*. Kekuatan *endowment* SDA ini juga menyebabkan besarnya ketergantungan perekonomian Indonesia pada industri pengolahan SDA. Dalam kerangka pikir secara makro, keberadaan dari hilirisasi SDA mendorong pengembangan industri *high-tech* yang

memproduksi barang kompleks bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global. Hal ini akan mendukung peningkatan ekspor, integrasi dalam ekosistem *global value chain* (GVC), serta turut mengurangi ketergantungan impor, yang seluruhnya akan berdampak pada neraca perdagangan maupun neraca transaksi berjalan. Studi oleh Bank Indonesia (2022) mengonfirmasi dampak hilirisasi SDA dalam mendukung penguatan struktur industri manufaktur dengan adanya penciptaan produk yang lebih bernilai tambah dan memiliki kompleksitas lebih tinggi. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas industri nasional untuk memproduksi barang kompleks juga akan berdampak pada kemampuan memenuhi permintaan domestik, atau dengan kata lain, hilirisasi mendukung substitusi impor. Lebih lanjut, studi ini juga mengonfirmasi peran hilirisasi SDA dalam pengembangan *local value chain* (LVC), seiring dengan terbentuknya industri hilir di suatu wilayah yang bahan baku ataupun barang antaranya dipasok dari wilayah yang lain.

Aspek penting lain dari penguatan struktur industri manufaktur yang perlu menjadi perhatian, termasuk melalui hilirisasi, adalah sejauh mana *spillover* ke perekonomian dapat didorong secara optimum. Industrialisasi umumnya dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja secara luas, terutama dengan terbentuknya ekosistem aglomerasi. Dalam hal ini, perhatian pada dampak *forward-backward linkage* dari industri manufaktur menjadi penting. Grafik 4.2. memberikan gambaran seberapa besar dampak dari perubahan *output* industri manufaktur pada *output* sektor ekonomi lain. Salah satu faktor yang dapat mendorong optimalnya *spillover* dari industri manufaktur ke perekonomian adalah terciptanya ekosistem LVC yang terintegrasi. Semakin kuat LVC melalui integrasi secara *end-to-end* dalam satu ekosistem industri manufaktur, maka akan semakin besar pula potensi *spillover* ke sektor ekonomi lain. Hal ini turut menjadi kunci dukungan pada aspek inklusi dari pengembangan industri manufaktur.

Grafik 4. 1 Perbandingan Transaksi Berjalan Negara Berpendapatan Tinggi & Menengah



Sumber: World Bank, diolah

Grafik 4. 2 Dampak Perubahan Output Industri Manufaktur pada Sektor Ekonomi

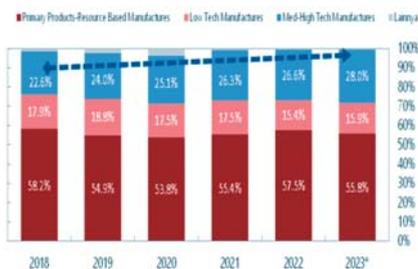


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Bila dicermati, struktur industri manufaktur Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir terindikasi mengalami pergeseran dari aspek tingkat teknologi ekspor, di tengah situasi pandemi Covid-19. Grafik 4.3 menunjukkan tren peningkatan distribusi nilai ekspor yang tergolong dalam kategori produk *medium-high tech*. Hal ini tentu saja tak lepas dari kontribusi kebijakan dan implementasi program hilirisasi SDA terutama SDA pertambangan, melalui pembangunan *smelter* dan kebijakan tata kelola yang mendukung terjadinya hilirisasi. Salah satu cerminan dari dukungan hilirisasi SDA pertambangan pada *upgrading* dari produk ekspor adalah pada distribusi nilai ekspor produk *medium-high tech* yang tinggi di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) sebagai sentra hilirisasi nikel (Grafik 4.4).

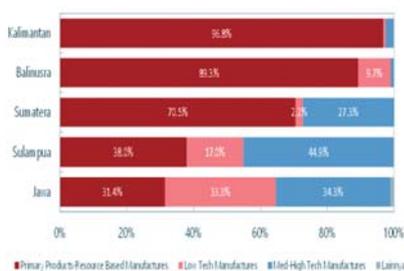
Meski terdapat tren perbaikan struktur ekspor produk manufaktur, pangsa sektor industri manufaktur dalam PDB cenderung menurun. Satu faktor yang berpengaruh tentunya dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya efek *scarring* dan membutuhkan fase pemulihan secara bertahap. Namun, penurunan pangsa PDB industri manufaktur tetap perlu mendapat perhatian. Hal ini terutama dalam konteks menghindari terjadinya fenomena *middle income trap*. Studi dari ADB (Felipe *et al.*, 2014) menemukan bahwa pangsa lapangan kerja manufaktur menjadi faktor yang lebih dominan dalam menghindari *middle income trap*. Hampir seluruh negara berpendapatan tinggi mencatat pangsa lapangan kerja manufaktur lebih dari 18%–20% sejak tahun 1970-an. Adapun pangsa tenaga kerja manufaktur Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar 14,2%, yang sebagian besar didominasi oleh tenaga kerja lulusan SMA ke bawah. Pangsa tenaga kerja dengan tingkat pendidikan diploma dan sarjana baru sebesar 7,5%. Hal ini tentunya akan membatasi upaya transformasi industri manufaktur, termasuk melalui program hilirisasi SDA pertambangan yang membutuhkan pekerja dengan kapabilitas memadai.

Grafik 4. 3 Perkembangan Distribusi Nilai Ekspor Indonesia Berdasarkan Tingkat Teknologi



Sumber: Bea Cukai (diolah)

Grafik 4. 4 Distribusi Nilai Ekspor per Wilayah Berdasarkan Tingkat Teknologi



Sumber: Bea Cukai (diolah)

Terbatasnya penyerapan tenaga kerja pada hilirisasi SDA pertambangan juga menjadi perhatian, meski disadari bahwa semakin mengarah ke hilir, industri hilirisasi SDA pertambangan akan lebih bersifat padat modal. Dalam konteks ini, terdapat kecenderungan hilirisasi pertambangan belum cukup inklusif karena relatif terbatasnya pembukaan lapangan kerja baru. Hal ini mendasari pertimbangan bahwa dukungan pada program hilirisasi dipandang tidak cukup hanya pada SDA pertambangan, namun juga perlu diperluas pada hilirisasi pangan yang berbasis pada pertanian, perkebunan, dan perikanan. Diharapkan perluasan ke hilirisasi pangan ini akan mampu menjaga inklusivitas dari program hilirisasi nasional yang tidak saja diharapkan mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing ekspor, namun juga mendorong perluasan lapangan kerja sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi.

4.1 Hilirisasi Pertambangan

4.1.1 Perkembangan Hilirisasi Pertambangan

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA) pertambangan. Berdasarkan laporan dari U.S. Geological Survey (USGS) awal tahun 2023, Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki cadangan yang besar untuk berbagai komoditas tambang jenis mineral. Pada komoditas nikel misalnya, Indonesia dilaporkan sebagai negara yang memiliki cadangan terbesar di dunia, yaitu sekitar 21% dari total cadangan dunia. Indonesia juga menjadi negara dengan cadangan timah terbesar dan cadangan bauksit keenam terbesar di dunia. Potensi cadangan timah di Indonesia diperkirakan sekitar 17,4% dari total cadangan dunia sedangkan bauksit adalah sekitar 3,2% dari total cadangan dunia. Di samping itu, Indonesia juga memiliki cadangan yang cukup besar untuk komoditas mineral lain seperti tembaga, 2,7% dari total cadangan dunia, kobalt, bijih besi, hingga emas dan perak. Secara lebih rinci, data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa sumber daya nikel Indonesia tersedia sebesar 143 juta ton dengan cadangan 49 juta ton pada tahun 2020. Sementara itu, sumber daya yang tersedia untuk bauksit adalah sebesar 5,5 miliar ton, tembaga sebesar 16 miliar ton, dan timah sebesar 2,76 juta ton. Adapun pada tahun yang sama, cadangan bauksit tercatat sebesar 3 miliar ton, tembaga sebesar 3 miliar ton, dan timah sebesar 2,72 juta ton. Hal ini masih ditambah dengan kekayaan tambang nonmineral seperti batu bara, minyak bumi, maupun gas bumi.

Dengan kekayaan cadangan yang dimiliki Indonesia tersebut, potensi pengelolaan SDA pertambangan untuk menjadi salah satu motor pendorong

perekonomian nasional sangat menjanjikan. Komoditas pertambangan secara umum memiliki peran strategis di Indonesia sebagai sumber energi, sumber devisa, serta bahan baku beberapa industri pengolahan lanjutan. Dalam tataran yang lebih makro, sektor pertambangan menjadi sektor yang dapat mendorong investasi, meningkatkan ekspor, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan penerimaan negara (Dorin *et al.*, 2014). Namun demikian, pemanfaatan SDA pertambangan di Indonesia sebagian besar masih dalam bentuk *raw material*, khususnya jika dilihat dari aspek kapasitas produksi produk hilir maupun dari sisi ekspor (Ika, 2017). Dengan kata lain, pengolahan lebih lanjut untuk beragam SDA tambang masih memiliki ruang untuk dikembangkan.

Hilirisasi pertambangan menjadi salah satu strategi dan pilar penting untuk mengoptimalkan pengelolaan SDA tambang dan memperkuat struktur ekonomi. Seperti yang telah diulas pada bagian pendahuluan hilirisasi, paling tidak terdapat tiga alasan utama mengapa hilirisasi pertambangan menjadi bagian krusial dalam memperkuat struktur ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2022).⁵ *Pertama*, hilirisasi SDA pertambangan dapat mendukung penguatan struktur industri pengolahan (manufaktur) dengan adanya penciptaan barang yang bernilai tambah serta memiliki kompleksitas lebih tinggi. Keberadaan produk hilir yang semakin kompleks diharapkan dapat mendorong ekspor dan juga memperkuat posisi Indonesia dalam GVC. *Kedua*, peningkatan kapabilitas industri nasional untuk membuat produk hilir juga secara langsung dapat memenuhi permintaan domestik terkait. Dengan kata lain, hilirisasi juga dapat mendukung substitusi impor. *Ketiga*, hilirisasi bahan tambang juga akan mendukung pengembangan LVC dan pertumbuhan inklusif seiring dengan terbentuknya industri produk hilir di suatu wilayah yang bahan baku ataupun barang antaranya dipasok dari wilayah yang lain.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong hilirisasi pertambangan agar dapat memberi manfaat yang lebih optimal bagi perekonomian nasional. Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 4.1, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagai momentum awal untuk mendorong kebangkitan dari program hilirisasi nasional. Dalam implementasinya, Pemerintah melakukan penyesuaian ketentuan sebelum pada akhirnya melarang ekspor konsentrat nikel pada Januari 2020. Larangan ekspor bahan mentah bertujuan agar komoditas tersebut diproses secara terintegrasi dan menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi di

⁵ Penguatan Struktur Ekonomi Indonesia: Tinjauan *Local Value Chain*, Hilirisasi, dan Industri Hijau. Bank Indonesia (2022)

dalam negeri. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi struktural untuk mendukung penguatan struktur industri dan mendorong peningkatan ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Kendati kebijakan tersebut menuai pendapat yang berseberangan, namun implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mendukung jalannya hilirisasi dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi perekonomian dalam jangka panjang. Sejalan dengan implementasi kebijakan tersebut, data Kementerian Perindustrian menunjukkan investasi pada industri lanjutan nikel, khususnya industri logam dasar, meningkat signifikan dan mencatat nilai tertingginya pada 2021 sebesar Rp118,1 triliun (Bank Indonesia, 2022). Pada Juni 2020, pemerintah menerbitkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 yang mengamankan pelarangan ekspor bijih bauksit per Juni 2023. Larangan ini diharapkan dapat memacu hilirisasi bauksit seperti yang terjadi pada nikel.

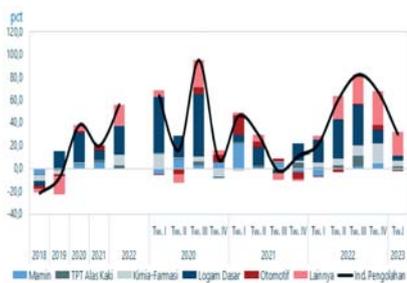
Gambar 4. 1 Lini masa Perkembangan Kebijakan Larangan Ekspor Mineral Mentah



Di samping pengetatan ekspor hasil tambang mentah, regulasi hilirisasi pertambangan turut didukung oleh berbagai kebijakan lain yang diarahkan untuk mendorong investasi di sisi hilir. Dukungan kebijakan lain tersebut antara lain adalah pemberian insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, kepada para pelaku usaha mulai dari tahap pembangunan fasilitas pemurnian (*smelter*) hingga tahap operasional. Bentuk dari kebijakan insentif ini misalnya adalah pembebasan pajak dalam rangka impor kebutuhan mesin operasional dan barang strategis lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menekan biaya investasi *smelter* bagi pelaku usaha. Pemberian insentif juga dilakukan melalui skema *tax holiday*, *tax allowance*, maupun *super deduction tax*. Selain berbagai kebijakan insentif tersebut, pemerintah juga memperkuat otomasi sistem perizinan berusaha dengan adanya *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) serta menerbitkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) pada tahun 2021 untuk meningkatkan daya saing investasi. Berbagai kebijakan di atas diambil Pemerintah untuk mendukung dan memastikan kesuksesan program hilirisasi SDA pertambangan di Indonesia.

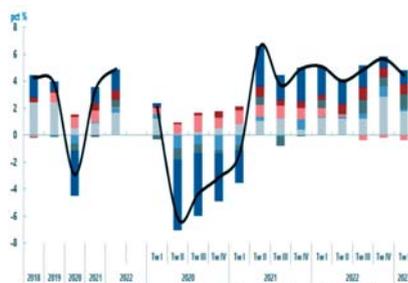
Langkah yang diambil Pemerintah untuk mengakselerasi peningkatan nilai tambah produk hilir tambang, yang dimulai dari nikel, telah menunjukkan hasil yang positif. Perkembangan positif dari hilirisasi nikel secara umum tercermin antara lain pada perkembangan investasi, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) pada industri logam dasar yang terus meningkat (Grafik 4.5). Secara bertahap, struktur ekspor nasional juga terindikasi membaik sejalan dengan peningkatan ekspor produk hilirisasi seperti *iron and steel* (HS 72). Pangsa ekspor produk ini telah meningkat menjadi 6,2% pada 2020 dari sebelumnya hanya 0,8% pada 2010 (Bank Indonesia, 2022). Lebih lanjut, capaian positif dari kebijakan hilirisasi pertambangan juga tercermin dari kinerja PDB subsektor industri logam dasar dalam tiga tahun terakhir. Kontribusi PDB subsektor industri logam dasar tetap positif di periode pandemi Covid-19 dan turut menopang kinerja perekonomian nasional. Kontribusi PDB subsektor industri logam dasar juga semakin meningkat dari tahun 2020 hingga triwulan I 2023 (Grafik 4.6).

Grafik 4. 5 Perkembangan Investasi PMA di Sektor Industri Manufaktur



Sumber: Kementerian Investasi, diolah

Grafik 4. 6 Perkembangan Kontribusi PDB dari Subsektor Utama Industri Manufaktur

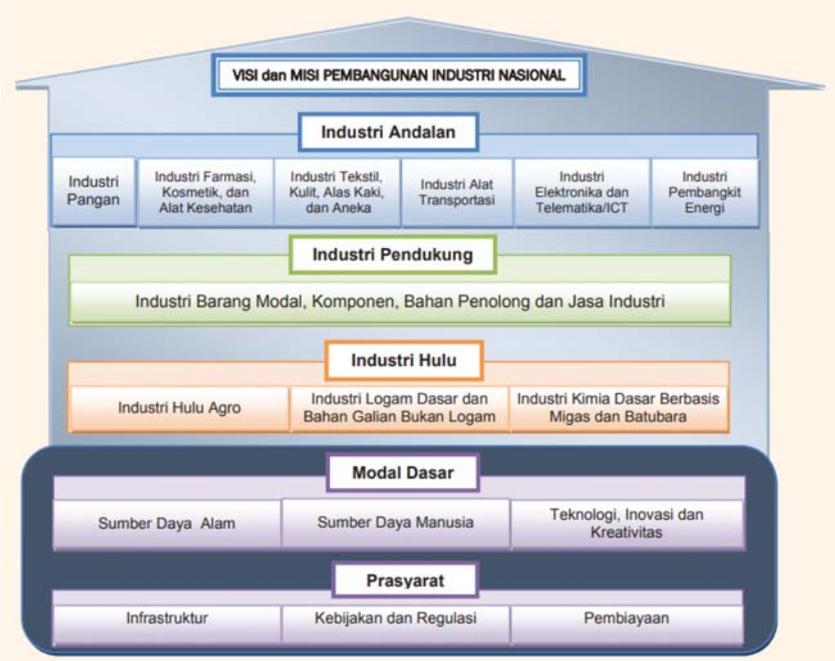


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Dampak positif dari kebijakan hilirisasi juga terlihat dalam kinerja neraca transaksi berjalan serta aspek perekonomian lainnya. Hilirisasi dinilai mendukung neraca perdagangan nasional menjadi lebih kompetitif. Hal ini salah satunya terlihat dari neraca perdagangan dengan negara mitra utama, terutama Tiongkok, yang mengalami penurunan defisit sebesar 40% (Bank Indonesia, 2022). Selain itu, ekspor produk hilirisasi juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak, stabilisasi nilai tukar, serta industrialisasi di kawasan timur dan pemerataan ekonomi di Indonesia (Kemenko Marves, 2022). Beberapa indikator inilah yang mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan hilirisasi dengan didukung tata kelola yang lebih baik untuk komoditas pertambangan lainnya selain nikel.

Pengembangan dan penguatan hilirisasi tentunya perlu diarahkan kepada produk yang lebih kompleks, disesuaikan dengan ketersediaan SDA pertambangan dan prospek permintaan global. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan beberapa SDA mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah. Di samping itu, berbagai mineral tersebut juga dinilai memiliki prospek dan potensi *demand* yang cukup tinggi. Untuk nikel misalnya, mineral ini sangat dibutuhkan oleh industri *stainless steel* serta dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau *electric vehicle* (EV). Aluminium yang diolah dari bauksit juga dibutuhkan dalam produksi berbagai peralatan rumah tangga hingga *spareparts* pesawat terbang. Selanjutnya, tembaga juga penting dalam pembuatan kabel, barang elektronik, dan mesin, sedangkan timah memiliki aplikasi yang cukup luas dalam industri transportasi maupun telekomunikasi. Upaya untuk mendorong hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, maupun timah juga sejalan dengan strategi Pemerintah untuk memperkuat tata kelola mineral strategis serta arah pengembangan industri yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 (Gambar 4.2).

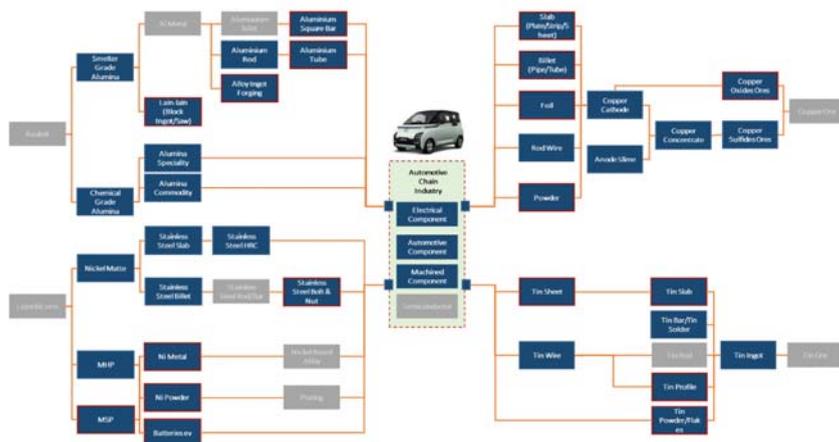
Gambar 4. 2 Kerangka Berpikir Hilirisasi Pertambangan



Sumber: Kementerian Perindustrian

Lebih lanjut, arah kebijakan hilirisasi juga sejalan dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih *sustainable* atau berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan potensi kebutuhan produk hasil hilirisasi pertambangan sebagai bahan baku utama untuk produk ramah lingkungan. Potensi permintaan produk hilir SDA tambang ke depan akan meningkat, terutama didorong oleh kebutuhan bahan baku untuk industri otomotif dalam pengembangan EV dan peningkatan penggunaan energi hijau yang ramah lingkungan (Bank Indonesia, 2022). Hal ini senada dengan publikasi dari McKinsey (2022) yang menyatakan bahwa mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah memang memiliki prospek cerah terkait kebutuhan untuk industri EV, jaringan kelistrikan, panel surya, bioenergi, serta sektor energi baru terbarukan lainnya. Hasil pemetaan prioritas produk hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, dan timah menunjukkan potensi pengembangan ekosistem industri EV (Gambar 4.3). Apalagi, komoditas-komoditas ini juga memiliki produk turunan yang kompetitif dan memberikan efek *trickle-down* terhadap ekonomi hampir di sepanjang rantai pasokannya. Oleh karena itu, pengembangan hilirisasi komoditas-komoditas tambang ini sangat penting untuk masa depan Indonesia dalam mencapai Visi Indonesia 2045.

Gambar 4. 3 Keterkaitan Produk Prioritas Hilirisasi dalam Ekosistem Industri EV



Sumber: Bank Indonesia

4.1.1.1 Perkembangan Hilirisasi Nikel

Hilirisasi komoditas nikel menjadi yang pertama didorong pengembangannya dan telah memberikan hasil yang cukup signifikan. Sebagai produsen nikel terbesar di dunia dengan pangsa produksi hingga 52,8% (USGS, 2023), Indonesia tentunya memiliki posisi strategis dalam rantai nilai nikel global

sehingga hilirisasi diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia. Secara umum, *high grade nickel* (dengan kadar nikel >1,7%) digunakan untuk produk-produk antara seperti *nickel pig iron* (NPI), feronikel, nikel *matte*, hingga produk hilir seperti *stainless steel*. Sementara itu, nikel kadar rendah (<1,7%) lebih banyak digunakan untuk industri bahan baku baterai. Kedua produk tersebut memiliki potensi permintaan yang tinggi, sejalan dengan terus meningkatnya kebutuhan *stainless steel* dan material untuk pembuatan baterai EV maupun komponen elektronik lain.

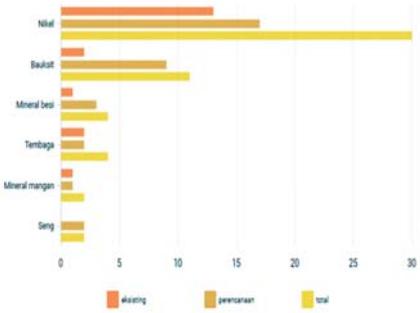
Perkembangan dari hilirisasi nikel terlihat dari perkembangan ekspor produk hilir nikel serta pembangunan dan operasional *smelter* nikel. Sejak pelarangan ekspor nikel mentah tahun 2020, penjualan ekspor produk hilir nikel tercatat mengalami peningkatan, sehingga neraca perdagangan membaik (Grafik 4.7). Pembangunan *smelter* juga masih terus berjalan, dengan jumlah terbesar ditargetkan dari penyelesaian proyek *smelter* nikel yaitu mencapai 30 *smelter* pada 2024. Untuk *smelter* yang ditargetkan beroperasi pada 2024, terdapat 16 *smelter* dengan *progress* pembangunan lebih dari 90%, sembilan *smelter* dengan *progress* antara 30-90%, dan lima *smelter* dengan progres kurang dari 30%. Secara spasial, pembangunan *smelter* nikel dilakukan di berbagai provinsi seperti Banten, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, hingga Maluku Utara. Proyek *smelter* nikel yang sedang dibangun di Indonesia diperkirakan dapat meningkatkan kapasitas produksi nikel sehingga dapat memberikan dampak signifikan terhadap nilai tambah dan ekspor komoditas nikel Indonesia.

Grafik 4. 7 Neraca Perdagangan Produk Turunan Logam Dasar



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 4. 8 Target Pembangunan Smelter 2021-2024



Sumber: Kemenko Perekonomian

Indonesia juga memiliki peluang pengembangan hilirisasi nikel dalam rantai energi baru terbarukan. Permintaan global yang terus meningkat untuk EV mendorong kebutuhan untuk produk hilirisasi nikel. Di satu sisi, investasi

dalam industri nikel untuk rantai energi baru terbarukan juga mulai meningkat, meskipun sebagian besar masih berfokus pada sektor hulu. Pembangunan *smelter High Pressure Acid Leach* (HPAL) yang menghasilkan bahan baku untuk baterai EV sedang berlangsung di Indonesia. Teknologi HPAL⁶ merupakan pengolahan dan pemurnian nikel limonit dengan melarutkannya dalam wadah bertekanan atau suhu tinggi (*autoclave*) dan selanjutnya dilakukan proses ekstraksi dari larutan konsentrat untuk mendapatkan mineral yang lebih murni, yaitu nikel dan kobalt.

4.1.1.2 Perkembangan Hilirisasi Bauksit

Indonesia memiliki potensi besar dalam hilirisasi bauksit untuk meningkatkan nilai tambah dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sebagai produsen bauksit ke-5 terbesar di dunia dengan pangsa sekitar 5,5% (USGS, 2023), Indonesia memiliki kesempatan emas untuk mengembangkan industri pemurnian bauksit dan produksi alumina khususnya untuk substitusi impor. Apalagi, hilirisasi dari bauksit dapat menghasilkan produk yang dapat diaplikasikan tidak hanya di manufaktur tetapi juga ke sektor transportasi dan konstruksi. Adanya penguatan infrastruktur *smelter* bauksit, Indonesia juga dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor dari negara lain, terutama Tiongkok. Peningkatan daya saing tersebut akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Indonesia serta membuka pintu bagi lebih banyak peluang investasi dalam industri bauksit dan alumina.

Meski neraca produk hilir bauksit (aluminium) masih defisit, pembangunan *smelter* bauksit juga telah menunjukkan progres yang positif. Terdapat tiga *smelter* dengan progres pembangunan lebih dari 90%. Hal ini menandakan kemajuan yang signifikan dalam implementasi hilirisasi sumber daya mineral bauksit. Selain itu, terdapat pula tujuh *smelter* dengan progress pembangunan antara 30-90%. Di sisi lain, terdapat satu *smelter* dengan progres pembangunan kurang dari 30%, yang menandakan adanya kendala atau tantangan tertentu yang perlu diatasi agar pembangunan fasilitas pemurnian bauksit dapat berjalan optimal. Adanya kebijakan pelarangan ekspor bauksit yang diberlakukan Juni 2023, pengembangan nilai tambah komoditas bauksit melalui hilirisasi atau pengolahan di dalam negeri diharapkan dapat diakselerasi.

⁶ *Smelter* yang sedang dibangun menggunakan dua teknologi utama yaitu: (i) Teknologi *Rectangular Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF) dengan kapasitas 4x72 MVA, terdiri atas empat lajur produksi untuk mengolah bijih nikel *saprolite*; dan (ii) Teknologi *High Pressure Acid Leaching* (HPAL) untuk mengolah bijih nikel *limonite* (bijih nikel kadar lebih rendah) untuk menghasil baterai EV.

4.1.1.3 Perkembangan Hilirisasi Timah

Indonesia juga memegang peranan penting dalam pengembangan industri hilirisasi timah di tingkat global. Sebagai produsen timah terbesar ke-2 di dunia dengan pangsa sekitar 23,9% dan berpusat di provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Indonesia hanya berada di belakang Tiongkok yang memiliki pangsa produksi sebesar 30,6% (USGS, 2023). Dengan demikian, pengembangan produk hilir timah diharapkan dapat meningkatkan integrasi Indonesia ke GVC berbagai industri pengguna timah. Berkat pangsa produksi dan cadangan yang signifikan, Indonesia memainkan peran penting sebagai salah satu *key player* dalam industri timah dunia. Untuk memperkuat posisinya di pasar global, Indonesia perlu terus mengembangkan hilirisasi produk timah guna meningkatkan daya saingnya.

Pengembangan hilirisasi timah di dalam negeri pada dasarnya telah dilakukan namun masih relatif terbatas dan perlu diperkuat. Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 4.7, neraca perdagangan produk turunan timah telah mencatat surplus, namun dinilai masih dapat ditingkatkan terutama dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik (menurunkan impor). Meskipun permintaan timah dari pasar global tetap berprospek tinggi, permintaan di dalam negeri masih rendah akibat terbatasnya pengembangan produk lanjutan domestik. Padahal, terdapat potensi yang besar karena produk hilir timah memiliki aplikasi yang cukup luas. Berbagai produk hilir dari komoditas timah antara lain digunakan atau dipasok ke industri elektronik, kimia dan farmasi, logam dasar, hingga ke sektor di luar industri yaitu sektor konstruksi.

4.1.1.4 Perkembangan Hilirisasi Tembaga

Tembaga juga merupakan mineral yang tidak kalah penting bagi Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar di dunia. Dalam pangsa produksi global, Indonesia memiliki porsi sebesar 4,2% (USGS, 2023). Potensi pertumbuhan komoditas tembaga Indonesia didukung oleh daya saing produk turunannya. Tembaga Indonesia memiliki potensi untuk bersaing dengan baik karena nilai tambah saat proses peleburan saat ini masih tergolong kecil dan terdapat hasil samping yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Namun demikian, pengembangan *smelter* dan pengolahan tembaga lebih lanjut di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar mencapai potensi yang optimal.

Meskipun permintaan dalam negeri masih sedang, hasil produksi dari *smelter* tembaga diperkirakan akan melebihi kebutuhan domestik. Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan ekspor. Seperti kita ketahui, berbagai produk

turunan tembaga juga memiliki aplikasi yang cukup luas baik di industri elektronik serta sektor konstruksi. Selain itu, dengan meningkatnya permintaan terhadap kendaraan ramah lingkungan, potensi permintaan tembaga di pasar domestik juga berpotensi meningkat. Hal ini masih didukung dengan potensi peningkatan adopsi dan penggunaan energi hijau seperti *solar photovoltaic* (PV) dan pembangkit listrik tenaga angin. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, Indonesia dapat terus meningkatkan peran dan kontribusinya baik di dalam ataupun luar negeri dengan harapan meningkatkan surplus neraca perdagangan produk turunan tembaga.

4.1.2 Tantangan Hilirisasi Pertambangan

Dalam mendorong hilirisasi pertambangan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan fokus komoditas mineral logam strategis, yaitu nikel, timah, tembaga, dan bauksit. Hal ini didasarkan pada *foresight* potensi Indonesia sebagai *global key player* dari produk hilirisasi SDA pertambangan dengan dukungan cadangan yang besar pada keempat komoditas mineral logam strategis tersebut. Selain itu, juga terdapat prospek dari pengembangan produk hilir unggulan yang menjadi fokus kebijakan pengembangan industri manufaktur unggulan, di antaranya industri kendaraan listrik, solar panel, serta elektronik. Potensi kuatnya permintaan pada produk hilir unggulan yang tergolong dalam barang kompleks, tidak hanya dari global, tetapi juga dari domestik.

Di tengah komitmen yang kuat dari Pemerintah dalam mendorong hilirisasi pertambangan yang terefleksi dari kebijakan tata kelola SDA mineral strategis, termasuk pelarangan ekspor dalam bijih mentah, berbagai tantangan masih membayangi. Dalam konteks

ini, salah satu kerangka pendekatan identifikasi tantangan hilirisasi pertambangan yang dapat diadopsi adalah dari konsep *trade competitiveness diagnostic* (TCD) oleh Reis dan Farole (2012). Kerangka TCD terdiri atas Perbaikan Faktor Produksi, Pengaturan dan Kelembagaan, serta Promosi dan Kerja Sama Perdagangan.

Secara umum, terdapat beberapa tantangan di setiap aspek sebagaimana disebutkan di atas. Tantangan pada aspek faktor produksi terkait dengan keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya energi, besarnya kebutuhan investasi di tengah pembiayaan yang terbatas, keterbatasan bahan baku domestik, hingga rendahnya daya saing produk hilir yang mengakibatkan terjadinya *mismatch*. Dari aspek pengaturan, kendala seperti belum optimalnya insentif fiskal dan nonfiskal, rendahnya pemanfaatan produk hilirisasi, serta

dukungan kebijakan teknis lainnya masih terjadi. Sementara, pada aspek promosi dan perdagangan, terindikasi perlunya perhatian atas hambatan tarif dan nontarif, isu afiliasi, sampai dengan implementasi *Free Trade Agreement* (FTA) yang belum tepat sasaran untuk menjaga daya saing produksi domestik.

4.1.2.1 Tantangan Hilirisasi Nikel

Dari aspek Perbaikan Faktor Produksi, hilirisasi nikel memiliki beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah akselerasi hilirisasi nikel yang dihadapkan pada risiko ketahanan cadangan nikel nasional. Potensi tinggi permintaan nikel telah mendorong investasi asing masuk ke sektor hilirisasi nikel, khususnya untuk pembangunan *smelter*. Jika tidak ada eksplorasi baru, cadangan nikel nasional saat ini diperkirakan akan habis dalam 10 tahun mendatang. Dengan kondisi tersebut, momentum prospek permintaan produk hilirisasi nikel ke depan dalam jangka panjang berisiko tidak dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.

Masih terkait dengan faktor produksi, perkembangan rantai nilai hilirisasi nikel dinilai belum optimal karena masih ada produk hilir yang mengalami defisit neraca perdagangan. Saat ini, rantai nilai hilirisasi nikel masih didominasi oleh produk *stainless steel*. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya pembangunan *smelter* pirometalurgi yang menghasilkan bahan baku *stainless steel*, seperti NPI dan feronikel. Sementara itu, jumlah *smelter* yang menggunakan metode hidrometalurgi untuk menghasilkan bahan baku baterai kendaraan listrik, seperti *mixed hydroxide precipitate* (MHP) dan *mixed sulfide precipitate* (MSP) masih terbatas.

Selain itu, terbatasnya ketersediaan tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan juga berpotensi menghambat produksi dari hilirisasi nikel. Kondisi ini menyebabkan industri masih tergantung pada tenaga ahli dari luar negeri. Sementara itu, faktor ketidakpastian harga nikel akibat belum adanya penetapan standarisasi harga komoditas nikel, khususnya untuk nikel *high grade*, juga memberikan ketidakpastian dalam produksi.

Tantangan hilirisasi nikel juga terkait dengan beberapa aspek Pengaturan dan Kelembagaan mengenai tarif impor. Kebijakan tarif bea masuk impor yang ada saat ini masih menjadi tantangan dengan perlunya harmonisasi untuk menjaga upaya penguatan LVC. Beberapa produk *stainless steel* belum mampu diproduksi untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Kondisi ini menyebabkan produk tersebut harus diimpor dan berpotensi menyebabkan defisit neraca perdagangan nikel. Hal ini tidak terlepas dari masih rendahnya tarif impor yang diterapkan. Berdasarkan PMK No. 6/PMK.010/2017, level

tarif impor yang diterapkan di beberapa produk hilir tersebut masih sama dengan tarif di produk hulu. Hal ini berpotensi menekan produksi dalam negeri karena harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah.

Tarif impor juga dikenakan untuk produk antara (bahan baku) yang belum bisa diproduksi di domestik, meski produk tersebut dibutuhkan oleh industri hilir untuk memproduksi barang kompleks bernilai tambah tinggi. Hal ini menyebabkan industri hilir memperoleh bahan baku dengan harga lebih tinggi yang meningkatkan biaya produksi, dan berpotensi menurunkan daya saing ekspor. Tantangan tersebut juga terindikasi pada rantai industri baterai EV, di mana bea masuk masih diterapkan untuk bahan baku lithium, mangan dan sodium karbonat.

Pada aspek Promosi dan Kerja Sama Perdagangan, terdapat *mismatch supply-demand* dan skema afiliasi yang menghambat pengembangan hilirisasi lanjutan nikel. Kondisi ini ditemukan pada mata rantai produk *stainless steel* di mana mayoritas *stainless steel* yang diproduksi oleh industri hulu diekspor ke perusahaan induk di Tiongkok. Kondisi ini mengakibatkan pasokan bahan baku terbatas untuk industri hilir domestik yang pada akhirnya harus dipenuhi melalui Impor. Kendala pasokan bahan baku di pasar domestik akibat isu afiliasi ini akan menjadi faktor penghambat pengembangan lebih lanjut dari industri hilir *stainless steel*. Selain itu, kebijakan terkait pengembangan ekosistem industri EV di Indonesia juga masih relatif terbatas. Beberapa kebijakan memang telah diimplementasikan untuk mendorong pengembangan industri EV maupun penjualan EV, di antaranya kemudahan impor bahan baku, insentif pajak, fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta pembangunan fasilitas SPKLU dan parkir khusus mobil listrik. Meski demikian, jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat (AS), kebijakan tersebut masih perlu diperluas dan didukung dengan kebijakan lain yang dapat mempercepat transisi ke EV.

4.1.2.2 Tantangan Hilirisasi Bauksit

Untuk komoditas bauksit, terdapat tantangan Perbaikan Faktor Produksi terkait kapasitas produksi yang belum optimal serta ketersediaan pasokan energi listrik. Kapasitas produksi alumina dan aluminium di Indonesia masih sangat terbatas di tengah potensi *excess* penambangan bijih bauksit pasca pelarangan ekspor. Pembangunan beberapa *smelter* alumina mengalami kendala investasi dan perizinan sehingga berpotensi menghambat penyerapan bijih bauksit. Sementara itu, ekosistem dari sisi hilir, khususnya industri aluminium di domestik sangat terbatas mengingat baru ada satu *smelter* yang sudah beroperasi. Kapasitas produksi *smelter* yang sudah

beroperasi saat ini adalah sebesar 250 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan aluminium domestik diperkirakan mencapai 1 juta ton per tahun. Pasokan listrik untuk kebutuhan operasi *smelter* alumina juga masih terbatas, di tengah tarif yang ditetapkan untuk industri relatif tinggi. Keterbatasan infrastruktur listrik ini terutama ditemukan di daerah *remote* yang sulit dijangkau oleh infrastruktur listrik pemerintah. Sementara dari sisi pembiayaan, perbankan domestik yang mengalirkan modal untuk pembangunan *smelter* alumina masih sangat terbatas, di tengah kebutuhan investasi yang sangat besar.

Pada aspek Pengaturan dan Kelembagaan, kelembagaan industri pengolahan bauksit juga masih belum efektif untuk mengakomodasi kebutuhan industri kecil. Keberadaan industri kecil yang banyak beroperasi secara terpisah menyebabkan inefisiensi, khususnya dalam mendapat bahan baku. Kebijakan aglomerasi wilayah industri sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi operasi *smelter*, terutama bagi industri yang wilayah operasinya saling berdekatan.

Kemudian, dari sisi Promosi dan Kerja Sama Perdagangan, terdapat tantangan terkait FTA. Penerapan kebijakan FTA menyebabkan daya saing industri alumina menurun, terutama dipengaruhi oleh pembebasan bea masuk untuk produk hilir bauksit. Pembebasan bea masuk menyebabkan harga barang impor produk hilir bauksit menjadi lebih rendah dan menghambat perkembangan industri lokal.

4.1.2.3 Tantangan Hilirisasi Timah

Dari sisi Penguatan Faktor Produksi, terdapat beberapa tantangan dalam mendorong hilirisasi timah. Tantangan pertama terkait dengan kebijakan larangan ekspor *raw material*. Penguatan hilirisasi melalui kebijakan intervensi sisi suplai dengan adanya larangan ekspor bijih mentah, cenderung kurang efektif untuk diterapkan di produk timah. Hal ini dipengaruhi oleh fase hilirisasi timah yang telah mencapai *tier* kedua (*forming*), relatif berbeda dengan logam lainnya yang fase hilirisasinya masih di fase hulu dan antara. Oleh karena itu, penguatan industri hilir seperti industri elektronik sangat diperlukan untuk dapat menyerap produk olahan timah tersebut.

Tantangan lain terkait dengan penyerapan produk hilirisasi timah oleh domestik yang masih relatif rendah, sehingga sebagian besar masih diekspor langsung. Sementara itu, sebagian besar bahan baku untuk produksi masih diimpor dengan harga yang relatif mahal, mengingat saat ini belum terdapat produsen lokal yang dapat memasok bahan baku tersebut. Nilai investasi

pembangunan *smelter* timah relatif cukup besar dan membutuhkan waktu pembangunan yang lebih lama.

Tantangan juga muncul terkait pemisahan izin yang diperlukan pelaku industri. Pemisahan antara Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) cukup mempersulit pelaku industri untuk menjalankan proses bisnis yang terintegrasi. Kendala ini bisa mempengaruhi minat investor dalam melakukan hilirisasi secara *end-to-end* dari hulu hingga hilir.

Selain itu, proses untuk mendapatkan izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) juga terindikasi cukup rumit dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal ini masih ditambah dengan proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk pembangunan *smelter* yang juga relatif lambat.

Pada aspek Pengaturan dan Kelembagaan, tantangan hilirisasi timah datang dari kebijakan terkait bea masuk impor dan kendala eksternal. Kebijakan penghapusan bea masuk impor untuk beberapa klasifikasi bahan baku industri menyebabkan harga produk impor timah lebih murah. Sementara itu, produk domestik masih dikenakan pajak PPN 11% yang menyebabkan harga produk lokal menjadi lebih mahal. Kondisi ini diprakirakan akan mengurangi daya saing industri domestik, meningkatkan impor produk hilir timah, serta membatasi perkembangan industri hilir nasional. Selain itu, belum terdapat Kawasan Industri (KI) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendorong ekosistem hilirisasi timah, di tengah masih banyaknya penambangan timah ilegal. Dari sisi eksternal, kendala penyerapan timah berasal dari terbatasnya akses pasar global untuk menyerap produk turunan hilirisasi timah. Kondisi ini dipengaruhi oleh industri global yang umumnya sudah memiliki pemasok tetap.

Untuk aspek Promosi dan Kerja Sama Perdagangan, tantangan yang ada yaitu perkembangan ekosistem industri akhir produk hilirisasi timah domestik yang masih terbatas. Permintaan timah dari industri elektronik, konstruksi, manufaktur makanan kaleng, dan perusahaan *food and beverages* (F&B) relatif terbatas. Keterbatasan teknologi dalam pengelolaan timah tingkat lanjut dan inovasi hilirisasi serta belum adanya kemitraan *research and development* (R&D) menyebabkan masih terbatasnya kapabilitas industri hilir.

4.1.2.4 Tantangan Hilirisasi Tembaga

Tantangan perbaikan faktor produksi pada hilirisasi tembaga berkaitan dengan terbatasnya kapasitas produksi produk antara serta harga gas yang tinggi. Kapasitas produksi dari produk antara tembaga masih terbatas, yang

menyebabkan beberapa produk antara tembaga untuk kebutuhan industri hilir masih harus diimpor. Di sisi lain, produksi tembaga dari sisi hulu seperti bijih tembaga dan katoda tembaga relatif cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan eksternal. Diperkirakan 51% produk katoda tembaga berpotensi langsung diekspor apabila kapasitas produksi industri hilir tidak meningkat.

Sementara itu, harga gas yang tinggi juga berpotensi meningkatkan biaya produksi produk hilir tembaga. Tekanan geopolitik turut menyebabkan kenaikan harga gas. Adapun faktor harga gas signifikan berpengaruh pada biaya produksi dalam proses hilirisasi tembaga, dengan kontribusi sekitar 10-15%. Hal ini secara tidak langsung turut menekan daya saing produk hilirisasi tembaga di pasar global.

Untuk aspek Pengaturan dan Kelembagaan, hilirisasi tembaga menghadapi beberapa tantangan. Tantangan pertama yaitu masih adanya kendala perizinan pembangunan *smelter* tembaga. Salah satu kendala perizinan yang dihadapi adalah izin untuk memperoleh bahan pendukung pembangunan *smelter*. Kondisi ini berpotensi menyebabkan beberapa *smelter* yang sedang dibangun mengalami keterlambatan operasi. Tantangan yang lain adalah terkait dengan penjualan produk turunan tembaga domestik yang dikenakan PPN 11%. Hal ini tentunya menekan daya saing produk domestik dibanding produk impor. Sejumlah industri di hilirisasi tembaga juga terindikasi masih mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan insentif fiskal.

Kemudian, dari sisi Promosi dan Kerja Sama Perdagangan, pelaku industri di hilirisasi tembaga belum memiliki kerja sama yang kuat dengan industri hilir, khususnya industri elektronik. Sebagian besar industri elektronik domestik masih berperan sebagai perakit (*assembly*), yang mana sebagian besar produk rakitan dimaksud diperoleh melalui impor. Barang rakitan tersebut memiliki kandungan tembaga yang relatif tinggi seperti *copper tube*, *sheet*, dan *brass*.

4.1.3 Rekomendasi Strategi Pengembangan Hilirisasi Pertambangan

Berdasarkan pemetaan tantangan pada bagian sebelumnya, perlu dirumuskan strategi penguatan hilirisasi pertambangan. Hal ini mengacu pada setidaknya tiga aspek berikut: (i) Perbaiki faktor produksi guna memperkecil *productivity gap* melalui dukungan infrastruktur, layanan logistik, dan pendidikan vokasi; (ii) Penguatan aspek pengaturan dan kelembagaan yang mampu mengurangi *regulatory deficit* sebagai salah satu penghambat masuknya investasi, daya saing ekspor maupun aktivitas

produksi; (iii) Penguatan kerja sama perdagangan dan promosi guna meningkatkan akses ke pasar global.

Dalam rangka perbaikan faktor produksi dari hilirisasi pertambangan, diperlukan upaya mempercepat penciptaan ekosistem industri hilir unggulan yang menjadi *intake* produk hilirisasi pertambangan. Ekosistem ini dapat dibentuk melalui upaya peningkatan kualitas LVC, perbaikan sistem distribusi serta pengintegrasian rantai pasokan. Selain itu, diperlukan perbaikan tata kelola mineral tambang strategis yang akan mendukung pengembangan ekosistem *value chain* industri hilir unggulan. Dalam konteks ini, dirumuskan kerangka tata kelola pengembangan hilirisasi pertambangan yang jelas dalam jangka menengah dan panjang, disertai payung hukum yang kuat serta perencanaan implementasi yang terintegrasi dan terkoordinasi. Hal ini akan memastikan optimalitas alokasi sumber daya, baik dari SDA pertambangan sendiri maupun sumber daya lainnya seperti sumber daya manusia (SDM) dan pembiayaan. Hal ini menimbang pula cadangan SDA pertambangan lambat laun berkurang dan keterbatasan teknologi yang dapat dikembangkan secara mandiri.

Upaya perbaikan faktor produksi melalui peningkatan investasi perlu didorong kemudahan perizinan dan kebijakan insentif. Dukungan perbankan juga perlu diperkuat untuk mendanai industri hilirisasi, seperti pembangunan *smelter*, infrastruktur pendukung, serta pengembangan *research and development* (R&D). Percepatan pembangunan *smelter* juga dapat ditempuh oleh pelaku industri melalui pemanfaatan fasilitas dan insentif di KEK. Guna memastikan berjalan efektifnya dukungan pada perbaikan faktor produksi dimaksud, diperlukan satu mekanisme koordinasi dalam hal *monitoring*, evaluasi dan upaya *debottlenecking* program hilirisasi pertambangan di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Forum Koordinasi Pusat dan Daerah yang memfasilitasi diskusi atas kendala dari implementasi hilirisasi pertambangan.

Terkait dengan pengaturan dan kelembagaan, upaya mendorong harmonisasi kebijakan hilirisasi pertambangan perlu dilakukan melalui satu kerangka kebijakan tata kelola yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan kebijakan Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait. Kebijakan tata kelola mineral strategis dan mineral kritis merupakan salah satu kebijakan yang sedang disusun sebagai payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden. Selain itu, perlu dipertimbangkan upaya harmonisasi kebijakan tata niaga, perpajakan dan insentif pada hilirisasi pertambangan. Salah satunya kebijakan insentif yang dapat dipertimbangkan adalah perluasan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada jangka waktu tertentu. Selain itu, pemberian insentif harga

listrik juga dapat dipertimbangkan untuk industri hilir unggulan yang secara langsung mendukung penguatan LVC dari program hilirisasi pertambangan. Selain itu, perlu upaya mendukung integrasi tata niaga dari industri hulu hingga hilir agar produsen dapat dengan memperoleh bahan baku dengan harga kompetitif. Perluasan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga dapat diarahkan untuk mendorong penggunaan produk hilir dalam negeri, sehingga serapan produk hilirisasi lebih terjamin dan mampu mendorong kinerja industri domestik. Selain itu, penerapan kebijakan larangan ekspor ataupun pajak ekspor dapat dilakukan secara berjenjang agar memudahkan pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian produksi.

Sinkronisasi dan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha di sepanjang rantai pasok juga harus diperkuat, sehingga mampu mendorong percepatan proses bisnis industri pertambangan hingga industri hilir secara *end-to-end*. Beberapa perizinan usaha yang perlu diintegrasikan adalah: (i) Izin Usaha Industri (IUI); (ii) Izin Usaha Pertambangan(IUP); (iii) Izin AMDAL; (iv) Izin terkait aturan tata ruang dan lahan; (v) Izin ekspor-impor; serta (vi) Pelaporan terkait usaha pertambangan dan perindustrian. Semua bentuk perizinan tersebut perlu dipertimbangkan untuk diintegrasikan menjadi *Online Single Submission (OSS)* sehingga memudahkan proses bisnis hilirisasi dan pengawasannya.

Perluasan kerja sama dan promosi perdagangan perlu dilakukan, terutama ke negara pasar non-tradisional yang juga sedang mendorong pengembangan industri hilir. Hal ini dilakukan melalui mekanisme *business matching* antara produsen dan konsumen produk hilirisasi pertambangan, yang dapat diinisiasi oleh sejumlah lembaga seperti Kamar Dagang, Perwakilan Negara di luar negeri serta Kementerian terkait. India sebagai salah satu negara yang sedang berkembang industri elektroniknya, dapat menjadi tujuan ekspor potensial produk hilir timah dan tembaga.

Potensi perluasan kerja sama ekspor ke depan juga turut didukung oleh dampak perang dagang Tiongkok-AS. Dalam kaitan ini, diperlukan penyesuaian standarisasi produk hilir untuk memenuhi kebutuhan industri global. Pembentukan badan arbitrase juga diperlukan untuk menjamin adanya kualitas produk. Hal ini diperlukan untuk menghindari potensi terjadinya *dispute* di sepanjang rantai *supply chain*.

Sebagai penutup subbab ini, kita memahami bahwa dalam mendorong implementasi program nasional terkait hilirisasi pertambangan, khususnya mineral, koordinasi kebijakan antara pemangku kepentingan menjadi faktor penting. Diperlukan *alignment* atau keselarasan dalam menentukan prioritas kebijakan hilirisasi mineral strategis agar tujuan yang sama dapat dicapai

secara efektif. Selain itu, *debottlenecking* atau penyelesaian kendala dalam hilirisasi mineral dan pengembangan industri prioritas menjadi langkah krusial untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Koordinasi serta sinergi yang baik antara berbagai K/L terkait diharapkan mempercepat proses hilirisasi dan membangun industri mineral strategis yang kompetitif untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045.

4.2 Hilirisasi Pertanian

Hilirisasi berpotensi untuk terus diperluas terutama hilirisasi pertanian di tengah keberhasilan hilirisasi SDA dalam menopang pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi. Perluasan strategi hilirisasi SDA ke hilirisasi pertanian yang berbasis pangan tidak hanya untuk mendukung stabilitas ekonomi, tapi juga untuk mendukung surplus transaksi berjalan, serta turut berkontribusi pada pertumbuhan yang lebih inklusif. Hilirisasi ini perlu diperkuat dengan sinergi bersama Kementerian/Lembaga terkait seiring dengan tantangan yang dihadapi dan strategi yang diperlukan bersifat lintas sektoral.

Perluasan hilirisasi pada sektor pangan perlu terus dilakukan secara konsisten untuk mendorong perbaikan struktur ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan tiga aspek. Pertama, hilirisasi pangan dalam jangka pendek perlu diarahkan untuk mendukung stabilitas inflasi terutama untuk komoditas pangan yang sering kali menjadi sumber inflasi. Kedua, hilirisasi pangan dalam jangka lebih panjang mendukung penguatan industri makanan minuman (mamin) yang berkontribusi positif dalam menopang surplus neraca perdagangan, baik melalui potensi ekspor produk berdaya saing tinggi maupun melalui potensi substitusi impor. Ketiga, perlu upaya lebih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih *broad based* mempertimbangkan hilirisasi SDA yang tengah berjalan belum cukup inklusif yang ditandai dengan penyerapan tenaga kerja yang masih dapat ditingkatkan.

Grafik 4. 9 Serapan Tenaga Kerja Sektor Manufaktur



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Secara umum, potensi hilirisasi pada sektor pertanian berkaitan dengan perannya dalam mendukung stabilitas ekonomi dan meningkatkan nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Dalam jangka pendek, hilirisasi pangan perlu diselaraskan dengan upaya mendukung stabilitas inflasi. Sementara itu, dalam jangka yang lebih panjang, hilirisasi pangan dapat diarahkan untuk menopang surplus neraca perdagangan, termasuk dalam menyerap tenaga kerja. Secara keseluruhan, hilirisasi pangan diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi secara lebih *broad based* mengingat *linkage* industri hilir pangan yang cukup besar terhadap perekonomian.

Tantangan umum dalam mendorong hilirisasi pertanian khususnya pertanian terutama berkaitan dengan kebijakan yang masih perlu difokuskan antar kementerian dan lembaga serta tahapan dan dukungan hilirisasi yang masih terbatas. Saat ini sejumlah kementerian dan lembaga telah memiliki strategi pengembangan hilirisasi pangan dengan fokus komoditas yang dapat lebih diselaraskan. Selain itu, tantangan lain dari sisi hilirisasi umumnya masih terpusat pada industri hulu dengan tingkat penggunaan teknologi yang relatif lebih rendah, serta pembiayaan eksternal korporasi kecil masih didominasi oleh skema *direct financing*.

Untuk mendukung pengembangan hilirisasi pangan nasional, diperlukan strategi yang membidik tiga sasaran utama, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan inklusi. Berdasarkan ketiga sasaran tersebut, hilirisasi dapat difokuskan pada tujuh komoditas pangan, yaitu bawang merah, beras, aneka cabai, kelapa sawit, perikanan, rumput laut, dan tebu. Hilirisasi pangan pada ketujuh komoditas tersebut dapat diakselerasi dengan didukung upaya mengatasi sejumlah tantangan struktural baik skala nasional maupun regional. Tidak kalah penting, penguatan sinergi kebijakan menjadi kunci dalam mengakselerasi hilirisasi pangan.

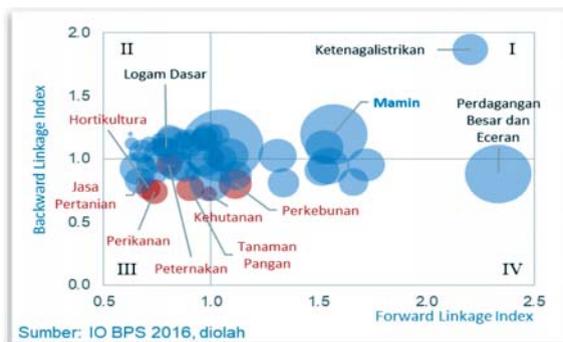
4.2.1. Potensi Hilirisasi Pertanian

Secara umum, potensi hilirisasi pada sektor Pertanian terkait dengan perannya dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Analisis *backward* dan *forward linkages*⁷ menunjukkan bahwa hilirisasi pertanian menjadi industri makanan minuman (mamin) dapat meningkatkan keterkaitan (*multiplier effect*) dengan sektor lainnya. Selain itu, potensi hilirisasi didukung pula dengan luas lahan yang tersedia, sumber daya alam yang melimpah, dan keanekaragaman hayati. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar pada sektor pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia

⁷ Analisis menggunakan Tabel *Input Output (IO)* 2016 yang merupakan matriks yang menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antarsektor dalam perekonomian di Indonesia secara menyeluruh

juga bekerja di sektor ini. Lebih dari itu, sektor pertanian juga memberikan kontribusi besar pada perekonomian, dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya mencapai 13,22% terhadap PDB Indonesia, terbesar kedua setelah sektor Industri Pengolahan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam hilirisasi pertanian.

Grafik 4. 10 Analisis *Backward* dan *Forward Linkage*



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

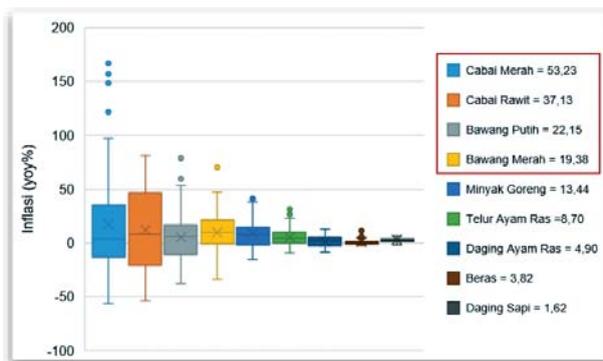
Potensi ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPS1) serta Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Produk Pangan tahun 2023. Pada Rapat Kerja Nasional tersebut, Presiden Indonesia memaparkan bahwa hilirisasi ke depan tidak hanya terbatas pada hilirisasi SDA seperti mineral dan batu bara, melainkan juga hilirisasi yang dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, salah satunya adalah pertanian. Selanjutnya, pada Ratas dibahas mengenai peningkatan produksi khususnya produksi pertanian, pangan, dan hilirisasi dari pangan serta skema pendanaan yang diperlukan. Ke depan, hilirisasi pertanian perlu terus didorong agar memberikan nilai tambah tinggi dibandingkan dengan hanya mengeksport komoditas. Pengembangan pada hilirisasi pertanian menjadi pilar penting dalam memperkuat industri manufaktur dan diharapkan mampu mendorong reformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki, hilirisasi pada sektor ini juga diyakini akan berdampak ke banyak elemen masyarakat dan pelaku usaha baik dari hulu sampai hilir.

Upaya mendorong hilirisasi pangan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi secara lebih *broad based* mengingat *linkage* industri hilir pangan yang cukup besar terhadap perekonomian. Hal ini didasarkan pada realisasi pertumbuhan PDB triwulan I 2023 yang tumbuh lebih tinggi dari prakiraan dan berlanjut pada PDB triwulan II 2023, namun secara komposisi masih dapat diperkuat. Konsumsi rumah tangga belum tumbuh sekuat prakiraan karena lebih

ditopang oleh *contact intensive sectors*⁸ sehingga memengaruhi kecepatan pemulihan ekonomi. Bank Indonesia (2022) juga menyampaikan setidaknya terdapat tiga alasan mengapa hilirisasi dapat memperkuat industri manufaktur dan struktur ekonomi secara keseluruhan. Pertama, hilirisasi mendukung ekspor ke depan dengan nilai tambah yang lebih besar. Hal ini juga memungkinkan Indonesia berperan besar pada *global value chain* (GVC). Kedua, adanya hilirisasi pertanian dapat meningkatkan substitusi impor terutama produk pangan. Ketiga, hilirisasi dapat membentuk rantai nilai bahan baku lokal atau *local value chain* (LVC). Selanjutnya, adanya hilirisasi ini akan menciptakan stabilitas perekonomian yang lebih kuat karena akan memperbaiki neraca perdagangan.

Hilirisasi pangan dalam jangka pendek perlu turut diselaraskan dengan upaya mendukung stabilitas inflasi di jangka pendek serta mendorong ketahanan pangan nasional. Hal ini mengingat sebagian komoditas pangan menjadi sumber inflasi yang cukup signifikan. Sepanjang tahun 2022, komoditas aneka cabai dan aneka bawang mencatat volatilitas inflasi terbesar dibandingkan komoditas strategis lainnya. Kondisi ini dipengaruhi baik oleh isu struktural maupun siklikal. Ketersediaan pasokan masih menghadapi sejumlah kendala karena faktor struktural disparitas harga antarwaktu dan antardaerah. Selain itu, faktor gangguan cuaca juga menjadi faktor yang secara berulang memengaruhi sisi produksi. Hilirisasi pangan diharapkan dapat mendukung kesinambungan pasokan komoditas pangan dan mendorong konsumsi alternatif bahan pokok makanan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Grafik 4. 11 Volatilitas Inflasi Sejumlah Komoditas Strategis



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

⁸ LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud), LU Perdagangan, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin)

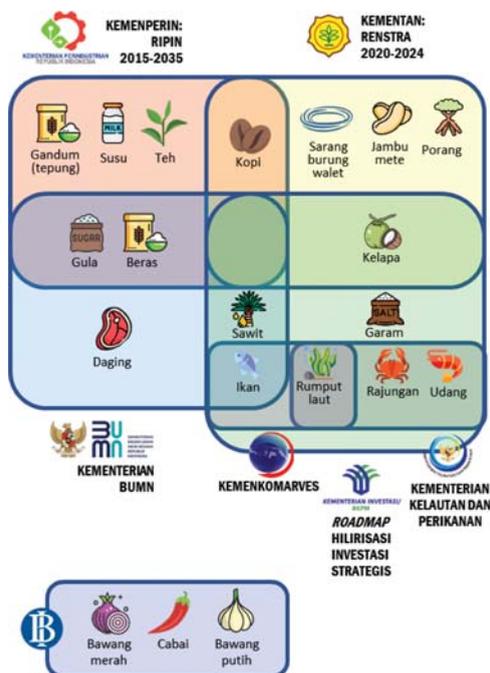
Implementasi hilirisasi pangan dalam jangka lebih panjang turut berkontribusi dalam menopang surplus neraca perdagangan. Berdasarkan historis, kontribusi positif industri mamin terlihat melalui dukungannya dalam menopang ekspor produk berdaya saing tinggi baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan industri. Selain itu, berdasarkan pemetaan pada produk impor industri mamin, terdapat peluang substitusi impor yang dapat terus dioptimalkan pada sejumlah produk impor utama melalui peningkatan nilai tambah.

Dari sisi tenaga kerja, peran sektor ini cukup besar dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor lain. Kontribusi sektor pangan dalam menyerap tenaga kerja cukup signifikan, yaitu sekitar 30%, kendati didominasi tenaga kerja informal. Hilirisasi pangan berpotensi menyerap tenaga kerja yang lebih tinggi sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Sementara itu, stabilitas makro terjaga tercermin dari inflasi yang menurun meskipun masih terdapat disparitas antarpasokan dan antardaerah yang memengaruhi stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.

4.2.2. Tantangan Hilirisasi Pertanian

Tantangan umum dalam mendorong hilirisasi pertanian khususnya pertanian terutama berkaitan dengan kebijakan yang masih perlu difokuskan antar kementerian dan lembaga. Dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, upaya hilirisasi produk pangan yang dilakukan Kementerian Perindustrian menasar setidaknya pada lima komoditas utama, yakni gandum, susu, teh, kopi, dan gula. Sementara itu, strategi hilirisasi pangan oleh Kementerian Pertanian tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yang menitikberatkan pada lima komoditas, yaitu kopi, sarang burung walet, jambu mete, porang, dan kelapa. Kementerian Investasi/BKPM mendorong hilirisasi pangan melalui strategi penguatan investasi pada beberapa produk strategis, antara lain kelapa, garam, rajungan, udang, rumput laut, kelapa sawit, serta perikanan. Kementerian BUMN tengah berfokus pada pengembangan hilirisasi produk beras, daging, perikanan, kelapa sawit, dan gula. Kemenkomarves dan KKP melakukan pengembangan komoditas pangan yang masing-masing difokuskan pada ikan, rumput laut; dan ikan, rumput laut, rajungan, serta udang. Sementara itu, Bank Indonesia mendorong hilirisasi pada klaster binaan pada komoditas cabai dan aneka bawang (Gambar 4.4).

Gambar 4. 4 Pemetaan Prioritas Pengembangan Komoditas Pangan Kementerian/Lembaga



Sumber: Bank Indonesia dan Renstra K/L, diolah

Secara umum, hilirisasi pangan baik pada sektor pertanian, perkebunan maupun perikanan menghadapi tantangan dalam lingkup yang seragam. Hilirisasi umumnya masih terpusat pada industri hulu dengan tingkat penggunaan teknologi yang relatif rendah. Pembiayaan eksternal korporasi kecil masih didominasi oleh skema *direct financing*. Berbagai kendala korporasi kecil dalam melakukan hilirisasi sebagian besar disebabkan oleh minimnya ketersediaan kapasitas pengolahan, kebutuhan modal yang cukup besar, serta pasar untuk produk turunan hasil dari proses lanjutan yang belum sepenuhnya terbuka. Di sisi lain, korporasi kecil cenderung memanfaatkan dana internal untuk membiayai kebutuhan ekspansi termasuk hilirisasi. Selain itu, pembiayaan eksternal korporasi kecil masih didominasi oleh skema *direct financing*, diikuti dengan skema *noncash loan* dan *value chain financing*.

Dari sisi spasial, hilirisasi pangan telah berjalan, namun masih terbuka ruang penguatan. Pengembangan hilirisasi di sejumlah wilayah sudah berjalan baik, terutama untuk

komoditas unggulan di masing-masing daerah. Beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu proses hilirisasi yang masih terfokus di industri antara, serta hilirisasi yang masih terbatas seiring ketergantungan terhadap impor yang masih tinggi. Pengembangan hilirisasi di daerah perlu lebih didorong untuk menuju industri hilir yang bernilai tambah, berdaya saing tinggi, serta meningkatkan *local value chain*, didukung sinergi dan koordinasi antarpihak terkait.

Pengembangan hilirisasi di sektor Pertanian masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang terkait dengan sektor hulu dan regulasi. Berdasarkan hasil prioritas dan pendalaman arah kebijakan hilirisasi nasional, setidaknya terdapat 3 (tiga) tantangan dalam hilirisasi pertanian, yaitu kendala kontinuitas produksi, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya minat investasi. Permasalahan yang melingkupi sektor hulu dapat mengganggu peta jalan (*roadmap*) pembangunan industri pangan.

Kendala hilirisasi pada umumnya juga berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur listrik untuk kebutuhan aktivitas hilirisasi di daerah terpencil masih terbatas, di tengah pasokan listrik yang terbatas dan tarif yang mahal. Selain itu, kebutuhan lahan yang *clear and clean* untuk membangun industri juga diperlukan. Dari sisi struktur industri, peningkatan nilai tambah produk yang lebih hilir belum optimal akibat penguasaan terhadap teknologi produksi yang masih rendah. Hal ini diikuti pula dengan struktur industri hilirisasi di luar negeri yang lebih terintegrasi sehingga industri hilirisasi domestik kurang berdaya saing.

Dukungan insentif untuk mendorong masuknya investor pada industri hilirisasi pertanian juga masih terbatas. Saat ini belum terdapat kebijakan yang mengatur pola tanam maupun proses penangkapan kekayaan laut untuk memastikan keberlanjutan dari hasil produksi komoditas pertanian yang menjadi bahan baku utama industri hilir. Selain itu, beberapa pengaturan terkait bea masuk impor ataupun perizinan ekspor menghambat berbagai upaya hilirisasi lebih lanjut.

Sumber pembiayaan masih menjadi faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan hilirisasi pangan. Pembiayaan eksternal pada korporasi kecil yang melakukan proses hilirisasi pangan masih didominasi oleh skema *direct financing*. Skema pembiayaan ini diperoleh secara langsung dari perbankan dalam bentuk penyaluran kredit (misalnya dalam bentuk Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja) sehingga target dari pembiayaan ini cenderung hanya menyasar secara spesifik pada lini bisnis korporasi pangan tertentu atau belum optimal menyentuh rantai industri pangan secara menyeluruh. Di tengah

kondisi tersebut, korporasi kecil cenderung memanfaatkan dana internal untuk membiayai kebutuhan ekspansi termasuk hilirisasi.

Subsektor Pertanian potensial seperti sektor perikanan, selain *share* terhadap PDB yang masih rendah, saat ini juga dihadapkan dengan permasalahan logistik, Sumber Daya Manusia (SDM), dan budidaya perikanan berkelanjutan. Permasalahan kritis dari sisi logistik di antaranya ialah infrastruktur yang minim dengan sebanyak 43% pelabuhan perikanan terkonsentrasi di Pulau Jawa, rantai dingin yang terputus karena jumlah *freezer container* dan pasokan listrik kapal terbatas, model pendekatan kontinen bukan maritim, perizinan yang belum optimal, serta rendahnya kompetisi usaha pengangkutan laut di daerah. Sementara itu, permasalahan SDM berpusat pada kurangnya tenaga kerja terampil dengan 96% armada perikanan Indonesia dimiliki oleh nelayan kecil.

Penangkapan berkelanjutan yang belum menjadi prioritas di tengah ancaman perubahan iklim juga berpotensi menghambat produktivitas saat ini dan jangka panjang (Rahmizal, 2022).⁹ Hal ini diperparah dengan data 2017 yang menunjukkan bahwa hampir separuh stok ikan tangkap Indonesia dikategorikan *overfished* (World Resources Institute, 2022).¹⁰ Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menetapkan pembagian zona penangkapan ikan terukur berbasis kuota dalam PP No. 11 Tahun 2023. Walaupun, pada pelaksanaannya masih diperlukan keseimbangan antara konservasi lingkungan dengan produktivitas dan pendapatan nelayan.

4.2.3. Rekomendasi Strategi Pengembangan Hilirisasi Pangan

Untuk mendukung pengembangan hilirisasi pangan nasional, diperlukan strategi yang membidik tiga sasaran utama, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan inklusi. Strategi dengan pendekatan *three-pronged approach downstream strategy* diarahkan untuk menjaga kestabilan harga dalam negeri, khususnya komoditas pangan, yang difokuskan di jangka pendek. Selain itu, hilirisasi diarahkan pula untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi regional melalui pemilihan komoditas unggulan daerah. Dalam jangka yang lebih panjang, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas eksternal diarahkan melalui perbaikan neraca transaksi berjalan, baik melalui peningkatan produk ekspor bernilai tambah tinggi maupun

⁹ Studi ini menggunakan data 33 provinsi selama 2000-2015. Efektivitas usaha penangkapan, faktor ekonomi, dan populasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *volume* tangkapan.

¹⁰ *Overfished* terdiri atas *fully exploited* (penangkapan maksimal, tingkat eksploitasi 0,5-1) dan *overexploited* (penangkapan di atas titik maksimal, tingkat eksploitasi di atas 1). Pada 2017, sekitar 75% sumber daya ikan telah *fully exploited* atau berpotensi *overfished*.

substitusi impor. Selanjutnya, strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif tercermin melalui peningkatan serapan tenaga kerja di berbagai wilayah.

Berdasarkan pendekatan tersebut, pemetaan prioritas hilirisasi pangan dapat dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria dasar. Pemetaan potensi pengembangan komoditas hilirisasi pangan dilakukan melalui sejumlah tahapan berdasarkan sejumlah kriteria dasar sebagai landasan dalam mengidentifikasi strategi kebijakan pengembangannya. Kriteria dasar tersebut terdiri dari empat indikator utama yang meliputi sektor prioritas yang menjadi daya ungkit perekonomian, tingkat inflasi, tingkat daya saing, dan serapan tenaga kerja. Berdasarkan identifikasi sektor prioritas, penentuan fokus komoditas diarahkan pada subsektor ekonomi yang memiliki daya ungkit perekonomian. Sementara itu, kriteria inflasi mempertimbangkan rata-rata tingkat inflasi, volatilitas inflasi, serta kontribusi inflasi. Potensi perluasan cakupan serapan tenaga kerja menjadi indikator utama lainnya dalam penentuan produk prioritas tersebut. Parameter terakhir yang digunakan ialah perkembangan daya saing produk, yang dinilai melalui metode *Revealed Symmetric Comparative Advantage* (RSCA) serta *Trade Balance Index* (TBI).¹¹

Berdasarkan kriteria yang digunakan, hilirisasi dapat difokuskan pada tujuh komoditas pangan. Ketujuh komoditas pangan tersebut meliputi bawang merah, beras, aneka cabai, kelapa sawit, perikanan, rumput laut, dan tebu. Berdasarkan tahapannya, hilirisasi pada bawang merah, beras dan aneka cabai menjadi prioritas jangka pendek dengan fokus utama pada perbaikan tingkat inflasi terlebih dahulu sebelum menuju tahapan hilirisasi lebih lanjut. Sementara itu, komoditas ikan menjadi prioritas baik untuk mendukung perbaikan inflasi maupun mendukung perbaikan neraca transaksi berjalan. Tiga komoditas lainnya, yaitu kelapa sawit, rumput laut, dan tebu menjadi prioritas jangka menengah-panjang dengan fokus pada perbaikan defisit transaksi berjalan serta mendukung ekonomi lebih inklusif.

Sebagai tahap awal, akselerasi hilirisasi pangan pada ketujuh komoditas tersebut dapat terus dilakukan melalui upaya identifikasi terkait kondisi hilirisasi *existing* secara nasional dan spasial. Dari identifikasi tersebut, terlihat

¹¹ *Revealed Comparative Advantage* (RCA) digunakan untuk melihat keunggulan komparatif (daya saing) produk ekspor suatu negara dalam basket ekspor negara-negara di dunia, menggunakan formula:

$$RCA_{it} = \frac{X_i / \sum_{i=1}^N X_i}{X_{iw} / \sum_{i=1}^N X_{iw}}, \quad i = 1 \dots N; \quad RCA_{it} \rightarrow RCA \text{ industri } i \text{ tahun } t; \quad X_i \rightarrow \text{ekspor produk } i \text{ dari negara tertentu}; \quad X_{iw} \rightarrow \text{ekspor produk } i \text{ dari seluruh dunia.}$$

RCA dikonversi menjadi angka simetrik *Revealed Symmetric Comparative Advantage* (RSCA) menggunakan formula $RSCA = \frac{RCA_{it}-1}{RCA_{it}+1}$ untuk memudahkan visualisasi dan pengelompokan produk, dengan nilai pada kisaran $-1 \leq RSCA \leq 1$.

Trade Balance Index (TBI) menggambarkan *trade balance* dalam bentuk indeks di rentang $-1 \leq TBI \leq 1$ untuk memudahkan visualisasi dan pengelompokan produk, menggunakan formula:

bahwa hilirisasi sudah berjalan pada sebagian komoditas meski dengan kapasitas yang masih relatif terbatas, sehingga kebutuhan impor masih cukup besar, seperti komoditas tebu. Di samping itu, terdapat komoditas yang cukup potensial untuk dilakukan hilirisasi, namun masih perlu dipastikan ketersediaan pasokan sisi hulu agar keberlangsungan dapat terjaga, yaitu beras, aneka cabai, dan bawang merah. Pada komoditas ikan dan rumput laut, terdapat potensi besar pengembangan hilirisasi di sepanjang rantai produksi. Sementara itu, pengembangan hilirisasi kelapa sawit diarahkan pada komoditas *oleofood* antara lain, margarin, minyak makan merah, dan minyak goreng yang dapat mendukung perbaikan defisit transaksi berjalan sekaligus menjaga stabilitas harga.

Secara spasial, implementasi hilirisasi telah berjalan dan bervariasi di setiap wilayah sesuai dengan *local wisdom* masing-masing. Untuk melihat kondisi hilirisasi secara lebih granular, dilakukan pemetaan hilirisasi pangan berdasarkan keunggulan komoditas pangan di masing-masing wilayah. Hilirisasi pangan di Sumatera dan Kalimantan umumnya berfokus pada kelapa sawit. Sementara wilayah lainnya terdapat ruang penguatan hilirisasi, yaitu Jawa pada tebu, Sulampua pada ikan, dan Balinusra pada rumput laut. Keberadaan potensi ini memberikan peluang besar untuk mengembangkan industri pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk. Hilirisasi pangan di sejumlah wilayah berpotensi untuk terus ditingkatkan khususnya untuk wilayah yang masih berfokus di industri antara dan masih bergantung pada impor.

Sejumlah tantangan struktural masih dihadapi sehingga berisiko menghambat upaya percepatan hilirisasi pangan, baik skala nasional maupun regional. Identifikasi kendala dalam mendorong hilirisasi pangan dilakukan dalam kerangka 3P, yakni Perbaikan Faktor-faktor Produksi (P1), Pengaturan dan Kelembagaan (P2), serta Promosi dan Kerja Sama Perdagangan (P3). Mayoritas tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mendorong perbaikan faktor produksi, meliputi penurunan produktivitas, minimnya ketersediaan sarana-prasarana dan teknologi, serta terbatasnya akses pembiayaan ke lembaga keuangan formal. Sementara itu, dari aspek P2, kendala yang dihadapi terutama pada belum optimalnya insentif kebijakan pemerintah, perlunya kepastian regulasi, serta kelembagaan petani yang masih tradisional. Tantangan faktor promosi dan perdagangan juga perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait penguatan jalur distribusi dan rantai pasok, perluasan dukungan kemitraan dengan perusahaan, kerja sama

$$TBI_i = \frac{X_i - M_i}{X_i + M_i}, i = 1 \dots N; X_i \rightarrow \text{ekspor produk } i \text{ dari negara tertentu}; M_i \rightarrow \text{impor produk } i \text{ dari negara tertentu}$$

antardaerah yang masih terbatas, hingga hambatan tarif dan nontarif untuk produk berorientasi ekspor.

Penguatan sinergi kebijakan menjadi kunci dalam mengakselerasi hilirisasi pangan. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan instansi lainnya diperlukan dalam perumusan strategi dan implementasi kebijakan. Dalam jangka pendek, diperlukan dukungan model bisnis dan pembiayaan. Dukungan tersebut selanjutnya akan mendorong peningkatan kapasitas produksi dan penggunaan teknologi dalam hilirisasi produk. Dukungan lain yang diperlukan adalah penguatan kelembagaan sehingga dapat dibangun kemitraan antara petani dan pelaku industri. Dalam jangka menengah-panjang, diperlukan dukungan di antaranya penguatan regulasi, perluasan kerja sama perdagangan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Dalam menjawab tantangan dan mendukung kebutuhan perluasan variasi skema pembiayaan hilirisasi pangan, diperlukan penguatan kebijakan dan mekanisme pembiayaan hilirisasi pangan. Sinergi dan Koordinasi kebijakan juga dibutuhkan dalam melakukan penguatan bisnis model pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan hilirisasi pangan, termasuk pengembangan kredit pertanian yang sesuai dengan karakteristik jangka waktu tanaman semusim.

Pembiayaan korporasi pangan yang lebih terencana baik dari sisi penyaluran maupun fleksibilitas angsuran perlu mendapatkan perhatian lebih. Melalui penyempurnaan dan perluasan manfaat mekanisme *grace period*, produktivitas sektor pertanian dapat ditingkatkan dengan mengurangi risiko kegagalan bayar secara bersamaan. Dalam hal ini, untuk tanaman keras yang bersifat jangka panjang seperti CPO dimungkinkan untuk mendapatkan *grace period*. Sementara itu untuk tanaman semusim, salah satu alternatif solusinya adalah pengembangan produk kredit yang tenornya disesuaikan dengan musim tanam dan siklus panen. Produk sejenis sudah ada dalam KUR Sektor Pertanian dan ke depan dipandang perlu untuk diperluas tidak hanya melalui KUR. Mekanisme kredit *existing* baik seperti dalam bentuk Kredit Modal Kerja maupun Investasi dapat diperluas dengan mengakomodasi fleksibilitas tenor berdasarkan sektor tertentu yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan upaya pengelolaan produk turunannya melalui program hilirisasi.

Guna mendorong pembiayaan hilirisasi khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas produksi diperlukan dukungan kebijakan pembiayaan melalui koordinasi lintas kebijakan dan koordinasi fiskal. Mekanisme kerja sama dalam fasilitasi pembiayaan Lembaga Keuangan (*business matching*) dapat

mendukung penyaluran modal kerja dan investasi bagi pelaku usaha sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Inovasi produk kredit dengan periode yang disesuaikan siklus panen di masing-masing komoditas juga dapat diterapkan ke depannya. Dari sisi pengelolaan risiko pembiayaan, kerja sama antara akademisi, pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga penjamin dapat membantu penyaluran pembiayaan dengan risiko kegagalan yang minim. Akademisi berperan dalam menjaga *best practice* produksi dan kinerja korporasi pangan, pemerintah daerah dapat berperan sebagai pendamping dan pengawas melalui dinas maupun BUMD, serta lembaga penjamin berperan penting dalam mengantisipasi terjadinya risiko produksi karena *force majeure*. Oleh karena itu, dari sisi otoritas, kebijakan Bank Indonesia dan fiskal dapat memfasilitasi kebutuhan pembiayaan korporasi pangan melalui inovasi dan sinergi lintas K/L. Salah satu inovasi Bank Indonesia yaitu memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) yang akan berlaku 1 Oktober 2023 pada sektor antara lain hilirisasi minerba dan nonminerba termasuk pertanian, peternakan, dan perikanan. Pemerintah juga mendukung menyiapkan anggaran prioritas untuk mendukung ketahanan pangan nasional guna mendukung transformasi ekonomi nasional.

BAB V

AKSELERASI DIGITALISASI UNTUK INKLUSI EKONOMI DAN KEUANGAN

Penguasaan teknologi digital serta inovasi ekonomi keuangan digital memiliki peranan penting dalam mendorong inklusi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, antara lain melalui perluasan jangkauan, memperpendek jalur distribusi dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Beberapa studi menunjukkan bahwa inklusi keuangan memberikan dampak positif pada berbagai indikator pembangunan di negara-negara berkembang. Selain berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan juga signifikan dalam meningkatkan inklusi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan regional.

Disrupsi teknologi yang menghasilkan berbagai inovasi digital telah mendukung individu dan pelaku bisnis dalam memperoleh akses ke pasar global.¹² Akses ke pasar global dapat mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan aksesibilitas ke layanan keuangan global. Hal ini membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya terpinggirkan untuk dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia telah secara aktif mendorong transformasi digital yang inklusif untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan, khususnya melalui upaya perluasan akses UMKM kepada *global supply chain* dan perluasan infrastruktur digital. Dari perspektif makro, mendorong inklusi keuangan melalui transformasi digital juga memiliki kontribusi signifikan terhadap stabilitas keuangan suatu negara. Selanjutnya, topik utama pembahasan pada bab ini terbagi menjadi 6 (enam) bagian: (1) Akselerasi pembangunan ekonomi dan keuangan digital; (2) Digitalisasi UMKM; (3) Pembiayaan digital; (4) Digitalisasi sistem pembayaran (5) Penguatan konsumen dan keamanan digital; dan (6) Tantangan dan rekomendasi kebijakan.

¹² Disrupsi teknologi merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya transformasi atau perubahan masif pada hal-hal mendasar yang diakibatkan oleh pesatnya perkembangan sistem teknologi digital (Roblek, *et al.*(2021)).

5.1 Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Digital Nasional

Sejak 2015, sektor ekonomi digital Indonesia mengalami peningkatan nilai pendapatan kotor (*Gross Merchandise Value*) sebesar lebih dari 40% setiap tahunnya. Pendapatan kotor yang diproduksi diprediksikan akan mencapai 130 miliar dolar AS pada 2025. Perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dipicu oleh maraknya penggunaan sistem pembayaran digital, perbankan digital, *e-commerce* dan beragam jasa digital termasuk *ride-hailing*.

Akselerasi ekonomi dan keuangan digital juga didorong oleh digitalisasi sistem pembayaran. Digitalisasi sistem pembayaran yang memfasilitasi kemudahan bertransaksi dengan jaminan keamanan keuangan, menjaga transaksi ekonomi agar tetap berjalan baik khususnya pada era pandemi Covid-19. Digitalisasi sistem pembayaran juga termasuk menghubungkan seluruh platform dan kanal transaksi pembayaran yang selama ini berjalan secara terpisah, melalui API (*Application Programming Interface*) dan QR Code.

Kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi digital (*digital trust*) adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi digital. Nasabah harus memiliki keyakinan yang cukup terhadap keamanan, privasi, dan perlindungan data dan informasi keuangan, selain proses transaksi digital yang lebih cepat dan mudah (*user friendly*) dibandingkan transaksi manual. Salah satu topik utama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan digital di negara berkembang dalam upaya meningkatkan dan menjaga *digital trust* adalah perlindungan konsumen dan literasi digital

UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memelihara stabilitas nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) tahun 2022, kontribusi UMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sangat signifikan, yaitu sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia sebesar 119,6 juta orang atau setara dengan 95% dari total tenaga kerja di Indonesia.

Saat ini, masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan ruang digital untuk mengembangkan ekonomi mereka. Data yang dirilis oleh KemenKopUKM pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia telah menembus 64,2 juta unit. Namun, hanya 20,76 juta yang telah masuk ke dalam ekosistem digital atau 32,34%. Jumlah digitalisasi

UMKM mengalami peningkatan sebesar 26,6% dibandingkan pada tahun sebelumnya, di mana hanya sekitar 16,4 juta UMKM yang memanfaatkan teknologi digital. Meskipun ada peningkatan, angka 20,76 juta masih dianggap kurang memuaskan karena belum mencapai separuh dari total UMKM, hanya sekitar sepertiga dari keseluruhan populasi UMKM. Oleh karena itu, pemanfaatan *platform* digital oleh UMKM dipandang kritis dalam mendorong inklusi keuangan dalam mendukung terwujudnya ketahanan ekonomi nasional.

5.2 Digitalisasi UMKM

Pemanfaatan teknologi digital menjadi hal yang penting bagi UMKM untuk memulihkan produktivitas ekonomi masyarakat dan membuat kondisi perekonomian kembali bergairah, khususnya pascapandemi Covid-19. Jika UMKM ingin tetap dapat bersaing dan bertahan dalam lingkungan yang semakin kompetitif, maka penguasaan terhadap perangkat digital dan internet menjadi hal yang mutlak (Purwana, Rahmi dan Aditya, 2017). Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan program digitalisasi UMKM dengan menargetkan UMKM yang memasuki pasar digital meningkat menjadi 30 juta unit pada tahun 2024. Selain itu, ditargetkan juga untuk membentuk 500 unit koperasi modern berbasis digital dan meningkatkan kontribusi ekspor UMKM hingga 17% pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan hasil kajian Deloitte, konsumen semakin cenderung membuat keputusan berdasarkan konten digital dan melakukan pembelian barang secara *online* antara lain pada pasar digital (*marketplace*)¹³. Selain itu, menurut riset yang dilakukan oleh OVO, YCAB, dan J-PAL, pelaku UMKM telah menggunakan *ride hailing platform* sebesar 63% dari total 300 responden yang telah disurvei. Pemanfaatan *ride hailing* tersebut memperbesar kemungkinan UMKM menjangkau pangsa pasar yang lebih besar.

5.2.1 UMKM dan Pasar Digital

Prospek sektor pasar digital (*marketplace/e-commerce*) dan perbankan digital di Indonesia diprediksikan akan terus bertumbuh seiring meningkatnya penetrasi internet dan literasi digital. Berdasarkan prediksi terkini, diperkirakan nilai transaksi *e-commerce* akan mencapai sekitar Rp533 triliun pada tahun 2023, naik 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai transaksi perbankan digital diperkirakan mencapai Rp64.175,1 triliun pada tahun yang sama, naik 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Prediksi

¹³ Lihat lebih lanjut: <https://www.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/Economics/deloitte-au-economic-value-informal-care-Australia-2015-140815.pdf>

ini mencerminkan adanya permintaan yang kuat dan adopsi layanan-layanan digital yang berkembang pesat di Indonesia.

Pada Februari 2023, sekitar 24,9 juta pedagang telah mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran dan 91% di antaranya merupakan UMKM. Nilai transaksi QRIS hingga Februari 2023 mencapai Rp12,28 triliun, dengan volume transaksi sebesar 121,8 juta. Selain itu, sektor *e-commerce* mengalami pertumbuhan nilai transaksi yang mencapai lebih dari Rp476,3 triliun pada tahun 2022, meningkat sebesar 18.8% dibandingkan tahun sebelumnya di mana transaksi *offline* telah kembali pulih ke keadaan normal. *E-commerce* tetap memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi. Sementara itu, nilai transaksi perbankan digital pada tahun 2022 meningkat 28,72% dari tahun sebelumnya menjadi Rp52.545,8 triliun, sejalan dengan meningkatnya penggunaan uang elektronik.

5.2.2 UMKM dan Digitalisasi Sektor Transportasi (*Ride Hailing*) dan Sektor Ekonomi Lainnya

Industri *ride-hailing* atau ojek *online* (ojol) merupakan salah satu sektor industri yang menjadi alternatif sumber pendapatan masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian situasi ekonomi dan krisis. *Ride hailing platform* tidak hanya dimanfaatkan oleh individu, tetapi juga pelaku usaha rental kendaraan yang ingin meningkatkan tingkat penggunaan kendaraannya, ataupun pelaku usaha lainnya yang diakomodasikan dalam *ride-hailing platform* sehingga menjadi sebuah ekosistem digital yang menyediakan berbagai jasa layanan.

Ride-hailing platform tidak saja menawarkan jasa transportasi, namun jasa antar (*delivery*) baik untuk kebutuhan sehari-hari ataupun makanan dan minuman, hingga investasi dan layanan medis. Ekosistem *ride-hailing* memungkinkan interaksi secara langsung antara produsen atau penyedia jasa (*merchants*) dengan konsumen dengan jangkauan pasar yang lebih luas. Data statistik industri *ride-hailing* yang tersedia sangat terbatas. Sampai dengan tahun 2022, Platform Gojek-GoFood telah memiliki lebih dari 1,4 juta mitra di mana 99% merupakan UMKM kuliner, dengan total nilai transaksi bruto (GMV) sebesar Rp34,4 triliun. Total GMV GrabFood pada tahun yang sama tercatat sebesar Rp31 triliun, sedangkan ShopeeFood sebesar Rp4,9 triliun.

Selain digitalisasi sektor ekonomi retail (*e-commerce/marketplace*) dan transportasi (*ride-hailing*), peluang rambatan digitalisasi juga terbuka lebar dan terus meningkat di beberapa sektor seperti jasa *travel* dan *hospitality*, *real estate-housing*, serta kesehatan. Lebih lanjut, terdapat ekspansi yang signifikan pada kelas konsumen di Indonesia, yakni tambahan sekitar 70

juta penduduk kelas menengah yang diperkirakan terjadi selama 2020-2030. Bertambahnya masyarakat kelas menengah tersebut diiringi dengan kebutuhan akan layanan digital. Tambahan masyarakat kelas menengah dan pesatnya pertumbuhan teknologi semakin mendukung kontribusi digitalisasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inklusi keuangan yang dapat menjadi peluang bagi UMKM.

5.2.3 Digitalisasi dalam Peningkatan Produktivitas UMKM

Peningkatan produktivitas UMKM turut didorong oleh percepatan digitalisasi terhadap UMKM. Peningkatan produktivitas UMKM melalui percepatan digitalisasi mempermudah transaksi UMKM melalui pembayaran digital. Selain itu, peningkatan produktivitas bagi para pelaku UMKM mengalami peningkatan pendapatan per bulan dikarenakan inovasi digital yang dapat memotong *supply chain* bahan baku menjadi lebih murah, memotong jalur distribusi pemasaran seperti Sayurbox, serta pencatatan laporan keuangan secara digital yang membuat UMKM menjadi lebih *aware* dengan literasi keuangan seperti Siapik.

Peningkatan literasi keuangan pada UMKM turut mendorong tingkat inklusi keuangan. Hasil penelitian beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *financial technology* yang berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan (Nantungga, 2023; Dewi, 2023; dan Intishar, 2021). Salah satu penelitian kolaborasi yang telah dilakukan antara OVO dan YCAB menunjukkan bahwa meningkatnya inklusi keuangan juga turut meningkatkan volume pinjaman mikro untuk mendukung kegiatan usaha pelaku UMKM.

Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan adalah melalui *platform* pencatatan laporan keuangan yang terdigitalisasi. Pencatatan keuangan menjadi salah satu kunci agar para pelaku UMKM dapat mengelola keuangannya dengan baik serta terintegrasi. Laporan keuangan ini juga menjadi prasyarat dalam pengajuan modal kepada lembaga keuangan formal. *Platform* SIAPIK merupakan salah satu platform yang dapat digunakan untuk membantu melakukan pencatatan keuangan secara digital. Tujuan SIAPIK adalah meningkatkan akses keuangan, mendorong UMKM naik kelas, dan mendorong produktivitas UMKM. SIAPIK memiliki lima fitur yakni Standar, Mudah, Aman, Sederhana, dan Handal atau yang dikenal dengan istilah S-M-A-S-H.¹⁴

¹⁴ Dapat diakses pada laman website Bank Indonesia yaitu <https://www.bi.go.id/siapik/v110/#/login>

5.3 Pembiayaan Digital

Sektor keuangan memiliki peranan yang krusial dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainable development*). Sektor keuangan memiliki peran krusial dalam menunjang program-program strategis *sustainable development* khususnya pada sektor-sektor ekonomi keberlanjutan, seperti kegiatan ekonomi pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM. Pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan akses layanan keuangan, sehingga menjangkau masyarakat dengan keterbatasan geografis misalnya di wilayah pedesaan terpencil atau masyarakat urban yang masih terisolir dari layanan keuangan merupakan *game changer*. Kelompok pelaku ekonomi tersebut memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian target 90% inklusi keuangan nasional pada tahun 2024.

Peningkatan porsi kredit UMKM dapat membantu mengatasi kendala pembiayaan UMKM dalam pembelian perangkat digitalisasi. Kebijakan peningkatan porsi kredit UMKM secara bertahap menjadi 30% di 2024 merupakan wujud kehadiran Pemerintah dalam membantu UMKM mengakses pembiayaan usaha yang terjangkau. Hal ini akan memungkinkan UMKM untuk mengakses teknologi terkini dan menggunakan data untuk menganalisis tren pasar, mengidentifikasi peluang baru, dan menghasilkan produk yang relevan dengan permintaan konsumen. Sehingga, UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan penghasilan mereka.

Laporan International Data Corporation (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi mendorong terjadinya pergeseran perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran di *e-commerce* Indonesia, dari *cash* ke *e-payment*. Hasil survei Katadata Insight Center (2023) mengkonfirmasi bahwa dompet digital menjadi metode pembayaran paling dominan yang digunakan konsumen dalam bertransaksi di *e-commerce*. Uniknya hasil studi tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan *e-wallet* mengalahkan metode pembayaran melalui transfer bank/*virtual account*. Pergeseran perilaku masyarakat akibat digitalisasi juga terjadi pada aspek pembiayaan, sehingga turut mendorong perubahan proses kerja perbankan tradisional menjadi digital.¹⁵

Perubahan perilaku masyarakat sebagai dampak dari digitalisasi sistem pembayaran dan keuangan ini perlu direspons oleh pelaku usaha khususnya UMKM, untuk melakukan transformasi proses bisnisnya yang juga membutuhkan dukungan akses pembiayaan. Terdapat 2 jenis akses pembiayaan yang berkembang di era digital, yaitu: (i) Pembiayaan digital melalui perusahaan *fintech*, dan (ii) Pembiayaan digital dari sinergi lembaga keuangan dan bank digital dengan perusahaan *fintech*.

¹⁵ <https://www.unpad.ac.id/2023/08/digitalisasi-dorong-pergeseran-operasional-perbankan/>

5.3.1 Pembiayaan Digital melalui Perusahaan *Fintech*

Alternatif sumber pembiayaan khususnya untuk UMKM dan Usaha Mikro (UMI) tidak hanya berasal dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan tradisional. Sejalan dengan transformasi digital sistem keuangan, terdapat beberapa alternatif pembiayaan digital yang ditawarkan oleh perusahaan *fintech*, antara lain:

- a. *Peer to Peer Lending* (P2P), yaitu jenis layanan *fintech* yang mempertemukan secara langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman uang dalam suatu platform tertentu. *P2P lending* dapat diumpamakan seperti *marketplace* untuk pinjam-meminjam uang atau untuk investasi dan memperoleh modal kerja seperti Amarnya, Investree, dan Modalku.
- b. Pinjaman *Online* atau '*pinjol*', yaitu jenis layanan *fintech* yang memberikan fasilitas kredit atau pinjaman yang prosesnya dapat dilakukan secara *online*. Prosedur pengajuan pinjaman relatif lebih mudah dibandingkan dengan pengajuan kredit yang ditawarkan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya, namun biasanya dengan tingkat suku bunga yang tinggi seperti Uang Teman, Kredit Cepat, dan Kredit Cepat.
- c. *Crowdfunding*, yaitu praktik pengumpulan dana secara *online* dari masyarakat untuk membantu keperluan dana suatu proyek sosial atau usaha tertentu seperti Kitabisa.com dan Gandengtangan.co.id.
- d. *Payment, Clearing, dan Settlement*, yaitu jenis *fintech* yang memberikan layanan sistem pembayaran, baik yang diselenggarakan oleh *fintech* industri, perbankan ataupun bank sentral seperti Gopay, OVO dan LinkAja.
- e. *E-Aggregator*, yaitu jenis *fintech* yang mengumpulkan dan mengolah berbagai data atau informasi keuangan agar dapat dimanfaatkan oleh konsumen dalam mengambil keputusan, misalnya memilih produk asuransi termurah dan kredit terbaik seperti Lifepal, Cekaja dan KreditGogo.

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), industri *fintech* tumbuh dengan sangat pesat, tercatat dari 24 perusahaan *fintech* pada tahun 2016 menjadi 340 perusahaan per April 2023. Namun demikian, hanya 102 perusahaan *fintech lending* di Indonesia yang secara resmi berada di bawah pengawasan OJK.¹⁶

¹⁶ https://blog-oss.investree.id/wp-content/uploads/2023/06/Siaran-Pers-OJK-AFTECH-Investree_-Kepatuhan-Pelaku-Fintech-Lending-terhadap-Code-of-Conduct-Menjadi-Kunci-Sukses-Industri.docx.pdf

5.3.2 Sinergi Lembaga Keuangan dan *Fintech* dalam Rangka Mendorong Pembiayaan Digital

Berdasarkan hasil penelitian Banna, *et al.* (2023), tingkat layanan keuangan berbasis *fintech* akan mendorong tingkat efisiensi perbankan. Lebih lanjut, penelitian IMF dan World Bank menunjukkan bahwa kehadiran *fintech industry* mendorong tingkat kompetisi sektor keuangan antara lain dengan penurunan *Net Interest Margin* (NIM), penurunan biaya, dan ekspansi ke pasar potensial baru (Bejar *et al.*, 2022).

Hal tersebut melatarbelakangi fenomena akuisisi 105 perusahaan *fintech* oleh 80 bank komersial selama periode 2010 sampai 2018 di 15 negara OECD (Kwon *et al.*, 2023). Adapun di Indonesia, paling tidak terdapat 8 perusahaan *fintech* yang telah mengakuisisi bank komersial, antara lain: Akulaku mengakuisisi 24,9% saham Bank Neo Commerce pada tahun 2021, GoPay mengakuisisi 22,16% saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) pada 2020, Kredivo menjadi pengendali PT Bank Bisnis Internasional Tbk (BBSI) pada 2021 dengan penguasaan 24% saham, dan Ajaib memiliki 24% saham PT Bank Bumi Artha Tbk. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Sapulette, *et al.*, (2021), diketahui bahwa industri *fintech* memberikan dampak yang positif terhadap performa sektor perbankan khususnya pada bank berskala besar. Sinergi antara industri *fintech* dan sektor perbankan mendorong akselerasi inovasi digital pada sektor perbankan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi proses bisnis serta mitigasi risiko atas praktik bisnis perbankan tradisional. Hingga saat ini baru 19 juta UMKM atau 29% dari total UMKM di Indonesia yang dapat melakukan bisnis secara digital. Melalui teknologi digital seperti *credit scoring* dengan algoritma *machine learning* atau *artificial intelligence*, proses evaluasi dan persetujuan kredit UMKM menjadi lebih mudah dan cepat.

Sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM untuk menyelaraskan dengan kebutuhan pembiayaan digital antara lain terkait ketersediaan rekam jejak keuangan yang memadai, BI mengeluarkan alat bantu pencatatan keuangan UMKM yang dinamakan SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan). SIAPIK merupakan teknologi digital pendukung *e-financing* (pembiayaan digital) bagi UMKM.

5.4 Digitalisasi Sistem Pembayaran

Inovasi teknologi digital pada sektor keuangan telah menggeser perilaku dan preferensi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran. Tren digitalisasi di sektor sistem pembayaran juga tercermin dari pelaku industri

SP yang semakin meluas, dari semula terbatas pada pelaku usaha di sektor perbankan tradisional dan telekomunikasi, saat ini diikuti pula oleh industri *fintech lending* dan perbankan digital.

Studi empiris menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran mendorong inklusi keuangan dan efisiensi ekonomi (Crosson *et al.*, 2022). Kelompok masyarakat yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan, melalui digitalisasi sistem pembayaran, mereka telah memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi pembayaran ataupun menerima pembayaran atas produk dan jasa yang mereka tawarkan, antara lain dengan *e-wallet* seperti Gopay dan OVO. Efisiensi ekonomi diperoleh dari penurunan biaya transaksi pembayaran atau transfer.

Namun demikian, salah satu dampak negatif dari inovasi digital pada sistem keuangan dan pembayaran adalah kecenderungan terjadinya monopoli digital. Inovasi digital pada sistem ekonomi dan keuangan yang berbasis platform teknologi yang mengarah pada monopoli, akan mendorong inefisiensi ekonomi karena pemilik platform dapat menerapkan biaya yang lebih tinggi dan pengembangan potensi pasar menjadi tidak optimal. Keterhubungan antar platform digital pada sistem pembayaran dan keuangan nasional merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dampak positif inovasi dalam meningkatkan efisiensi ekonomi.

Terdapat 3 (tiga) faktor penting dalam upaya mendorong digitalisasi sistem pembayaran, yaitu: interkoneksi dan *interoperability*, keandalan infrastruktur SP, dan transaksi *cross-border* menggunakan mata uang lokal.

a. Interkoneksi dan *interoperability* untuk ekosistem digital nasional yang *sustainable*

Untuk menciptakan ekosistem digital nasional yang berkelanjutan, diperlukan keterhubungan antar platform digital khususnya platform sistem pembayaran dan keuangan digital. Sebagaimana penelitian BIS tahun 2022, *platform-based digital payment* dan *economy* cenderung mengarah pada kondisi pasar yang monopolistik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menghubungkan seluruh platform sistem pembayaran yang ada, melalui mekanisme *interconnectivity* maupun *interoperability*. Hal ini ditujukan untuk menghindari praktik monopoli yang dapat merugikan masyarakat serta mendorong ekosistem menjadi lebih optimal dan memberikan nilai manfaat yang lebih tinggi bagi ekonomi, antara lain efisiensi biaya transaksi ekonomi. Sebagai contoh, QRIS telah menghubungkan berbagai platform sistem pembayaran Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), baik perusahaan *fintech* maupun perbankan.

Upaya mendorong *interconnectivity* maupun *interoperability platform* sistem pembayaran di Indonesia antara lain dilakukan dengan pengembangan *Interface* Pembayaran Terintegrasi (IPT) yang menghubungkan kanal-kanal pembayaran di dalam industri. Beberapa output dari kebijakan *interconnectivity* maupun *interoperability platform* sistem pembayaran ini adalah QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dan SNAP (*Standar Nasional Open API* Pembayaran).

b. Penguatan infrastruktur sistem pembayaran meningkatkan keandalan dan mendorong efisiensi transaksi ekonomi

Percepatan digitalisasi sistem pembayaran merupakan *game-changer* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, khususnya penguatan infrastruktur yang memfasilitasi transaksi pembayaran 24 jam, baik transaksi *wholesale* maupun *retail*, *realtime* dengan biaya yang lebih efisien. Infrastruktur SP dapat disediakan oleh bank sentral ataupun oleh industri dalam kerangka kebijakan otoritas sistem pembayaran. Dalam hal efisiensi transaksi belum dapat optimal dilakukan oleh industri, otoritas dapat mendorong akselerasi upaya efisiensi tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menurunkan biaya transaksi transfer antar bank dari semula Rp6.500 sampai dengan Rp10.000 menjadi Rp2.500 dengan implementasi BI-FAST.

Kehandalan dan standarisasi infrastruktur sistem pembayaran juga diterapkan kepada industri melalui regulasi dan pengawasan. Berdasarkan data Bank Indonesia, saat ini terdapat 9 (sembilan) penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) yang dikategorikan sebagai sistemik dan kritikal.

c. *Regional Payment Connectivity*, inklusi keuangan, dan stabilitas ekonomi

Salah satu inisiasi penting terkait digitalisasi sistem pembayaran khususnya pada Presidensi G20 Indonesia adalah kesepakatan kerja sama sistem pembayaran antarnegara atau yang dikenal dengan *Regional Payment Connectivity* (RPC) antara lima negara ASEAN dengan skema *local currency transaction* (LCT). Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam transaksi ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Kebijakan ini juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan devisa pada mata uang utama (*hard currency*) terutama Dolar AS sekaligus sebagai *buffer* untuk mengantisipasi krisis dan turbulensi ekonomi yang diakibatkan oleh fluktuasi Dolar AS.

Kerja sama *cross-border payment* dengan skema transaksi menggunakan mata uang lokal di wilayah ASEAN-5 ini difasilitasi dengan QRIS dan *fast payment*. Tidak hanya ASEAN-5, kerja sama regional ini juga melibatkan Jepang, Korea Selatan dan China (ASEAN +3). Kerja sama ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi regional ASEAN yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan pesatnya inovasi digital di sektor ekonomi dan keuangan. UMKM di kawasan wisata sudah dapat menerima pembayaran turis ASEAN +3 melalui platform QRIS, tanpa harus menggunakan infrastruktur EDC (*electronic data capture*) untuk menerima pembayaran menggunakan kartu (kartu kredit atau kartu debit) dengan biaya instalasi yang lebih mahal.

5.5 Perlindungan Konsumen dan Keamanan Digital

Perkembangan teknologi membawa dampak yang begitu besar terhadap tatanan kehidupan. Dampak positif yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat adalah kemudahan dalam memperoleh informasi secara daring. Teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Perkembangan teknologi mengubah analog menjadi digital. Beberapa aspek yang dulu bersifat lokal dan sempit jangkauannya, kini telah beralih ke jangkauan yang lebih luas bahkan global (Novita dan Santoso, 2021).

Adopsi teknologi baru dan inovasi platform digital tersebut disertai dengan peningkatan risiko. Risiko siber dan *fraud* harus senantiasa diprioritaskan dan dimitigasi secara menyeluruh dalam rangka menumbuhkan dan memelihara kepercayaan digital (*digital trust*), sehingga dapat mendorong tingkat adopsi layanan digital (*digital adoption*). Selain itu, risiko operasional menjadi faktor krusial yang harus diwaspadai dalam rangka menjaga resiliensi layanan dan memitigasi potensi kegagalan yang bersifat sistemik.

5.5.1 Kejahatan Keuangan Digital dan Keamanan Data

Pada tahun 2022, *National Cyber Security Index* (NCSI) mengeluarkan data keamanan siber Indonesia berada di peringkat ke-6 Asia Tenggara. Sedangkan secara global, Indonesia menduduki peringkat ke-83 dari 160 negara. Dibandingkan negara-negara anggota G20, tingkat keamanan siber Indonesia berada di posisi 3 terbawah. Indonesia hanya unggul di atas Meksiko dan Afrika Selatan.

Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Nasional 2022 memperoleh angka 53,23 atau berada dalam kategori Mampu. Indeks keberdayaan konsumen (IKK) merupakan dasar untuk menetapkan kebijakan di bidang perlindungan

konsumen dan untuk mengukur kesadaran dan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya, serta kemampuan dalam berinteraksi dengan pasar. Namun, kategori “Mampu” yang dicapai pada tahun 2022 masih perlu dikembangkan secara berkesinambungan agar konsumen lebih mengerti hak dan kewajibannya ke depan.

Gambar 5. 1 Laporan Kasus Kejahatan Siber 2021



Sumber: Katadata

Berdasarkan Katadata, terdapat beragam jenis kejahatan keuangan digital yang sering terjadi seiring dengan perkembangan teknologi digital, dengan berbagai bentuk dan tujuan tindak kejahatan, antara lain sebagai berikut:

- a. Kejahatan keuangan digital dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain di bidang keuangan, baik melalui tindak pidana penipuan ataupun pencurian. Beberapa bentuk kejahatan siber terkait dengan motif keuangan antara lain adalah:
 - *Card Skimming*, yaitu kejahatan siber dengan metode pencurian informasi dengan cara menyalin data magnetik kartu debit atau kartu kredit secara tidak sah.
 - *SIM swap*, yaitu pengambilalihan data *SIM card* korban agar pelaku kejahatan dapat menggunakan layanan keuangan yang terhubung dengan kartu *SIM* korban.
 - *Phising*, yaitu jenis kejahatan siber dengan metode membuat halaman *website* palsu yang mirip dengan alamat suatu *website* lembaga resmi, biasanya disertai link untuk melakukan transaksi keuangan digital atau membuat *website internet banking* palsu.
 - *Pharming*, yaitu kejahatan siber dengan cara meretas dengan mengirim virus seperti *malware* yang ditujukan untuk menyusup,

- merusak, mengganggu atau mencuri data pribadi atau lembaga keuangan bahkan lembaga pemerintahan.
- b. Kejahatan keuangan digital dengan tujuan pendanaan terorisme seperti tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). Hal ini sejalan dengan hasil analisis PPAK berdasarkan dugaan Tindak Pidana Asal tahun 2022, terdapat 10% dugaan tindak pidana pendanaan terorisme.

Keamanan data masih menjadi tantangan transaksi keuangan digital Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu tantangan serius bagi perlindungan konsumen di era digital adalah terjadinya serangan malware. *Malware*, singkatan dari “*malicious software*”, merujuk pada perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan jahat untuk merusak sistem komputer, mencuri informasi pribadi, atau melakukan tindakan merugikan lainnya. *Malware* dapat menginfeksi perangkat komputer, ponsel cerdas, atau jaringan, dan mencuri data pribadi konsumen seperti informasi kartu kredit, kata sandi, atau data identitas. Data yang dicuri kemudian dapat digunakan untuk pencurian identitas, penipuan finansial, atau aktivitas ilegal lainnya.

Bentuk kejahatan lain yang marak di era digital adalah *social engineering*, upaya memanipulasi psikologis korban dengan tujuan antara yaitu pencurian dan penyalahgunaan data yang akhirnya berujung pada kejahatan siber apabila tidak dilakukan pencegahan sedini mungkin. *Social engineering* adalah tindakan kejahatan rekayasa sosial dengan memanipulasi psikologis korban dalam bentuk serangan digital yang tidak disadari oleh korban kejahatan digital, melalui berbagai platform di internet, *website*, email, media sosial, telepon bahkan *video call*, dengan berusaha menarik simpati korban. Pelaku kejahatan siber biasanya jarang menyerang sistem lembaga keuangan yang memiliki keamanannya berlapis, namun menyerang nasabah individu atau pelaku usaha yang memiliki lapisan keamanan digital paling lemah. Oleh karena itu, konsumen memerlukan perlindungan hukum dan edukasi digital, baik terkait manfaat positif teknologi digital pada sektor ekonomi dan keuangan, maupun risiko yang ditimbulkan serta upaya perlindungan terhadap ancaman keamanan digital.

5.5.2 Regulasi Perlindungan Konsumen

Aturan terkait perlindungan konsumen telah diatur pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada UU tersebut dijelaskan pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha. Keterbukaan pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin keamanan

dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui upaya perlindungan konsumen. Namun demikian, belum terdapat Undang-Undang (UU) yang secara khusus mengatur Ekonomi Keuangan Digital atau *Financial Technology*. Beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur terkait ekonomi keuangan digital dan dapat menjadi dasar hukum antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE);
- 6) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Elektronik; dan
- 7) Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Di era ekonomi dan keuangan digital saat ini, perlindungan konsumen melalui berbagai kebijakan pengaturan dan pengawasan menjadi semakin krusial. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa perlindungan konsumen yang efektif dan dapat dipercaya akan memberikan dampak yang positif bagi kegiatan usaha di Indonesia. Penguatan perlindungan konsumen yang dilakukan diharapkan dapat menyeimbangkan hubungan antara penyedia layanan digital dengan konsumen, terutama konsumen yang memiliki keterbatasan dalam merespons tantangan dan perkembangan inovasi finansial serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Industri periklanan digital merupakan salah satu pemain utama dalam ekosistem digital, namun acap kali menempatkan konsumen pada posisi dengan risiko atas praktik periklanan yang menyesatkan atau menipu. Hal ini termasuk penggunaan klaim palsu, manipulasi informasi, atau pelacakan *online* yang invasif. Peraturan perundang-undang perlindungan konsumen perlu mengatur praktik periklanan digital dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Penyalahgunaan data atau penggunaan data secara tidak adil dan tanpa izin, profilisasi yang tidak transparan, atau manipulasi perilaku konsumen menjadi isu utama dalam ekosistem ekonomi digital. Penting bagi perusahaan untuk memperoleh persetujuan konsumen dalam merekam data dan menggunakannya secara

wajar. Regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan perlindungan data konsumen dan penggunaan data secara legal dan etis, untuk mengantisipasi potensi tindak kejahatan digital.

5.5.3 Literasi Keuangan Digital

Selain keamanan data, tantangan lain transaksi keuangan digital di Indonesia, yaitu literasi keuangan dan literasi digital masyarakat yang belum merata. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022 melaporkan tingkat literasi keuangan masyarakat hanya 49,6%, lebih rendah dari tingkat inklusi keuangan yang mencapai 85%. Begitu pula dengan rendahnya literasi digital yang baru mencapai 41,48%.

Dengan semakin meningkatnya *share* pengguna produk jasa keuangan dan pembayaran digital yang secara bersamaan memunculkan risiko keamanan digital, upaya perlindungan konsumen melalui penguatan regulasi dan pengawasan juga harus didukung dengan literasi keuangan digital. Literasi keuangan digital tidak hanya dimaksudkan untuk mendorong inklusi keuangan melalui perluasan adopsi jasa keuangan digital, literasi keuangan juga dimaksudkan untuk perlindungan konsumen terkait keamanan data dan antisipasi kejahatan siber. Konsumen perlu meningkatkan kewaspadaan digital (*digital awareness*) dengan mengambil langkah-langkah keamanan tambahan, seperti hanya menggunakan layanan jasa keuangan dan sistem pembayaran yang berizin dan terverifikasi serta mengaktifkan fitur keamanan tambahan seperti verifikasi dua tahap. Perlindungan konsumen dengan meningkatkan literasi keamanan digital pada ekosistem ekonomi dan keuangan digital dimaksudkan agar konsumen terlindungi dari penipuan, pencurian data pribadi seperti kartu kredit, *e-wallet* dan *mobile banking*, kebocoran informasi keuangan atau kehilangan aset keuangan. Penggunaan protokol keamanan seperti *Secure Sockets Layer* (SSL) dan metode pembayaran yang aman dapat membantu melindungi konsumen.

5.6 Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan

5.6.1 Tantangan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital

Perkembangan digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia saat ini dihadapkan oleh lima tantangan utama. Pertama, belum meratanya ketersediaan infrastruktur dan keterjangkauan internet. Kedua, masih perlu ditingkatkannya kapabilitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal literasi dan kematangan digital. Ketiga, regulasi yang belum mengoptimalkan bauran regulasi antar kementerian/lembaga. Keempat, tantangan pembiayaan yang

kini tengah dihadapi oleh berbagai pihak seperti pelaku ekonomi digital dan UMKM. Kelima, faktor pola pikir dan budaya yang belum mendukung.

a. Ketidakmerataan Infrastruktur dan Keterjangkauan Internet

Jumlah penduduk Indonesia yang terhubung ke internet telah mencapai 215,62 juta jiwa atau 78,19% dari total populasi Indonesia (naik 5 juta jiwa dari tahun sebelumnya). Akan tetapi, masih tampak ketidakmerataan akses internet secara geografis dan disparitas akses internet antarprovinsi. Penetrasi internet di kawasan perkotaan masih lebih tinggi (87,55%) daripada di kawasan pedesaan (79,79%). Perbedaan ini diperkuat dengan masih adanya 2.881 desa dari 83.218 desa yang belum memiliki akses internet sama sekali serta 12.548 desa yang belum mendapatkan akses internet layak (4G). Selain itu, penetrasi internet tertinggi masih terkonsentrasi di provinsi di pulau Jawa dan Bali (81,83% dan 80,88%), sedangkan penetrasi terendah berada pada provinsi Papua (63,15%).

Kecepatan internet *mobile* Indonesia pada Februari 2023 naik dua peringkat menjadi peringkat 103 dari 137 negara dengan kecepatan internet 20,17 Mbps. Namun Indonesia berada pada kelompok negara dengan kecepatan internet terendah, dan bila dibandingkan seluruh negara Asia Tenggara merupakan *ranking* terakhir. Kecepatan internet *fixed broadband* Indonesia pun menempati posisi tiga terbawah, hanya lebih unggul dari Kamboja dan Myanmar, yaitu pada 26,38 Mbps. Sebagai perbandingan, rata-rata kecepatan internet *mobile* global adalah 38,77 Mbps dan *fixed broadband* mencapai 78,62 Mbps.

Dari segi keterjangkauan, sebagian besar penduduk Indonesia yang tidak terkoneksi internet dan tidak memiliki perangkat yang dapat mengakses internet, 55% di antaranya menyatakan karena harga yang tidak terjangkau (Bank Dunia, 2020). Masyarakat dari kelas ekonomi menengah-bawah diperkirakan dapat menghabiskan 20% dari pengeluaran bulannya untuk membeli ponsel dengan akses internet. Selain itu, harganya bisa lebih tinggi di daerah pedesaan dan terpencil. Selain masalah harga, penggunaan layanan digital juga menjadi tantangan bagi banyak orang.

b. Kapabilitas SDM yang Masih Perlu Ditingkatkan

Secara umum, Indonesia masih menghadapi kekurangan SDM atau tenaga kerja berketerampilan digital. Di sisi lain, dalam rentang waktu 2016–2030, Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta tenaga kerja digital, atau sekitar 600 ribu per tahun. Literasi digital masyarakat Indonesia juga masih relatif rendah,

tercermin dari skor Indeks Literasi Digital Indonesia yang mencapai 3,54, atau berada dalam kategori sedang. Hal ini berpengaruh pada tingkat kematangan digital, seberapa cepat suatu teknologi digital diadopsi individu maupun organisasi, misalnya, teknologi sistem perbankan dan pembayaran digital. Individu dengan kematangan digital yang rendah memiliki kecenderungan untuk tetap membutuhkan kehadiran lembaga keuangan secara fisik, baik dalam bentuk kantor cabang ataupun jaringan kantor lainnya, sehingga upaya transformasi keuangan digital menjadi kurang efektif.

Keterampilan digital (*digital skill*) merupakan salah satu faktor penting dalam membangun Ekonomi dan Keuangan Digital Nasional. Berdasarkan studi empiris, diketahui bahwa akses terhadap internet meningkat secara signifikan seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan. Maka dari itu, inklusi digital yang optimal dapat terwujud bila pendidikan juga ditujukan untuk meningkatkan literasi digital dan penggunaan internet yang produktif di semua lapisan masyarakat

Diperlukan kelanjutan dan peningkatan berbagai program, kebijakan, dan inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam ekonomi dan keuangan digital. Pertama, program pelatihan, pendidikan, dan pendampingan melalui Kartu Prakerja perlu terus dipertajam. Kedua, program Literasi Digital Nasional, yang meliputi Program Siber Kreasi, *Digital Talent Scholarship*, dan *Digital Talent Academy* juga harus terus dilakukan dengan memperluas implementasinya. Ketiga, Program *Digital Entrepreneurship Academy*, yang merupakan bagian dari *Digital Talent Scholarship*, perlu dipercepat. Program ini bertujuan untuk melatih para wirausahawan Indonesia dalam memanfaatkan *platform* digital untuk kegiatan bisnis. Di tahun 2023, program ini berencana untuk melatih sekitar 33.000 wirausahawan Indonesia.

c. Regulasi yang Belum Optimal

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan terkait ekonomi dan keuangan digital, antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjadi landasan hukum dalam hal transaksi elektronik, termasuk *e-commerce*; (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari UU ITE dan mengatur lebih detail mengenai keamanan transaksi elektronik serta penggunaan tanda tangan elektronik; (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (*Financial Technology*) yang mengatur kegiatan *fintech* dan memberikan pedoman dalam penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi; (4) Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur sektor *fintech peer-to-peer lending*, dan; (5) Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa isu yang dihadapi terkait digitalisasi di sektor ekonomi dan keuangan, antara lain, perlindungan konsumen, keamanan data, kepastian hukum, serta kebutuhan koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi terkait. Ditambah, pesatnya kemajuan *Artificial Intelligence* saat ini menambah ancaman keamanan data dan *cybercrime* dengan isu seputar hak cipta, berita palsu, dan *deepfake*. Hal ini semakin membuat komunikasi dan kolaborasi multi-sektor antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media menjadi semakin krusial (Aghion *et al.*, 2017; Raimundo & Rosaria, 2021). Pengembangan dan penyempurnaan regulasi yang lebih adaptif dan responsif perlu terus dilakukan agar ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dapat tumbuh secara optimal.

d. Pembiayaan Ekosistem Keuangan Digital

Kendala pembiayaan adalah faktor paling utama dihadapi oleh UMKM dalam melakukan transformasi digital, berdasarkan hasil studi Boston Consulting Group (BCG) dan Telkom Indonesia tahun 2022. Berdasarkan hasil survei di atas dengan responden lebih dari 3.700 UMKM, 57% responden UMKM menyatakan bahwa kendala dukungan pembiayaan merupakan permasalahan utama yang dihadapi, diikuti oleh keterbatasan pelatihan digital sebesar 49% dan dukungan kebijakan sebesar 43%.¹⁷

Sejak akhir 2022, terdapat tantangan baru khususnya pada digitalisasi UMKM, yakni dampak *tech winter* (fenomena penurunan nilai ekonomi atau stagnasi pada industri teknologi yang terjadi setelah periode *booming*). Fenomena ini disebabkan oleh ketidakstabilan pasar, kegagalan perusahaan *start-up*, atau turunnya minat investor setelah melandainya *new economy*, ekonomi digital yang berkembang pesat pada masa pandemi Covid-19. Salah satu dampak dari *tech winter* adalah kebijakan efisiensi industri digital yang meningkat secara drastis yang antara lain diimplementasikan dengan pemotongan kegiatan promosi pada ekosistem keuangan digital secara signifikan. Hal ini yang berdampak pada penurunan pendapatan atau kenaikan

¹⁷ <https://www.bcg.com/publications/2022/powering-up-post-pandemic-rebound-for-msmes>

biaya operasional pelaku UMKM dan biaya yang harus ditanggung konsumen yang selama ini disubsidi oleh perusahaan *Fintech* yang memperoleh suntikan dana dari *angel investor*.

e. Pola Pikir dan Budaya yang Belum Sepenuhnya Mendukung

Pola pikir dan budaya masyarakat dan pelaku ekonomi di Indonesia masih belum sepenuhnya mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan digital, walaupun terjadi peningkatan Indeks literasi digital selama 3 tahun terakhir dari 3,46 menjadi 3,54 berdasarkan survei Status Literasi Digital Indonesia 2022 yang dilakukan Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC). Beberapa faktor seperti ketidakpercayaan terhadap teknologi, preferensi terhadap transaksi tunai, dan kurangnya produktivitas penggunaan internet masih menjadi tantangan dalam mengadopsi dan memanfaatkan potensi ekonomi digital. Selain itu, sikap skeptisisme terhadap keamanan dan privasi data juga mempengaruhi toleransi terhadap inisiatif digital. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya yang komprehensif untuk merubah pola pikir melalui peningkatan literasi digital, edukasi masyarakat tentang manfaat dan keamanan teknologi digital, serta mendorong adopsi transaksi nontunai dan inovasi digital yang dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas, khususnya bagi UMKM dan masyarakat dengan letak geografis jauh dari pusat kota dan yang belum memiliki akses ke perbankan.

5.6.2 Rekomendasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Digital

Tantangan dan hambatan dalam upaya pengembangan ekonomi dan keuangan digital tersebut di atas memerlukan alternatif rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan membumi. Hasil analisis dan diskusi penulis menghadirkan 5 (lima) usulan alternatif kebijakan akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Pertama, yaitu pendidikan dan pelatihan digital, kepada masyarakat umum dan khususnya bagi pelaku usaha. Kedua, pengembangan infrastruktur digital. Ketiga, pengembangan sistem logistik yang efisien dan terintegrasi. Keempat, pembaharuan regulasi secara terintegrasi yang memitigasi risiko dan meningkatkan keamanan digital baik konsumen maupun pelaku ekonomi digital. Kelima, peningkatan keunggulan produk dan layanan UMKM.

Pendidikan dan Pelatihan Digital

Program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pemanfaatan teknologi digital dapat membantu meningkatkan pemahaman UMKM terhadap teknologi digital, pengaplikasian alternatif solusi digital dan aspek keamanan

digital. Program ini akan membantu UMKM dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan menggunakan perangkat digital dengan efektif. Ini termasuk pemahaman tentang *e-commerce*, media sosial, analitik digital, dan keamanan siber. Penyediaan mentor digital yang berpengalaman juga membantu mengatasi ketakutan dan rasa tidak percaya diri terkait teknologi digital. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan industri dalam menginisiasi *digital center* di setiap daerah sangat krusial untuk memastikan pelaksanaan program kerja telah berjalan secara terarah dan tepat guna. Pada akhirnya, sumber daya manusia sektor UMKM diharapkan memiliki keterampilan dan kematangan digital yang memadai sehingga dapat memanfaatkan potensi ekonomi dan keuangan secara maksimal.

Pengembangan Infrastruktur Digital

Ketersediaan infrastruktur digital publik merupakan salah satu prasyarat utama yang diperlukan untuk mengakselerasi digitalisasi produk finansial yang bermanfaat bagi peningkatan inklusi keuangan dan mendorong tingkat adopsi digital masyarakat. Pengembangan infrastruktur digital dapat membantu UMKM memaksimalkan operasional bisnis secara *online* dimanapun lokasi UMKM tersebut berada. Pemerintah perlu mengalokasikan dana yang cukup untuk memperluas jangkauan internet, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Pengembangan teknologi 5G juga penting untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan koneksi internet. Kolaborasi dengan pihak swasta, seperti penyedia layanan internet atau telekomunikasi, dapat membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas internet di Indonesia. Hal ini akan memungkinkan UMKM untuk menjalankan operasional mereka secara efisien dan memanfaatkan potensi penuh dari layanan digital, seperti *e-commerce*, pemasaran *online*, dan kolaborasi jarak jauh.

Merespons hal ini, Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus meningkatkan pembangunan infrastruktur digital lewat keberlanjutan 5 (lima) program prioritas di tahun 2023. Kelima program tersebut adalah: (1) Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, melanjutkan pembangunan *Base Transceiver Station (BTS)* 4G di 2.134 titik baru dan 7.482 titik berkategori 3T; (2) Program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan layanan publik; (3) Program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; (4) Program komunikasi publik dan; (5) Program dukungan manajemen.

Pengembangan Sistem Logistik yang Efisien dan Terintegrasi

Biaya logistik yang tinggi menyulitkan UMKM untuk bersaing dalam pasar digital yang kompetitif. Menurut data Armstrong and Associates (2021), biaya logistik Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara yaitu 22% dari

Produk Domestik Bruto (PDB). Pengiriman produk dalam skala besar dan jarak yang jauh seringkali memerlukan biaya yang tinggi, terutama ketika UMKM belum dapat memanfaatkan skala ekonomi yang lebih besar. Akibatnya, UMKM mungkin tidak dapat memanfaatkan potensi pasar yang lebih luas melalui digitalisasi. Hal ini menghambat kemampuan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka ke seluruh wilayah Indonesia atau bahkan di tingkat internasional.

Pengembangan sistem logistik yang efisien dan terintegrasi merupakan salah satu infrastruktur penunjang utama dalam keberhasilan implementasi teknologi digital pada UMKM. Pemerintah perlu memperluas jalan tol, memperbaiki jalan yang rusak, dan memperbanyak pelabuhan di beberapa titik distribusi di Indonesia. Kolaborasi UMKM dengan mitra logistik terpercaya untuk meningkatkan efisiensi jalur distribusi barang menjadi semakin krusial. UMKM harus memilih mitra yang menyediakan layanan pengiriman, pelacakan, dan manajemen persediaan yang efisien. Dengan begitu, UMKM dapat memperoleh proses logistik yang optimal dan meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun kepercayaan, dan meningkatkan pangsa pasar mereka.

Pembaharuan Regulasi Digitalisasi

Pembaharuan regulasi ekonomi keuangan digital yang sesuai dengan perkembangan teknologi dapat membantu UMKM mengatasi isu-isu digital. Pemerintah perlu memperbaharui dan mengembangkan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk akselerasi digitalisasi UMKM. Hal ini termasuk perlindungan privasi dan keamanan data pribadi, keamanan siber, perlindungan konsumen *online*, melindungi UMKM dari *predatory business* dan ketentuan yang mengatur transaksi elektronik. Kerangka hukum ini harus diadaptasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren bisnis digital, termasukantisipasi kemungkinan terjadinya arbitrase ketentuan (*regulatory arbitrage*) yang menguntungkan perusahaan *fintech* besar dan merugikan UMKM. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi industri juga penting dalam untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi baru. Dengan membuka ruang berdialog dan keterlibatan UMKM secara aktif, kebijakan yang disusun akan lebih memahami perspektif UMKM dan merancang regulasi yang berfokus pada kepentingan UMKM. Pada akhirnya, UMKM dapat terlindungi dari aspek legal dan beroperasi secara aman dalam lingkungan digital.

Peningkatan Keunikan Produk dan Layanan UMKM

Peningkatan keunikan produk atau layanan yang ditawarkan masing-masing UMKM dengan standar nasional dapat membantu UMKM untuk memiliki

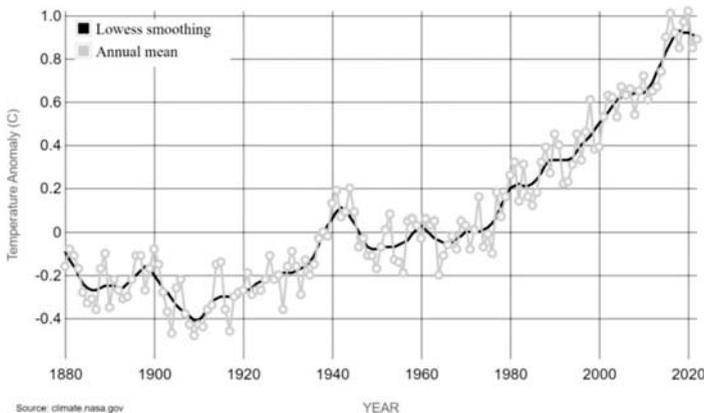
keunggulan kompetitif dan menjangkau pasar yang lebih luas. UMKM perlu menemukan cara untuk membedakan diri dari pesaing dengan menawarkan nilai tambah yang unik dan menarik bagi pelanggan. Ini dapat dilakukan melalui inovasi produk, desain yang menarik, memberikan pengalaman pelanggan secara personal, atau penyediaan layanan ekstra. Selain itu, UMKM juga perlu mengoptimalkan penggunaan data dan analitik untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan serta mengidentifikasi peluang pasar yang belum terpenuhi. Pemerintah juga dapat mendorong persaingan sehat melalui regulasi yang memfasilitasi akses yang adil. Dengan memahami pasar dengan baik dan membangun strategi yang sesuai, UMKM dapat memosisikan diri mereka sebagai pemain yang menonjol sehingga dapat berhasil bersaing di dalam *marketplace* digital.

BAB VI

PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN

Era “*global warming*” telah berakhir. Dunia mulai memasuki era “*global boiling*”¹⁸. Tahun 2023 tercatat sebagai tahun dengan suhu rata-rata global terpanas selama sejarah manusia modern. Temperatur bumi pada bulan Juli 2023 diperkirakan sekitar 1,5°C lebih hangat daripada rata-rata pada tahun 1850-1900. Kerusakan lingkungan, pemanasan suhu global, dan perubahan iklim semakin terasa. Langit biru semakin jarang ditemui terutama di kota-kota besar.

Gambar 6. 1 *Global Land-Ocean Temperature Index*



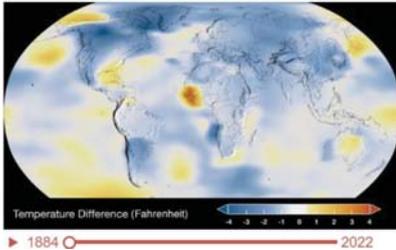
Pemborosan ekonomi (*over consumption* dan *over production*) menyebabkan tingginya emisi dunia yang berakibat pada pemburukan perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*). Mathis Wackernagel (2002) menyampaikan bahwa aktivitas manusia dapat ditopang oleh ekosistem alami dunia terakhir pada tahun 1980an, dan pada tahun 2002 manusia telah melakukan *over*konsumsi sumber daya sebanyak 20% di atas daya dukung ekosistem alami bumi. Perilaku *greedflation*¹⁹

¹⁸ Sebagaimana disampaikan oleh Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB pada 27 Juli 2023.

¹⁹ <https://www.economist.com/leaders/2023/07/06/greedflation-is-a-nonsense-idea-kenaikan-profit-margin-perusahaan-perusahaan-di-negara-negara-barat-diindikasikan-disebabkan-oleh-kebijakan-subsidi-selama-pandemi-yang-meningkatkan-consumer-spending-di-tengah-terjadinya-disrupsi-global-supply-chain,-dilanjutkan-dengan-kelangkaan-komoditas-akibat-perang-Rusia-Ukraina-serta-meningkatnya-gaji-di-tengah-tight-labor-market>

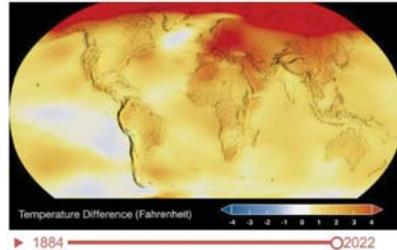
terdeteksi di negara-negara barat pada pertengahan tahun 2023. Meskipun dampak dari perilaku oportuniste tersebut terhadap tingkat inflasi masih diperdebatkan, tetapi kenaikan harga yang terjadi di negara-negara tersebut, apapun penyebabnya, bukan hanya didasari perilaku bertahan dari perusahaan, tetapi juga diinginkan oleh perusahaan (*not only defensible but also desirable*).

Gambar 6. 2 Temperatur bumi pada tahun 1884



Sumber: NASA dan GISS

Gambar 6. 3 Temperatur pada tahun 2022



Sumber: NASA dan GISS

Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target *net-zero* emisi karbon selambat-lambatnya pada 2050. Pada tahun 2021, Indonesia mengambil langkah tegas menuju dekarbonisasi. Pada COP26 di Glasgow, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mencapai puncak emisi GHG nasional pada tahun 2030, dengan *net sink (carbon sequestration)*²⁰ di sektor kehutanan dan tata guna lahan, dan untuk mencapai target emisi *net-zero* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Indonesia memperbarui komitmen NDC (*Nationally Determined Contribution*)²¹ pada September 2022, meningkatkan target tanpa syarat dari 29% menjadi 32% di bawah skenario bisnis seperti biasa (*Business as Usual/BAU*), dan target bersyarat dari 41% menjadi 43% di bawah BAU, termasuk target emisi dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (*land use, land use change and forestry (LULUCF)*). Pada 2023, Indonesia meningkatkan komitmen untuk mencapai target *net-zero* emisi karbon selambat-lambatnya pada 2050.

6.1 Lima Tantangan Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC)

Dalam memenuhi komitmen NDC, Indonesia menghadapi 5 (lima) tantangan besar yang harus dilalui, yaitu ekosistem regulasi di Indonesia yang masih

²⁰ Penyerapan karbon lebih besar daripada yang dilepaskannya ke atmosfer

²¹ Para negara pihak (*party*) yang telah meratifikasi Perjanjian Paris (Paris agreement di 2016) wajib menyampaikan National Determined Contributions (NDC) yang berisi target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga tahun 2030.

banyak tumpang tindih dan saling kontradiktif, masih kurangnya infrastruktur sebagai modal untuk langkah adaptasi dari perubahan iklim, ekosistem data yang masih kurang andal dan terintegrasi, kualitas manusia yang perlu ditingkatkan dalam menghadapi transisi lapangan kerja yang ramah lingkungan, serta masih rendahnya kesadaran dan edukasi terkait pola hidup ramah lingkungan. Tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara pengurangan emisi gas rumah kaca dan memastikan lintasan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan merata untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.

6.1.1 Mengatasi Regulasi yang Tumpang Tindih dan Kontradiktif

Regulasi yang tumpang tindih di Indonesia dapat menghambat produktivitas dan kegiatan ekonomi. Tsani (2011) menyebutkan bahwa perundangan dan regulasi di Indonesia banyak yang mengalami tumpang tindih. *Over-regulation* tetapi satu regulasi dengan lainnya tidak sesuai. Perundangan dan turunannya yang sejatinya diciptakan sebagai produk hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah Pemerintah dan masyarakat, sering kali dalam kenyataan tidak berjalan sesuai harapan dan justru menghambat produktivitas serta kegiatan ekonomi di lapangan. Beberapa contoh kasus sebagai berikut:

1) Regulasi dalam pengembangan ekosistem energi terbarukan

Aturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih menjadi salah satu hambatan utama dalam lelang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia. Dalam rangka mencapai target NDC, Indonesia perlu mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) guna mengejar target 23% bauran EBT pada 2025²² dan *net-zero emission* pada 2050. Pemanfaatan energi surya diyakini dapat menjadi salah satu alternatif strategi yang cepat dan tepat untuk mencapai target tersebut. Energi surya sendiri memainkan peran penting dalam ketenagalistrikan di Indonesia dengan 421 GW dari 700 GW sumber listrik EBT berasal dari surya. Secara umum, pengembangan energi surya Indonesia memperlihatkan kemajuan sejak 2018 meski tergolong lambat. Namun dalam prosesnya, aturan mengenai TKDN masih menjadi salah satu hambatan utama dalam lelang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia. Berdasarkan Permenperin No. 5 Tahun 2017, nilai TKDN minimal barang untuk komponen modul surya harus mencapai minimal 60% sejak 1 Januari 2019. Namun, realisasi nilai TKDN modul surya saat ini baru mencapai 47,5%. Di samping pencapaian nilai TKDN, efisiensi dan harga panel surya domestik masih belum sesuai ketentuan standar *bankability* pembiayaan internasional.

²² Sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.

Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia tidak hanya mampu mencapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhan listrik melalui EBT, melainkan juga berpotensi besar untuk dapat melakukan ekspor energi baru dan terbarukan. Untuk itu, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan ketentuan nilai TKDN modul surya berdasarkan kesiapan industri sambil mempersiapkan kebijakan industri modul surya jangka panjang untuk dekarbonisasi sistem energi Indonesia. Oleh karena itu, kepastian regulasi mengenai EBT akan mampu mengakselerasi transisi energi.

2) Regulasi dalam pengaturan pemanfaatan lahan dan kehutanan
UU Cipta Kerja dinilai dapat memperbaiki tata kelola hutan namun juga dapat melemahkan perlindungan hutan alam apabila kualitas institusi pelaksana dan penegakan hukum rendah. Dalam rangka mencapai target NDC *net-zero emission* pada 2050, Indonesia perlu menjamin perlindungan hutan alam dan lingkungan hidup. Di sisi lain, terdapat tiga hal utama yang menjadi perhatian dalam UU Cipta Kerja yaitu: (i) Hilangnya aturan batas minimal 30% kawasan hutan; (ii) Penyelesaian keterlanjuran berusaha di kawasan hutan; dan (iii) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan ketahanan pangan (*food estate*). Untuk itu, sangat penting bagi Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah memastikan implementasi dari UU Cipta Kerja berdampak positif di lapangan.

Tidak adanya batas minimal 30% kawasan hutan dapat berdampak negatif yang disertai dengan kebijakan yang mempermudah pemberian izin usaha di sektor kehutanan dapat berpotensi meningkatkan deforestasi. Namun, di sisi lain, apabila Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dapat menerapkan aturan yang didasari oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan *Life-Cycle Assessment* (LCA) dengan baik, penetapan kawasan hutan di suatu daerah dapat menjadi lebih tinggi dari 30%. Dengan kata lain, apabila implementasi dari UU Cipta Kerja dan turunannya dapat dilakukan dengan baik di lapangan, aturan ini dapat mendukung pencapaian NDC Indonesia. Syarat utamanya adalah kualitas institusi pelaksana dan penegakan hukum.

Tidak sejalannya regulasi dari Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait kepemilikan tanah menahan pengusaha kelapa sawit untuk menanam. Permasalahan regulasi yang tumpang tindih juga terjadi di industri kelapa sawit yang merupakan penopang ekspor nonmigas Indonesia. Tidak sejalannya regulasi dari Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait kepemilikan tanah, meningkatkan risiko produsen kelapa sawit. Hal tersebut diindikasikan menahan pengusaha kelapa sawit untuk menanam sawit sehingga menurunkan produktivitas kelapa sawit Indonesia.

Peraturan yang mensyaratkan sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bersamaan dengan permintaan pasar terkait regulasi anti deforestasi Uni Eropa menurunkan daya saing produk mebel Indonesia. Industri mebel yang menghadapi regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bersamaan dengan permintaan mebel dari Eropa yang memberlakukan regulasi anti deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/ EUDR). Adanya kebutuhan pemenuhan kedua regulasi yaitu sertifikasi yang isinya hampir sama tersebut, menimbulkan biaya ganda yang menurunkan daya saing produk mebel Indonesia.

6.1.2 Penguatan Infrastruktur sebagai Modalitas untuk Adaptasi *Climate Change*

Ketersediaan infrastruktur dasar yang masih belum merata di Indonesia akan menghambat pencapaian NDC karena pentingnya peran infrastruktur dalam ketahanan suatu daerah terhadap perubahan iklim. Di negara berkembang, akses ke teknologi dan infrastruktur tidak terdistribusi secara merata (Preston *et al.*, 2019). Untuk kota besar seperti Jakarta, pembangunan infrastruktur *sea walls* menjadi penting untuk dibangun untuk mengatasi dampak fisik dari perubahan iklim. Sementara itu, untuk kota-kota kecil di luar pulau Jawa, Pembangunan infrastruktur yang menjamin ketersediaan air bersih sangat penting untuk menjamin masyarakat di area tersebut dapat bertahan hidup di tengah suhu yang semakin panas (OECD, 2018).

Perubahan iklim dan pemanasan global semakin memperburuk permasalahan kurangnya air bersih. Ketersediaan air bersih diperkirakan akan berkurang sejalan dengan semakin meningkatnya kejadian iklim ekstrem. Meningkatnya krisis air bersih di Indonesia dapat berdampak buruk terhadap sanitasi dan kesehatan masyarakat di Indonesia (Elysia, 2018). Dalam hal terjadi banjir, kerugian fisik terutama timbul bukan karena kerusakan langsung akibat banjir, namun karena terdampak dari disrupsi transportasi dan ketersediaan *supply* listrik akibat banjir tersebut (OECD, 2018). Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur dasar yang merata sangat penting agar Indonesia kuat menghadapi transisi dalam rangka mencapai komitmen NDC dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6.1.3 Membangun Sistem Data yang Andal dan Terintegrasi

Sistem data di Indonesia terutama terkait emisi dan lingkungan masih belum lengkap dan terintegrasi di tengah pentingnya data untuk kebijakan iklim. Padahal dengan tersedianya data yang lengkap dan berkualitas, kita dapat memahami dampak suatu kebijakan. Dari kebijakan insentif pengurangan

emisi, hingga peraturan yang mengurangi risiko fisik dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan iklim. Seorang fisikawan terkenal pernah berkata: “*When you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it*”. Ketersediaan data yang dapat diandalkan, terintegrasi dan komprehensif sangat penting untuk langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (NGFS, 2022). Tanpa adanya data yang komprehensif dan dapat dibandingkan secara internasional, mustahil untuk mengetahui kebijakan apa yang berhasil, dan di mana koreksi diperlukan (IMF, 2022).

Dengan data yang dapat dibandingkan secara internasional yang menggunakan parameter yang sesuai dengan *local context* negara/daerah terkait, diharapkan pencapaian target iklim global dapat tercapai dan perubahan iklim global dapat teratasi dengan baik, sebelum terlambat. Oleh karena itu, pengembangan *database* yang *reliable* sangat penting di Indonesia. *Database* yang dapat mengintegrasikan antara identitas unik setiap penduduk dan bisnis (*single identity*), data jejak karbon dan jalur pemanfaatan bahan/material (*flow of materials*) dalam setiap perusahaan dan UMKM termasuk sampah rumah tangga. Pengambilan dan pengolahan data perlu menggunakan teknologi terkini termasuk *Artificial Intelligence* (AI), *satellite geo-imaging* serta data emisi per *grid* yang dapat memonitor emisi, cuaca dan iklim secara *real time* dan akurat. Hal ini melibatkan kolaborasi antar institusi pemerintah dan swasta.

6.1.4 Mempelajari Kapasitas Manusia Indonesia untuk Lapangan Kerja Hijau

Pemenuhan komitmen NDC Indonesia untuk mencapai *net-zero* pada 2050 membutuhkan investasi yang signifikan, dan hal ini memberikan peluang untuk penciptaan lapangan kerja baru. Transisi menuju ekonomi berkelanjutan tidak hanya melibatkan tantangan regulasi, infrastruktur, dan data, tetapi juga tantangan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Investasi dalam energi bersih dan infrastruktur berkelanjutan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan investasi pada sektor konvensional. Studi menunjukkan bahwa investasi sektor energi terbarukan memiliki *multiplier* yang tinggi dengan penciptaan lapangan kerja baru 2,8 kali lipat lebih banyak daripada investasi pada sektor energi bahan bakar fosil. Secara spesifik, tiap satu juta dolar AS investasi pada energi solar PV dan energi angin masing-masing menciptakan lapangan pekerjaan 1,5 dan 1,2 kali lebih banyak daripada investasi pada energi fosil. Investasi energi bersih lainnya seperti tenaga air, energi panas bumi, dan efisiensi industri menciptakan *multiplier* yang lebih tinggi. Perkiraan ini adalah median

dari berbagai studi yang mencakup Brazil, Cina, Indonesia, Jerman, Afrika Selatan, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan dunia secara keseluruhan (UNIDO dan GGGI, 2015; Chen, 2019; Garrett- Peltier, 2017; dan IEA, 2020). Laporan dari Bappenas juga menunjukkan bahwa jalur pembangunan rendah karbon di Indonesia dapat menghasilkan 15,3 juta lapangan kerja baru yang lebih hijau dan memberikan upah lebih tinggi pada tahun 2045. Saat ini, lebih dari 65 juta orang di seluruh dunia bekerja dalam sektor energi dan industri terkait, dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 139 juta pada tahun 2030. Jumlah lapangan kerja energi terbarukan pun diperkirakan akan meningkat dari 0,63 juta menjadi 0,74 juta pada tahun 2030 dan 1,07 juta pada tahun 2050.

Untuk itu, sangat penting bagi tenaga kerja Indonesia untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini di tengah bonus demografi Indonesia sebelum 2045. Apabila kesempatan ini dimanfaatkan secara strategis dapat mendukung Indonesia untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi. Di sisi lain, minimnya *labor supply* sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk memproduksi energi bersih, dapat menjadi salah satu penghambat masuknya investasi energi bersih ke Indonesia.

Hal ini menuntut SDM Indonesia memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri yang kian berkembang ini. Penyelarasan antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri ramah lingkungan adalah suatu keharusan. Sebagai contoh, pada tiap tahapan *value chain* sektor energi hijau, diperlukan setidaknya 36 jenis pekerjaan dan 29 di antaranya memerlukan keahlian dan pendidikan yang tinggi. Sedangkan, proporsi tenaga kerja lulusan universitas di Indonesia masih rendah, yakni sebanyak 9,92% pada Februari 2022. Selain itu, tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi baik diploma maupun sarjana juga masih mencapai 15,7%. Ditambah, Indonesia juga masih kekurangan ahli energi, khususnya ahli panas bumi. Hal ini kurang mendukung potensi energi terbarukan panas bumi Indonesia, yang memiliki potensi energi hingga 29 ribu megawatt. Selain itu, proyeksi akan terjadinya pergeseran lapangan kerja dari sektor energi yang berbasis fosil ke sektor energi terbarukan membutuhkan *training* dan pelatihan yang sesuai sehingga proses transisi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, integrasi *green skills* dalam kurikulum pendidikan juga perlu menjadi perhatian. Keberhasilan transisi energi akan sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam teknologi dan prinsip-prinsip energi terbarukan. Hal ini nantinya juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

Tantangan kapasitas sumber daya manusia dalam transisi energi hijau yakni memastikan bahwa munculnya lapangan pekerjaan baru di sektor hijau

bukan hanya berkualitas tetapi juga menjamin akses keamanan, keselamatan, serta perlindungan sosial bagi pekerja. Terutama di negara berkembang, di mana pekerjaan hijau sering bersifat informal, salah satunya adalah dalam pengelolaan limbah seperti ekosistem ekonomi sirkular. Namun sayangnya, imbal hasil yang didapatkan dari pengelolaan limbah masih dipandang sebelah mata. Populasi yang terus tumbuh dan melakukan urbanisasi membutuhkan investasi yang signifikan untuk infrastruktur dasar. Tidak seperti di negara maju, ekosistem ekonomi sirkular belum terbentuk seperti belum adanya standarisasi *output* hasil pengolahan limbah yang menjadi stok bahan untuk digunakan kembali oleh perusahaan-perusahaan lain (Prieto-Sandoval *et al.*, 2018 dan Scheel, 2016).

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan perlindungan pekerja dan mendukung mereka dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam konteks ekonomi yang berkelanjutan. UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan Tujuan Pembangunan Milenium juga menegaskan perlunya perlindungan lingkungan dan pekerja dalam konteks ekonomi yang berkelanjutan. Ke depannya, diperlukan UU Ketenagakerjaan yang mengonsepan *green jobs* untuk memastikan hak-hak dan perlindungan pekerja terpenuhi dengan layak.

6.1.5 Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat

Kesadaran dan wawasan masyarakat terhadap pentingnya transisi energi dan pola hidup ramah lingkungan masih relatif minim sejalan dengan rendahnya daya beli. Hambatan utama transisi menuju energi dan produk hijau dari sisi masyarakat adalah daya beli rendah. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya konsep keberlanjutan di negara berkembang (Soda *et al.*, 2015) dan lemahnya permintaan dari konsumen (Ehrgott *et al.*, 2013) untuk produk berkelanjutan sebagian besar karena rendahnya daya beli di pasar tersebut, di mana produk ramah lingkungan dengan harga premium menjadi tidak terjangkau untuk rakyat banyak di negara berkembang (Brik *et al.*, 2013).

Konsumen lebih memilih untuk membeli produk konvensional yang dapat memenuhi fungsi dasar dari sebuah produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk hijau yang memberikan fungsi dasar yang sama meski dengan kualitas yang lebih baik (Azmat dan Ha, 2013). Di sisi lain, produsen di negara berkembang masih memiliki kekurangan dari sisi pengetahuan, keahlian, dan dana yang diperlukan untuk menerapkan praktik berkelanjutan (Jia *et al.*, 2018; Preston *et al.*, 2019). Di negara berkembang, tekanan dari

pemangku kepentingan eksternal lainnya seperti media, LSM, dan masyarakat lokal jauh lebih rendah dibandingkan di negara maju (Sandhu *et al.*, 2012). Selain itu, akses ke teknologi dan infrastruktur (infrastruktur transportasi dan jaringan telekomunikasi) di negara berkembang tidak terdistribusi secara merata. Elektrifikasi memasak (kompor listrik) dan transportasi (kendaraan listrik) masih dianggap terlalu mahal oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil survei Pertamina dan PLN (2022) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekhawatiran terkait keandalan, baik pada kendaraan listrik maupun kompor listrik. Oleh karena itu, untuk elektrifikasi transportasi, diperlukan lebih banyak stasiun pengisian daya atau penukaran baterai. Sementara itu untuk kompor listrik, perlu diperkuat keandalan pasokan listrik di rumah tangga. Di sisi transportasi, tantangan utama di Indonesia adalah peningkatan kualitas transportasi publik agar sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut Pertamina dan PLN (2022), permasalahan utama dari transportasi publik di Indonesia adalah waktu tunggu dan interkoneksi.

Peran institusi dan lembaga masyarakat dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup ramah lingkungan merupakan *centre* dari keberhasilan pencapaian NDC. Institusi formal ataupun informal yang dimiliki masyarakat memiliki peran penting dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai urgensi dan manfaat dari pengurangan emisi karbon dan beralih ke sumber energi terbarukan (ESDM, 2022). Kolaborasi antara pemerintah dan institusi masyarakat juga dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan implementasi, seperti melakukan evaluasi dampak kebijakan secara berkala, penyediaan pengetahuan teknis, pendanaan, dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu lingkungan.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak perubahan iklim dapat mendorong permintaan terhadap sumber energi bersih dan terbarukan. Dengan memiliki pengetahuan yang baik dan pemahaman mengenai manfaat energi terbarukan dan kontribusinya terhadap *net zero emission*, masyarakat akan lebih mendukung kebijakan pemerintah yang mendukung transisi energi dan menopang terbentuknya pasar energi terbarukan di tingkat konsumen. Tantangan utama dalam adopsi pola hidup ramah lingkungan dan konsumsi energi bersih bagi masyarakat adalah terbatasnya daya beli masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sejalan dengan Stern (2018), pencapaian target NDC Indonesia perlu ditopang oleh peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata dapat tercapai.

6.2 Peran dan Kontribusi Sektoral untuk Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan

6.2.1 Sektor Energi dan Pertambangan

Tantangan di sektor energi dan pertambangan dalam mendorong pertumbuhan hijau di Indonesia tercermin dalam 3 (tiga) buah kendala yaitu kapasitas infrastruktur energi, investasi, dan pembiayaan, sebagaimana diungkapkan dalam laporan Energy Outlook 2023 oleh Institute for Essential Services Reform (IESR). Pertama, infrastruktur jaringan listrik PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) saat ini tidak mampu sepenuhnya mengakomodasi sumber energi terbarukan yang bervariasi, seperti tenaga surya dan angin. Ketidakkampuan untuk mengatasi fluktuasi dalam pasokan energi dari sumber-sumber ini dapat menghambat penerapan yang lebih luas dari energi terbarukan. Di sisi lain, untuk menyediakan akses energi yang merata di Indonesia, dibutuhkan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan yang dalam proses produksinya memerlukan pembangunan ekosistem industri pertambangan *critical minerals*.

Kedua, meskipun saat ini terdapat surplus energi yang disuplai pembangkit listrik, mayoritas berasal dari batu bara. Hal ini menunjukkan bahwa transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan masih belum terlaksana secara efektif. Ketergantungan yang berlanjut pada batu bara dapat merugikan lingkungan dan memperlambat *shift* menuju pertumbuhan hijau. Ketiga, dalam upaya mengembangkan energi biofuel, fluktuasi harga komoditas seperti kelapa sawit menjadi kendala yang signifikan. Perubahan harga ini dapat berdampak pada ekonomi dan ketersediaan energi biofuel, yang pada gilirannya mempengaruhi rencana transisi menuju energi berkelanjutan.

Terakhir adalah kendala pendanaan, baik dari publik maupun swasta. Pendanaan publik untuk proyek-proyek energi terbarukan masih sangat terbatas, hanya mencapai sekitar 0.83% dari target yang ditetapkan, menghambat pengembangan proyek-proyek inovatif dan mencegah pencapaian tujuan energi terbarukan yang lebih ambisius. Bank-bank swasta juga lebih memprioritaskan pendanaan untuk sumber energi tak terbarukan, diindikasikan karena pertimbangan risiko atau keuntungan jangka pendek yang lebih besar dengan kondisi proyek hijau umumnya memerlukan dana investasi yang besar di awal periode. Hal ini dapat menghambat aliran modal ke sektor energi terbarukan yang lebih berkelanjutan (IESR, 2023).

6.2.2 Sektor Pangan

Setidaknya terdapat 3 (tiga) buah tantangan dalam sektor pangan yang menghambat pertumbuhan hijau di Indonesia, yakni deforestasi, ketergantungan pada pertanian konvensional, dan kurangnya riset pertanian hijau. Dalam dua dekade terakhir, pengalihan penggunaan hutan primer menjadi padang rumputan, lahan pertanian, dan perkebunan berkontribusi pada 20% total deforestasi yang terjadi di Indonesia (Austin *et al.*, 2019). Deforestasi menjadi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan ketersediaan lahan pertanian yang berkualitas. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2001 dan 2020, Indonesia kehilangan lebih dari 24 juta hektar hutan tropis, mengurangi habitat alami serta memperburuk perubahan iklim.

Dalam jangka panjang, ketergantungan pada pertanian konvensional dengan penggunaan pupuk dan pestisida kimia berlebihan mengancam produktivitas tanah ditambah merusak kualitas lingkungan. Berdasarkan studi kasus di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, mayoritas petani di Indonesia masih mengandalkan praktik ini (Kadir *et al.*, 2022). Padahal, petani bisa meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan dengan menerapkan teknologi *green agriculture*, seperti mendaur ulang bahan organik limbah panen dan menggunakan sarana agrokimia secara tepat dan rasional dengan residu dan cemaran minimal (Sumarno, 2010).

Kondisi yang ada tidak terlepas dari kurangnya investasi dalam riset pertanian hijau. Data riset pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari 1974 ke 2006 menunjukkan pertumbuhan 2,698% (Warr, 2022). Selain itu, riset pertanian juga ditemukan masih belum berdampak pada peningkatan TFP, sehingga dibutuhkan upaya lebih besar untuk mendukung penelitian dan inovasi dalam pengembangan teknik pertanian modern, dan solusi berkelanjutan lainnya. Investasi dalam penelitian pertanian dapat memicu inovasi yang mendukung pertumbuhan pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi dampak lingkungan yang negatif.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan di tengah meningkatnya risiko iklim, Pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat dapat mengadopsi teknologi terkini (digitalisasi) yaitu *smart farming*, sehingga proses monitoring kesehatan tanaman dan cuaca dapat dilakukan dengan lebih baik dibandingkan cara konvensional. Selain itu, edukasi mengenai manfaat dan cara bertani *organic farming* yang meminimalkan penggunaan pupuk kimia akan sangat berperan untuk

meningkatkan pendapatan petani dan kesehatan tanah dan ekosistem alam tanpa mengorbankan kapasitas produksi pangan.

6.2.3 Sektor Kemaritiman

Sektor kemaritiman merupakan salah satu sektor rujukan dalam mendorong ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan. Laporan Bank Dunia (2021) mengemukakan bahwa dengan lebih dari 17.500 pulau, 108.000 km garis pantai, dan tiga perempat wilayah berupa laut, potensi kelautan Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar di dunia setelah Tiongkok. Potensi ini kemudian diharapkan dapat dieksplorasi sebagai potensi ekonomi baru, sekaligus memperkuat ekonomi demi mencapai pertumbuhan yang tinggi.

Potensi sektor kemaritiman ini meliputi tidak hanya pada potensi perikanan, kelautan, tetapi juga pariwisata. Sektor pariwisata di Indonesia berkontribusi terhadap penambahan cadangan devisa negara senilai 4,3 miliar dolar AS (Databoks, 2023). Salah satu potensi pariwisata di Indonesia adalah pariwisata bahari. Wisata bahari merupakan kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi keanekaragaman jenis biota laut sebagai daya tarik wisata. Kekayaan maritim Indonesia memiliki keindahan dan keunikannya masing-masing. Terdapat setidaknya 590 jenis karang, 2.057 ikan karang, 12 jenis lamun, 34 jenis *mangrove*, 1.512 jenis *crustacean*, 6 spesies penyu langka, 850 jenis *sponge*, dan 24 jenis mamalia laut yang dapat dieksplorasi dalam mengembangkan sektor pariwisata bahari.

Namun, pengembangan pariwisata dalam mendorong sektor *blue* menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah sampah di laut. Selain sampah, terjadinya *overfishing* atau penangkapan ikan melebihi kemampuan ekosistem untuk mengembalikan jumlahnya (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, 2017). Terdapat sepertiga dari jumlah terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi kurang baik (LIPI, 2019). Tantangan-tantangan ini tentunya akan menurunkan potensi kelautan Indonesia dalam upayanya mengembangkan sektor wisata bahari dalam mendorong perwujudan sektor *blue* sebagai *new source of growth*.

Pengembangan pariwisata ini memerlukan komitmen dalam menjaga prinsip-prinsip alami dan lokal. Selain itu, keberhasilan implementasi Ekonomi Biru yang benar-benar adil dan berkelanjutan tergantung pada partisipasi dari subjek seperti nelayan, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta masyarakat adat dan perempuan nelayan yang diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 (Wibowo *et al.*, 2023).

Upaya mendorong sektor *blue* ini juga memerlukan regulasi yang jelas terkait kewenangan perwilayahan antar berbagai elemen pemerintahan beserta kebijakannya. Permasalahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait sektor kepariwisataan di Indonesia perlu diperhatikan sebagai bentuk penyelarasan regulasi sebagai acuan investor pada sektor pariwisata. Batasan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tumpang tindih dengan undang-undang lain, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Aturan terkait lama Hak Guna Bangunan pada kedua undang-undang tersebut berbeda, sehingga diperlukan penyelarasan agar ekonomi berkelanjutan melalui *blue sector* dapat terwujud.

6.2.4 Sektor UMKM

UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%.²³ Namun, mereka juga menghadapi beberapa tantangan dalam mengadopsi praktik ekonomi hijau dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.

Keterbatasan akses dan literasi finansial sering kali menjadi hambatan utama (Gunawan *et al.*, 2022). Tidak sedikit praktik ekonomi hijau membutuhkan modal dan investasi yang besar agar dapat mengadopsi teknologi yang berkelanjutan. Saat ini banyak UMKM yang masih bergantung pada teknologi konvensional yang kurang efisien dan ramah lingkungan, serta memiliki skala produksi yang rendah, sehingga transisi dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan menjadi cukup mahal. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah yang tidak selaras dengan agenda ekonomi hijau membuat UMKM, dan pelaku usaha lainnya, menjadi ragu untuk berinvestasi untuk teknologi hijau.

UMKM juga memiliki keterbatasan terhadap akses informasi dan pendidikan, serta kurangnya kepedulian, tentang perubahan iklim dan praktik ekonomi hijau (Gunawan dan Dhewanto, 2012; Yuliani dan Soetjipto, 2019). Banyak UMKM di sektor pertanian yang banyak mengalami keterbatasan ini. Para petani banyak yang tidak menyadari bahwa kegagalan produksi yang mereka alami disebabkan karena perubahan iklim, yang mengakibatkan cuaca yang tidak menentu. Seperti salah satu kasus yang dihadapi petani durian di

²³ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html#:~:text=Berdasarkan%20data%20Kementerian%20Koperasi%20dan,lebih%20besar%20lagi%20bagi%20perekonomian.>

Lombok, Nusa Tenggara Barat yang mengalami gagal panen karena banyak bunga durian yang rontok sebelum berbuah. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi pada saat bunga durian tumbuh, sehingga banyak pohon yang tidak dapat menghasilkan buah dan mengakibatkan gagal panen.

Oleh karena itu, Pemerintah, institusi dan lembaga masyarakat berperan penting untuk melakukan edukasi dan meningkatkan *awareness* pelaku UMKM tentang pentingnya dan manfaat dari pola hidup ramah lingkungan. UMKM dapat memanfaatkan peningkatan produktivitas dengan menerapkan pola produksi berkelanjutan yaitu dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular yang meminimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya.

6.3 Strategi *Two-Pronged Approach* dalam Mengakselerasi Ekonomi Hijau di Indonesia

Melihat tantangan yang multidimensi, upaya untuk mengakselerasi ekonomi hijau di Indonesia perlu ditempuh secara integratif, di antaranya melalui strategi *two-pronged approach* atau pendekatan yang dilakukan dari berbagai arah berbeda namun saling terkait. Pendekatan tersebut terdiri dari: (i) Meningkatkan partisipasi sektor keuangan dalam mendukung pengembangan dan pendalaman pasar pada berbagai *green-related instrument*; serta (ii) Memperkuat produktivitas sektor riil untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dalam mendorong alternatif kegiatan usaha berbasis hijau.

Seluruh aspek dari strategi di atas masih sejalan dengan inisiatif dan upaya yang tengah ditempuh pemerintah dalam memastikan proses transisi ekonomi hijau di dalam negeri yang seimbang, adil dan transparan. 'Seimbang' dalam artian kebijakan transisi dilaksanakan secara gradual dengan memperhatikan kondisi iklim berusaha dan kesiapan masyarakat setempat. Kemudian, 'adil' yang berarti meskipun dalam implementasinya kebijakan terkait bersifat *mandatory* tetapi ia juga dibarengi dengan mekanisme kompensasi yang bisa diterima sehingga tidak terlalu memberatkan pelaku usaha dan juga terjangkau. Terakhir, adalah 'transparan' yang mengedepankan komitmen bersama antarregulator di tingkat global dan domestik terhadap penggunaan metodologi yang *accountable* dan dijalankan secara kolektif dalam memenuhi target *Net Zero Emission* di masing-masing negara.

Meski demikian, pada tataran implementasi, upaya penggabungan antara konsep pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan bukan berarti tanpa risiko. Hal ini menimbang dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang akseleratif, sering kali juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap

lingkungan dan sumber daya alam. Di sisi lain, fokus hanya kepada kondisi lingkungan akan menyebabkan distribusi pembangunan ekonomi serta perbaikan taraf hidup menjadi tidak merata. Oleh karena itu, implementasi dari strategi *two-pronged approach* berikut ini akan mencoba mengombinasikan berbagai aspek positif dalam merespons dilema implementasi kebijakan ekonomi hijau di Indonesia, dengan mengedepankan beberapa elemen utama seperti pembangunan sosial dan ekonomi yang memperhatikan lingkungan, redistribusi sumber daya untuk menjamin kualitas hidup orang banyak, dan penggunaan sumber daya dalam jangka panjang untuk generasi selanjutnya.

6.3.1 Memperkuat Ekosistem Investasi dan Pembiayaan Hijau Domestik

Dalam rangka mencapai komitmen NDC Indonesia, dibutuhkan investasi untuk mendanai *green projects*. Untuk itulah, *green financing* memiliki peran krusial dalam proses mencapai *sustainable development*. Proyek yang didanai melalui *green financing* perlu memenuhi kriteria ESG, yaitu memenuhi kriteria standar lingkungan (*environment*), berdampak social (*social*) dan memiliki tata kelola yang baik (*governance*).

Setidaknya Indonesia membutuhkan dana sebanyak Rp 3800 triliun untuk mencapai target penurunan emisinya sebesar 29% pada tahun 2030. Kebutuhan investasi tersebut tidak memungkinkan jika hanya ditanggung oleh anggaran negara, sehingga dibutuhkan alternatif pendanaan baru, baik dengan mendorong investasi swasta, kebijakan fiskal, maupun pengembangan *blended finance*. Kebutuhan pembiayaan tambahan adalah rata-rata sekitar 3-5% dari PDB (BPS, 2021). Pendanaan yang sudah digelontorkan Pemerintah melalui APBN pada tahun 2021 mencapai Rp112,74 triliun dan merupakan kenaikan Rp40,3 triliun dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, alokasi belanja APBN untuk perubahan iklim telah mencapai Rp562,68 triliun sejak tahun 2016. Sumber-sumber dana APBN tersebut adalah pajak dan cukai, dana anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mitigasi, dana adaptasi perubahan iklim, dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), serta dana pembiayaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pembiayaan hijau lainnya berasal dari beberapa sumber keuangan seperti *green bond* dan *carbon pricing*. Mayoritas dari kebutuhan pendanaan tersebut disalurkan untuk pembiayaan sektor energi dan transportasi yang mencapai sekitar 94% dari total kebutuhan dana. Sisanya, dana dialokasikan untuk penanganan limbah sampah, *Industrial Processes and Product Use* (IPPU), kehutanan dan pertanian.

1) Pengembangan Investasi dan Pembiayaan Hijau di Indonesia

Pengembangan investasi dan pembiayaan hijau di Indonesia telah mengalami tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Kapitalisasi ESG Funds semakin meningkat sejak tahun 2020. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung investasi dan pembiayaan hijau. Salah satu kebijakan yang signifikan adalah Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang berfungsi sebagai panduan dalam mengatasi perubahan iklim dan mempromosikan investasi dalam energi terbarukan dan proyek-proyek ramah lingkungan lainnya.

Tren penerbitan obligasi hijau oleh sektor perbankan. Pada tahun 2021, terdapat tiga bank komersial yang telah menerbitkan surat utang berkelanjutan. Dua bank BUMN di Indonesia telah menerbitkan *global sustainability bond* senilai Rp12,25 triliun. Kemudian salah satu bank swasta nasional bekerja sama dengan International Financial Corporation (IFC) World Bank menerbitkan *green and gender bond* senilai Rp59,9 triliun. Perbankan juga ikut serta dalam skema *blended finance* dengan nilai Rp35,6 triliun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sepanjang tahun 2021 total penyaluran pinjaman berkelanjutan atau kredit hijau mencapai 55,9 juta dolar AS atau sekitar Rp800 triliun. Sementara itu, untuk *sustainability green bond* atau obligasi hijau pada tahun 2022 mencapai 2,26 juta dolar AS atau sekitar Rp32 triliun, dan *blended finance* untuk 55 proyek mencapai 3,27 juta dolar AS atau Rp46 triliun. Angka realisasi kredit hijau tersebut disalurkan melalui 13 bank dengan 8 di antaranya merupakan peserta *pilot project* kredit sektor hijau.

Peran perbankan dalam memperkuat nilai-nilai ESG salah satunya dapat dilihat dari penyaluran kredit hijau yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari total Pembiayaan Hijau Nasional pada akhir 2021 sebesar Rp466 triliun atau 8% dari total Kredit Indonesia. Realisasi kredit hijau pada salah satu bank swasta nasional pada tahun 2021 mencapai Rp154,4 triliun atau naik 20,9% secara tahunan, jauh di atas target pertumbuhan yang semula ditetapkan 5,5%. Salah satu bank BUMN di Indonesia telah berkontribusi 20,7% dari total kredit hijau nasional. Dari jumlah tersebut, penyaluran kredit hijau diberikan kepada sektor UMKM, *sustainable palm oil, renewable energy, clean transportation* dan sektor *sustainable water and wastewater management*. Adapun bank BUMN lainnya berhasil menyalurkan portofolio hijau senilai Rp172,4 triliun atau 29,6% dari total portofolio kredit bank tersebut. Penyaluran pembiayaan hijau perseroan naik 23,67% secara tahunan (yoy) dari nilai Rp139,4 triliun atau setara 25,4% total portofolio kredit bank BUMN tersebut pada 2020.

Meski demikian, pembiayaan hijau di Indonesia masih jauh dari cukup baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi fasilitas. Pembiayaan hijau di Indonesia masih dinilai terlalu mahal dibandingkan pembiayaan untuk proyek-proyek konvensional. Hal ini dipengaruhi oleh masih tingginya persepsi risiko perbankan dan investor terhadap proyek-proyek hijau mengingat besarnya dana yang dibutuhkan terutama pada periode awal (*upfront costs*).

2) Mengakselerasi Pembiayaan Hijau Indonesia

Salah satu kebijakan yang dapat diusulkan untuk meningkatkan investasi hijau di Indonesia, adalah dengan menerbitkan aturan yang memastikan *green financing* di Indonesia kompetitif dan mempermudah proses bisnis *green projects* di Indonesia. Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat mendorong investasi hijau dengan menciptakan kebijakan yang jelas, konsisten, dan stabil. Hal ini meliputi bauran kebijakan nasional (kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial dan mikroprudensial) yang memberikan insentif bagi perusahaan dan individu yang berinvestasi dalam proyek-proyek hijau. Selain itu, pemerintah juga dapat mengadopsi praktik hijau dalam pengadaan publik dan mendukung penelitian dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Selain itu, kebijakan perizinan yang mudah, jaminan kepastian hukum, dan stabilitas regulasi juga penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang menarik. Bank Indonesia bersama lembaga terkait dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mengembangkan instrumen keuangan hijau dan pasar keuangan hijau. Selain itu, kerja sama dengan lembaga keuangan internasional dan penggunaan mekanisme pembiayaan berkelanjutan juga bisa dipertimbangkan. Di sisi lain, Pemerintah perlu memperketat pengawasan investasi hijau dan sertifikasinya untuk menghindari terjadinya *green washing*²⁴ oleh investor.

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman dan literasi mengenai investasi hijau untuk memanfaatkan animo minat investor baik dalam skala besar maupun individu. Pendidikan dan pelatihan mengenai investasi dan pembiayaan hijau juga dapat ditingkatkan untuk membangun kapasitas dan keterampilan di bidang ini. Pemerintah dapat mengadakan dialog dan konsultasi dengan pelaku bisnis, investor, dan lembaga keuangan untuk memahami kebutuhan mereka dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi hijau. Pemerintah juga dapat mendorong kemitraan publik-swasta dalam pelaksanaan proyek-proyek hijau untuk membagi risiko dan mempercepat implementasi.

²⁴ *Greenwashing* adalah klaim bohong/menyesatkan tentang keberlanjutan suatu produk atau layanan.

1) Penerapan Pajak Karbon di Indonesia

Untuk dapat mencapai target NDC yang telah ditetapkan, agenda reformasi dalam kebijakan fiskal untuk mempercepat investasi hijau telah dimulai. Pemerintah telah memberikan insentif fiskal seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan fasilitas PPN untuk meningkatkan pengembangan energi terbarukan. Dalam 5 tahun terakhir, belanja negara untuk penanganan perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1% dari APBN.

Penerapan pajak karbon di Indonesia ditunda menjadi tahun 2025. Pada 7 Oktober 2021, pajak karbon lahir melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan menambah sederetan kebijakan fiskal yang digunakan sebagai instrumen pengendali perubahan iklim. Pajak karbon akan diterapkan di Indonesia pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara sejak tahun 2025 dengan menggunakan mekanisme pajak yang didasarkan pada batas emisi (*cap and tax*). Tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi *cap* yang ditetapkan, sejalan dengan pengembangan pasar karbon yang sudah mulai berjalan di sektor PLTU batubara. Tarif tersebut relatif lebih rendah dibandingkan skenario IMF yaitu 25 dolar AS per ton CO₂e (tCO₂e) untuk negara maju, 50 dolar AS per tCO₂e untuk negara dengan *high-income emerging market economies*, serta 75 dolar AS per tCO₂e bagi negara dengan *lower income emerging market*. Hal tersebut mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang ekonominya sebagian besar didukung oleh ekspor batubara, dan dalam prosesnya memerlukan proses transisi yang berkeadilan.

Kementerian Keuangan memperkirakan dampak penerapan pajak karbon berpotensi menambah penerimaan negara namun masih relatif terbatas karena rendahnya tarif pajak karbon. Proses penyusunan peta jalan (*roadmap*) pajak karbon perlu memperhatikan peta jalan pasar karbon. Peta jalan pajak karbon di antaranya akan memuat strategi penurunan emisi karbon dalam NDC, sasaran sektor prioritas, keselarasan dengan pembangunan energi baru terbarukan, dan keselarasan dengan peraturan lainnya. Dalam implementasinya, pemerintah akan memperhatikan transisi yang tepat agar penerapan pajak karbon ini tetap konsisten dengan momentum pemulihan ekonomi pascapandemi.

Pemberlakuan pajak karbon perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas dalam pencapaian target NDC, perkembangan pasar karbon, kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi Indonesia. Hal ini bertujuan agar pemberlakuan pajak karbon yang berlaku di Indonesia dapat memenuhi asas keadilan (*just*) dan terjangkau (*affordable*) serta tetap

mengutamakan kepentingan masyarakat. Adapun peta jalan pajak karbon nantinya terdiri dari dua skema, yakni skema perdagangan karbon (*cap and trade*) dan skema pajak karbon (*cap and tax*). Pada skema perdagangan karbon, entitas yang menghasilkan emisi lebih dari cap harus membeli Sertifikat Izin Emisi (SIE) entitas lain yang emisinya di bawah cap. Selain itu, entitas juga dapat membeli Sertifikat Penurunan Emisi (SPE). Namun, jika entitas tersebut tidak dapat membeli SIE atau SPE secara penuh atas kelebihan emisi yang dihasilkan, maka berlaku skema *cap and tax*, yakni sisa emisi yang melebihi cap akan dikenakan pajak karbon.

Menelusuri Penerapan Pajak Karbon di Berbagai Belahan Dunia

Menurut laporan *State and Trends of Carbon Pricing 2022* yang dirilis oleh World Bank, saat ini terdapat 37 negara yang sudah menerapkan pajak karbon. Sistem pajak karbon yang diterapkan di setiap negara memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing negara. Sebagai contoh, Finlandia menjadi negara pertama yang menerapkan pajak karbon sejak tahun 1990. Saat ini pajak karbon Finlandia mencapai 24,39 dolar AS per tCO₂e. Untuk emisi sektor transportasi termasuk salah satu dari 10 negara dengan penerapan pajak karbon tertinggi dengan tarif pajak lebih mahal dibanding sektor lainnya.

Menurut data World Bank, tarif pajak karbon negara Amerika Selatan ini mengalahkan negara-negara Eropa lainnya dengan tarif pajak karbon Uruguay mencapai 137 dolar AS per tCO₂e. Sementara itu, di kawasan Asia hanya 3 negara yang telah menerapkan pajak karbon selain Indonesia, yakni Jepang sejak tahun 2013, China sejak tahun 2017 (tidak secara eksplisit), serta Singapura sejak tahun 2019.

6.3.2 Meningkatkan Produktivitas Sektor-sektor Pendukung Ekonomi Hijau

Untuk mencapai manfaat yang seimbang, pencapaian target NDC Indonesia perlu ditopang oleh peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat Indonesia secara merata. Stern (2018) melalui Kurva Kuznets lingkungan (*Environmental Kuznet Curve/EKC*) berargumen bahwa hubungan antara dampak lingkungan atau emisi per kapita dan pendapatan per kapita adalah berbentuk U terbalik. Dalam kata lain, pencapaian ekonomi rendah karbon tidak dapat terjadi tanpa didukung oleh peningkatan produktivitas nasional. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

1) Peningkatan Peran Faktor Produksi Secara Nasional

Kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja memegang peranan penting dalam peningkatan produktivitas. Tenaga kerja yang berkualitas, dengan pendidikan dan keterampilan yang tinggi, merupakan modal dasar pembangunan yang sangat besar. Untuk mendorong pengembangan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, diperlukan kebijakan yang konsisten dalam merespons perubahan permintaan dan penawaran tenaga kerja tersebut. Dalam jangka pendek, Pemerintah perlu secara konsisten melanjutkan upaya perbaikan kualitas iklim usaha (kemudahan perizinan usaha). Sementara dalam jangka menengah-panjang, Pemerintah perlu membangun sistem pendidikan dari tingkat dasar, menengah maupun tinggi yang mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara luas. Hal ini diperlukan untuk mendorong penelitian dan pengembangan (*research and development* (R&D)) yang dapat menopang inovasi produk maupun perbaikan proses produksi.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produktivitas nasional dan memanfaatkan bonus demografi Indonesia tahun 2045, salah satunya adalah UU Cipta Kerja. Sangat penting bagi Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah memastikan implementasi dari UU Cipta Kerja berdampak positif di lapangan. Deregulasi dan sinkronisasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting (jika bukan yang paling penting) untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha untuk dapat berkembang dan fokus untuk meningkatkan produktivitas. Penegakan hukum menjadi landasan bagi para investor untuk meminimalkan biaya-biaya tersembunyi (*hidden costs*) yang cenderung membebani dan menghambat daya saing dunia usaha di Indonesia. Dengan fokus melakukan penguatan institusi nasional melalui tiga langkah: deregulasi dan sinkronisasi kebijakan nasional serta penegakan hukum, “*ease of doing business*” di Indonesia dapat semakin meningkat dan mengundang investor untuk mengembangkan ekonomi Indonesia.

Peningkatan kapasitas dan kualitas manusia Indonesia dan memperluas akses infrastruktur dasar dapat menjadi penopang tercapainya target iklim NDC Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Untuk itu, ruang fiskal yang tersedia perlu dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan utama negara. Proses pencairan fiskal dan pembelanjaan fiskal perlu dikawal secara ketat sehingga dampaknya dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan tujuan negara.

2) Subsidi Energi yang Inklusif Berkelanjutan

Setelah perbaikan SDM dilakukan, maka hal penting berikutnya adalah memperkuat ekosistem hijau kepada *end-user* atau di tengah-tengah

masyarakat, yang ditempuh melalui kebijakan subsidi energi yang inklusif dan berkelanjutan. Kaitannya dengan hal ini, subsidi energi inklusif berkelanjutan mencakup dua dimensi penting, yaitu inklusivitas dan keberlanjutan. Inklusivitas merujuk pada perlunya subsidi energi mencapai semua lapisan masyarakat, terutama untuk mereka yang kurang mampu atau tinggal di daerah terpencil. Sementara itu, keberlanjutan melibatkan penggunaan solusi energi yang ramah lingkungan dengan tetap menjamin ketahanan energi Indonesia. Dengan pendekatan inklusif dan berkelanjutan dalam memberikan subsidi energi, tercipta keselarasan antara kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi dan memberikan akses terhadap energi yang terjangkau bagi semua orang.

Peningkatan alokasi subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong subsidi energi inklusif berkelanjutan. Dalam RAPBN 2023, terdapat alokasi subsidi energi sebesar Rp210,7 triliun untuk BBM tertentu, LPG tabung 3 kg, dan listrik. Jumlah subsidi ini mengalami kenaikan dari Rp208,9 triliun dalam APBN Perubahan 2022, yang sebelumnya juga meningkat dari Rp134 triliun dalam RAPBN. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price (ICP)*). Selain itu, kompensasi BBM dan listrik juga mengalami lonjakan yang signifikan, naik dari Rp18,5 triliun menjadi Rp293,5 triliun pada tahun 2022. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh krisis geopolitik yang memengaruhi ICP, serta penetapan Pertalite sebagai jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) yang turut berkontribusi pada peningkatan kompensasi tahun tersebut.

Meskipun peningkatan harga minyak mentah Indonesia (ICP) menjadi faktor utama dalam kenaikan subsidi energi, penting untuk memastikan bahwa alokasi tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah perlu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi subsidi energi ini untuk memastikan bahwa manfaatnya merata dan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pengendalian volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi fokus penting dalam upaya mengelola subsidi energi dengan lebih efisien. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan subsidi energi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan serta tepat sasaran. Kebijakan subsidi energi melibatkan subsidi solar dan subsidi listrik, yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan bauran energi dan harga pembelian listrik dari produsen independen (IPP). Subsidi pupuk juga tetap menjadi fokus dengan penekanan pada dua jenis pupuk yaitu urea dan NPK, serta sembilan jenis komoditas pertanian.

Untuk menerapkan subsidi energi inklusif berkelanjutan, diperlukan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan komunikasi efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan holistik dan terkoordinasi menjadi kunci dalam memastikan bahwa subsidi energi yang diberikan benar-benar berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui penerapan subsidi energi inklusif berkelanjutan, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dengan menggabungkan akses terhadap energi yang terjangkau dengan perlindungan lingkungan, sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkembang, dan berkelanjutan.

Beberapa strategi dalam pengelolaan subsidi energi adalah sebagai berikut. *Pertama*, perlu adanya perencanaan yang matang dan terarah dalam penggunaan subsidi energi. Hal ini melibatkan analisis yang komprehensif terkait kebutuhan masyarakat, potensi sumber energi terbarukan, dan perkembangan teknologi energi. Dengan demikian, subsidi energi dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Kedua, penting untuk menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan guna mencegah penyalahgunaan dan penimbunan subsidi energi. Hal ini melibatkan koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memantau penggunaan subsidi energi. Audit reguler dan pelaporan transparan dapat menjadi instrumen penting dalam mengawasi penggunaan subsidi energi secara efektif.

Ketiga, diversifikasi sumber energi juga menjadi strategi yang relevan. Peningkatan penggunaan energi terbarukan sebagai alternatif yang ramah lingkungan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang disubsidi. Pemerintah perlu mendorong investasi dan inovasi di sektor energi terbarukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Keempat, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan subsidi energi menjadi langkah yang penting. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan subsidi energi dapat memastikan inklusivitas dan keberlanjutan program subsidi tersebut. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam pengelolaan subsidi energi dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Suroso, D. S., Setiawan, B., Pradono, P., Iskandar, Z. S., dan Hastari, M. A. 2022. *Revisiting the role of international climate finance (ICF) towards achieving the nationally determined contribution (NDC) target: A case study of the Indonesian energy sector*. Environmental Science & Policy, 131, 188-195. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.01.022>.
- Aghion, P., Jones, F. B., dan Jones, I. C. 2017. Artificial intelligence and economic growth. In NBER Working Paper Vol. 22. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226613475.003.0009>.
- Aprilianti, Ira, dan Siti A. Dina. 2021. *Co-regulating the Indonesian Digital Economy*. Center for Indonesian Policy Studies. <https://doi.org/10.35497/332998>.
- Austin K G, Schwantes A, Gu Y dan Kasibhatla P S. 2019. *What causes deforestation in Indonesia*. Environmental Research Letters Vol. 14 (2). <https://10.1088/1748-9326/aaf6db>.
- Azmat F dan Ha H. 2013. *Corporate Social Responsibility, Customer Trust, and Loyalty—Perspectives from a Developing Country*. Thunderbird International Business Review Vol. 55 (3) pp 253-270. <https://doi.org/10.1002/tie.21542>.
- Bank Indonesia. 2023. Bank Indonesia Terus Edukasi Masyarakat dan Pedagang/Merchant agar Terhindar dari Upaya Penyalahgunaan QRIS. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_259323.aspx.
- Bank Indonesia. 2023. Kejahatan Keuangan Dalam Pembayaran Digital. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Kejahatan-Kuangan-Dalam-Pembayaran-Digital.aspx>.
- Bejar, P., Ishi, K., Komatsuzaki, T., Shibata, I., Sin, J., & Tambunlertchai, S. 2022. *Can fintech foster competition in the banking system in Latin America and the Caribbean*. Latin American Journal of Central Banking, 3(2), 100061.
- Briandana, R., Dkitorialina, C. M., & Sukmajati, D. 2018. *Promotion analysis of marine tourism in Indonesia: A case study*. European Research Studies Journal, 21(1), 602–613. <https://doi.org/10.35808/ersj/973>
- Brik, A., B., Mellahi, K. dan Rettab, B. 2013. *Drivers of Green Supply Chain in Emerging Economies*. Thunderbird International Business Review Vol. 55(2) pp 123-136. <https://doi.org/10.1002/tie.21531>.
- Chen, W C, Chen W K, Chen C W, dan Lo C C. 2019. *An empirical study of willingness to renewable energy installation using importance-performance analysis: the case of Taiwan*. Journal of Industrial and Production Engineering Vol. 36 (7). <https://doi.org/10.1080/21681015.2019.1690059>.

- Dorin, I., Diaconescu, C., dan Topor, D.I. 2014. *The role of mining in national economies*. International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences Vol. 4(3) pp 211–218. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARAFMS/v4-i3/1116>.
- Ehrgott M, Reimann F, Kaufmann L, dan Carter C R. 2013. *Environmental Development of Emerging Economy Suppliers: Antecedents and Outcomes*. Journal of Business Logistics Vol. 34 (2) pp 131-147. <https://doi.org/10.1111/jbl.12015>
- Elysia, V. 2018. Air dan Sanitasi: Di Mana Posisi Indonesia. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan pp 1-23. ISBN 978-602-392-327-4, e-ISBN 978-602-392-328-1.
- ESDM. 2022. Urgensi Transisi Energi dalam Presidensi G20 Indonesia. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/urgensi-transisi-energi-dalam-presidensi-g20-indonesia>.
- Felipe, J., Mehta, A., dan Rhee, C. 2014. *Manufacturing matters... but it's the jobs that count*. ADB Economics Working Paper Series No. 420.
- Garret-Pelteir, H. 2017. *Green versus brown: Comparing the employment impacts of energy efficiency, renewable energy, and fossil fuels using an input-output model*. Economic Modelling Vol 61 pp 439-447. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.11.012>.
- Gunawan, A.A., Bloemer, J., van Riel, A.C.R., dan Essers, C. 2022. *Institutional barriers and facilitators of sustainability for Indonesian batik SMEs: a policy agenda*. Sustainability 14(14): 1-25.
- Gunawan, A.A., dan Dhewanto, W. 2012. *Why eco-friendly family business is less popular in Indonesia*. Procedia – Social and Behavioral Sciences 57: 61-68.
- Haryanto, A. T. 2023. Kecepatan Internet Indonesia Peringkat Terakhir di Asia Tenggara. Detikinet. <https://inet.detik.com/telecommunication/d-6639503/kecepatan-internet-indonesia-peringkat-terakhir-di-asia-tenggara>.
- International Monetary Fund. 2023. *Geoeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism*. Staff Discussion Note. <https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2023/01/11/Geo-Economic-Fragmentation-and-the-Future-of-Multilateralism-527266>.
- Kompas.id. 2022. Menggalang Kesadaran Bersama Menuju Transisi Energi Global. <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/12/06/menggalang-kesadaran-bersama-menuju-transisi-energi-global>.
- Kominfo. 2022. Kominfo Lanjutkan Lima Program Prioritas di 2023. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/44678/kominfo-lanjutkan-lima-program-prioritas-di-2023/0/artikel>.

- Kwon, K.Y., Molyneux, P., dan Pancotto, L. 2023. *Banks and FinTech Acquisitions*. Journals of Financial Services Research. <https://doi.org/10.1007/s10693-022-00396-x>
- Lall, S., Weiss, J., dan Zhang, J. 2005. *The ‘Sophistication’ of Exports: A New Measure of Product Characteristics*. Asian Development Bank Institute Discussion Paper No. 23.
- Lavinda. 2023. APJII: Pengguna Internet Indonesia 215 Juta Jiwa pada 2023, Naik 1,17%. Katadata. <https://katadata.co.id/lavinda/digital/646342df38af1/apjii-pengguna-internet-indonesia-215-juta-jiwa-pada-2023-naik-1-17>.
- Mediaindonesia.com. 2021. Upaya Indonesia untuk Energi Terbarukan. Diakses pada 8 Agustus 2023. <https://mediaindonesia.com/opini/374710/upaya-indonesia-untuk-energiterbaru-kan#:~:text=Persoalan%20lainnya%20datang%20dari%20kesadaran%20masyarakat%20dan%20pelaku,rendah%20dan%20menjadikan%20aspek%20keberlanjutan%20hanya%20sebagai%20pelengkap>.
- Novita, and Y. D., Santoso, B. 2021. Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 1, pp. 46-58, Jan. 2021. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>
- Oberman, R., Dobbs, R., dan Budiman, A. 2012. *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential*. McKinsey & Company.
- Pertamina dan PLN. 2022. Percepatan Transisi Energi di Masyarakat. BUMN Research Institute.
- Prieto-Sandoval, V, Jaca, C, dan Ormazabal, M. 2018. *Towards a consensus on the circular economy*. *Journal of Cleaner Production* Vol 179 pp 605-615. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.224>.
- Raimundo, R., dan Rosaria, A. 2021. *The impact of artificial intelligence on innovation management: A literature review*. *Sensors*, 21, 7029. <https://doi.org/10.34190/EIE.21.225>.
- Reis, J.G., dan Farole, T. 2012. *Trade competitiveness diagnostic toolkit*. World Bank. <http://hdl.handle.net/10986/2248>.
- Rizaty, M. A. 2023. Transaksi *E-commerce* RI Tak Capai Target pada 2022. *DataIndonesia.id*. <https://dataIndonesia.id/digital/detail/transaksi-ecommerce-ri-tak-capai-target-pada-2022>.
- Roblek, V., Mesko M., Pusavec, F., dan Likar, B. 2021. *The Role and Meaning of the Digital Transformation as a Disruptive Innovation on Small and Medium Manufacturing Enterprises*. *Frontiers Psychology* Vol. 12.
- Rodrik, D. 2013. *Unconditional Convergence in Manufacturing*. *The Quarterly Journal of Economics* pp 165-204. <https://doi.org/10.1093/qje/qjs047>.

- Sapulette, M. S., Effendi, N., Santoso, T. 2021. *Fintech, Banks, and The Covid-19 Pandemic: Evidence from Indonesia*. Bulletin of Monetary Economics and Banking: Vol. 24 No. 4, Article 3. <https://doi.org/10.21098/bemp.v24i4.1470>
- Setiawan, I., Pape, U., dan Beschorner, N. 2023. Bagaimana mengatasi ketidakmerataan akses internet di Indonesia. World Bank Blogs. <https://blogs.worldbank.org/id/eastasia-pacific/bagaimana-mengatasi-ketidakerataan-akses-internet-di-indonesia>.
- Sandhu, S., C. Smallman, L. Ozanne dan R. Cullen. 2012. *Corporate environmental responsiveness in India: lessons from a developing country*. Journal of Cleaner Production, Vol. 35 pp 203–213. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.05.040>.
- Scheel, C. 2016. *Beyond sustainability: Transforming industrial zero-valued residues into increasing economic returns*. Journal of cleaner production Vol. 131 pp 376-386. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.05.018>.
- Soda, S., Anish, S. dan Rajiv Kumar, G. 2015. *GSCM: practices, trends and prospects in Indian context*. Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 26(6) pp 889-910. <https://doi.org/10.1108/JMTM-03-2014-0027>.
- Szirmai, A. 2012. *Industrialisation as an engine of growth in developing countries 1950–2005*. Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 23 (4) pp 406-420. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2011.01.005>
- United Nations Framework Convention on Climate Change. 2022. *Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*.
- United States Geological Survey (USGS). 2023. *Mineral commodity summaries 2023*. USGS Numbered Series. <https://doi.org/10.3133/mcs2023>.
- Yuliani, dan Soetjipto, B.E. 2019. *Why should SMEs in Indonesia have to apply “green practices”?* Advances in Economics, Business and Management Research 101: 249-251.
- Wackernagel, M., Schulz, N B, Deumling, D, Linares A C, Jenkins M, Kapos V, Monfreda C, Loh J, Myers N, Norgaard R, dan Randers J. 2002. *Tracking the ecological overshoot of the human economy*. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America Vol. 99 (14) pp 9266-9271. <https://doi.org/10.1073/pnas.142033699>.
- World Resource Institute Indonesia. 2022. *Trends in marine resources and fisheries management in indonesia: a review*. <https://doi.org/10.46830/wriipt.20.00064>.

Zen, F., K. Jaya, W., Lalana, B., Handoko, W., & Halley Yudhistira, M. 2022. *Maritime highway and Eastern Indonesia development*. ERIA Research Project Report 2021 No.24. <https://www.eria.org/uploads/media/Research-Project-Report/2021-24-Maritime-Highway-and-Eastern-Indonesia-Development/Maritime-Highway-and-Eastern-Indonesia-Development.pdf>.



IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

Gedung Kantor Pusat ISEI

Jl. Daksa IV No.9, Jakarta 12110

Telp. : (021) 2277 2577

Fax. : (021) 720 1812

Email : isei.pusat@gmail.com

<http://isei.or.id/>

ISBN 978-623-98213-2-6

